

Opini **Denny J.A**
Harian Suara Pembaruan



**JALAN
PANJANG
REFORMASI**



EDITOR : FRANSISKUS SURDIASIS

Denny J.A.

JALAN PANJANG REFORMASI

Opini Suara Pembaruan

Editor : Fransiskus Surdiasis

Buku ini dalam bentuk cetakan telah diterbitkan pada
Agustus 2006 dengan ISBN 979-416-880-7

Penerbit

LkiS Yogyakarta

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194/ 7472110

Faks. (0274) 417762

*Untuk Tiga Matahari:
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Ramy Anakku*

Daftar Isi

Kata Pengantar● IX

BAGIAN PERTAMA

ARAH REFORMASI SETELAH BABAK PERTAMA

Babak Pertama Reformasi●15

Paham Kebangsaan Pemerintahan Baru●20

Meningkatkan Kinerja Parlemen●28

Bangkitnya Politik Primordial●34

Memburu Hantu Komunisme●41

Memperkuat Paham Kebangsaan●48

Utusan Golongan dan●55

Tanggung Jawab PDI-P●55

Poso, Idul Fitri dan Natal●63

Bom Bali : The Event of the Year 2002●71

Lemahnya Komunikasi Politik●79

Gerakan Mahasiswa di Simpang Jalan?●86

Gerakan Anti Megawati●94

Soal Pasal Kudeta Itu●103

Rhoma Irama Versus Inul●112

Wacana Mahkamah Konstitusi●119

Setelah Bom Marriot Meledak●127
Setelah Hambali Ditangkap●134
Membelah Politik Papua●141
Seputar Reformasi Politik Tentara●149
PKI, Militer, GAM, dan Nonpri●157

BAGIAN KEDUA POLITIK MENJELANG PEMILU LEGISLATIF

Komplikasi Pemilihan Presiden●166
Calon Presiden Golkar?●173
Kuburan Kecil Partai●180
Satu Gus Dur, Dua PKB●188
Pemerintahan Tiga Partai●195
Kompromi Menjaring Presiden●202
Kebutuhan Koalisi Partai●210
Godaan Terakhir Nurcholis Madjid●217
Ribut-Ribut di PDI-P●224
Konvensi Golkar Sebagai Strategi●231
Koalisi Menghadang Megawati?●238
Heboh Tutut Sebagai Capres●246
Soekarnoputri vs “Soehartoputri?”●254
Dua Momen Pemilu di 2004●262

Akbar Tandjung Pascakasasi●270

Balada Surya Palohvs Akbar Tandjung●278

BAGIAN KETIGA

POLITIK SETELAHPEMILU LEGISLATIF

Siapa Mencuri Start Kampanye?●287

Mesin Politik Versus Citra Capres●294

Kampanye Negatif Calon Presiden●301

Tuduhan Polri Memihak Megawati?●308

Golkar Mendukung Siapa?●314

Proklamasi di Era Transisi Demokrasi●320

Golkar Versus Koalisi Kebangsaan?●326

Cak Nur Melemah, Gagasannya Menguat●332

BAGIAN KEEMPAT

POLITIK SETELAH PEMILU PRESIDEN

Politik Setelah Pemilu Presiden●339

Sentuhan Terakhir Megawati Soekarnoputri●345

Selamat Datang Kabinet Baru●352

Setelah Kabinet Diumumkan●358

Politik Elite yang Mengkhawatirkan●363

Akbar, Wiranto atau Surya Paloh?●369

Pertaruhan Gus Dur di NU●376

Godaan Politik Nahdlatul Ulama●382

Berebut Ketua Umum Golkar●388

Kemenangan Jusuf Kalla di Golkar●394

BAGIAN KELIMA

TAHUN PERTAMA SBY-KALLA

Akankah Aceh Mengubah Indonesia?●401

PPP, Riwayatmu Kini●407

Kompensasi bagi Penduduk Miskin?●414

Megawati Versus Yudhoyono Jilid Dua?●421

Ditangkapnya Mulyana W. Kusumah●428

Dimulainya Konsolidasi Politik Presiden●434

Dimulainya Perang Melawan Korupsi?●441

Drama Panjang di KPU●447

Dua Partai Kebangkitan Bangsa●452

Pemerintah dalam Kontroversi Fatwa MUI●464

Tambahan Menteri untuk Golkar?●470

Tes Bagi Duet Yudhoyono-Kalla?●476

Politik Setelah BBM Naik●482

Semoga Negeri Ini Selamat!!!●488

BAGIAN KEENAM
DUNIA SETELAH PERANG IRAK

Fondasi Politik AS●495

Proyek Politik Afghanistan dan “Setan Besar”●501

Amerika Serikat Versus Irak?●509

Dunia setelah Perang Irak●518

“Perang Irak”di Menko Polkam●526

Terorisme di Pundak Amerika Serikat●535

Mengusir Yasser Arafat?●544

Jatuhnya Kepemimpinan Amerika Serikat●552

Tertangkapnya Saddam Hussein●560

Kata Pengantar

Jalan Tiada Ujung. Ungkapan pendek ini dapat kita pakai untuk menggambarkan periode transisi politik Indonesia pasca jatuhnya Soeharto. Berawal di tahun 1998, hingga kini proyek besar reformasi itu belum dapat dipandang selesai. Sebagian pengamat politik bahkan menyebut Indonesia tengah mengalami transisi yang permanen. Sebuah fase yang bersifat contradiction in terminis, namun menggambarkan secara pas paradox transisi Indonesia yang jalan ditempat.

Pernyataan seperti ini tentu tidak dimaksudkan untuk menafikan sejumlah pencapaian politik selama ini. Ada sejumlah pencapaian yang boleh dibilang merupakan balok penting bagi dinding demokrasi Indonesia. Amandemen konstitusi yang kemudian melahirkan pemilihan presiden secara langsung, merupakan inovasi politik penting era reformasi.

Pernyataan seperti ini lebih dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa meski sebagian balok telah diletakkan pada tempatnya, keseluruhan kerangka bangunan belum dapat dipandang selesai. Kerja masih didepan mata.

Dibidang ekonomi misalnya, reformasi dalam kurun satu minggu ini belum mampu menghadirkan sebuah ruang ekonomiyang memungkinkan segala potensi berkembang secara optimal dan bersinergi satu sama lain. Yang terjadi malah sebaliknya, potensi ekonomi masyarakat terhimpit oleh beban kehidupan yang semakin meningkat. Indonesia seperti terjebak dalam labirin krisis yang berlapis-lapis.

Di bidang politik penataan kehidupan berbangsa belum menghasilkan sebuah konstruksi politik demokratis yang kokoh yang tidak hanya ditopang oleh kelembagaan politik yang demokratis,tetapi juga oleh sebuah public spirit yang demokratis.

Seperti diutarakan oleh ilmuwan politik,demokrasi bukan sekedar perkara hadirnya lembaga-lembaga politik,tetapi perkara yang lebih filosofis: way of life, dengan sederet values yang menopang prinsip-prinsip demokratis,seperti toleransi, komitmen, pada aturan main bersama, kebebasan, kesamaan,dan sikap respek sau sama lain, kesedian untuk menerima perbedaan baik berkenan dengan pilihan politik,maupun perkara-perkara sosial lainnya seperti keyakinan serta perbedaan politik.

Di tingkat kelembagaan politik, urusan tidak sekedar membentuk ornament politik layaknya sebuah sebuah Negara demokrasi. Perhatian harus juga diberikan pada pelembagaan politik, dimana semua lembaga ini bekerja dalam sebuah prosedur yang jelas merujuk pada aturan main bersama yang disepakati. Komitmen pada prosedur merupakan persyaratan penting bagi optimalnya fungsi berbagai lembaga politik yang sudah dihasilkan.

Pengalaman di era Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono memberi kita pelajaran tentang pentingnya pelembagaan politik. Dengan pelembagaan politik misalnya kita tidak lagi tertarik untuk menjatuhkan seorang presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Komplikasi aneka persoalan inilah yang kita saksikan di era Gus Dur yang kemudian terpaksa berhenti ditengah jalan. Ketika Megawati menggantikan pososo Gus Dur, sejumlah kalangan tetap berikhtiar untuk mengganti kepemimpinan nasional dengan sebuah presidium. Belum setahun SBY menjadi presiden, sejumlah suara mulai muncul mempersoalkan kemampuannya. Bahkan di jalan-jalan saat demokrasi, teriakan agar presiden pertama yang dipilih secara langsung itu segera mundur, ramai terdengar.

Transisi reformasi Indonesia setidaknya menghadapi tiga medan persoalan pertama. Pertama berkaitan dengan arah reformasi itu sendiri. Kedua, berkaitan dengan sejumlah tantangan langsung seperti konflik, politik kekerasan maupun tindakan terror. Ketiga, berkaitan dengan momentum. Pemilu 2004 dimana

tiga pemilu diselenggarakan dalam setahun memberi dinamika tersendiri bagi jalannya reformasi Indonesia.

Tiga ruang persoalan utama itulah yang menjadi focus perhatian aneka artikel Denny J.A, penulis buku ini yang diterbitkan di harian Sore Suara Pembaruan. Penulis merekam, merefleksikan dan membagi perspektif atas aneka isu dan peristiwa politik semenjak naiknya Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur, hingga tahun pertama pasangan SBY-Kalla.

Dalam periode empat tahun itu, muncul setidaknya 105 artikel yang sebagian besarnya disertakan dalam buku yang kini tengah anda pegang. Mencatat peristiwa selama itu, buku ini layak disebut sebagai satu dokumentasi isu dan peristiwa politik penting yang member warna dan bentuk pada reformasi Indonesia. Karena itulah buku ini diberi judul : Jalan Panjang Reformasi.

Artikel-artikel dalam buku ini sebagian besar dipilah sebagai kronologis dengan merujuk pada beberapa periode penting.

Bagian Pertama : Arah reformasi setelah babak pertama adalah tempat bagi aneka artikel yang mendiskusikan reformasi pada berbagai bentuk dan wujudnya pada era pemerintah Megawati.

Bagian Kedua : Politik menjelang pemilu mengurai t politik terutama di tahun 2003 dan awal 2004 yang berkaitan dengan pemilu. Bagian ini mencatat misalnya inovasi Konvensi Partai Golkar.

Bagian Ketiga : Politik setelah pemilu Legislatif merupakan potret dinamika politik setelah babak pertama pemilu legislative dan persiapan menuju pemilu presiden.

Bagian Keempat : Politik Setelah Pemilu Presiden , merupakan tempat bagi artikel-artikel yang menyoroti periode transisi SBY-Kalla setelah dilantik pada Oktober 2004.

Bagian Kelima : Tahun pertama SBY-JK, merupakan tempat bagi artikel-artikel yang merekam jejak politik di tahun pertama SBY, terutama setelah 100 hari pertama. Bagian Keenam : Dunia setelah Perang Irak merupakan tempat bagi artikel-artikel yang menggambarkan langkah AS setelah tragedy 11 September 2001, terutama berkaitan dengan perang Irak dengan seluruh resonansinya.

Jalan panjang reformasi. Mengandaikan kerja masih ada didepan mata. Semoga buku ini membantu Anda yang tengah membacanya menemukan cara mempersingkat jalannya transisi politik kita ke arah politik demokratis yang sesungguhnya.

Akhirnya Selamat Membaca !!!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis
Editor

**BAGIAN PERTAMA
ARAH REFORMASI SETELAH
BABAK PERTAMA**

Babak Pertama Reformasi

Dalam pengalaman transisi ke demokrasi dinegara lain, dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada demokrasi yang stabil. Ibarat drama, transisi ke demokrasi itu membutuhkan sejumlah babak. Spanyol membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Sementara di Turki, reformasi sudah berusia 40 tahun namun belum juga mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Kita belum tahu kasus Indonesia. Namun setidaknya babak pertama demokrasi akan segera ditutup dengan Sidang Istimewa MPR tahun ini, dan segera dimulai dengan babak kedua.

Bagaimana dengan kondisi babak pertama reformasi di Tanah Air? Hikamah apa yang dapat dipetik untuk babak kedua? Gonjang-ganjing mendominasi babak pertama. Konflik presiden versus parlemen menghangat. Ekonomi terus terpuruk. Bayangan disintegrasi terus

menghantui. Kriminalitas menjamur. Apa yang salah dengan babak pertama reformasi? Tanpa memahami kesalahan itu, babak kedua reformasi mengalami kegagalan yang sama.

Tentu banyak variable penyebab. Satu dari variable itu adalah tidak dijalankannya paket reformasi secara komplet. Jika reformasi yang sukses membutuhkan dua paket, yang kita laksanakan di Tanah Air hanya satu paket, dan mengabaikan paket yang lainnya. Yang diambil adalah paket kebebasan politik, tetapi paket kelembagaan politik kurang diperhatikan.

Sejak jatuhnya Soeharto, paket pertama (kebebasan politik) di Tanah Air meletup secara luar biasa. Pers sedemikian garangnya, dengan bebas membongkar aib presiden yang sedang berdaulat. Setiap warga negara bebas mendirikan partai politik. Berbagai LSM bebas membongkar aneka korupsi dan pelanggaran hak asasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ataupun pemerintahan sekarang.

Tiga kriteria demokrasi : partisipasi politik, kompetisi politik, dan civil liberties terjadi di Tanah Air. Warga Negara dengan aneka organisasi terbuka untuk berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. pimpinan masyarakat dengan aneka partai terbuka untuk bertarung memperebutkan jabatan public melalui pemilu. Hak politik warga Negara dijamin. Semuanya dimungkinkan kaena adanya paket kebebasan politik.

Namun, paket kebebasan politik semata tidak mencukupi. Tanpa pengamanan, paket ini justru dapat berbahaya. Kebebasan dapat dengan mudah tergelincir menjadi penindasan mayoritas terhadap minoritas. Tanpa pengamanan, aneka kelompok kepentingan dapat dengan bebas saling melukai. Yang kemudian tercipta, kebebasan justru menunjang eskalasi konflik dan kekerasan.

Pengamanan atas paket pertama reformasi ada pada paket kedua, yaitu pelembagaan politik. Yang dimaksud dengan pelembagaan politik adalah kondisi dimana prosedur dan aturan main politik nasional benar-benar menjadi tradisi dan pedoman yang ditaati. Tujuannya agar kebebasan yang ada tidak menjadi negatif dan melemahkan pemerintah.

Pelembagaan politik di Negara demokrasi baru dimulai dengan membuat aturan politik baru. Aturan main politik itu dipastikan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan stabil. Lalu aturan itu di sosialisasikan, dikomunikasikan, ditaati, sehingga ia menjadi rutin dan mengakar.

Karena absennya paket kedua, Presiden Gus Dur menciptakan pemerintahan yang stabil. Lembaga presiden berada dalam konflik yang berlarut-larut, baik dengan parlemen, ataupun dengan lembaga wakil presiden. Pembagian wewenang dengan wapres tidak di taati. Hak dan kewajiban parlemen untuk mengawasi tidak di hormati. Konsensus membentuk pemerintahan bersama dengan parpol lain yang berjasa memilih Gus

Dur di khianati. Akhirnya mayoritas parlemen ber oposisi terhadap presiden. Situasi itu membuat presiden terisolasi, menjadi a lonely boy.

Menjadi pertanyaan, mengapa dalam babak pertama reformasi, paket kedua itu (pelembagaan politik) kurang diperhatikan? Mengapa Gus Dur mengabaikan pelembagaan politik? Salah satu penyebabnya adalah pemerintahan reformasi babak pertama itu tidak disiapkan secara matang. Diurut dari asal-usul terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, sangat jelas bahwa presiden Gus Dur adalah kecelakaan sejarah. Ditengah bayangan konflik missal antara pendukung Habibie dan Megawati, Gus Dur dimajukan sebagai solusi.

Tidak banyak yang menyangka Gus Dur bakal terpilih sebagai presiden. bahkan partainya sendiri, PKB, sejak jauh hari mencalonkan megawati. PKB berubah hanya pada menit terakhir. Pihak Gus Dur memang tidak menyiapkan secara matang scenario politik jika Gus Dur menjadi presiden. Apa yang akan dilakukan Gus Dur di seratus hari pertama? Bagaimana warna kebijakan ekonominya? Bagaimana membuat desain politik yang baru? Bagaimana strateginya untuk membentuk pemerintahan yang stabil? Hal itu tak pernah dirancang oleh tim gus Dur sejak awal.

Yang terjadi kemudian, seluruh waktu dan energy Gus Dur dan timnya sudah disibukan dengan kerja

pemerintahan sehari-hari aneka persoalan day to day politik minta penyelesaian segera. kerja yang lebih strategis, seperti menyusun pelebagaan politik, seperti membuat plat form bersama agar tercipta pemerintahan baru yang stabil, terabaikan. Politik merosot nilainya dari membangun system menjadi menebar intrik.

Kebebasan politik yang ada segera menjadi alat pihak lawan untuk menyerang Gus Dur. Atau sebaliknya, oleh pihak Gus Dur, kebebasan itu digunakan untuk bertahan dan menyerang kembali lawannya. Paket kedua, pelebagaan politik, terlupakan. Ini salah satu hikmah terpenting dari babak pertama reformasi ditanah air.

Babak kedua reformasi janagn melupakan kesalahan babak pertama. Pemerintahan baru pasca SI MPR, siapa pun presidennya dapat terantuk pada batu yang sama jika tidak member perhatian pada kepada paket kedua(pelebagaan politik), agar dapat tercipta pemerintahan demokratis yang stabil.

Paham Kebangsaan Pemerintahan Baru

Terpilihnya Megawati dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden yang baru, sekali lagi merepresentasikan duet antara kekuatan kaum nasionalisme dan islam di pucuk tertinggi pemerintahan eksekutif. Perbedaannya, di era pemerintahan Gus Dur tempo hari, Gus Dur mewakili kalangan islam yang kini disebut islam liberal, sedangkan Hamzah Haz mewakili kalangan islam yang lebih konservatif.

Di era gus Dur dan Megawati, isu paham kebangsaan tidak mencuat. Hal itu disebabkan karena public sudah sangat mengenal pandangan ke islaman dan nasionalisme gus dur sendiri. Gus Dur dikenal sebagai

pejuang pluralism dan nasionalisme dengan akar ajaran islam. Sementara Megawati dianggap mewarisi kultur Bung Karno dengan paham kebangsaan yang plural. Tidak tercium adanya masalah fundamental antara kedua tokoh diatas mengenai masalah filsafat kenegaraan.

Namun, duet Mega Hamzah Haz memberikan suasana yang berbeda . pemikiran politik keislaman Hamzah Haz belum terlalu dikenal. Yang populer dari Hamzah Haz adalah slogan politik, seperti isu anti presiden perempuan,dan piagam Jakarta. Ini isu yang sangat mungkin hanya konsumsi politik praktis sesaat, tetapi sebelum ada klarifikasi secara tegas dari Hamzah Haz, citra Hamzah Haz yang mewakili islam konservatif , belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran banyak pihak. Apalagi Hamzah Haz berada dalam posisi wakil presiden, yang tinggal selangkah lagi dapat menggantikan presiden.

Langkah pertama yang mesti diciptakan Megawati dan Hamzah Haz adalah pembentukan citra(image building). Tantangan terberat dalam pembentukan citra itu, adalah masalah paham kebangsaan, disamping kesan atas kemampuan mereka dalam menumbuhkan ekonomi ataupun menstabilkan politik. Public ingin diyakinkan bahwa kebersamaan mereka, yang mewakili paham nasionalisme dan islam adalah kebersamaan yang asli, yang genuine, yang ikhlas. Public ingin juga diyakinkan bahwa mereka juga menghayati paham kebangsaan yang sama, yang sesuai dengan prinsip

demokrasi modern, tanpa diskriminasi baik atas status ekonomi, jenis kelamin, warna kulit, aliran politik ataupun agama warga negara.

Di luar masalah paham kebansaan, banyak hal positif yang disumbangkan oleh Hamzah haz kepada kepemimpinan Megawati. Dari sisi dukungan parlemen , Hamzah Haz adalah wakil kelompok poros tengah. Dukungan poros tengah kepada Megawati, apalagi jika mampu mengakomodasi Golkar, membuat Megawati menguasai mayoritas parlemen.

Konflik kelembagaan antara pemerintahan eksekutif dan parlemen yang sangat melelahkan tempo hari, diharapkan tidak terjadi lagi. Aneka perbedaan kepentingan antara presiden dan parlemen lebih mudah diselesaikan karena baik pemerintahan ekekutif dan parlemen dikuasai oleh koalisi partai yang sama.

Dari sisi geografis, Hamzah Haz adalah wakil dari masyarakat diluar jawa. Masuknya hamzah Haz sebagai wakil presiden, member citra bahwa lembaga keperesidenan tidak hanya representasi orang jawa. Masyarakat diluar jawa memiliki keterwakilan yang sama dipucuk pimpinan.

Di era menguatnya otonomi daerah dan meningginya kecemburuan daerah atas pusat, hadirnya wakil dari luar jawa di pucuk pimpinan jelas positif bagi upaya terbentuknya kesan kebersamaan yang meliputi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Dari sisi aliran politik, Hamzah Haz juga menyumbang citra yang kuat sekali serta positif kepada Megawati. Kini Megawati mendapatkan legitimasi dari komunitas islam yang diwakili oleh Hamzah Haz. Dalam segmen politik di Indonesia, kaum nasionalis dan islam adalah segmen terbesar, kekuatan dua segmen ini relative seimbang.

Dapat dikatakan Indonesia sebenarnya berdiri diatas dua kaki utama, kaki nasionalis dan kaki islam, masuknya Hamzah sebagai wapres, membuat pemerintahan Megawati semakin kukuh berdiri.

Dari sisi cultural, Hamzah Haz juga sangat bermanfaat bagi Megawati. Hamzah Haz berasal dari kultur Nahdatul Ulama (NU). Dalam peralihan dari Gus Dur ke Megawati, NU adalah kelompok yang terluka. Komunitas NU merasa disisihkan dan dikalahkan dalam pergulatan kekuasaan.

Masuknya Hamzah Haz menjadi pemimpin tertinggi kedua di pemerintahan baru dapat sedikitnya mengobati luka kaum NU. Akan terbangun citra dikalangan NU bahwa NU diajak kembali pada suasana kebersamaan melalui Hamzah Haz yang dipilih sebagai wakil presiden.

Masalah paham kebangsaan adalah salah satu masalah penting yang tidak termasuk dalam daftar positif Hamzah Haz diatas. Ketika diwawancarai Metro TV pada hari kedua pemilihan presiden, Sutradara Ginting telah

menyatakan secara eksplisit. Ia meminta Hamzah Haz mengklarifikasi sikap politiknya terhadap Pembukaan UUD 1945.

Sutradara Ginting memang tidak secara tegas menjelaskan apa yang ia maksud. Namun masyarakat politik sudah memahami bahwa itu menyangkut politik Islam yang dianut Hamzah Haz (konservatif), berbeda dengan politik Islam yang dianut Gus Dur (liberal). Kekhawatiran Sutradara Ginting mewakili banyak segmen masyarakat baik kalangan nasionalis, penganut paham Negara modern yang berorientasi barat, ataupun kelompok minoritas.

Politik Islam sendiri memang terdiri atas banyak golongan jika ditinjau dari sikapnya atas paham kebangsaan. Golongan yang paling kecil adalah kelompok penganut Islam Liberal. Termasuk dalam kelompok ini adalah Gus Dur sendiri. Islam liberal meyakini keterpisahan Negara dan agama dan memimpin terbentuknya Negara Indonesia yang modern seperti Negara yang berkembang di dunia barat.

Golongan yang paling esar adalah Islam mainstream. Ini penganut Islam mayoritas yang sudah terbiasa hidup dalam kemajemukan model pemerintahan Soeharto. Dengan Ideologi Panca Sila, Soeharto berhasil menciptakan mayoritas Islam yang menerima kemajemukan, plus adanya peran pemerintah untuk umat beragama. Penganut Islam mainstream tidak seradikal Islam Liberal dalam memperjuangkan demokrasi dan penerimaan atas filsafat barat. Islam

mainstream tidak pula menghayati Piagam Jakarta ataupun Negara Islam. Golongan ketiga adalah Islam Konservatif. Jumlah penganut paham ini lebih besar disbanding penganut Islam Liberal, namun jauh lebih kecil daripada Islam Mainstream.

Sungguhpun minoritas, namun kelompok ini sangat menonjol karena militansinya. Berbeda dengan Islam Liberal atau Islam Mainstream, Islam Konservatif ini masih dihidupi oleh romantisme politik Islam.

Dalam slogannya, mereka anti presiden wanita, padahal konstitusi UUD 1945 tidak membedakan jenis kelamin untuk jabatan presiden. Sebagian mereka menginginkan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta, yang mewajibkan pelaksanaan, yang mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Tidak sedikit pula yang ingin memperjuangkan terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Gerbong besar Islam yang dikomandani Hamzah Haz berisi Islam liberal, Islam Mainstream ataupun Islam Konservatif. Persoalannya, bagaimana dengan pilihan politik Hamzah Haz sendiri? Apakah Hamzah Haz lebih dimotivasi oleh Islam Liberal, Islam Mainstream atau Islam konservatif. Klarifikasi itu sangat penting mengingat Hamzah Haz saat ini menjadi wakil presiden.

Jika Piagam Jakarta menjadi agenda yang ingin diperjuangkan Hamzah Haz, baik secara terbuka atau tersembunyi, tentu akan mengalami persoalan mendasar dengan agenda Megawati, yang ingin membangun

Indonesia berdasarkan prinsip Negara nasional yang modern.

Memperjuangkan kembali piagam Jakarta, baik untuk jangka pendek, atau jangka panjang akan kembali membawa Indonesia ke suasana dead lock dan kebuntuan politik ditahun 1950an. Transisi demokrasi akan semakin menuju jalan yang terjal.

Dapat dipahami sulitnya Hamzah Haz bertindak secara tegas dalam hal Piagam Jakarta, bagaimanapun Hamzah Haz mewakili konstituen yang sebagian masih hidup dalam aspirasi itu. Sebagian konstituen itu akan merasa ditinggal atau di khianati oleh Hamzah Haz. Sebelum menjadi wapres, mungkin konstituen itu merasa Hamzah Haz berada bersama mereka. Namun setelah Hamzah Haz menjadi wapres dan berkuasa, mereka merasa dicampakkan.

Tetap justru disini letak ujian leadership yang pertama bagi Hamzah Haz. Ia justru harus bersikap tegas dan terbuka, dimana sebenarnya ia sendiri berdiri? Kita berharap dalam waktu dekat karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi nomor dua, karena keinginannya membangun Indonesia yang plural, karena keinginannya menenangkan segmen masyarakat luas yang khawatir dengan Piagam Jakarta, karena menyadari Piagam Jakarta ditentang oleh sebagian masyarakat Islam sendiri, karena ia tidak ingin meninggalkan bom waktu pertengkaran ideologis yang sulit di masa mendatang, Hamzah haz membuat manifesto politik secara terbuka.

Pernyataan politik secara terbuka atas isu public yang meresahkan masyarakat adalah bagian dari etika berpolitik Negara modern. Tradisi ini mesti ditumbuhkan di Indonesia. Hamzah Haz terkena pula oleh etika politik ini.

Kita berharap dalam sebuah konferensi pers, yang disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun TV, dalam waktu dekat ini, Hamzah Haz menyatakan bahwa ia tidak merekomendasikan Piagam Jakarta dijadikan acuan kenegaraan Indonesia dimasa kini dan nanti.

Paham kebangsaan yang bersandar pada demokrasi yang modern, yang tidak membedakan jenis kelamin dan agama warga Negara adalah komitmen beliau. Ketegasan seperti itu yang sedang kita tunggu dari wakil presiden Hamzah Haz.**

Meningkatkan Kinerja Parlemen

Satu prestasi politik parlemen yang acap kali dinyatakan baik dengan pujian ataupun sinisme adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan atas presiden. Pimpinan partai politik dianggap telah sukses mengubah praktek ketatanegaraan atau praktek politik yang menyerupai system demokrasi parlementer.

Sebenarnya, sebagai presiden, Megawati memiliki hak untuk menentukan kabinetnya sendiri, dan untuk tidak mengajak partai lain dalam pemerintahannya. Megawati perlu berkonsultasi dengan pimpinan partai karena kewenangan itu dijamin konstitusi. Namun yang terjadi dalam real politik adalah hokum politik yang berbeda.

Megawati tidak punya pilihan lain, kecuali

mengakomodasi tokoh partai untuk terlibat dalam kabinetnya. Jika tidak, ia sulit memenangkan dukungan parleme. Sekali lagi parlemen dapat menjalankan fungsi pengawasannya yang kuat atas Megawati sebagai mana yang parlemen lakukan atas Gus Dur.

Namun disisi fungsi parlemen yang lain, seperti fungsi legislasi, parlemen belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Kinerja parlemen dibidang ini jauh sekali dibanding fungsi parlemen sebagai pengawas. Padahal banyak sekali TAP MPR ataupun pengaduan masyarakat yang perlu diikat dengan undang-undang. Pertanyaan yang dapat difikirkan adalah apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja parlemen?

Satu cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan membuat study perbandingan. Melalui study perbandingan, kekuatan dan kelemahan parlemen Negara lain dapat menjadi masukan yang berharga.

Tentu disadari, ada perbedaan historis, kultur, ekonomi, dan politik di berbagai Negara yang membuat stiap generalisasi mustahil dilakukan,. Namun, entua ada persamaan yang membuat sebuah mdel politik yang relevan untuk diadopsi atau setidaknya dimodifikasi sesuai dengan situasi kita. Parlemen itu sendiri sebenarnya adalah model yang bukan berasal dari tradisi kita seperti dari kerajaan Sriwijaya, atau Majapahit, tetapi model politik sejarah barat. Toh ternyata model itu dapat dimodifikasi kedalam system kita.

Robert Axerold (1991) dari University of Michigan membuat study pebandinagn tentang parlemen di banyak Negara. Ia berkesimpulan parlemen yang tekuat didunia mungkin kongres dia Amerika Serikat. Kriteria yang ia gunakan adalah pengaruh parlemen ataskebijakan public dan fasilitas yang dimiliki oleh anggota parlemenuntuk mempengaruhi kebijakan itu. Parlemen AS memiliki otoritas menaikkan atau menurunkan pajak, meloloskan atau tidak meloloskan anggaran pemerintah, menyetujui atau menolak nominasi pejabat inti pihak eksekutif (kecuali presiden dan wakil presiden), dan meratifikasi hukum/perjanjian.

Parlemen di AS semakin aktif dalam memonitor dan mengontrol implementasi hukum. Yang paling ditakuti pihak eksekutif adalah investigasi palemen. Melalui investigasi, parlemen AS mampu membuat sebuah isu menjadi perhatian public secra luas. Pihak eksekutif dengan mudah menjadi pihak tertuduh jika parlemen mencium adanya gelagat penyelewengan hukum(seperti korupsi). Untuk membuat investigasi itu lancar, semua pihak yang bersangkutan diwajibkan member informasi sejujurnya. Penolakan memberikan informasi atau kesengajaan memberi informasi yang salah dapat membuat pihakitu masuk penjara.

Dua hal yang membuat parlemen di AS itu kuat. Yang satu bersifat tekhnis, yang lain bersifat politis. Yang bersifat tekhnis, para anggota parlemen itu dilengkapi informasi yang canggih untuk menjalankan tugasnya, tersedia perpustakaan dan berbagai dokumen yang

dibutuhkan, yang mudah di akses oleh para anggota parlemen, terutama dalam system komputerisasi dan internet seperti sekarang.

Yang jauh lebih membantu, semua anggota parlemen, terutama anggota terkuatnya memiliki staf ahli yang memang berpengalaman di bidangnya. Suara anggota parlemen menjadi berwibawa karena informasi yang ia bawa sudah sedemikian matang dan strategis karena terlebih dahulu di godok oleh tim ahli dibelakang mereka.

Yang bersifat politis, parlemen AS menjadi sangat kuat karena sumber legitimasi dan jaringan politik yang ia miliki. Semua anggota parlemen di AS dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih dan tidak ada satu pun yang diangkat. Anggota parlemen itu dengan sendirinya tidak berutang budi pada siapapun (apalagi pihak eksekutif), kecuali rakyat yang memilihnya.

Kepentingan rakyat pemilih yang menjadi komitmen dan penentu karirnya. Jika tidak memuaskan rakyat pemilih, ia akan jatuh pada pemilihan umum berikutnya. Situasi itu sendiri sudah memberikan keberanian moral bagi sang anggota parlemen untuk berhadapan dengan sesama anggota parlemen lain atau untuk mengontrol pihak eksekutif.

Anggota parlemen itu juga didukung oleh jaringan politik yang kuat. Jaringan pertama adalah partai politik tempat ia menjadi anggota partai di AS, sebagaimana dinegara demokrasi lainnya, benar-benar berkuasa.

Partai itu mandiri baik dalam pembentukan program ataupun pengumpulan dana. Jaringan partai bersifat nasional membuat koalisi dengan organisasi masyarakat lain yang memiliki kesamaan platform politik. Jaringan lainnya adalah berbagai kelompok kepentingan pers yang siap memobilisasi pendapat umum. Harus digaris bawahi pula, jaringan ini hanya mungkin bekerja dalam iklim kebebasan pers dan berorganisasi yang memadai.

Dengan fasilitas teknis dan kondisi politik diatas, parlemen di AS dapat bekerja maksimal dengan posisi politik yang sangat kuat. Pihak eksekutif dapat di control oleh parlemen untuk menyelenggarakan pemerintaha yang bersih dan professional. Parlemen pun menjadi produktif dalam menjalankan fungsi legislasi dan budgeting nya.

Tentu kita dapat memperbandingkan parlemen kita denga parlemen AS. Parlemen AS sudah tumbuh ratusan tahun dan mengalami penguatan melalui trial and error sekian lama. Parlemen kita baru berusia puluhan tahun, dan berada pada konteks historis yang berbeda, serta berbeda pula dalam kultur politik dan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, study perbandingan, setidaknya kita mendapatkan arah tentang hal apa yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan dan membuat perubahan dalam parlemen kita. Dalam sejarah parlemen itu sendiri, perubahan mendasar dalam tubuh parlemen adalah hal

yang biasa. Tidak satu lembaga pun yang di bentuk sekali jadi. Perubahan dan adaptasi atas lingkungan baru mutlak dilakukan agar lembaga itu semakin berfungsi dan relevan dengan zamannya. Dengan landasan itu, kita pun selalu membuka kemungkinan membuat perubahan secara gradual dan terkendali atas parlemen kita agar semakin mampu menjalankan tugasnya.

Agar parlemen kita semakin kuat, dimensi teknis dan dimensi politik yang membuat parlemen AS itu kuat agaknya layak dijadikan input sehingga kelak parlemen tidak hanya dikenal sebagai lembaga public yang berprestasi menurunkan presiden. Parlemen akan dikenal pula dengan prestasi dalam legislasi atau penyusunan undang-undang, fungsi yang kini menjadi titik lemah parlemen.**

Bangkitnya Politik Primordial

Tidak perlu terkejut bila politik primordial yang militan kembali bangkit di Indonesia. Mereka memperjuangkan agar aspirasi politik kelompoknya menjadi agenda politik nasional, bahkan dimasukkan kedalam konstitusi. Berdasarkan pengalaman politik Negara lain, politik primordial itu dapat memperjuangkan Negara agama (Hindu, Kristen, ataupun Islam), ataupun superioritas ras dan warna kulit.

Kebebasan politik karena transisi ke demokrasi sama engan membuka kotak Pandora. Dari kotak itu semua jenis semua jenis insting politik muncul dan menyebar kepermukaan. Apa daya transisi ke demokrasi tidak hanya melahirkan pejuang democrat, namun juga para demagog yang memainkan sentiment primordial.

Para democrat memperjuangkan pluralisme,

toleransi, social trust dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, apapun warna kulit, jenis kelamin, ideology dan agama warga Negara itu. Sebaliknya para demagog melalui sentiment primordial memperjuangkan homogenitas, intoleransi, kecurigaan kelompok, baik berbasis agama, etnis maupun ras, serta keinginan agar kelompoknya memperoleh hak khusus dalam politik Negara.

Demokrasi memang tidak bisa menghindari tumbuhnya aneka sentiment politik, termasuk bangkitnya politik primordial. Namun yang membuat demokrasi itu terkonsolidasi dan menetap secara permanen, atau demokrasi itu hanya datang dan pergi (kembali ke Negara otoriter) sangat bergantung pada seberapa dominannya para demagog yang memainkan politik primordial. Bahkan, di Negara seperti di Amerika Serikat, para demagog terus hadir, tetapi selalu dalam posisi marginal dan tidak pernah dominan.

Kasus di Amerika Serikat dapat kita jadikan model bagaimana memberikan kebebasan bagi politik primordial itu satu sisi, namun di sisi lain membuat kekuatan politik marginal itu selalu menjadi marginal.

Di sekitar gedung putih, Washington DC, 4 oktober 1996, ratusan ribu orang berkumpul memenuhi jalan, menghadap kesebuah panggung raksasa. Menurut CNN , itu salah satu kerumunan terbesar yang pernah ada dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagian dari mereka

kadang bersujud, menangis, mengucapkan sumpah, bersorak, bertepuk tangan.

Kerumunan itu mengikuti sebuah prosesi keagamaan mereka penganut *promise keepers*, sebuah sekte Kristen. Mereka datang secara berkelompok dari berbagai bagian dengan mencarter bus, kereta api, atau pesawat terbang, agar bisa menjadi bagian peristiwa religious yang kolosal itu.

Setahun sebelumnya, sekte itu mengelilingi 20 negara bagian di Amerika Serikat. Mereka membuat ritual agama di stadion sepak bola yang berkapasitas 50.000 sampai 70.000 orang, di masing-masing Negara bagian. Stadion itu selalu penuh sesak.

Amerika Serikat saat ini, ujar chip Berlet dan Qugley (1977) sedang dilanda perang kebudayaan. Kini tengah bangkit dengan perkasa gerakan politik sayap kanan yang menggunakan ajaran agama sebagai panduan politik. Tokoh utama gerakan politik itu adalah Pat Robertson, pendiri Christian coalition, yang ingin mengubah Amerika Serikat menjadi sejenis "Negara teokrasi otoritarian".

Robertson mengikrarkan perang terhadap system Amerika Serikat yang makin bobrok karena mengandalkan kebudayaan sekuler. Sebagai alternative, Robertson, menawarkan system yang berlandaskan agama yang diyakininya "tidak akan pernah ada rasa damai" ujar Pat Robertson, "sampai rumah Tuhan dan pengikut Tuhan diberikan haknya untuk memimpin

dunia. Bagaimana ada rasa damai jika pemabuk, penganjur minuman keras, komunis, ateis, pemuja setan dan sekuler humanis, dictator, spekulasi uang, pembunuh revolusioner, dan homo seks berada pada top kepemimpinan”?

Peace Keepers, yang hari itu berdemo di Washington yang didirikan oleh Bill Mc Cartney tujuh tahun silam memang terkesan jauh lebih moderat ketimbang kelompok Pat Robertson. Namun penganalisis politik melihatnya hanya sebagai strategi. Ada agenda politik yang disembunyikan, yang baru akan dimunculkan setelah gelombang gerakan menjadi besar.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa di Amerika telah terjadi pergeseran area konflik, dari persoalan ekonomi dan politik ke persoalan kultur dan gaya hidup. Tidak ada lagi perdebatan ideologis yang menyangkut sistem ekonomi dan politik. Kapitalisme sebagai model ekonomi dan demokrasi sudah mengakar dan di terima secara luas. Kalaupun ada perselisihan di bidang ekonomi atau politik, sifatnya tidak mendasar. Paling-paling menyangkut masalah graduasi, seperti seberapa besar pajak di tingkatkan atau diturunkan dan seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam ekonomi.

Namun dalam masalah kultur dan gaya hidup, konflik makin menganga menyentuh ke masalah ideologis dan emosional. Isu kultur dan gaya hidup sedemikian rupanya memecah masyarakat ke dalam pro kontra serta pemihakan, misalnya pro kontra atas aborsi, homoseksual atau orang tua tunggal. Mereka

yang kini aktif di berbagai kelompok agama yang mengambil posisi seperti Pat Robertson, bersebrangan dengan mereka yang tumbuh dalam kultur yang sekuler humanis.

Kelompok Pat Robertson dan Promise Keepers mendapat momentum dari persoalan besar yang kini tengah di hadapi Amerika Serikat. Misalnya tingginya angka perceraian, maraknya tindakan kriminalitas dikota besar atau meluasnya gerakan homoseksual, yang semuanya dianggap mengancam kenyamanan hidup dan nilai-nilai konservatif.

Masalah diatas tidak lagi dapat diatasi dengan hanya mengubah institusi atau struktur social. Dibutuhkan respon yang berhubungan dengan filsafat hidup dan system makna perorangan. Dan agama yang sudah mentradisi adalah obat yang mujarab.

Persoalan Pat Robertson dan tokoh sejenisnya telah mempolitisasikan agama sedemikian rupa sehingga agama menjadi eksklusif. Berbagai gerakan politik agama yang di Amerika Serikat sebagai ekstrim kanan itu memiliki cirri menomorduakan kelompok masyarakat tertentu. Ada yang mengunggulkan kulit putih dan mendiskriminasi kult berwarna. Ada yang memuja patriotisme Amerika Serikat dan anti migrant. Promise Keepers misalnya, hanya mencari pengikut lelaki dan menomorduakan wanita. Ada pula yang membuat diskriminasi berdasarkan agama.

Tidak mengherankan jika berbagai kelompok yang ingin memelihara keberagaman dan persamaan hukum bagi semua warga Negara sebagai ancaman. Didalam masyarakat sendiri tumbuh berbagai macam organisasi yang siap melawan gerakan sejenis Pat Robertson. Mereka antara lain American united for separation church and state, Institute for amandement studies, The interfaith alliance dan Equal Partners in Faith. kelompok lintas agama, ras dan gender itu cukup efektif membentuk opini public.

Disamping itu pemerintah Amerika Serikat dan aneka kekuatan politik Di AS yang pro pada demokrasi, pluralisme dan terbentuknya Negara AS yang modern dan sekuler, tentu harus member tempat bagi politik primordial itu untuk masuk memperoleh hak khusus dalam konstitusi Negara, walau agama yang menjadi dasar perjuangan kelompok itu adalah agama mayoritas di AS.

Konstitusi yang pro pada pluralism dan netral terhadap agama adalah prinsip dasar yang tidak bisa ditawarkan untuk Negara yang modern dan maju. Sekeras apapun desakan politik kaum fundamentalis agama, selalu ada area konstitusi yang tidak boleh di lampau. Secanggih apapun kelompok fundamentalis memainkan isu agama dan ingin memenangkan opini public, pemerintah dan kelompok yang pro pada pluralisme memikul tanggung jawab untuk menahannya agar tidak mempengaruhi hukum Negara yang netral agama.

Ada baiknya jika tokoh masyarakat di Indonesia

meniru dinamika politik di AS, disatu sisi, para pejuang demokrasi terus memfasilitasi dan membentuk kelompok kerukunan antar agama, ras ataupun etnik, seperti The Interfaith Alliance atau Equal Partners In faith dalam kualitas dan kuantitas yang terus membesar. Jika kelompok kerukunan itu mampu mengakar di massa, politik primordial di negeri kita selalu bisa di buat marginal.

Di sisi lain, mereka terus menjaga agar area pemerintahan tetap netral dalam hal agama. Konstitusi Negara tidak boleh di beri peluang untuk di pengaruhi oleh politik primordial. Sebagai sumber dari segala sumber hokum nasional, konstitusi mesti tetap dapat member kesempatan yang sama kepada semua warga Negara, apapun agama, jenis kelamin, warna kulit dan ideologi warga Negara itu.

Strategi lainnya untuk menghadapi bangkinya kembali politik primordial yang membonceng kebebasan politik di era demokrasi, apalagi jika mereka sudah mulai masuk untuk mempengaruhi konstitusi Negara, para pejuang demokrasi mesti terus mencari partner dari kalangan komunitas primordial itu sendiri. Selalu ada sayap Liberal dan demokratik disetiap komunitas baik itu komunitas agama, ataupun komunitas etnis.

Sayap Liberal dalam komunitas Hindu, Kristen, ataupun Islam sebagai missal adalah kekuatan yang paling mampu membuat fundamentalisme Hindu, Kristen, ataupun Islam untuk marginal, dan tidak mendapat dukungan public.**

Memburu Hantu Komunisme

Melewati tanggal 30 september yang diperingati sebagai tonggak G30SPKI discourse tentang gerakan kiri di Indonesia kembali marak. Dikhawatirkan, komunisme bangkit kembali memanfaatkan momentum kebebasan, lalu tampil dengan gaya lama atau pun gaya baru. Berbagai spanduk di ibukota menuliskan dengan jelas “Hati-hati komunisme yang berbaju reformasi, demokrasi dan agama” pawai missal antikomunisme juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia.

Kekhawatiran akan komunisme sebagai ekspresi politik di era yang bebas seperti sekarang adalah hal yang dibolehkan. Sikap anti atas ideologi komunisme, itupun hal lumrah. Namun jika menganggap komunisme akan bangkit lagi, sebagai mana yang terjadi di Indonesia seperti tahun 1960 an, itu sudah menjadi ilusi. Dunia sudah sedemikian berubah. sangat lah sayang jika

terlalu banyak energy dihabiskan untuk menghadapi ideology yang sudah mati. Menakuti komunisme sama dengan menakuti hantu.

Sebagai ideology, di zaman ini komunisme sudah bangkrut. Dua pusat komunisme Rusia dan China, kini justru bergerak menuju kapitalisme. Patung Marx dan Lenin sudah diturunkan dari singgasananya. Seperti yang ditulis A Dictionary of Modern Politic. Komunisme berarti dua hal. Pertama ia adalah ide teoritis yang ditemukan dalam tulisan Karl Marx. Kedua, ia adalah prinsip pemerintahan yang historis di dunia modern yang diawali oleh Lenin.

Marx membayangkan lahirnya masyarakat ideal komunisme. Masyarakat itu, ia ilustrasikan sebagai kondisi yang orang orang bekerja hanya sampai siang hari, sore hari memancing dan malam hari berdiskusi mengenai filsafat, dan membaca puisi. Itu sebuah bayangan masyarakat yang sudah terbebaskan dan bermasyarakat.

Akar dari eksploitasi, ia berpendapat, adalah pemilikan alat-alat produksi secara pribadi. Hal itu yang melahirkan kelas yang memiliki alat itu, dan kelas yang bekerja untuk mereka. Situasi itu membuat pemilik bukan saja menyerap keuntungan dari keringat kelas pekerja, tapi pula menciptakan situasi dominasi. Kelas pekerja akan mengalami ketergantungan ekonomi, ketergantungan psikologi dan system nilai.

Masyarakat komunisme menurut Marx adalah masyarakat yang tidak berkelas yang menghapus hak kepemilikan pribadi, dengan tingkat pemerataan yang tinggi. Negara dan pemerintahan pun akan menghilang karena semua manusia hidup dalam harmoni dan kerja sama, tanpa pembagian social yang menuntut hadirnya otoritas seperti Negara itu.

Oleh Lenin, ide Marx di terjemahkan kedalam politik praktis. Bagi Lenin, harus ada situasi antara (mediasi) ditengah robohnya kapitalisme dan berdirinya masyarakat komunis. Fase ini disebut Sosialisme yang membutuhkan partai pelopor.

Dalam kenyataan historis, partai ini berkembang menjadi birokrasi raksasa yang secara efektif mengontrol masyarakat. Control yang ketat ini diperlukan, menurut mereka, disamping buat membersihkan masyarakat dari ide-ide borjuis yang menentang terbentuknya masyarakat komunisme, ataupun sebagai implementator ideology yang akan menggiring public ke “jalan yang benar”.

Birokrasi itu mengambil kebijakan ekonomi yang terentral. Harga barang, sebagi missal tidak ditentukan mekanisme pasar tetapi oleh politik. Dimasyarakat tidak muncul pengusaha besar, karena alat-alat produksi dikuasai oleh Negara sebagai wakil rakyat secara keseluruhan. Birokrasi menjadi selector ide politik, yang menentukan mana yang boleh berkembang di masyarakat. Kebijakan itu berujung pada sensor politik yang ketat dan penyeragaman pandangan.

Akhirnya, komunisme yang terbentuk di dunia nyata sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Karl Marx. Negara yang dianggap akan menghilang, dalam kenyataan di dunia komunis justru bertambah besar dan melilit bagi gurita. Masyarakat yang dikira akan terbebaskan, justru akhirnya akan meronta mencari kebebasan dalam system social yang lain. System ekonomi tidak efisien dan produktif, politik sangat menekan, sementara masyarakat lumpuh karena hidup dalam kekangan yang ketat.

Di ujung dekade delapan puluhan, bagaikan rumah kartu, system pemerintahan komunisme roboh satu persatu. Ia roboh bukan karena dipukuli secara politik, tetapi diluluh lantakan oleh kenyataan yang semakin kompleks dan beragam. Kompleksitas dunia ekonomi tidak bisa lagi disentralisasi dan di control oleh hanya satu pusat kekuasaan, seperti birokrasi pemerintah. Sementara penyeragaman aspirasi politik dipecahkan oleh semakin berbedanya kebutuhan dan kesadaran berbagai segmen masyarakat.

Kecenderungan dunia justru mengarah pada Liberalisasi yang ditandai oleh dua hal. Pertama, semakin mengecilnya peran Negara di sector ekonomi dan politik, serta semakin membesarnya mekanisme pasar. Robert Nozick menyebutnya sebagai "The Minimal State", Negara yang hadir dengan peran minimal. Kedua, semakin besarnya peran individu, seperti yang disinggung Naissbit dalam Global Paradox, semakin global ekonomi dunia, berparadoks

dengan semakin besarnya peran individu dan unit kecil ekonomi. Jelaslah dua kecenderungan itu semakin jauh meninggalkan prinsip komunisme dengan birokrasi besar dan spirit kolektivismenya.

Tentu saja sentiment kepada rakyat jelata dan mereka yang lemah dan struktur masyarakat yang masih terus mendak lagi menggelora. Tetapi spirit itu tidak lagi mengambil bentuk dalam ideology ekstrim seperti komunisme. Ia kini diwakili oleh konsep Welfare State, yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang mengharap pemerintah lebih berperan dalam program kesejahteraan bagi kalangan bawah.

Dalam pertarungan ideology, komunisme sudah menjadi sejarah dan tampak sangat inferior. Apalagi yang perlu ditakutkan dari ideology yang sudah bangkrut itu?

Kita dapat belajar pula dari cara Negara barat menghadapi perbedaan ideology, termasuk komunisme. Dunia modern pun tidak dapat menghindari pluralisasi cara berpikir dan sikap politik. Berarti pluralisasi ideology adalah suatu kondisi yang tidak terhindari akibat semakin kompleksnya masyarakat. Dengan demikian, seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya karena mempunyai keyakinan politik yang berbeda. Namun jelaslah seseorang harus dihukum jika melakukan kekerasan politik, apapun ideology yang diyakininya.

Salah satu fungsi pemerintah, seperti yang diutarakan Milton Friedman, adalah melindungi warga dari paksaan dan kekerasan (coercion) pihak lain. Hukum dibuat sebagai aturan legal untuk melindungi kebebasan warga Negara. Memilih sebuah ideology dan keyakinan, belum termasuk dalam kategori mengganggu atau melakukan paksaan. Di negara Barat, meyakini komunisme, sebagai mana meyakini kapitalisme, tidak termasuk tindakan kriminal. Namun sekali lagi ideology itu ingin diterapkan dengan menggunakan kekerasan dan melanggar konstitusi, ia akan dikenakan sanksi.

Agama yang diyakini absolut dan datang dari wahyu Tuhan saja tidak dipaksakan. Sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an (2: 256), bahwa tidak ada dalam paksaan dalam agama, sejak jalan yang benar sudah terbedakan secara jelas dari jalan yang salah. Apalagi ideology relatif diciptakan oleh para pemikir. Mengabsolutkan ideology berarti membawa ideology setingkat agama. Konsekwensinya harus diberikan kebebasan kepada setiap warga untuk memilih ideologinya sendiri.

Dokumen hak asasi manusia universal dengan jelas mengatakan bahwa manusia tidak boleh didiskriminasi hanya karena keyakinannya. Para pendiri bangsa kita, dalam UUD 1945, juga tidak pernah menyinggung berlakunya diskriminasi kepada penganut ideology tertentu. Mereka yang melakukan kejahatan kriminal dengan sendirinya harus dihukum. Namun ketika hukuman selesai ia pulih kembali sebagai warga Negara utuh yang tidak boleh dihilangkan hak politiknya.

Adalah sebuah takhayul jika kita meyakini aktivis komunis akan mampu membawa Negara kita pasca reformasi 1998 menjadi Negara komunis dan mengganti system ekonomi atau konstitusi. Jika niat itu ada mereka akan dilawan bukan hanya oleh sebagian besar masyarakat, namun oleh sejarah gerakan itu sendiri. Ini adalah sejarah yang tidak bisa di balika lagi. Yaitu menuntutefisiensi ekonomi dan kebebasan politik, yang tidak dapat dipenuhi oleh ideology komunisme itu.

Zaman sudah berubah. Komunisme harus dibiarkan mati. Menakuti komunisme justru akan memitoskan barang yang sudah mati dan membuatnya gentayangan sebagai hantu. **

Memperkuat Paham Kebangsaan

Peristiwa sumpah pemuda 1928 merupakan salah satu masterpiece yang dibuat the founding father. Berbagai tokoh masyarakat dari latar belakang kultur yang beragam menikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Mereka yang berasal dari berbagai agama, etnis, ras, dan ideology berkomitmen menyatakan identitas nasional yang telah menyatukan mereka. Sampai kini, identitas nasional telah menjadi perekat yang mampu menyatukan Negara Indonesia yang beragam dari aneka gerakan pemisahan diri atau separatism.

Namun, di era demokrasi seperti sekarang, niscaya paham kebangsaan yang lahir dari Sumpah Pemuda

perlu diperkuat sekaligus diperbaharui. Ia perlu diperkuat akibat bangkitnya kembalo politik identitas local, baik yang bersandar pada agama, ataupun kedaerahan. Jika tidak diperkuat, sentiment agama dan kedaerahan akan mengalahkan identitas nasional. Pada gilirannya, sunggupun kita masih berada dalam satu Negara, fragmentasi dan konflik primordial akan selalu hadir. Kebersamaan dan komitmen sebagai suatu Negara hanya menjadi formalitas yang kehilangan ruhnya.

Pada saat yang sama, paham kebangsaan itu juga perlu diperbarui. Realitas dunia sekarang berbeda dengan era sumpah pemuda 1928. Dunia kini semakin terkait secara ekonomi, dan saling bergantung. Revolusi yang melahirkan internet dan televise membuat dunia saling mengawasi. Di era ini setiap Negara nasional tidak dapat menghindari hadirnya bahkan investasi badan dunia seperti PBB, IMF, World Bank, dan aneka perjanjian internasional.

Tanpa memperkuat dan memperbarui paham kebangsaan, niscaya demokrasi kita akan selalu goyah disatu sisi akibat konflik primordial antar warga Negara. Di sisi lain, demokrasi kita akan pula ter isolasi dari dunia akibat berkebangnya paham kebangsaan yang sempit, yang menolak kehadiran dan intervensi badan dunia sebagai realitas dunia baru.

Tidak lagi bisa ditawar bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam secara agama, etnis, ras, gender, dan ideologi. Dalam bahasa ilmu politik masyarakat kita berada dalam level Devided Society.

Istilah itu merujuk pada hadirnya riwayat panjang konflik internal antar warga masyarakat, baik yang bersandar pada agama, etnis, maupun ideologi.

Masih terbayang dalam memori kolektif kita konflik yang terjadi dalam geografis Indonesia sejak zaman kolonial, yaitu konflik muslim dengan non muslim, antara non pri versus pribumi, antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya, serta antar ideologi seperti komunisme versus anti komunis.

Konflik itu bukan hanya meresahkan masyarakat, namun acap kali pula muncul secara terbuka dan berdarah yang menyebabkan matinya ratusan bahkan ribuan orang. Tak terhitung terbakar dan hancurnya aneka property. Namun yang paling parah konflik ini melukai perasaan bersama sebagai warga Negara satu Indonesia

Selama orde baru, identitas politik local itu, terutama yang bersandar pada agama, etnis, dan ideologi, telah diatasi dengan represi. Rezim orde baru tampil sebagai kekuatan politik yang sangat powerfull dan tersentralisasi. Kata kunci SARA pun diperkenalkan. Konflik primordial diatasi dengan cara melarang hal ini dibicarakan secara public. Setiap isu yang mulai mempersoalkan elemen primordial dituding sebagai isu SARA yang terlarang. Pembawa isu akan terkena represi bahkan dimasukkan penjara.

Konflik ideology juga diatasi dengan memperkenalkan ideology Tunggal Negara Pancasila. Semua partai dan

kekuatan politik masyarakat diwajibkan memeluk ideologi tunggal itu. Semua buku dan tokoh yang terkait dengan ideologi komunisme direpresi.

Politik yang represif terkesan berhasil mengatasi aneka konflik politik identitas local. Selama orde baru, relative jarang kita melihat adanya konflik terbuka antar agama, etnis, ataupun ideologi. Namun tidak pernah kita sadari apa yang terjadi di bawah permukaan. Kebijakan represi orde baru sebenarnya bukan mengikis habis konflik politik identitas local itu, namun menyembunyikannya. Itu sama dengan sampah yang ditutupi permadani. Tampak luar, seolah permadani membentang sedemikian indahnyanya. Namun dibawah permadani, tetap ada tumpukan sampah yang membusuk.

Era Reformasi telah mengganti Orde Baru. Yang terjadi bukan saja pergantian pimpinan nasional. Lebih dari itu reformasi membuat hilangnya kekuatan politik represif dan tersentralisasi ala ORBA. Larangan SARA pun hilang. Akibatnya, pemerintah pusat tidak lagi dapat sepenuhnya mengontrol daerah dan politik identitas lokal.

Karena konflik primordial itu selama Orde Baru bersembunyi, tidak hilang di era kebebasan, konflik primordial itu muncul lagi, juga dengan bebasnya. Itu yang terjadi mulai dari Aceh sampai Irian jaya. Konflik horizontal yang berlandaskan agama telah terjadi di berbagai tempat. Paling parah, konflik ini terjadi di Ambon. Konflik antara pribumi dan non pri, atau

tepatnya kekerasan yang terjadi dengan non pri, terjadi dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Konflik antar etnis, antar suku, anatr suku asli dan pendatang, terjadi di berbagai provinsi. Yang terparah, konflik yang terjadi di Kalimantan.

Konflik horizontal diatas berlangsung dalam bentuknya yang paling barbar. Bukan saja konflik itu memakan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu warga Negara. Konflik itu telah membunuh sesama anak negeri dengan cara yang kejam, seperti membakar mereka secara missal ataupun memancung kepala. Aneka media internasional secara jelas-jelas menampilkan foto kekejaman ala Indonesia itu.

Semangat sumpah pemuda justru telah di injak-injak di era kebebasan, di era reformasi, di era demokrasi. Jika bangsa ini ingin survive , mau tidak mau, semangat kebangsaan itu harus dihidupkan kembali. Identitas nasional meski lebih kuat dari identitas politik local masing-masing warga Negara. Si A seorang muslim, seorang jawa, namun sekaligus ia harus merasa sebagai bagaian dari orang Indonesia yang beraudara dengan orang Indonesia yang lainnya. Hal yang sama dengan si B, seorang Kristen, seorang batak namun ia harus sekaligus merasa sebagai bagian dari orang Indonesia juga. Kebanggaan yang tinggi menjadi orang Indonesia tidak melunturkan kesalehan agama ataupun identitas politik lokalnya.

Pada saat yang sama, paham kebangsaan perlu diperbarui. Era millennium ketiga saat ini sudah

berbeda sangat jauh dengan suasana dunia pada 1928. Kini revolusi teknologi, melalui revolusi transportasi dan komunikasi, telah menyatukan dunia. Melalui internet dan televisi, peristiwa yang terjadi di AS dan Afganistan secara langsung dapat dirasakan dan ditonton oleh penduduk dunia yang lain. Peristiwa dipelosok dunia yang jauh seolah juga terjadi di ruang keluarga kita sendiri melalui televisi

Barang-barang yang diproduksi sebuah Negara kini juga mendunia. Coca Cola, MC Donald's, dan Levi's sudah menyebar keseluruh benua. Film, music, serta perdagangan sudah pula mengglobal. Siapa yang tidak kenal dengan Mike Tyson atau Maradona? Siapa yang tidak kenal dengan Ricky Martin? Sementara produk barat masuk ketimur, produk timur juga masuk ke barat. Meditasi mewarnai aneka Negara Eropa dan Amerika Serikat

Namun, yang paling signifikan dalam perkembangan dunia baru adalah lahirnya badan dunia yang berpengaruh antara lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga ekonomi semaca IMF, World Bank, CGI, Paris Club, serta ideology internasional seperti Deklarasi Hak Asasi. Tak dapat lagi dibantah, dalam realitas dunia baru, badan dunia ini dapat mengintervensi semua Negara nasional.

Wilayah nasional sebuah Negara kini sepenuhnya tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah nasional Negara itu, suka ataupun tidak suka.

Realitas dunia baru ini jelas harus juga mempengaruhi paham kebangsaan kita. Tidak bisa lagi kita terlalu sempit mengartikan kedaulatan nasional. Semua kehendak populer seperti menolak kehadiran dan intervensi IMF, World Bank, atau CGI, serta keinginan memutuskan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat sangat bertentangan dengan fenomena dunia baru. Kehendak itu hanyalah cerminan paham kebangsaan lama yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Jika kehendak populer itu diikuti, Indonesia justru terisolasi dan membunuh dirinya sendiri.

Apa boleh buat, dunia sudah mengubah. Perubahan itu tidak dapat dilawan karena ia sudah menjadi kekuatan sejarah yang impersonal. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki paham kebangsaan kita untuk menerima realitas baru. Menjadi Indonesia ditengah bangkitnya politik identitas local dan globalisasi ekonomi dunia tentu semakin sulit, namun menantang.***

Utusan Golongan dan Tanggung Jawab PDI-P

Seperti yang sudah diduga, Sidang Tahunan(ST) MPR 2001 berakhir dengan deadlock. MPR gagal mencapai kesepakatan untuk amandemen pasal yang sangat penting, komposisi MPR dan pemilihan presiden. Diluar dua pasal krusial itu, sebenarnya cukup banyak pasal lain yang diamandemen dalam ST MPR 2001, termasuk masalah Mahkamah Konstitusi. Namun karena dua pasal krusial itu yang paling mencolok, yang berhubungan dengan penataan ulang pola kekuasaan (power arrangement), MPR dianggap gagal melaksanakan tugas sejarahnya tahun ini.

Akibatnya, ST MPR akan dikenang justru untuk hal-hal yang buruk, misalnya saling dorong anggota MPR yang terhormat dikedung rakyat yang terhormat pula dihari pertama. Atau, sepinya siding komisi dan paripurna karena para anggota dari lembaga tertinggi Negara itu banyak yang absen dan mangkir. Serta

habisnya uang 18,7 miliar disaat krisis ekonomi untuk menyelenggarakan acara ini tanpa hasil amandemen konstitusi yang berarti. Hasil positif diluar yang negative itu kalah gaung atau kalah pamor.

Menarik untuk menyimak lebih dalam mengapa MPR gagal mengamandemen dua pasal krusial itu. Kegagalan amandemen untuk pasal pemilihan presiden sedikit banyak dipahami. Dengan memegang teguh prinsip demokrasi, memang perbaan visi tentang proses pemilihan presiden (kepala eksekutif) dapat terjadi. Memilih presiden secara langsung (di ronde pertama dan kedua) sama sahnya dengan pemilihan kepala eksekutif melalui parlemen(MPR) semua sudah di pilih rakyat melalui pemilu.

Namun, kegagalan untuk pasal utusan golongan agar tidak lagi menjadi bagian dari MPR sangat sulit dimengerti. Padahal anggota MPR terhormat duduk di kursi sekarang karena adanya gerakan reformasi yang ingin menegakan demokrasi. Jelas-jelas ditinjau dari segala sisi, utusan golongan adalah hal yang tidak lazim bahkan bertentangan dengan sistem demokrasi.

Utusan golongan diciptakan dengan prinsip dimana MPR seharusnya mewakili semua golongan di masyarakat. Sementara DPR menjadi bagian utama komposisi MPR hanya mewakili partai politik atau kekuatan yang memang aktif dalam politik. Golongan lain diluar politik diwakili MPR melalui utusan

golongan. Jika tidak ada utusan golongan, MPR dianggap tidak mewakili semua lapisan dan unsure masyarakat Indonesia, terutama yang tidak aktif dalam partai politik.

Prinsip diatas benar namun operasionalisasinya yang jelas salah alamat. Benar bahwa MPR harus mewakili semua golongan masyarakat. Namun jika hal tersebut dioperasionalisasikan melalui kehadiran wadah khusus utusan golongan, prinsip itu dilaksanakan secara salah total.

Semua golongan sebenarnya sudah diwakili oleh pemilu. Dalam pemilu yang bebas dan universal berlaku kaidah suffrage. Semua orang dewasa, apapun jenis kelamin, warna kulit, agama, profesi, hobby, jenis pekerjaan mempunyai hak yang sama dalam pemilu. Semua golongan bebas memilih siapapun yang mereka percaya untuk mewakili mereka dilembaga perwakilan rakyat. Hasil pemilu itu adalah utusan semua golongan tanpa kecuali secara paling sah. Tidak diperlukan sebuah wadah yang bernama utusan golongan lagi untuk golongan tertentu.

Dari sisi prosedur, konsep utusan golongan juga sama membingungkannya. Semua anggota perwakilan rakyat harus dipilih oleh rakyat yang diwakilinya. Pemilihan itu apat dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri melalui pemilu. Namun pemilihan dapat pula dilakukan oleh dewan perwakilan daerah jika yang dipilih adalah anggota yang mewakili daerah itu.

Namun bagaimana dengan utusan golongan? Siapa yang memilih anggotanya? Praktek politik selama ini menunjukkan bahwa utusan golongan itu diangkat oleh presiden atau oleh KPU sejak era reformasi. Sementara kita tahu KPU berisikan wakil partai politik dan pemerintah. Ini berarti utusan golongan mewakili pihak yang mengangkatnya(partai politik dan pemerintah), bukan mewakili golongan yang dimaksud. Golongan yang di wakili tidak memilih sendiri secara bebas siapa utusanya dalam golongan itu.

Dari sisi klasifikasi utusan golongan itu tidak kalah ngawurnya. Diatur bahwa utusan golongan mewakili golongan agama, perempuan, penyandang cacat, ekonomi, dan badan kolektif, etnis minoritas, budayawan, cendikiawan, ilmuwan, PNS, mahasiswa, pemuda, dan LSM, serta veteran perintis kemerdekaan.

Menjadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas menentukan golongan mana yang harus punya wakil. Jika penyandang cacat diwakili, mengapa penduduk usia lanjut tidak ada wakilnya?, jika etnis minoritas diwakili, mengapa fakir miskin tida? Jika agama besar diwakili, mengapa aneka gerakan spiritual yang kini subur di luar agama besar tidak di wakili?

Mengapa pula PNS diwakili oleh lima orang, mengapa wakil PNS itu lebih banyak dari wakil agama Kristen, Katholik, dan Buddha digabung menjadi satu? Mengapa pula penyandang cacat diwakili oleh dua orang?, lalu cacat yang mana yang harus diwakili? Apakah mereka orang yang cacat berbicara, cacat menengar, cacat

penglihatan, atau cacat berjalan? Jika jatah dua orang itu untuk cacat mlihat dan mendengar, bagai mana dengan yang cacat bicara dan cacat berjalan?semua itu menggambarkan kekacauan konsep utusan golongan itu dalam ketatanegaraan kita.

Sungguh mengherankan untuk menghapus utusan golongan yang secara terang benderang begitu jelas kelirunya, para anggota MPR yang terhormat, di era reformasi juga tidak mampu. Mereka memilih jalan aman menunda persoalan sampai tahun depan.

Seandainya yang menentang penghapusan utusan golongan datang dari utusan golongan sendiri, itu bisa dipahami. Mereka memang sedang berjuang untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan prinsip demokrasi. Bahkan TBI/POLRI juga masuk akal untuk membela keberadaan utusan golongan. Jika TNI/POLRI kelak dihapus dari keanggotaan DPR, TNI/POLRI masih bisa masuk MPR melalui jalur utusan golongan.

Namun sulit membayangkan mengapa aneka partai besar ikut-ikutan menjadi tidak bisa bersikap tegas. Jika tidak salah data, PDI-P adalah partai yang membela keberadaan utusan golongan, sehingga tidak di amandemen oleh ST MPR 2001. Karena didukung oleh PDI-P , ditambah dengan suara TNI/Polri dan utusan golongan sendiri , pihak lain jadi mengkerut. Mereka yang ingin menghapuskan utusan golongan dan

membuat komposisi MPR hanya terdiri atas anggota DPR dan PD yang dipilih rakyat, mengurungkan niat.

Hitungan sederhana, jika dipaksakan voting, tanpa dukungan PDI-P kuorum mungkin tidak tercapai, senadainya pun tercapai, mayoritas 2/3 dari kuorum tidak terpenuhi. Padahal untuk mengubah pasal dibutuhkan prasyarat mayoritas 2/3 dari kuorum. Akibatnya ramai-ramai semua partai menunda masalah amandemen utusan golongan di tahun 2002.

Ini adalah sebuah ironi dari PDI-P. padahal partai itu adalah partai terbesar. Partai pemenang pemilu. Di era Orde Baru partai itu dikenal menderita karena represi rezim otoriter. Dalam pemilu bebas pertama setelah 32 tahun rezim orde baru, public berbondong bondong memilih PDI-P, karena simpati atas penderitaannya. Diduga kerana menderita di rezim yang otoriter, kelak PDI-P akan berjuang mati-matian membela prinsip dasar demokrasi.

Namun semakin hari, PDI-P tampak semakin konservatif, semakin khawatir dengan perubahan yang mendasar. Padahal muara dari perubahan mendasar, untuk kasus golongan dan komposisi MPR, itu adalah tujuan penerapan prinsip demokrasi. Tidak mengherankan jika public mulai bertanya, dimana tanggung jawab PDI-P selaku partai pemenang pemilu di era pemilu pertama reformasi?

Hanya ada dua kemungkina mengapa PDI-P menolak menghapus utusan golongan dalam ST MPR 200,

kemungkinan pertama adanya kepentingan jangka pendek. Dengan membela utusan golongan PDI-P akan mendapatkan dukungan 65 suara utusan golongan dan 38 suara TNI/Polri. Untuk aneka maneuver selanjutnya di MPR, utusan golongan dan TNI/Polri akan membalas jasanya mendukung PDI-P. itu semata mata kepentingan kelompok aliansi yang tidak berhubungan dengan visi politik apa pun.

Kemungkinan kedua, ada visi politik lebih jauh yang mendasari sikap PDI-P. kepentingan PDI-P justru sangat jangka panjang dan visioner bagi kelangsungan hidup Indonesia. Bagi PDI-P, utusan golongan dan TNI/Polri adalah elemen yang mendasar dalam kehidupan bangsa yang kehadirannya dalam lembaga tinggi MPR justru untuk memperkuat MPR. Sehingga MPR benar-benar representative.

Itu tentu visi politik yang sah, namun harus dikatakan visi itu bukanlah visi yang lahir prinsip demokrasi. Alasan dibagian tengah tulisan ini, penulis sudah menjelaskannya. Sangat disayangkan jika partai terbesar PDI-P, memperjuangkan visi politik yang berbeda bahkan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Citra PDI-P dimata public luas akan terganggu, public akan mengambil sikap. Jika demokrasi yang hendak diperjuangkan, berarti tidak bisa lagi diharap hal itu bisa diperjuangkan melalui PDI-P.

PDI-P tidak akan dikenang seperti partai konres di India atau ANC di Afrika Selatan. Dua partai itu adalah partai terbesar dinegaranya di era awal

transisi demokrasi., yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengoperasikan prinsip demokrasi. Megawati tidak akan pernah disamakan oleh Nehru atau Nelson Mandela yang gigih mempersatukan partainya agar konsisten untuk memperjuangkan prinsip demokrasi.

PDI-P mungkin tetap menjadi partai besar atau terbesar dalam satu atau dua pemilu berikutnya. Namun tidak akan pernah dikenang sebagai partai bersejarah, yang secara sadar mengambil tanggungjawab zaman.

Pihak-pihak yang demokrat di PDI-P harus cepat bertindak. Jangan biarkan partai yang potensial itu “dibajak” oleh kekuatan konservatif yang akan memperburuk citra partai bahkan mempersulit transisi Indonesia menuju demokrasi. Masih ada waktu bagi PDI-P untuk kembali ke image semula, menjadi partai yang memperjuangkan agenda demokrasi sesuai dengan namanya”Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Setahun lagi Negara kita tertunda memiliki desain politik baru, yang lebih demokratis. Ketidakpastian agenda reformasi semakin tinggi. Ironisnya, ketidakpastian itu justru turut diciptakan oleh PDI-P, yang dulu pernah menjadi tumpuan harapan. PDI-P kini harus menentukan sikap. Apakah ingin membuat sejarah, atau ditinggalkan sejarah? **

Poso, Idul Fitri dan Natal

Indonesia di bulan Desember tahun 2001. Tanggal 25 di bulan itu, umat Kristiani merayakan Natal. Tanggal 16 dan 17 di bulan yang sama, umat Islam merayakan Idul Fitri. Dua hari besar bagi penganut agama, Kristen dan Islam, mengingatkan pentingnya agama bagi perdamaian sunia yang sejati.

Namun di Poso, Sulawesi Tengah, hal sebaliknya yang terjadi. Pada awal Desember, bahkan sudah tiga tahun lamanya, agama (Kristen versus Islam) justru menjadi basis konflik kekerasan. Lebih dari 80 rumah ibadah kedua belah pihak dihancurkan.

Di daerah kecil itu, lebih dari 500 nyawa melayang. Ribuan rumah penduduk porak-poranda, berikut dengan berbagai gedung publik seperti perkantoran dan sekolah. Selama konflik, kerugian diperkirakan

mencapai lebih dari 300 miliar rupiah, pada saat ekonomi sedang krisis. Tidak terhitung kerugian yang berbentuk psikologis, seperti rasa ketakutan, kebencian, kesedihan dan kemarahan massal.

Pihak yang bertikai memang sudah menandatangani kesepakatan di Malino. Di minggu ketiga Desember 2001, pemerintah dibawah Menko Kesra Jusuf Kalla berhasil menjadi mediator dan fasilitator. Upaya mediator itu didampingi pula oleh pemimpin umat Kristen dan Islam di tingkat lokal maupun di tingkat nasional (MUI dan PGI). Diharapkan resolusi konflik itu akan merembes ke tingkat akar rumput.

Kesepakatan formal itu semoga menjadi pemandu dan awal kehidupan baru di Poso. Agama diharapkan tidak lagi menjadi basis konflik, tetapi sebaliknya justru menjadi motif perdamaian dan berkah bagi semua, seperti yang dipesankan baik oleh Natal maupun Idul Fitri.

Walau harus optimis dan mendorong kemajuan, sikap kritis kita yang meragukan tetap baik untuk dipelihara. Dengan sikap kritis itu, minimal semua pihak menjadi awas untuk tetap melihat kendala apa yang ada dilapangan, serta kesulitan apa yang mungkin menghadang di Poso, atau di daerah rawan lainnya. Dengan demikian, upaya resolusi (pemecahan) konflik dan perdamaian akan lebih realistis, dan lebih antisipasif atas kemungkinan terburuk.

Atas kasus konflik bernuansa SARA di Poso, menarik untuk memperhatikan hasil survey tentang tema itu. Survey dilakukan oleh Pusat Studi Demokrasi, Universitas Jayabaya, bekerjasama dengan OTO/USAID, pada Maret dan April 2000. Responden sebanyak 2.000 (500 per kota) dipilih secara acak terstratifikasi yang mewakili semua segmen status ekonomi di Jakarta, Makasar, Surabaya dan Solo. Hasil survey yang dilakukan satu setengah tahun lalu masih relevan untuk dijadikan basis analisis karena dalam jangka waktu itu belum banyak perubahan yang terjadi.

Berdasarkan survei itu, sangat nyata sebenarnya tidak ada masalah dengan mayoritas penduduk. Persoalan ada pada apa yang disebut dalam ilmu politik sebagai the active minority. Istilah itu merujuk hanya sekelompok kecil dari penduduk, dari masing-masing agama, yang bertindak ekstrem. Namun Karena segelintir penduduk itu sangat aktif dan mobil, serta menguasai tata cara mobilisasi the silent majority, keseluruhan wilayah terlibat. The active minority itu yang harus menjadi sasaran utama.

Menurut hasil survey, mayoritas masyarakat Indonesia (lebih dari 90 persen) adalah masyarakat yang toleran atas keberagaman agama, etnis dan status ekonomi. Hanya sedikit sekali (kurang dari 10 persen) dari masyarakat itu yang memiliki persepsi negative atas keberagaman.

Mayoritas responden dari berbagai latar belakang, agama, etnis dan status ekonomi, merasa nyaman

dengan keberagaman yang ada. Mereka merasakan ada kesempatan yang sama dalam mencari nafkah dengan mereka yang beda agama (94,3 persen); dengan mereka yang berbeda etnis/suku (90,8 persen); dan dengan pendatang (jika mereka penduduk asli) ataupun dengan penduduk asli jika mereka pendatang (92,9 persen). Yang merasakan terjadinya diskriminasi karena identitas yang mereka punya hanya 5,4 persen (untuk beda agama), 8,6 persen (untuk beda suku) dan 6,4 persen (untuk pendatang atau penduduk asli).

Dalam soal karier (seperti karier didunia politik), mayoritas reponden juga merasakan kenyamanan yang sama atas keberagaman. Mereka merasa tidak dibedakan hanya Karen agama yang dipeluk (91,5 persen), tidak dibedakan hanya karena asal muasal etnis/suku (90 persen) atau tidak dibedakan hanya karena pendatang atau penduduk asli (91,3 persen).

Mereka yang memiliki persepsi atau pandangan negatif atas keberagaman, seperti masa didiskriminasi, cukup kecil. Yang merasa didiskrimasi dalam karier karena agama yang dipeluk sebesar 8,7 persen, Karen asal muasal etnis/suku (9,3 persen), karena mereka pendatang atau penduduk asli (7,7 persen).

Mayoritas responden juga punya pengalaman yang menyenangkan dengan keberagaman itu. Lebih dari 95 persen dari responden merasa diperlakukan secara wajar, dengan bersahabat atau bahkan dianggap seperti berasal dari identitas yang sama. Yang merasa dimusuhi atau dicurigai hanya 3 persen (oleh yang lain agama),

2,4 persen (oleh yang lain suku/etnis) dan 3 persen (oleh pendatang atau penduduk asli).

Fakta itu menceritakan, dalam kondisi negara yang normal, Indonesia adalah Negara plural yang toleran dan damai. Mayoritas penduduknya merasa nyaman dengan keberagaman itu. Mereka yang berpersepsi negatif atas keberagaman hanyalah kelompok kecil yang kurang dari 10 persen. (untuk kasus kesempatan sosial) dan kurang dari 3 persen (untuk kasus merasa dimusuhi atau dicurigai).

Namunkondisi masatransisidi Indonesiamemberikan suasana tersendiri. Dalam ilmu politik, kondisi transisi itu menjadi political opportunity structure (kondisi yang member insentif) bagi munculnya aneka protes sosial dan kerusuhan. Krisis ekonomi, suasana yang tidak pasti dan pertikaian politik antar elite yang berpengaruh merembes dan meradikalkan berbagai segmen masyarakat.

Kerusuhan dan konflik SARA itu dapat lahir secara alami. Sekelompok kecil yang berpersepsi negatif atas keberagaman (yang kurang dari 10 persen itu) mampu mengorganisasi diri untuk melampiaskan persepsi dan pengalaman buruknya. Disisi lain, konflik itu dapat juga direayasa (tidak alami). Isu SARA dijadikan political resources (sumber daya politik). Yang sengaja dimanipulasi oleh elite yang bertikai untuk tujuan politik dan ekonomi tertentu dalam rangka pertarungan

kekuasaan belaka.

Serangan dari satu kelompok dibalas oleh sekelompok yang diserang, sampai akhirnya konflik itu mengalami eskalasi. Hasil dari eskalasi itu dapat saja kerusuhan massal yang brutal dan berdarah seperti terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Konflik dan kerusuhan yang bernuansa SARA di era transisi di Indonesia menjadi laten, mungkin selalu timbul dan ditimbulkan. Harga dari konflik dan kerusuhan itu sangatlah mahal dan menjadi kendala yang serius bagi lahirnya masyarakat plural yang equal dan damai. Dari sisi demokrasi, harga termahal yang mesti dibayar adalah rusaknya common citizenship. Ada tiga elemen dari common citizenship yang dapat rusak karena konflik dan kerusuhan bernuansa SARA.

Pertama, prinsip kewarganegaraan. Dalam Negara demokrasi, identitas seseorang (agama, suku, pendatang atau penduduk asli) tidak boleh menjadi isu public yang dapat mendiskriminasikan seseorang dari kesempatan sosial dan jabatan publik. Namun konflik bernuansa SARA justru menegaskan bahwa identitas seseorang (agama, etnis, pendatang/penduduk asli) menjadi masalah dan bahkan dapat menyebabkan jiwa terancam. Seseorang tidak hanya didiskrimasi tapi terancam keselamatannya, bukan Karen tindakan yang dilakukannya, tapi semata-mata karena identitasnya.

Kedua, prinsip kebangsaan. Dalam demokrasi, semua warga Negara yang beragam mesti berada ada

dalam rasa satu bangsa yang sama. Perasaan itu sangat penting karena ia dapat menjadi dasar dari kerja yang sama dan saling percaya (social trust) yang melintasi keberagaman SARA. Namun konflik dan kerusuhan bernuansa SARA justru menegaskan, kelompok yang beragam itu bukan saja tidak dapat bekerjasama tetapi menjadi musuh satu sama lain. Politik menjadi zero sum game, keberuntungan satu kelompok sosial hanya mungkin dicapai dengan membuat rugi atau menghancurkan kelompok sosial lainnya.

Ketiga, prinsip pluralitas. Dalam demokrasi, keberagaman dipahami secara positif dapat membuat unsur yang beragam itu bersinergi satu sama lain menuju manfaat bersama (common interest). Perbedaan kepentingan diselesaikan dengan kompetisi yang tidak mempersoalkan identitas seseorang. Namun konflik dan kerusuhan bernuansa SARA justru menegaskan, keberagaman adalah musibah. Aliansi dan kerja sama yang didasarkan pada kepentingan bersama yang mengatasi perbedaan SARA dianggap pengkhianatan atas identitas SARA masing-masing. Karena buruknya konflik dan kerusuhan bernuansa SARA itu bagi transisi Indonesia menuju demokrasi, upaya meredam konflik dan kerusuhan bernuansa SARA harus menjadi prioritas. Mayoritas responden sendiri menyarankan agar pemerintahan baru bertindak setegas mungkin kepada pihak yang memobilisasi terlibat konflik itu.

Diharapkan pula agar kebijakan public pemerintahan baru bersifat nonsektarian (tidak hanya ingin

menguntungkan kelompok SARA tertentu).

Namun ketimbang pemerintah pusat, mayoritas responden lebih mempercayai pemimpin informal di daerah dan pemerintahan lokal (daerah) sebagai pihak untuk mengatasi konflik dan kerusuhan SARA itu. Desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat menjadi insentif bagi menguatnya pemerintah daerah dan pemimpin informal local. Pada gilirannya, penguatan itu menjadi positif pula bagi upaya penyelesaian, dan pencegahan konflik di masa datang.

Bagi umat Kristen dan Islam, pada Desember ini seharusnya menjadi momentum dan perenungan yang dalam. Baik Natal maupun Idul Fitri 2001 terjadi di bulan ini, dan hanya berjarak sekitar seminggu. Tentu sebuah langkah maju, diantara Idul Fitri dan Natal (setelah Idul Fitri sebelum Natal), pihak Kristen dan Islam di Poso bersepakat untuk berdamai. Mayoritas penduduk Poso kita yakini memang mengharap datangnya suasana damai.

Namun the active minorit, seperti yang ditunjukkan oleh survei, adalah kelompok yang paling sukar diraba. Kelompok kecil di masing-masing agama itu selama ini menjadi penyulut konflik. Ideologi, keyakinan dan tabiat kelompok kecil itu acap kali jauh lebih keras dan tidak dapat diatasi hanya melalui formalitas kesepakatan diatas kertas. Demi kepentingan kelompok yang lebih besar, pemerintah mesti memberikan perhatian ekstra dan pendekatan khusus kepada the active minority itu.

**

Bom Bali : The Event of the Year 2002

Di Indonesia, di tahun 2002, peristiwa apakah yang terjadi paling dramatis, yang menjadi pusat pemberitaan dalam jangka waktu lama, dan yang efeknya bagi kehidupan orang banyak sangat terasa? Dari sekian peristiwa menghebohkan, Bom Bali pada 12 Oktober 2002 dapat dinobatkan menjadi the Event of the Year 2002.

Sangat jarang Indonesia menjadi pusat berita dunia. Namun bom yang meledak di Bali menjadi perkecualian. Pada banyak pers Australia, kisah Bali menjadi top story selama berminggu-minggu. Separuh dari korban bom Bali yang menyebabkan lebih dari 180 orang tewas berasal dari Australia. Di Amerika Serikat, Bali juga menjadi hot issue dan headline di CNN, Time, Newsweek, Washington Post, New York Times dan

aneka media utama lainnya. Setelah tragedi September 2001, bom Bali dianggap aksi terorisme terbesar.

Bagi politik dan ekonomi domestic Indonesia, Bom Bali menjadi peristiwa terbesar, terpenting dan terburuk dilihat dari tiga hal. Pertama, efek ekonomi dan politik yang disebabkan. Kedua, terror di bali menjadi modus baru aksi terror yang berbeda dengan aksi terror generasi sebelumnya. Ketiga, Bom Bali juga menjadi picu terbongkarnya sebuah jaringan kejahatan politik dengan kedok agama yang sangat berbahaya.

Pekerjaan besar yang tersisa pada 2003 adalah bagaimana menuntaskan persang atas terorisme demi rasa nyama publik luas. Tokoh yang melakukan terror dapat saja semuanya ditangkap. Namun paham yang berada dibalik aksi terror itu mungkin selalu hidup atau dihidupkan kembali. Paham itu berbahaya karena pada gilirannya dapat kembali menyebabkan aksi terror berikutnya yang mungkin lebih besar.

Efek yang paling terasa dari Bom Bali adalah meluasnya perasaan terancam. Tidak hanya warga asing, terutama dari Amerika Serikat dan Australia yang merasa terancam, penduduk Indonesia juga merasakan hal yang sama. Betapa tidak? Bom itu membabi-butakan dapat membunuh siapa saja secara massal. Kakek, nenek, bapak, ibu, anak muda, si kaya, si miskin, dimanapun, apapun agamanya berpotensi menjadi korban.

Lihatlah betapa dahsyat kekejaman bom Bali. Begitu

banyak jasad yang tidak lagi dikenali. Begitu banyak potongan tubuh yang tercecer. Banyak pula mayat yang kaku dengan aneka posisi. Sebelum korban menyadari apa yang terjadi, ia sudah menjadi mayat. Begitu banyak keluarga yang kehilangan kerabat, kekasih, anak, saudara yang disayangi. Padahal mereka tidak tahu menahu soal apapun yang dibenci oleh kelompok teroris itu.

Bali pun berubah, dari surge dunia menjadi neraka yang dijauhi. Sebelumnya, Bali dianggap tempat wisata paling favorit di Asia. Namun setelah bom meledak, begitu banyak negara yang memberlakukan travel banned, larangan berkunjung ke Bali. Secara mendadak, Bali menjadi sangat sepi. Seketika itu pula kehidupan ekonomi penduduk disana terganggu secara signifikan.

Hunian kamar hotel yang biasanya di atas 60 persen, bahkan diatas 80 persen pada akhir tahun, merosot drastis hanya dibawah 30 persen. Pemutusan hubungan kerja secara massal mengancam Bali. Indonesia juga menderita citra yang semakin buruk. Country Risk untuk berbisnis di Indonesia semakin parah. Akan semakin sedikit investor yang datang. Bahkan investor ada juga yang berpotensi hengkang, pergi ke tempat lain yang lebih aman. Akibatnya, pengangguran dan krisis ekonomi terus mengancam.

Bom Bali juga mengungkapkan modus baru aksi terorisme yang berbeda dengan terorisme generasi sebelumnya. Sulu, aksi terror hanya mengambil korban secukupnya. Korban diperlakukan hanya

untuk menarik perhatian dunia. Sengaja korban itu dibuat minimal, Karena kelompok teroris masih ingin mendapatkan simpati dunia. Mereka tidak punya cara lain mendapatkan perhatian, kecuali dengan cara kekerasan.

Namun kini aksi terorisme justru ingin memaksimalkan jumlah korban. Semakin besar jumlah korban, semakin aksi terorisme itu dianggap berhasil. Diledakkannya bom di Sari Club dengan pertimbangan maksimalisasi korban. Sama halnya dengan dipilihnya Worl Trade Center untuk diledakkan. Kelompok teroris tidak lagi peduli apakah aksi mereka mendapatkan simpati dunia. Kemarahan dan kebencian tampaknya sudah begitu dalam, dan menimbulkan sebuah fantasi kenikmatan untuk membunuh korban sebanyak mungkin, dengan efek sedramatis mungkin.

Dulu, aksi terorisme dilakukan secara terbuka. Tidak lama setelah aksi terror dilakukan, akan muncul klaim dari pihak tertentu, melalui Koran atau saluran lain, yang mengaku sebagai pelaku. Kelompok teroris kemudian menyebutkan apa yang menjadi tujuannya. Mungkin mereka ingin sebuah konsesi politik tertentu, atau hanya sekedar kompensasi keuangan dalam jumlah besar.

Namun kelompok teroris sekarang sudah sma sekali berbeda. Mereka justru ingin menyembunyikan identitas. Nomor mesin mobil yang digunakan untuk meledakan bom sudah dirusak. Tidak ada klaim dari pihak manapun setelah Bali meledak. Tidak jelas pula

apa yang menjadi tujuan ledakan itu. Semua serba rahasia dan tertutup. Adalah kecanggihan pihak polisi yang mampu mengungkapkannya.

Dulu terorisme beraksi dengan target yang strategis. Mereka tidak ingin mengorbankan pihak lain yang tidak terlalu terkait dengan konflik. Mereka mungkin menculik seorang tokoh atau pejabat Negara. Mereka mungkin menyandera staf kantor kedutaan. Atau mereka menyerang basis pertahanan seperti Pearl Harbour. Public luas memahami bahwa korban memang berurusan dengan persoalan konflik.

Namun aksi terror sekarang sudah sangat berbeda. Mereka tidak peduli lagi siapa yang menjadi target. Maka sebuah klub malam di Bali, seperti Sari Club atau Paddy's Club dijadikan sasaran. Tak peduli siapa yang mati disana, dan apakah korban memang terkait atau tidak dengan isu konflik. Tidak hanya warga asing yang mati disana. Penduduk Indonesia juga mati. Korban yang nyata di Bali datang dari berbagai agama. Jelaslah ini kejahatan yang sempurna dan buta.

Bali sebagaimana World Trade Center menjadi monumen berkembangnya aksi terorisme jenis baru, yang lebih jahat, lebih terorganisir dan lebih nekat. Semua tahu aksi terorisme itu tidak terkait dengan agama mana pun. Pada dasarnya semua agama memusuhi terorisme, memusuhi pembunuhan secara membabi-buta.

Namun kelompok teroris dapat saja memainkan

sentimen agama demi mendapatkan simpati publik luas. Ini pula yang membuat aksi terorisme jenis baru lebih berbahaya. Pembunuhan massalayang kejam itu dapat dipersepsikan sebagai perang suci yang diwajibkan Tuhan. Akibatnya kenekatan kelompok teroris sangat tinggi. Bahkan mereka tidak takut mati karena mati itu ditafsir secara buta sebagai mati di jalan yang benar, dan mendapat ganjaran yang lebih baik di dunia akhirat.

Pelaku yang sebenarnya dari Bom Bali tengah diusut. Pengadilan yang nanti memutuskan apakah ada sebuah jaringan di belakang Bom Bali yang divonis bersalah. Sebelum vonis pengadilan, semua tuduhan harus dianggap sebagai bukti awal yang mungkin benar dan mungkin salah.

Sambil menunggu keputusan pengadilan, polisi agaknya mulai berhasil membongkar sebuah jaringan terorisme. Jelaslah ini prestasi yang sangat luar biasa. Jika pengusutan polisi itu terbukti, jajaran polisi dan Menko Polkan selaku pimpinan tertinggi pemberantasan terorisme layak dinobatkan sebagai the men of the Year 2002 untuk Negara Indonesia.

Sejak reformasi, begitu sering kita dilanda oleh terror bom. Tak tanggung-tanggung, bom itu meledak di tempat ibadah, mulai dari gereja sampai Mesjid Istiqlal. Bom juga meledak di malam Natal dan malam Idul Fitri, ketika publik hening ingin menikmati kedamaian dengan Sang Pencipta.

Sejak reformasi, kita juga dibingungkan dengan meluasnya konflik horizontal. Berbagai kekerasan dengan nuansa agama di berbagai daerah meluas. Terutama di Ambon dan Poso, konflik horizontal itu terkesan sangat sulit diatasi karena ada kelompok terorganisir yang bermain.

Jika segala hal berjalan lancar, jaringan terorisme dibalik banyak bom itu akan segera terbongkar. Bahkan kelompok itu pula dianggap bertanggung jawab, sebagian, dengan aneka konflik horizontal di daerah lain. Lebih dari itu, kelompok itu diduga sudah berjaringan internasional di kawasan Asia Tenggara. Polisi sendiri negatakan, hamper pasti bahwa Jemaah Islamiyah berada dibalik banyak terror kekerasan di Indonesia, bahkan si Asia tenggara.

Penangkapan dan pengadilan atas pelaku bom itu sangat penting. Namun juga tidak kalah pentingnya dalam melawan ideologi atau paham dibalik aksi terorisme. Kita menolak mengaitkan paham itu dengan agama Islam. Bagi kita, islam adalah agama yang suci dan cinta damai. Namun paham yang berbahaya itu “membajak” agama Islam, dan menggunakan simbol-simbol Islam untuk merebut simpati publik luas.

Pada 2003, tinggal beberapa hari lagi. Di tahun itu pengadilan atas Bom Bali akan digelar. Para pelakunya akan segera diadilidani diberikan ganjaran yang setimpal jika memang mereka terbukti bersalah. Namun, paham dan ideology dibalik terorisme itu masih terus hidup. Adalah tugas agamawan, terutama dari komunitas

Islam, untuk mengisolasi paham yang berbahaya itu agar tidak menjadi racun bagi public awam di tahun 2003 dan selanjutnya.

Tokoh puncak dari NU dan Muhammadiyah, ataupun aktivis muda dan jaringan Islam liberal sudah sering menyatakan bahwa terorisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Pada 2003, para tokoh dari Islam Mainsteram itu harus bekerja lebih keras, agar paham yang berbahaya itu tidak lagi “membajak” agama Islam, yang justru “memburuk-burukkan” citra Islam itu sendiri sebagai agama suci dan damai. **

Lemahnya Komunikasi Politik

Bayangkan skenario seperti ini. Jauh hari sebelum kenaikan harga BBM, listrik dan telepon di awal tahun 2003, Presiden Megawati secara khusus berpidato di TVRI dan RRI secara langsung. Beberapa stasiun TV dan radio swasta juga diminta menyiarkan acara itu. Bahkan berbagai wartawan dari media cetak diberi tempat untuk meliput.

Dalam siaran itu, Megawati menyampaikan rencana kenaikan harga BBM, listrik dan telepon. “Saudara-saudara sebangsa dan setanah air” ujar Megawati memulai pidatonya. “Demi menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat, pemerintah terpaksa mengambil sebuah kebijakan yang mungkin tidak populer. Kepentingan yang lebih luas, “Megawati menyambung “memaksa saya meminta pengertian Saudara-saudara sekalian untuk merelakan pengurangan subsidi”. Lalu Megawati memaparkan alasan mengapa subsidi atas BBM, listrik

dan telepon itu perlu dikurangi. Para pembantunya juga sudah menyiapkan table dan diagram yang mudah dibaca. Dalam table itu, tergambar angka-angka yang sederhana yang memperkuat argument perlunya subsidi dikurangi. Diproyeksikan apa keuntungan kita sebagai bangsa dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui kebijakan itu.

“Namun Saudara sebangsa sekalian” ujar Megawati lagi “Saya tahu, kenaikan harga ini akan menyulitkan sebagian besar kita. Karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan kompensasi untuk penduduk yang masih dalam garis kemiskinan, disiapkan beberapa kompensasi dibidang kesehatan, pendidikan, dan penyedia sembako murah. Sementara untuk kalangan pengusaha, agar terus dapat berusaha dan tidak menambah pemutusan hubungan kerja, dipersiapkan aneka kemudahan dan pengurangan pajak.”

Lalu kembali Megawati kembali memaparkan angka dan grafis secara detil mengenai kompensasi dan kemudahan pajak yang akan diberikan. Kembali Megawati memberikan analisis apap yang terjadi jangka pendek dan jangka panjang dengan aneka kompensasi serta kemudahan itu bagi masyarakat yang ditargetkan.

Untuk menyentuh rasa keadilan masyarakat, Presiden Megawati dalam siaran langsung itu juga memaparkan rencana pemberantasan korupsi. Bagaimanapun para koruptor telah menggerogoti keuangan Negara yang membuat Negara menjadi bangkrut seperti sekarang. Jika perlu, ada pula pengumuman satu atau dua pejabat

tinggi, yang diberhentikan dari jabatannya, tentu dengan bukti yang bersangkutan mengkomersilkan jabatannya.

Dinyatakan pula dalam pidato, Megawati sudah mengumpulkan pihak yang terkait untuk diajak bicara. Presiden Megawati, mengundang pengurus KADIN dan aneka asosiasi pengusaha untuk berdiskusi soal kenaikan itu. Juga presiden mengundang wakil para buruh, mahasiswa dan kalangan pers. Tak lupa Megawati mengajak DPR untuk sekali lagi menguji baik buruk pengurangan subsidi BBM, listrik dan telepon.

Jika komunikasi politik itu dilakukan, niscaya pemerintah akan tetap dapat menaikkan harga BBM, listrik dan telepon, tanpa perlawanan yang berarti. Niscaya Megawati tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang. Pertanyaannya, mengapa komunikasi politik sederhana seperti diatas tidak kunjung pula dilakukan oleh Presiden Megawati? Bukankah sejak lama sudah banyak kritik dan rekomendasi yang menyoroti pentingnya komunikasi politik itu? Apa yang sebenarnya terjadi?

Karena komunikasi model diatas tidak dilakukan, maka demonstrasi atas harga BBM, telepon dan listrik membuat dilemma pemerintah. Gelombang aksi protes itu sudah sedemikian meluas. Dari sisi geografis, aksi itu terjadi hampir di semua kota besar di seluruh Indonesia. Dari sisi partisipasi, hampir semua kalangan

terlibat. Tak hanya buruh dan mahasiswa yang menjadi pemain utama aksi protes, tetapi para ibu rumah tangga sampai pengusaha, juga sudah terlibat.

Menjelang pemilu 2004, dengan sendirinya kondisi itu menjdai lahan empuk bagi para politisi. Disamping mereka peduli terhadap nasib rakyat, tentu mereka juga peduli dengan kepentingan politik mereka sendiri. Politisi pun dapat bermain sirkus memainkan sentiment massa. Jika politisi kebetulan bersebrangan dengna pemerintah dan ada niat menggantikan pemerintahan, tentu isu itu akan diolah sedemikian rupa. Secara canggih ataupun kasar, politisasi atas kenaikan harga dilakukan untuk menyerang Megawati. Politisasi isu itu akan membuat situasi semakin panas dan kompleks.

Tinggallah pemerintah yang berada dalam situasi yang serba salah. Apapun yang memenuhi tuntutan masyarakat untuk menunda kenaikan harga. Jika itu dilakukan, pada satu sisi memang pemerintah terasa peduli dan mau mendengar.

Namun pada sisi lain, akan timbul citra betapa pemerintah bekerja secara asal-asalan. Kebijakan itu diambil tanpa memperhitungkan konsekuensinya, dan tanpa menyiapkan kondisinya dahulu. Akibatnya, kebijakan yang sudah diambil kini dicabut kembali. Timbulah citra pemerintah Megawati sangat plin-plan dan lemah karena mudah sekali ditekan.

Selanjutnya, apapun yang diputuskan pemerintah Megawati akan kembali ditekan dengan harapan akan

berubah kembali. Akibatnya, pemerintah Megawati tidak akan pernah mengambil kebijakan yang populer, walau kadang-kadang diperlukan.

Mengubah kebijakan secara cepat akan merusak citra Megawati sendiri. Selama ini Megawati terkesna sangat kukuh dengan pendiriannya. Sekali ia mengangkat Menteri, ia tidak akan menggantinya. Sekali membuat kebijakan, ia akan mempertahankannya karena merasa kebijakan itu dibuat dengan proses yang semestinya. Jika kini Megawati mencabut kebijakan pengurangan subsidi, citra sebagai pemimpin yang kukuh dan konsisten itu runtuh seketika.

Sebaliknya, jika Megawati bertahan dengan kebijakan sekarang, dan membiarkan harga BBM Listrik dan telepon naik, ia menjadi target politik yang empuk. Aksi protes sudah meluas sedemikian rupa. Bahkan patung dirinya dan Hamzah Haz dibakar massa. Oleh lawan politiknya, mudah sekali isu itu digunakan untuk mobilisasi kebencian public luas atas Megawati.

Pada satu sisi, Megawati menyadari, sulit bagi lawan politik menjatuhkannya sebelum pemilu 2004. Akibat amandemen konstitusi MPR sekarang tidak lagi memiliki kekuasaan seperti sebelumnya. Siding tahunan MPR 2003 kelak juga tidak seperkasa sebelumnya yang dapat menjatuhkan presiden. Pemimpin politik yang ada sekarang juga tidak akan untung jika presiden jatuh.

Namun disisi lain, Megawati juga menyadari, dengan tidak mengubah kebijakan harga BBM, listrik

dan telepon, ia mengizinkan lawan politik merusak citranya secara maksimal. Pada ujung 2003 dan awal pemilu presiden kelak tahun 2004, sangat mungkin ia tidak sepopuler tahun 2002. Peluangnya terpilih kembali semakin kecil akibat mobilisasi kebencian atas isu kenaikan harga itu. Situasi itu membuat posisinya serba salah.

Seandainya saja presiden Megawati dan tim di sekitarnya lebih memperhatikan komunikasi politik, situasi pemerintah tidak sedilematis sekarang. Persoalannya, mengapa komunikasi politik atas kebijakan pemerintah tidak kunjung dilakukan? Padahal komunikasi itu dapat dilakukan sejak dini melalui sosialisasi, conditioning, dialog dan marketing?

Pemerintah agaknya masih kagok dengan system politik demokratis. Sungguhpun sudah berubah, tradisi birokrasi dan politik otoriter masih dominan. Opini public belum dianggap penting. Pada era Soeharto yang otoriter, memang tidak diperlukan opnini public. Segala hal ditentukan dari atas. Yang penting adalah kemauan politik Soeharto sendiri. Apakah public protes atau tidak toh kekuasaan tetap kukuh tidak goyah.

Namun pada era reformasi, kekuasaan ada juga di masyarakat. Pers bebas, civil society jug punya kapabilitas politik. Dan public luas punya opini. Mereka perlu didengar. Mereka perlu diberi penjelasan. Mereka perlu dikondisikan agar setiap kebijakan pemerintah

dapat dimengerti dan didukung.

Jika public mendukung, segala upaya politisasi oleh lawan politik akan mudah dipatahkan. Public sendiri tidak akan bergerak terkena provokasi oposisi politik jika mereka merasa memahami dan diajak bicara.

Saatnya presiden memiliki tim komunikasi politik diseputar presiden. Mengikuti lembaga kepresidenan di Amerika Serikat, tim komunikasi politik itu dapat diletakkan di bawah kanto kepresidenan, atau mungkin kesekretariat Negara. Tim itu bertugas mencari tahu apa yang menjadi reaksi public jika sebuah kebijakan diambil. Tim itu juga dapat mengusulkan untuk memodifikasi sebuah kebijakan untuk mengurangi resistensi public.

Di dalam negara modern, bahkan tim komunikasi politik itu memiliki pollster dan maketing. Pollster bertugas melakukan jejak pendapat untuk mendapatkan gambaran makro reaksi public. Sementara marketing bertugas mencari cara sosialisasi seefektif mungkin agar sebuah kebijakan mendapatkan dukungan seluas mungkin. Memimpin sebuah Negara modern di era demokrasi memang lebih rumit. Namun segala hal menjadi lebih mudah jika kita mengikuti model sebuah Negara yang berhasil menjadi modern. Satu syaratnya adalah mempunyai tim komunikasi politik bagi pemimpin tertinggi. Janagan lagi pemerintah seperti domba yang terantup batu berkali-kali. **

Gerakan Mahasiswa di Simpang Jalan?

Gerakan yang berhasil adalah gerakan yang tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Tanpa waktu yang tepat untuk memulai suatu gerakan, aksi protes tidak akan pernah mendapat dukungan dari kelompok yang beragam. Sebaliknya, tanpa kesadaran kapan harus berhenti, sebuah aksi protes akan kebablasan, dan justru akan menjadi noda hitam bagi gerakan itu sendiri.

Aksi mahasiswa yang kini tengah membara, tahu kapan harus memulai gerakan. Kenaikan harga BBM, Tarif dasar listrik dan telepon dilakukan secara serentak oleh pemerintah tanpa sosialisasi yang memadai. Masyarakat terkejut. Para nelayan kesulitan mencari nafkah karena harga solar membumbung tinggi. Para

ibu rumah tangga terkena pula akibat kenaikan harga minyak tanah dan transportasi. Dalam situasi tidak normal, dengan pengangguran sudah berjumlah 40 juta, kemarahan kepada pemerintah menemukan momentumnya.

Itu memang saat yang tepat untuk memulai sebuah gerakan. Seketika aksi protes mahasiswa bak gayung bersambut meluas ke berbagai kota. Gerakan itu didukung oleh segmen masyarakat yang beragam. Tak hanya buruh, pengusaha pun ikut demo. Tak hanya kalangan populis dan “kiri”, tetapi kelompok yang berbasis agama dan “kanan” juga meramaikan aksi protes. Ibu rumah tangga dan artis tidak pula ketinggalan. Luasnya dukungan atas aksi mahasiswa tidak bisa tidak membuat kita harus menyimpulkan bahwa ini memang saat yang tepat bagi sebuah aksi protes.

Namun, kapan gerakan mahasiswa itu harus berakhir? Pemerintah sudah menunda harga kenaikan telepon. Bahkan pemerintah sudah pula merevisi kenaikan harga BM dan listrik. Sebagian aspirasi aksi protes sudah diakomodasi pemerintah. Apakah ini saat yang tepat bagi gerakan mahasiswa untuk mengakhiri aksi protesnya?

Pada titik itu, kita melihat gerakan mahasiswa mendua. Kini mereka berada disimpang jalan. Sebagian berpandangan bahwa saatnya mengakhiri gerakan. Jika gerakan itu diteruskan, akan terjebak pada kepentingan politik yang leih sempit dan justru buruk bagi citra gerakan mahasiswa itu sendiri.

Namun, sebagian sudah tergoda oleh tujuan politik yang lebih radikal. Mereka ingin punya prestasi politik sebagaimana angkatan mahasiswa sebelumnya. Prestasi politik itu di ukur dari keberhasilan menurunkan presiden dan mengganti pemerintahan. Bagi mereka, yang salah bukan hanya kebijakan menaikkan harga BBM, Tarif dasar listrik dan telepon. Yang salah adalah pemerintah dan pemimpin sekarang yang memang sudah tidak lagi peka kepada kepentingan orang banyak, maka pemimpin sekarang harus diturunkan ditengah jalan.

Saya termasuk yang berpandangan bahwa saatnya gerakan mahasiswa diakhiri. Gerakan itu sudah berprestasi dan berhasil membuat pemerintah merevisi kebijakannya atas BBM, tarif dasar listrik dan telepon. Akibat gerakan mahasiswa, dimasa datang pemerintah sekarang mungkin akan lebih sensitif untuk mengambil kebijakan yang tidak populer. Konsultasi public, sosialisasi, perlu dilakuakn lebih dulu sebelum kebijakan tidak populer diambil.

Jika gerakan mahasiswa saat ini tergoda untuk menjatuhkan presiden ditenga jalan, gerakan itu kan kebablasan. Secara politik, hampir mustahil presiden dapat diturunkan ditengah jalan hanya karena kebijakannya. Secara moral, seandainya pun berhasil, gerakan mahasiswa justru menjadi cacat karena tidak menumbuhkan kultur demokrasi yang dibutuhkan untuk mentradisikan pergantiam pemimpin hanya

melalui pemilu. Terkecuali jika pemimpin yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tingkat tinggi.

Gerakan mahasiswa harus menyadari keterbatasannya. Dalam konstalasi politik, mereka adalah kekuatan penunjang, bukan kekuatan utama. Kekuatan utama politik di negeri ini masih berada di tangan pimpinan partai dan militer/kepolisian. Gerakan mahasiswa yang terpecah tetapi didukung oleh kekuatan politik yang utama, jauh lebih kuat di bandingkan gerakan mahasiswa yang solid dan bersatu tetapi tidak didukung oleh kekuatan politik utama.

Gerakan mahasiswa di era presiden Gus Dur dapat dijadikan perbandingan saat itu gerakan mahasiswa justru tepecah. Yang berbasiskan islam dan nasionalis mengambil posisi yang berseberangan dengan Gus Dur sebaliknya, gerakan mahasiswa yang “kiri” dan populis, justru membela Gus Dur. Dalam berbagai kesempatan, dua front gerakan mahasiswa itu saling serang.

Tetapi praktis kekuatan politik utama saat itu berada di belakang gerakan mahasiswa yang anti Gus Dur. Masing-masing partai besar memiliki alasan sendiri untuk kecewa kepada Gus Dur. Megawati dan PDI-P kecewa karena Gus Dur memecat Laksamana Sukardi. Puncaknya, Gus Dur tidak konsisten menyerahkan kekuasaan operasional kepada wakil presiden seperti yang disepakati.

Golkar juga punya alasan sendiri untuk mengambil

jarak kepada Gus Dur. Jusuf Kalla, menteri andalan Golkar, juga dipecat Gus Dur. Dalam beberapa kali pertemuan dengan DPR yang dipimpin Akbar Tanjung, ketua umum DPP Golkar, Gus Dur memperlihatkan sikap yang meremehkan. PPP dan PAN juga memiliki anti pati yang sama. Hamzah Haz juga dipecat dari cabinet Gus Dur, sementara Amien Rais yang menolongnya menjadi presiden.

Tidak hanya partai, militer dan polisi memiliki alasan untuk kecewa kepada Gus Dur. Polisi melihat Gus Dur memainkan politik adu domba, akaibatnya polisi sebagai lembaga berada dalam posisi yang sangat berbahaya karena adanya dualisme kepemimpinan. Sementara itu, seajak lama tentara merasa diobok-obok oleh Gus Dur. Tak terhitung betapa Gus Dur sering membuat situasi politik gunjang-ganjing karena pernyataannya yang controversial. Sebagai pemimpin, Gus Dur bukannya menenangkan situasi, tetapi justru sering memanaskannya.

Dalam kondisi politik seperti diatas, Gus Dur berhasil diturunkan dari kursi presiden. Walau gerakan mahasiswa terpecah belah dan melemah, tetapi toh berhasil menggantikan presiden. Apalagi saat itu konstitusi UUD 1945 masih memungkinkan pergantian presiden ditengah jalan. MPR(dan DPR) memiliki kekuasaan mutlak untuk mengganti presiden. kondisi politik saat ini sangat berbeda. Memang gerakan mahasiswa lebih solid dan bersatu. Aksi protes dari berbagai kalangan, dari “kiri” atau pun “kanan” tidak

terpecah. Mereka di cut oleh solidaritas yang sama.

Tetapi, kekuatan elite utama sangat berbeda. Semua kekuatan partai besar tidak ada yang berkehendak menjatuhkan presiden ditengah jalan, baik Golkar, PPP, PAN mau pun PKB berkepentingan agar calon mereka yang kelak menjadi presiden. Dunia internasional dan public mood politik domestic hanya memberikan legitimasi tinggi jika mereka merebutnya melalui pemilihan umum. Bukankah waktu pemilihan umum tinggal satu tahun lagi.

Jika presiden Megawati dijatuhkan sekarang, belum tentu kursi presiden jatuh ke tangan presiden. Belum tentu pula pemerintah yang baru akan ikut jadwal pemilu di tahun 2004. Ada kemungkinan penguasa baru justru memundurkan pemilu ke 2005, 2006 atau 2007. Jika yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta bahkan sangat mungkin politik demokrasi itu tamat.

Tidaklah mengherankan jika pemimpin partai besar itu akan pasang badan dan mati-matian membuat Megawati bertahan sampai tahun 2004. Itu dilakukan bukan karena mereka mencintai atau menghormati Megawati, tetapi justru untuk melindungi kepentingan politik dan ambisi mereka sendiri. Bukankah akan lebih baik jika kelak mereka dicatat sejarah sebagai presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung?

Di samping itu, kepolisian dan militer saat ini makin bersatu dan yakin dengan jalan professional. Diantara yang aktif saat ini makin yakin bahwa politik militer

dan polisi adalah politik kenegaraan. Kesetiaan mereka yang tertinggi ada pada konstitusi. Sekali mereka mengkhianati konstitusi, selanjutnya membuka peluang pada pengkhianatan konstitusi berikutnya. Tidak ada Negara yang dapat stabil jika pengkhianatan konstitusi menjadi tradisi.

Sementara itu, berdasarkan konstitusi yang sudah di amandemen saat ini, tidak ada jalan untuk menurunkan presiden di tengah kekuasaannya. Hanya jika presiden melakukan pengkhianatan, korupsi, kriminalitas tingkat tinggi, dan perbuatan tercela, presiden dapat diproses untuk di pecat. Namun kebijakan BBM, tarif dasar listrik dan telepon, bahkan divestasi indosat, tidak termasuk dalam kategori itu.

Tanpa dukungan politik utama, gerakan mahasiswa, walau bersatu, tidak akan pernah berhasil untuk menurunkan presiden di tengah jalan. Di samping terlalu banyak kendala dalam politik praktis, menurunkan presiden ditengah jalan juga buruk bagi tradisi demokrasi. Masa jabatan empat presiden terdahulu, selalu berakhir dengan buruk. Tiga presiden diturunkan di tengah jalan (Soekarno, Soeharto dan Gus Dur). Satu presiden ditolak pertanggung jawabannya oleh MPR (Habibie). Jika sekali lagi mereka berhasil menurunkan Megawati, politik di Indonesia tidak akan pernah nyaman.

Negara demokrasi adalah Negara yang dapat mengganti kekuasaannya secara terlembaga dan tanpa kekerasan. Selama dua ratus tahun lebih merdeka,

tidak ada presiden yang di pecat di Amerika Serikat dan diturunkan di tengah jalan. Satu-satunya yang dipaksa mundur adalah Richard Nixon Karena ia melanggar hukum. Saatnya pula kita menumbuhkan kultur demokrasi itu, dengan cara menjadikan pemilu sebagai satu-satunya mekanisme untuk mengganti dan mempertahankan presiden.

Gerakan mahasiswa saat ini memang berada di disimpang jalan. Semoga para pemimpin mahasiswa yang sudah tercerahkan mengambil keputusan penting. Bahwa saatnya gerakan mahasiswa itu diakhiri. Jika pemerintah kembali membuat keputusan yang buruk, tentu saja gerakan mahasiswa tersebut harus bangkit kembali. **

Gerakan Anti Megawati

Akankah Megawati jatuh sebelum pemilu 2004? Seandainya ia selamat, akankah Megawati terpilih kembali melalui pemilihan presiden langsung di tahun 2004? Pertanyaan itu muncul secara spontan ketika melihat meluasnya gerakan anti Megawati. Tak hanya pendukung PDIP dan pemuja Megawati yang kaget dengan gerakan politik mutakhir itu. Mereka yang peduli dengan tumbuhnya demokrasi di Indonesia juga harus merenung, apa yang sesungguhnya terjadi.

Telah muncul berbagai aksi yang melibatkan dan merangkul banyak kalangan politik. Koalisi nasional dideklarasikan. Didalamnya terdapat berbagai komponen politik, mulai dari tokoh partai baru dan

partai kecil, juga buruh, dan mantan aktivis mahasiswa tahaun 1980an.

Lahir pula front ampera, dengan komponen politisi dan tokoh yang jauh lebih berpengaruh. Rachmawati Soekarno Putri, beserta Abdurrahman Wahid, dan aneka kelompok dari kalangan Islam, kumpul bersama purnawirawan dan kelompok ekonomi kerakyatan, serta berbagai tokoh mahasiswa yang masih aktif. Perbedaan platform politik seolah telah di nisbikan oleh hadirnya musuh bersama di kalangan mereka. Mengapa kekuatan anti Megawati semakin lama semakin banyak? Sungguh pun sama-sama anti Megawati, gerakan politik mutakhir itu punya motif dan target yang beragam. Sebagian murni, sebagian di mobilisasi, dan sebagian di politisasi. Semua bercampur baur menjadi satu. Namun demi kepentingan analisis, aneka motif itu dapat diurai.

Pertama, sebagian gerakan anti-Megawati berasal dari gerakan protes dan control public biasa. Mereka marah terhadap situasi. Bukan kenaikan harga BBM, tariff dasar listrik dan telepon itu yang menjadi the prime cause dari gerakan, tetapi mereka merasa adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Tak lagi penting apakah benar pemerintah sudah tidak adil, namun persepsi itu sudah terbentuk.

Subsidi atas BBM memang dapat menghemat uang Negara sebesar 17 triliun rupiah, tetapi mereka tahu, hutang konglomerat hitam itu jauh lebih besar, lebih dari 80 triliun rupiah. Muncul persepsi, pemerintah memilih mengurangi subsidi, akibatnya harga BBM,

listrik dan telepon naik. Tapi pada saat yang bersamaan, sebagian hutang konglomerat hitam itu juga dikurangi dan tindakan pidana mereka diampuni.

Mereka yang meyakini, pemerintah memilih kongkalikong dengan konglomerat hitam, dan mengorbankan rakyat banyak. Mereka yakin pula, kongkalikong dengan konglomerat hitam itu pasti jug ada unsure KKN yang membuat tebal sebagian kantong tokoh penguasa.

Sementara subsidi untuk rakyat banyak dikurangi, pemerintah juga membiarkan korupsi meluas. Tak hanya public, bahkan lembaga internasional seperti transparency international berpandangan korupsi di era reformasi justru bertambah buruk. Mereka menyaksikan pemerintahan Megawati tidak bertindak keras terhadap misalnya jaksa agung, yang oleh trial by the press, sudah dinyatakan berbohong tentang kekayaannya sendiri.

Sungguh pun mereka anti-Megawati, tetapi gerakan mereka dapat dikatakan murni, berdasarkan kalkulasi rasional yang mandiri. Terlepas apakah persepsi politik dan ekonomi mereka benar atau salah, namun mereka memang bertidak atas nama hati nuraninya sendiri. Rasa ketidakadilan itu yang membuat mereka turun ke jalan. Umumnya mereka adalah intelektual, aktivis LSM papan atas, dan mayoritas gerakan mahasiswa.

Kedua, ada pula gerakan anti-Megawati yang sudah

dengan target politik tertentu. Mereka membaca situasi bahwa public sedang berada dalam kemarahan kolektif. Mereka juga melihat memang banyak kebijakan, sikap pribadi, serta gaya kepemimpinan Megawati dapat menjadi target kemarahan. Kemarahan public itu mereka mobilisasi dengan tujuan memburukkan citra Megawati secara maksimal.

Hal yang lumrah pula di alam demokrasi bahwa politisi saling bersaing. Mereka memanfaatkan semua situasi yang potensial untuk saling memburukkan. Semakin menjelang pemilu, sikap saling memburukkan si kalangan elite itu semakin intensif. Bahkan dalam istilah politik Amerika pun dikenal negative campaign. Istilah itu merujuk pada teknik kampanye yang negative, dengan sasarannya hanya untuk memburuk-burukkan citra lawan politik.

Dikalangan kelas menengah atas, popularitas Megawati memang sudah jatuh secara mencolok. Jejak pendapat harian Kompas membuktikannya. Setelah 18 bulan memerintah, ketidakpuasan public atasnya sangat tinggi. Untuk beberapa kasus ketidakpuasan itu bahkan melampaui angka 90 persen.

Tetapi metodologi jejak pendapat hanya menggunakan responden yang memiliki telepon. Sementara, pemilik telepon di Indonesia hanya 5-7 persen. Berarti lebih dari 90 persen public luas tidak terwakili dalam jejak pendapat itu. Sangat mungkin public luas yang tidak memiliki telepon punya pandangan yang berbeda.

Survei yang dibuat IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat misalnya dengan metodologi face to face dan semua populasi dijadikan responden (tidak hanya yang memiliki telepon), memang menunjukkan hasil yang berbeda.

Megawati tetap menjadi tokoh yang paling mungkin dipilih kembali pada tahun 2004. Rakyat dari kalangan bawah rupanya tidak serasional kalangan menengah atas. Bagi pengikut yang fanatic, mati dan hidup yang penting ikut Mega.

Bagi lawn politik, itu saat yang sangat tepat untuk kampanye anti-Megawati. Mereka meyakini jumlah pengikut fanatic Megawati dapat diperkecil. Didengang-dengungkan bahwa wong cilik sudah ditinggal oleh Megawati. Komunitas nasionalis dan pengagum Bung Karno jug dipecah dengan menampilkan Rachmawati Soekarno Putri sebagai tokoh oposisi atas Megawati.

Pendukung jenis protes itu adalah aktivis partai besar. Mereka berkepentingan agar jago mereka yang menang dalam pemilihan presiden di tahun 2004. Dengan upaya memecah belah kelompok nasionalis dan memperluas oposisi, pada waktunya di tahun 2004, Megawati diharapkan terpuruk citranya, tidak hanya dikalangan kelas menengah atas, tetapi juga dikalangan luas.

Sesungguhnya pun ingin mengantam Megawati secara sengaja, namun gerakan jenis itu tidak ingin menjatuhkan Megawati ditengah jalan. Bagi mereka

jauh lebih menguntungkan Megawati tetap berkuasa, toh kekuasaannya tinggal setahun lagi. Lebih terbaik mereka mengambil alih kekuasaan melalui pemilu dengan cara mengalahkan Megawati yang sudah terpuruk. Jika Megawati jatuh di tengah jalan, ibarat bola liar, kursi kekuasaan dapat jatuh ke tangan pihak lain.

Ketiga, ada pula jenis gerakan anti-Megawati yang memang bertujuan menjatuhkan Megawati-Hamzah. Kelompok ini tidak hanya protes atas kebijakan buruk Megawati, seperti kelompok pertama. Kelompok ini juga tidak ingin hanya memburukkan citra Megawati agar tidak terpilih kembali dalam pemilu 2004. Lebih dari itu, kelompok ini memang ingin menjatuhkan Megawati beserta Hamzah Haz di tengah jalan. Jika bisa awal tahun ini juga, Megawati dan Hamzah Haz lengser dari kekuasaan.

Kelompok itu juga memperkenalkan konsep presidium nasional. Jika Megawati dan Hamzah Haz lengser atau dilengserkan, presidium nasional itu akan mengambil alih pemerintahan. Kemungkinan pemilu di undur sampai 2005 atau 2006. Presidium nasional diharapkan mengkonsolidasi kekuasaannya dahulu. Sangat mungkin pula pemilu itu ditunda untuk waktu yang lebih lama jika presidium yang baru tidak yakin dapat menang dalam pemilu.

Kelompok ketiga ini datang dari kalangan yang lebih

kecil dan radikal. Umumnya mereka politisi kelas dua yang mustahil dapat meraih kekuasaan melalui pemilu. Mereka bukan hanya datang dari partai besar. Mereka berharap terjadi revolusi. Hanya revolusi yang mungkin membawa mereka ke puncak kekuasaan. Seagian kecil aktivis mahasiswa berhasil di radikalisasi untuk menempuh jalan revolusi itu.

Mereka memiliki spirit anti partai yang cukup tinggi. Pemilu dianggap hanya menjadi mekanisme pembenaran orang partai untuk berkuasa. Sementara kualitas dan orientasi orang partai dianggap tidak hanya korup, tetapi juga primordial dan terlalu partisan. Indonesia tidak akan pernah lebih baik walau dilakukan pemerintahan baru yang dipilih melalui pemilu 2004.

Secara benar ataupun salah, mereka membayangkan presidium nasional adalah jawaban yang dibutuhkan. Presidium itu terdiri atas tokoh yang credible, dan gabungan dari beberapa unsure. Yang terbaik jika presidium itu dibentuk sendiri oleh MPR. Namun jika terpaksa, presidium itu mengambil alih kekuasaan untuk sementara, demi kepentingan nasional yang lebih luas. Substansi perubahan Indonesia dianggap lebih penting dari pada formalism prosedur politik melalui pemilu.

Dari kaca mata demokrasi, aksi protes jenis pertama dan jenis kedua masih dapat dibenarkan. Setiap warga dan kekuatan politik dibolehkan untuk protes dan

marah kepada pemimpinnya, sejauh masih dalam koridor hukum demokrasi.

Bahkan setiap pesaing politik dibolehkan pula ikut memburukkan lawan-lawan politiknya, sejauh data dan faktanya akurat. Justru kritik dan deklarasi keburukan lawan politik membuat politisi akan semakin hati-hati dengan track recordnya.

Dari kaca mata demokrasi, aksi protes jenis ketiga yang tidak sehat. Tradisi menjatuhkan presiden dalam sistem presidensialisme tidak berujung kemanapun, kecuali hancurnya pelebagaan politik negara itu. Ketidak pedulian pada lembaga pemilu juga tidak membawa kemana-mana kecuali rusaknya tradisi demokrasi Negara tersebut.

Di Amerika Serikat selama 200 tahun merdeka, tidak ada presiden yang di jatuhkan di tengah jalan. Semua pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilu. Hanya Nixon yang pernah mengundurkan diri. Kecuali hanya presiden yang melakukan kejahatan tinggi, sebaiknya kita mentradisikan pergantian presiden hanya melalui pemilu. Setidaknya hal itu juga membuat pemilih bertanggung jawab dengan pilihan politiknya. Jika tidak ingin pemimpin yang buruk, harus hati-hati dan mengenal tokoh yang dipilihnya.

Mengganti presiden juga haruslah tokoh lain yang dipilih rakyat melalui pemilu, bukan presidium yang tidak dikenal dalam konstitusi. Konstitusi dibuat sebagai aturan main yang melembagakan demokrasi.

Sekali prinsip konstitusi dilanggar, maka akan terjadi pelanggaran berikutnya. Tidak ada Negara di dunia yang stabil dan maju jika konstitusi ditradisikan untuk dilanggar. Sedangkan presidium nasional adalah pelanggaran konstitusi tingkat tinggi. **

Soal Pasal Kudeta Itu

Pasal Kudeta sebenarnya bersifat *contradictio in terminis*. Dua kata dalam terminology “Pasal Kudeta” itu bersifat saling berkontradiksi. Agak mengherankan bagaimana kata “ Pasal” dan kata “Kudeta” itu dapat disatukan. Dua kata itu hanya mungkin dipasangkan sebagai bentuk ekspresi sensasional, untuk menarik perhatian public.

Secara gabalang, pasal kudeta menyiratkan sebuah kudeta, atau pengambilan kekuasaan, yang dilegalkan atau doatur dalam sebuah pasal. Kudeta itu berarti berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena sesuai dengan hukum, pengambilalihan kekuasaan itu menjadi sah, dan tidak perlu dipersoalkan.

Sementara kudeta justru berarti perubahan kekuasaan dengan cara diluar aturan hukum, bahkan

berlawanan dengan konstitusi Negara. Kudeta justru terjadi karena pengambilalihan kekuasaan itu tidak sesuai dengan pasal dan hukum yang berlakudi Negara itu. Keabsahan sebuah kudeta tidak berdasarkan pada legitimasi hukum, tetapi pada dukungan politik.

Demikianlah kudeta yang terjasi di Iran, misalnya. Imam Khomeini mengambil alih kekuasaan dari Shah Iran. Pengambilalihn kekuasaan itu sama sekali berjlan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di Iran. Bersandarkan hukum yang ada, system kerajaan di Iran hanya memungkinkan perubahan kekuasaan kepada keturunan raja.

Toh, rezim yang dibangun Khomeini masih bertahan sampai sekarang. Penyebabnya, karena kudeta itu didukung secara politik oleh masyarakat setempat. Untuk melakukan kudeta itu, Khomeini dan pendukungnya tidak memerlukan perubahan pasal atau konstitusi terlebih dahulu. Yang ia perlukan hanyalah ketidakpuasan public terhadap penguasa saat itu. Sehingga kudeta atau pengambilalihan kekuasaan yang menentang konstitusi pun didukung luas.

Tentu sangat mustahil jika militer ingin melakukan kudeta di Indonesia dengan menyiapkan pasal dan aturan hukum terlebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan Khomeini dan pendukungnya, kudeta tidak memerlukan keabsahan hukum. Jika sesuai dengan hukum, bukan lagi kudeta namanya, tetapi pergantian kekuasaan yang normal. Pasal Kudeta dengan sendirinya tidak pernah masuk akal, atau salah secara terminology.

Tetapi mengapa pasal 19 draf UU TNI yang disebut pasal kudeta mendapat tanggapan dan kritik yang luas? Toh semua dapat memahami pasal itu tidak dimaksudkan oleh TNI untuk kudeta? Tiga alasan yang menjadi penyebabnya : alasan politik, alasan yuridis formal dan alasan prinsip demokrasi.

Gerakan reformasi sejak 1998, baru saja mengubah format politik TNI. Secara bertahap, bahkan TNI sendiri mengambil inisiatif untuk memasuki era baru, dengan bentuk keterlibatan social TNI yang baru pula. Pasal 19 dalam draf UU TNI itu dikhawatirkan berlawanan dengan arah peran TNI yang dibangun dalam format politik TNI.

Sejak reformasi, perubahan peran TNI sangat dahsyat. Militer meninggalkan doktrin dwi fungsi yang selama ini “disucikan”, dengan tekanan ataupun secara sukarela, TNI meninggalkan panggung politik. Posisi Kasospol dihapuskan. Pimpinan militer sendiri menyadari bahwa masuk dalam gelanggang politik praktis, bagi tentara adalah sebuah kesalahan.

Militer kemudian mengkhususkan diri pada pertahanan Negara. Bahkan peran sebagai penjaga keamanan politik domestic juga ditinggalkan. Peran keamanan diberikan kepada polisi. Terminology Aoleh BRI pun diganti oleh TNI. Polisi dikeluarkan dari korps militer, tidak lagi tunduk pada Panglima Militer tetapi mandiri dan langsung dibawah presiden. Bukan hanya

politik yang ditinggalkan militer, tetapi juga peran keamanan.

Militer aktif juga dilarang untuk duduk dalam jabatan public. Tak ada lagi posisi Gubernur, duta besar, rector, menteri, atau apa saja diluar kemiliteran, yang boleh diduduki oleh tokoh militer aktif. Jika ingin dikaryakan, tokoh militer harus dipensiunkan dulu atau menjadi purnawirawan. Dengan sendirinya, militer yang sudah menjadi pension kembali menjadi penduduk sipil, bukan militer lagi. Mereka kan punya hak yang sama dengan warga sipil yang lain dan terbuka untu duduk dimana saja, bahkan untuk menjadi presiden sekalipun.

Perubahan mencolok lainnya adalah henggangnya militer dari lembaga legislative. Selama ini, militer diberikan toleransi untuk dusuk di MPR sampai 2009. Sebuah inisiatif yang sangt cemerlang dibuat pimpinan militer karena mereka sendiri menyetujui untuk henggang dari MPR secra lebih cepat. Mulai tahun 2004, tidak ada lagi perwakilan militer aktif di DPR bahkan MPR.

Militer Indonesia secara perlahan beralih menjadi tentara professional sebagaimana yang ada di Negara demokrasi barat. Namun perubahan ini dianggap masih rawan. Perubahan baru saja dimulai pada 1998, dan belum lagi berusia lima tahun. Secara kelembagaan, perubahan itu dianggap belum kukuh. Apalagi secara cultural, perubahan peran militer belum benar-benar mengakar sampai ke tulang sumsum. Pasal 19 ayat (1) draf UU militer itu dikhawatirkan menjadi “batu kerikil”

bagi perubahan bertahap ini. Pasal itu tidak hanya akan memperlambat perubahan yang sudah terjadi. Sebaliknya, pasal itu dikhawatirkan membalikkan segala yang baik-baik itu ke masa silam.

Pasal 19 ayat (1) itu lengkapnya berbunyi, “dalam keadaan mendesak dimana kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa terancam, Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian yang lebih besar”.

Dalam penjelasan, pasal itu lebih di detilkan. Yang dimaksud dengan kekuatan TNI dalam keadaan mendesak adalah tindakan awal dalam situasi, dimana keputusan harus segera diambil berdasarkan pertimbangan ruang, waktu dan sasaran, dengan perkiraan resiko yang dihadapi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik TNI. Yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kerugian moril ataupun materil yang disebabkan oleh pelanggaran wilayah/kedaulatan Negara, kerusuhan missal, bencana alam, dan lain-lain. Sedangkan pasal 19 (2) berbunyi “pengeraha kekuatan TNI sebagaimana yang dimaksud dengan pasal (1) harus dilaporkan kepada presiden paling lama dalam 1 x 24 jam”. Secara politik yang controversial dari pasal itu adalah otoritas Panglima TNI. Secara sepihak, tanpa persetujuan presiden terlebih dahulu, panglima dapat mengambil sebuah tindakan. Apalagi itu bukan sembarang tindakan.

Itu kewenangan pengerahan kekuatan TNI, yang

mau atau tidak mau pasti punya konsekuensi politik yang besar. Memang ada pelaporan kepada presiden. Tetapi pelaporan itu diberikan setelah tindakan yang dilakukan. Seandainya presiden tidak setuju, ketidaksetujuan presiden sudah terlambat, karena sudah diambil tindakan.

Tindakan panglima TNI itu memang tidak harus kudeta yang mengambil alih kekuasaan. Tindakan itu dapat saja, misalnya, penyerbuan markas GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang mengakibatkan terbunuhnya banyak pimpinan teras GAM. Akibatnya, konflik di Aceh semakin meletup. Semua proses damai yang disetujui presiden tidak lagi efektif.

Pasal 29 itu akan kembali mengantar TNI memasuki wilayah politik praktis. Tindakan panglima yang mengerahkan TNI itu pasti punya konsekuensi politik, dan dapat pula mengubah haluan politik nasional. Ini kekhawatiran paling nyata. Seluruh proses depolitisasi militer yang sudah dilakukan sejak 1998 dapat batal karena kehadiran pasal 19 UU TNI itu.

Ibarat kemarau yang sudah terjadi tahunan, kini menjadi basah kembali dan diguyur hujan sehari. Pasal 29 itu berfungsi sebagai “hujan sehari” bagi “kemarau panjang” depolitisasi militer secara bertahap.

Namun yang jauh lebih mendasar, Pasal 19 UU TNI itu berpotensi melanggar prinsip tertinggi TNI sendiri. Sudah tersosialisasi, bahwa kesetiaan tertinggi TNI

adalah para konstitusi Negara. Jika TNI “berpolitik”, itu adalah politik Negara yang selalu menjunjung prinsip konstitusi. Pasal 29 itu justru melanggar prinsip konstitusi, UUD 1945.

Pasal 10 UUD '45, menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 12 UUD '45 menyatakan presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara dalam undang-undang sendiri, khususnya Undang-undang Pertahanan Negara No. 3/2002, Pasal 14, menyatakan bahwa presiden bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI. Dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam, presiden harus meminta persetujuan DPR. Jika DPR tidak menyetujui, presiden harus menghentikan pengerahan pasukan.

Dalam konstitusi ataupun undang-undang yang sudah disahkan, sangat jelas, presiden yang punya wewenang mengerahkan TNI, bukan panglima TNI. Sangat jelas pula, definisi keadaan bahaya itu akan diatur dalam undang-undang. Panglima TNI tidak dapat secara sepihak merumuskannya sendiri. Sangat jelas pula, yang harus menyetujui pengerahan TNI itu tidak hanya presiden, tapi juga DPR. Secara legal formal, Pasal 19 draf UU TNI itu tidak hanya bertentangan dengan UU pertahanan No. 3/2002. Yang jauh lebih fundamental, ia melanggar pasal konstitusi. Sebaik apa pun motif TNI, dan sebagus apa pun hasil kerja pengerahan TNI itu

kelak, jika sandaran hukumnya bertentangan dengan konstitusi, maka pasal itu tidak dapat dibenarkan.

Pasal itu juga melanggar prinsip demokrasi, yang sudah disepakati menjadi format politik Indonesia sejak 1998. Demokrasi membedakan kerja politik, dan kerja militer. Kerja politik harus dilakukan oleh mereka yang dipilih rakyat melalui pemilu. Karena militer tidak dipilih rakyat, militer tidak boleh mengambil keputusan politik.

Pengerahan militer untuk solusi keadaan mendesak adalah kerja politik. Itu murni keputusan politik karena ia punya alasan dan konsekuensi politik. Dengan sendirinya, demokrasi menyerahkan pengerahan militer itu kepada pimpinan politik. Panglima militer bukan pimpinan politik, karena itu tidak dapat mengerahkan militer jika tidak diperintahkan oleh pimpinan politik.

Tentu saja kita percaya pimpinan TNI punya niat naik di Pasal 29 draf UU TNI itu. Kecintaan militer kepada NKRI tidak perlu diragukan. Sementara sejak era transisi, Timor Timur sudah lepas. Sipadan-Ligitan juga sudah lepas. Aceh terus membara ingin merdeka. Papua dapat pula mengikuti jejak Aceh. Lahir pula kehendak merdeka di Maluku. Sementara elite sipil dapat saja membuat keputusan yang salah, lambat atau tidak kompeten, yang menyebabkan semakin banyak wilayah Indonesia yang lepas.

Pasal 19 draf UU TNI mungkin saja lahir keprihatinan itu. Namun dalam demokrasi, yang berdaulat adalah

rakyat. Melalui pemilu rakyat sudah memilih pemimpin politiknya. Militer memang diharap mendukung pimpinan politik sejauh pimpinan itu tidak melanggar konstitusi. Yang memutuskan apakah pimpinan politik melanggar konstitusi juga bukan militer, tapi Mahkamah Konstitusi.

Dengan apresiasi kita yang tinggi atas niat baik TNI dibalik pasal 19 draf UU TNI itu, atas nama konstitusi, atas nama demokrasi, dan atas nama reformasi di tubuh TNI sendiri, pasal itu memang selayaknya dicabut. **

Rhoma Irama Versus Inul

Tidak diduga, kasus “pertengkaran” Rhoma Irama versus Inul meluas. Tak hanya komunitas music dangdut atau kesenian yang mem bahas nya. Kini kalangan LSM, intelektual bahkan politisi angkat bicara. “Pertengkaran” Rhoma Irama versus Inul menjadi perdebatan dua segmen komunitas yang semakin saling tidak menyukai. Mengelaborasi pertengkaran du “raja dan ratu” ini, membuat kita lebih paham sentiment dan atmosfer kesadaran cultural public luas era reformasi.

Rhoma Irama yang mewakili komunitas yang meras dalam hierarki high culture. Dalam soal kebudayaan, kesenian, khususnya music dangdut, Rhoma Irama dan pendukungnya mengidentifikasi diri mewakili kalangan “priyayi”. Ia sangat tahu mana seni yang tinggi dan mana yang murahan. Lalu “yang tinggi” berhak menegur dan marah kepada “yang murahan”.

Rhoma Irama sudah mersa berjasa sudah mengangkut kualitas music dangdut dari music selera rendah. Ia sudah memadukan lirik dan atmosfer music rock seperti deep purple ataupun Led Zeppelin ke dalam dangdut. Setelah Rhoma Irama, dangdut dimainkan pula oleh artis kelas tinggi. Tak hanya dipinggir jalan, dangdut bahkan sudah masuk ke TV, kafe, bahkan istana Negara.

Inul dianggap kembali menjatuhkan wibawa music dangdut ke tingkat yang rendah. Gara-gara Inul, mereka yang menikmati dangdut ini tidak lagi benar-benar peduli dengan kualitas musiknya, tetapi goyangan ngebor. Menurut pendukung Rhoma Irama, setelah datangnya Inul, yang populer kini di kalangan TV dan public luas adalah “goyangan pinggul”, bukan lagi musiknya.

Rhoma Irama pun merasa mewakili komunitas dengan selera moral dan kesantunan yang tinggi. Ia merasa tahu betul apa yang pantas dan tidak pantas, dan apa yang harus dipuji dan dilarang. Music dangdutnya sudah ia angkat fungsinya tidak hanya sebagai music dangdut belaka, tetapi juga punya misi berdakwah. Ajaran agama ia selipkan dalam bait-bait syair dangdut.

Inul dianggap menurunkan kembali kualitas music dangdut. Melalui Inul, dangdut bukan saja tidak lagi mengandung misi dakwah . Sebaliknya, kalangan itu menganggap sensualitas rendahan ikut disebarkan Inul. Tanpa penelitian, langsung saja dibuat tuduhan, goyangan Inul dapat menyebablan meningkatnya perkosaan.

Sebaliknya, Inul dengan pendukungnya mewakili segmen komunitas yang lain sama sekali. Bagi mereka, tidak ada seni yang tinggi dan seni yang rendah. Rhoma Irama pun tidak mewakili seni tinggi dan berkualitas. Banyak yang menyukai music Rhoma Irama, namun banyak pula yang tidak menyukainya. Hal yang sama terjadi pada music dan goyangan Inul.

Sebagaimana soal gagasan dan kepentingan, komunitas juga punya selera yang beragam. Semua selera music dan goyangan punya derajat yang sama, dan hak yang sama untuk tumbuh. Yang ada hanyalah tontonan yang disukai dan tidak disukai. Inul sudah membuktikan diri sebagai tontonan yang disukai. Teguran Rhoma Irama atas Inul dianggap hanyalah kepongahan dan arogansi raja dangdut yang sudah lewat masa jayanya, dan digeser oleh popularitas Inul.

Lebih jauh lagi komunitas Inul menolak hierarki moral dan kesantunan. Siapa yang bilang music Rhoma Irama dan pentas panggungnya lebih santun dan lebih bermoral dari pada Inul? Pasar punya ukurannya sendiri. Sejauh tidak melanggar hukum, semua atraksi panggung sha-sah saja. Biarkan konsumen yang menilainya. Harus ada liberalisasi dalam pertunjukan seni yang memisahkannya dengan segala ukuran moral dan kesantunan.

Rhoma Irama dan pendukungnya mungkin cukup kaget. Mereka tidak menyangka Inul mendapatkan

simpati yang luar biasa. Tak hanya para artis sinetron dan penyanyi yang mengecam Rhoma Irama dan memuji Inul. Para intelektual, bahkan tokoh politik secara tegas menegur Inul untuk terus dengan goyang ngebornya. Jika kita analisis pendukung Inul, ada tiga segmen dengan motivasi yang beragam. Umumnya mereka bukanlah penggemar Inul. Mereka mendukung Inul karena ada isu yang jauh lebih besar.

Pertama, era reformasi sudah membentuk kultur baru yang serba terbuka dan sangat anti dengan dominasi. Sebagian public yang mendukung Inul bukan karena Inulnya, juga bukan karena Rhoma Iramanya. Rhoma Irama mewakili otoritas yang terkesan ingin mendominasi ruang public. Seolah hanya mereka yang punya selera dan persepsi sama dengannya yang berhak muncul di ruang public.

Siapa pun yang berada dalam posisi Rhoma Irama akan dikecam. Sebaliknya, siapa pun yang berada dalam posisi Inul akan dibela. Public di era kebebasan dan keberagaman seperti sekarang semakin “muak” dengan otoritas yang ingin menyeragamkan atau mengesankan berkuasa penuh.

Jangankan Rhoma Irama, bahkan Negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun akan mendapatkan kecaman yang sama. Ketika AS sangat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Negara lain, apalagi kemudian menyerang secara militer, dengan segera AS mendapatkan kecaman yang sama. Mereka yang mengecam AS dan membela Irak, sebagaimana yang

mengecam Rhoma Irama dan membela Inul, mungkin juga tidak suka pada yang dibela. Namun solidaritas anti dominasi ini sudah sedemikian mengakar. Rhoma Irama pun menjadi korbannya.

Dominasi Rhoma Irama terhadap Inul bisa banyak bentuknya. Dominasi itu bisa berbentuk dominasi pihka yang merasa punya level spiritual yang tinggi kepada yang lebih rendah. Atau dominasi seniman yang sudah senior terhadap pendatang baru lugu. Bahkan dapat pula berbentuk dominasi laki-laki yang chauvinist yang ingin “melindungi syahwat wanita” terhadap perempuan yang punya persepsinya sendiri.

Kedua, era reformasi juga membuat public semaki lelah dengan jargon dan semboyan yang menggunakan alasan formalism agama atau moral. Bukan karena public tidak ingin bermoral. Namun untuk kasus Indonesia, sudah sedemikian sering jargon moral dan agama dijadikan tameng kemunafikan. Alasan moral dan agama untuk menghentikan “Inul” juga berbau kemunafikan yang sama.

Lihatlah negar Indonesia. Di Negara ini, jarhon keagamaannya luar biasa. Tapi semua tahu, Indonesia termasuk Negara paling korup di dunia. Lihtlah betapa sering dikumandangkan di sekolah agama ataupun rumah ibadah, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun lihat juga apa yang terjadi dengan Ciliwung, misalnya. Sungai itu menjadi salah satu sungai terkotor dan bak sampah terpanjang di dunia.

Lihat pula apa yang terjadi dengan aksi masa yang begitu sering menggunakan slogan moral dan agama. Banyak yang tahu, betapa dibalik aksi itu bermain politik uang. Agama sudah ditungangi sedemikian rupa untuk menutupi sesuatu yang semakin terang benderang, yaitu kemunafikan yang luar biasa.

Rhoma Irama juga menjadi korban sentiment public. Yang sudah “muak” terhadap segala alasan moral atau agama diruang public. Apa benar yang menegur (Rhoma Irama) secara moral posisinya lebih bersih dari pada yang ditegur (Inul)? Apa benar dalam substansi agama, yang memarahi (Rhoma Irama) lebih tulus ketimbang yang dimarahi (Inul)? Kelelahan public atas meluasnya kemunafikan dia tanah air, membuat teguran moral dan agama Rhoma Irama justru ditanggapi secara serius.

Ketiga, era reformasi belum lama. Pubilik sangat sensitive dengan posisi kaum yang tertindas. Siapapun yang tertindas, apalagi jika ia terkesan tidak berdaya dan menerima nasibnya, justru semakin dicintai dan didukung public. Sebelum ia tertindas public mungkin tidak memperhatikanapalagi mendukungnya. Namun setelah ada kasus penindasan, dukungan datang bertubi-tubi.

Ini juga dialami oleh Megawati dan PDI. Di era Soeharto, betapa public melihat tokoh dan partai ini ditindas. Melalui operasi kilat, Megawati dipaksa turun dari kekuasaannya di partai. Melalu oprasi yang juga rahasia, kantor resmi PDI di rebut. Tetapi itu semua justru melahirkan simpati. Ketika pemilu bebas

dilaksanakan untuk pertama kali setelah Orde Baru, suara simpati itu akhirnya membuat PDI-P menjadi partai terbesar. Disamping mendapat suara dari publiknya, banyak pula suara untuk Megawati datang dari aksi simpati.

Inul mengalami "berkah" yang sama. karena ditegur dan dikuliahi Rhoma Irama, Inul terkesan menjadi pihak yang ditindas dan tidak berdaya. Di tivi diperlihatkan betapa "berkuasanya" Rhoma Irama. Sementara Inul hanya terdiam dengan mata yang sembab karena menangis. Adegan itu dengan sendirinya memancing kemarahan kepada Rhoma Irama dan mengundang simpati yang luas kepada Inul. Akibat adegan itu, di berbagai daerah dukungan buat Inul membesar

Kasus Rhoma Irama versus Inul membuat kita sadar. Betapa reformasi mampu membuat public bebas mengungkapkan semua jenis ekspresinya. pihak yang merasa berdiri pada hirarki yang lebih tinggi dalam soal selera dan moral, apalagi jika pihak itu mengesankan sangat berkuasa engan me"larang" pihak lain yang dianggap "lebih rendah", segera ia menjadi The Public Enemy Number One. Suka atau tidak, inilah realitas yang ada. **

Wacana Mahkamah Konstitusi

Bayangkan situasi keruh seperti ini saat ini UU Mahkamah Konstitusi baru saja ditetapkan oleh DPR. Namu UU itu tidak kunjung ditanda tangani oleh presiden. Sungguh pun UU itu tetap sah, terkesan tidak mendapatkan dukungan politik yang penuh dari presiden. Pada hari yang sama, sekelompok masyarakat meminta MA untuk melakukan judicial review terhadap UU itu. Mereka mengklaim UU Mahkamah Konstitusi sudah menentang beberapa prinsip dasar UUD 1945.

Situasi diatas mungkin saja terjadi. Perbedaan pandangan antar wakil rakyat di DPR dan pemerintah mengenai RUU Mahkamah Konstitusi sudah tercium

public. Sementara kekecewaan para akademisi, intelektual, dan tokoh masyarakat atas respon DPR mengenai RUU Mahkamah Konstitusi semakin keras pula. DPR dan pemerintah terkesan meremehkan dan tidak serius membahas RUU itu. Padahal, sejak laam UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa paling lambat sebelum 17 agustus 2003, Mahkamah Konstitusi terbentuk. Sementara DPR dan pemerintah baru tampak sibuk membahasnya menjelang dead line.

Bagaimana mungkin lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi itu di bahas secara tergesa-gesa? Bukan sembarangan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang luar biasa. Ia diberi wewenang langsung oleh UUD 1945 dapat membatalkan UU, membatalkan hasil pemilu, membubarkan partai politik, menyatakan siapa yang bersalah dalam konflik lembaga Negara, serta ikut memecat presiden/ wakil presiden.

Pembahasan asal jadi dan asal memenuhi tuntutan UUD 1945 saja dapat menciptakan sebuah monster baru yang berbahaya, yang begitu berkuasa, dan dapat dengan mudah membulatlonjongan negeri ini. Mumpung RUU itu belum diketok palu, saatnya Mahkamah Konstitusi dijadikan bahan debat public yang keras. Segala aspek dari kewenangan ataupun susunan dan kedudukannya ataupun hukum acaranya perlu “ditelanjangi” sebulat- bulatnya.

Dalam system demokrasi yang sama, Mahkamah

Konstitusi dapat diberikan kerangka yang sama sekali berbeda. Aneka hukum acara ataupun prosedur bekerja Mahkamah Konstitusi dapat sama sekali berbeda jika diberikan kerangka yang berbeda. Setidaknya ada dua kerangka besar yang dapat digunakan untuk menyusun Mahkamah Konstitusi.

Kerangka pertama meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang populer, yang dapat diakses semua Negara. Katakanlah kerangka ini lebih menekankan pada aspek akses demokratis dan mengoperasikan Mahkamah Konstitusi. Kerangka kedua meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berjarak dengan public luas namun mampu bekerja secara fungsional menunjang terbentuknya pemerintahan yang demokratis, tetapi sekaligus stabil. Kerangka kedua itu, katakanlah lebih menekankan aspek governability atau “kemampuan bekerja” dari Mahkamah Konstitusi itu.

Kerangka demokratis itu akan menyusun Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa sehingga dapat diakses siapa saja. Semua warga Negara yang berkepentingan dapat mengadu secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pembatasan. Keuntungan kerangka ini, Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi rumah rakyat. Namun kerugiannya, Mahkamah Konstitusi ada kebanjiran masalah, rawan terhadap politisasi, dan mungkin sulit bekerja secara tenang.

Sebaliknya, kerangka governability akan membuat Mahkamah Konstitusi berjarak dengan public luas. Public tidak dapat mengakses langsung atau mengadu

kasusnya ke Mahkamah Konstitusi secara langsung. Antara public dan Mahkamah Konstitusi, berdiri sebuah lembaga independen yang bertugas memfilter semua pengaduan masyarakat. Kesannya, Mahkamah Konstitusi menjadi menara gading. Tetapi, lembaga ini lebih dapat bekerja dengan tenang dan semakin terhindar dari gegap gempita kepentingan politik praktis masyarakat luas.

Duakerangka itu memberikansolusi yang berbeda atas prosedur dan tata cara Mahkamah Konstitusi bekerja. Ambil contoh soal kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, misalnya. Kerangka demokratis cenderung membolehkan semua pihak mengajukan kasusnya langsung ke Mahkamah Konstitusi. Warga biasa, kelompok masyarakat atau partai politik dianggap sebagai pihak yang langsung diuntungkan ataupun dirugikan oleh kehadiran sebuah undang-undang. Pihak itu pula yang harus diberikan hak langsung membawa keberadaannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan kerangka governability membuat prosedur yang berbeda. Kerangka itu cenderung membuat filter satu pintu. Hanya lembaga tertentu yang boleh membawa kasus undang-undang untuk di - judicial review. Lembaga itu harus ditunjuk langsung oleh undang-undang. Lembaga itu hanya berisi mereka yang ahli hukum tata Negara atau ahli konstitusi dan netral secara politik.

Public luas selaku undang-undang tetap

diperbolehkan membawa kasusnya. Tetapi kasus itu tidak langsung disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kasus itu harus disampaikan kepada lembaga perantara untuk diseleksi terlebih dahulu. Melalui kepakaran dan obyektivitas anggotanya, lembaga itu hanya menyampaikan undang-undang yang memang layak di-review. Mahkamah Konstitusi dihindari dari kebanjiran masalah yang tidak perlu.

Dua kerangka itu juga akan memberikan wewenang yang berbeda soal lingkup judicial review. Kerangka demokratis cenderung memberikan Mahkamah Konstitusi hak untuk me-review semua undang-undang yang ada. Sejauh undang-undang itu masih berlaku. Tak hanya undang-undang di masa datang, tapi undang-undang di era orde baru, orde lama, bahkan era colonial dapat di review.

Sementara kerangka governability justru berbeda, kerangka itu justru tidak ingin Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang berlaku surut. Undang-undang masa silam biarlah hadir, dan toh dapat direvisi oleh DPR dan pemerintah sendiri. Mahkamah Konstitusi hanya di design untu menangani undang-undang yang dibuat setelah Mahkamah Konstitusi lahir. Kerja lembaga itu sedikit selektif, tetapi dapat efektif dan mampu menyelesaikan tuganya. Dua kerangka itu juga berbeda dalam menyusun aktivitas Mahkamah Konstitusi.

Kerangka demokratis akan membuat Mahkamah Konstitusi yang aktif. Selaku lembaga pengawal konstitusi, kerangka itu ingin Mahkamah Konstitusi

ingin bekerja aktif, mencari undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tanpa diminta sekalipun, Mahkamah Konstitusi dapat berinisiatif melakukan judicial review. Hanya dengan sikap aktif seperti itu, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi sejati.

Sebaliknya, kerangka governability justru membuat design berbeda. Kerangka itu tidak ingin Mahkamah Konstitusi berperan aktif selayaknya lembaga pengawas. Kerangka itu mendesign untuk pasif saja menerima pengaduan. Hanya menunggu, Mahkamah Konstitusi sudah akan kebanjiran masalah, apalagi jika Mahkamah Konstitusi aktif mencari. Dengan menunggu, Mahkamah Konstitusi juga tidak terjebak dalam politisasi kasus, Karen mendahulukan undang-undang tertentu, ketimbang yang lainnya.

Untuk kewenangan mengenai partai politik, dua kerangka di atas juga akan memberikan design Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Kerangka demokratis tidak akan pernah memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Sebagaimana dengan koran atau majalah, partai politik harus tetap dibiarkan tetap hidup. Jika ada yang salah atau perlu dihukum, pengurus partai itu yang dituntut. Sedangkan partai politik adalah barang mati, yang arah dan gerakannya ditentukan oleh orang per orang.

Sebaliknya kerangka governability bertindak lebih

keras. Kerangka itu memungkinkan partai untuk dibubarkan. Memang untuk kasus ini, pengurus dapat dibawa ke pengadilan jika bersalah. Namun untuk kasus khusus, terutama jika terjadi pelanggaran konstitusi, sebuah partai dapat dibubarkan. Misalnya, jika partai itu menjadi agen kekuatan asing, atau terlibat dalam gerakan separatism.

Siapa yang dapat mengajukan pembubaran partai atau sanksi untuk partai? Kerangka demokratis tentu saja cenderung memberikan akses seluas mungkin kepada masyarakat. Konsumen politik adalah orang per orang atau kelompok masyarakat. Yang merasakan kejahatan atau kebaikan partai politik adalah public luas. Setiap warga dengan sendirinya harus dibolehkan dalam kasus partainya kepada Mahkamah Konstitusi, tanpa perantara atau di filter.

Sebaliknya, kerangka governability membatasi akses kepada Mahkamah Konstitusi. Kembali kerangka itu akan menunjuk sebuah lembaga independen, yang terdiri atas pakar dan non partisan. Lembaga itu diberi wewenang menerima pengaduan masyarakat soal pengaduan politik. Lalu lembaga itu yang menyeleksi dan menyajikan kepada Mahkamah Konstitusi, kasus mana yang layak untuk diuji dan dielaborasi. Dengan cara itu, Mahkamah Konstitusi dianggap akan terhindar dari upaya politisasi dan kebanjiran pengaduan.

Dua kerangka itu masing-masing memiliki filsafat, pembenaran, dan pendukungnya sendiri-sendiri. Sebeleum wakil rakyat dan tokoh masyarakat sibuk

berpolemik atau ranting dan tugas detilnya mereka harus memilih dulu kerangka mana yang akan dikembangkan untuk menyusun Mahkamah Konstitusi sendiri. Saya sendiri beranggapan, untuk Negara yang masih labil dan rawan seperti Indonesia, kerangka governability tampaknya lebih pas. **

Setelah Bom Marriot Meledak

Setelah bom meledak di hotel Marriot, para pemimpin, politisi, pejuang hak asasi serta kalangan pers perlu sekali lagi berfikir jauh. Kebebasan memang tidak cukup jika tidak disertai oleh rasa aman. persoalannya, seberapa besar kita siap berkorban untuk mendapatkan rasa aman itu? Bersediakah kita memperoleh keamanan yang lebih besar dengan mengorbankan sedikit prinsip kebebasan dan hak asasi manusia, misalnya? Relakah kita menghidupkan internal security act model Malaysia, yang hanya secara terbatas diterapkan untuk isu terorisme?

Kasus bom Bali ataupun Marriot menunjukkan pada kita sedang menghadapi gerakan terorisme dengan modus operandi yang sangat nekat. Hampir dapat dipastikan bahwa pelaku bom itu ikut mati bersama dengan meledaknya bom yang dibawa. Namun masih terus dijajki, apakah kematian pelaku itu hanya kecelakaan

biasa? Misalnya, ada kesalahan tekhnis semata. Bom itu menggunakan handphone. Sangat mungkin hanphone bordering lebih cepat daripada yang dijadwalkan akibat kesalahannya.

Jika ini hanya kesalahan tekhnis, tentu kenekatan pelaku belum seberapa. Yang dikhawatirkan justru ketika kematian pelaku itu bukan karena kesalahan tekhnis, tapi bagian dari scenario. Misalnya, bom yang meledak adalah bagian ekspresi bom bunuh diri. Jika ini terjadi niscaya kita memasuki peperangan jenis baru.

Dengan bom bunuh diri, semakin lama, mobil tidak lagi dibutuhkan sebagai medium bom. Dengan berkembangnya tekhnologi bom, bahan itu cukup dililit di tubuh manusia. Sang pelaku memang siap mati. Dibanding mobil, pelaku individual dapat bergerak bebas menyelinap kepusat keramaian. Tanpa diduga, lalu badan sipelaku meletus bersama bom yang dibawanya.

Jika sudah begitu banyak aktivis bersedia mati, perang gerilya kota akan begitu sulitnya. Sang teroris ini tidak hanya menargetkan bangunan vital yang langsung berhubungan dengan pihak yang dianggap musuh. Tak jarang, pelaku hanya menargetkan publikasi dan meluasnya rasa takut. Dengan kenekatannya, ia siap meledakan diri dengan bom bunuh diri dimana saja, asal ada keramaian. Padahal mustahil semua keramaian dapat dijaga oleh pihak keamanan.

Disamping nekat dan militant, kelompok teroris itu secara mungkin berjaringan secara regional. Sejak lama kita mendengar tuduhan yang dibuat oleh pemerintah dan pers diluar negeri. Selama ini tuduhan tidak terlalu dipandang serius oleh public luas. Namun dengan seringnya meledaknya bom,tuduhan pihak asing itu benar-benar harus direspons.

Sejak lama Indonesia dianggap sebagai surge terorisme. Di Indonesia, misalnya, era kebangsaan seang mekar-mekarnya. Undang-undang yang sangat keras model ISA(internal security act) di Malaysia ataupun Singapura, pasti banyak ditentang oleh kampin hak asasi. Akibatnya, aturan kita memang lebih nyaman bagi pluralism politik, sekalugus nyaman pula bagi kelompok teroris.

Besarnya kepulauan dan wilayah laut Indonesia juga menyulitak pengawasan ihak keamana atas penyelundup. Kasus pemasokan gula , sembako dan barang illegal lainnya melalui aneka pulau sudah sering terdengar. Bagaimana jika yang dipasok itu adalah bahan peledak, sekaligus pelaria teroris dari Negara lain?

Karena mendapatkan control yang keras di Singapura dan Malaysia jaringan teroris menggunakan Indonesia sebagai tempat bersarang. Jika Indonesia hanya menjadi tempat singgah dan kosolidasi, itu sudah menjadi problem. Apalagi jika Indonesia dijadikan tempat untuk membuat peringatan yang berskala regional dan global. Yang diincar, misalnya, pmerintah asing. Tapi yan diledakan adalah symbol asing yang berada di wilayah

Indonesia.

Akibat bom yang meledak, pihak asing itu tidak terlalu dirugikan, Indonesia jauh lebih dirugikan. Disamping politik menjadi tidak stabil, rasa tidak aman dalam negeri juga meluas. Investor dan turis menjadi takut datang. Banyak juga korban dan property yang berasal dari Indonesia sendiri.

Jamaah Islamiyah acapkali disebut sebagai jaringan teroris regional yang kini paling kuat. Kita selaku public awam tidak tahu secara pasti kebenaran tuduhan itu. Namun dari kasus pengadilan yang ada baik di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, semakin terlihat adanya kesamaan tokoh dan modus operandi. Apalagi tertuduh di eberapa Negara tampak saling kenal. Jaringan regional menambah bobot gerakan teroris.

Ditambah lagi, jaringan ini secara sengaja ataupun tidak telah memainkan symbol agama besar, Islam. Nama yang digunakan adalah nama yang sebenarnya suci bagi umat Islam , Jamaah Islamiyah. Sebenarnya terrorisme itu tidak bersumber dari ajaran resmi agama Islam. Semua organisasi Islam besar seperti NU, dan Muhammadiyah menentang terrorisme. Bahkan organisasi yang dikenal sangat keras dengan symbol Islam seperti FPI, juga mengecam terrorisme.

Namun selepas dari kecaman itu, secara nyata, memang symbol agama Islam telah disalahgunakan. Symbol itu bahkan membrikan ikatan ideologis yang kuat dikalangan jaringan teroris. Lebih dari sekedar

pengikat, symbol keagamaan itu agaknya memberikan pula makna pembenaran dan kenekatan , termasuk bom bunuh diri itu. Semakin sulit terorisme ditekuk karena agama besar telah dimanipulasi oleh tokohnya.

Setelah bom meledak di hotel Mariot, sudah harus dipikirkan langkah preventif. Beberapa langkahantisipasi dapat dibuat dengan melihat kecenderungan kelompok terorime itu.

Pertama, kelompok teroris cenderung menargetkan pusat keramaian, terutama yang punya elemen onternasional. Mustahil pihak keamanan seperti polisi dapat mengawasi semua tempat keramaian itu di seluruh Indonesia. Namun pihak keamanan dapat menerapkan standard system keamanan minimal yang harus dimiliki oleh setiap kelompok security lokal.

Hotel, mall, restoran besar, gedung pemerintahan, kedutaan asing dan tempat hiburan yang banyak dihadiri oleh warga asing, diberikan perhatian khusus. Tempat itu hanya boleh beroperasi jika ada kelompok security swasta yang memenuhi kwalifikasi standar. Misalnya, ada tekhnologi dan pengecekan baik bagi orang dan mobil yang lalu lalang di tempat itu.

Hotel Marriot sebelum meledak sudah melalui pengecekan yang memadai. Mereka yang masuk hotel harus melalui pintu khusus dengan detector. Mobil yang masuk kerah parker pun sudah di cek. Yang dilupakan, jika ada mobil yang masuk kearea lobby , mobil itu b

Dimasa datang, semua kemungkinan penyusupan bom harus dihitung dan dicegah. Pemerintah bertindak hanya sebagai regulator dan inspector saja. Namun pemerintah akan ketat dan keras sekali kepada semua pihak yang tidak memenuhi system keamanan standar, agar tidak bisa disusupi oleh bom. Apa daya ini langkah preventif yang paling pasti dan sederhana.

Kedua, diupayakan agar bahan kimia dan segala hal untuk membuat bom semakin sulit diperoleh. Penjualan bahan kimia secara resmi meti lebih terkontrol. Misalnya, mesti ada kriteria siapa yang berhak membeli dan seberapa banyak. Ada laporan berkala bagi jual beli bahan kimia itu. Bahkan jika pembeli bahan itu dari lembaga resmi pemerintahan harus pula ada kontrolnya. Korupsi dan pengkhianatan di era kini mudah terjadi.

Yang paling sulit mungkin pengawasan wilayah Indonesia dari pemasok illegal. Laporan sementara dari Hotel Marriot, ditemukan baterai yang mungkin digunakan sebagai bagian bom. Baterai itu tidak dijual-belikan di Indonesia. Jika laporan itu benar, sekali menunjukkan betapa pasokan barang dari luar, baik legal ataupun illegal, dapat membuat Indonesia benar-benar menjadi surge bagi pembuat bom swasta.

Namun justru disini letak persoalannya. Pemasokan senjata buat GAM dari luar sudah sering kit dengar beritanya. Keahlian penyelundupan gula dari negeri lain juga sering tercium. Jika senjata dan gula dapat mudah dipasok, tentu peralatan dan bahan bom juga bernasib sama. Titik penyelendupan dari berbagai kepulauan

mesti mendapat perhatian ekstra.

Ketiga, yang penting untuk direnungkan adalah perangkat hukum yang mudah untuk menangkap teroris. Malaysia dan Singapura punya ISA (Internal Security Act). Indonesia memang sudah punya UU terorisme. Menteri Pertahanan Matori mengusulkan Indonesia untuk mengadopsi sejenis ISA itu. Dengan ISA, minimal kita memiliki perangkat yang lebih efektif untuk langkah pencegahan.

Ini tema berikutnya yang penting untuk dijadikan debat public. Bagaimanapun ISA itu pisau bermata dua. Ia dapat digunakan secara efektif mmenggulung jaringan terorisme. Namun ia dapat pula digunakan untuk memukul oposisi politik secara tidak fair. Mungkin ISA yang dibutuhkan Indonesia kini hanya boleh digunakan secara terbatas, khusus untuk isu terorisme. Diskusi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mematangkan rencana ISA itu. **

Setelah Hambali Ditangkap

Ibarat petinju, jaringan terorisme, khususnya di Asia Tenggara, sedang terhuyung-huyung diatas ring. Ditangkapnya Hambali ibarat upper cut telak yang membuat “sang petinju” jaringan terorisme itu KO (knock out). Persoalannya, pertarungan belum berakhir. Sang petinju dapat terus tersudut dan benar-benar KO ataupun kalah angka. Namun selalu pula terbuka kemungkinan sang petinju kembali recovery dan memberikan pukulan telak sekali atau dua kali lagi berupa ledakan bom berskala besar.

Agustus ini, politik Indonesia sangat ramai dengan isu terorisme. Aneka peristiwa yang berhubungan dengan terorisme datang silih berganti. Ibarat pertarungan tinju, pada Agustus ini, terjadi “jual beli” pukulan antara Pemerintah Indoensia dengan jaringan terorisme.

Pukulan Hook kiri yang sangat keras dimulai pada awal Agustus 2003. Saat itu Hotel Marriot meledak. Lebih dari sepuluh korban tewas. Dan ratusan luka-luka. Berita itu segera mengalami internasionalisasi. Disamping ada warga asing yang terbunuh, dipilihnya Hotel Marriot sebagai target buka sembarangan. Symbol Amerika Serikat dibalik hotel itu membuat aksi peledakan itu mempunyai gaung yang sangat luas. Sudah lama public internasional percaya, kepentingan AS diseluruh dunia menjadi incaran jaringan terorisme.

Ibarat pertarungan tinju, Pemerintah Indonesia sedikit terjerembab ke belakang terkena “hook kiri” melalui bom di Hotel Marriot itu. Namun pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian, giliran jaringan terorisme terkena “jab” yang sangat keras. Pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada Amrozy. Ia menjadi tokoh pertama Bom Bali yang divonis, dan yang pertama pula menjadi korban UU Terorisme Tahun 2003.

Memang Amrozy tersenyum simpul. Hukuman mati ia dengar sambil lalu, seenteng ketika ia ikut meledakan bom Bali. Namun jelas, pengadilan bom Bali sudah menghancurkan salah satu sindikat terorisme di Indonesia. Yang paling penting dari pengadilan bom Bali adalah tumbuhnya keyakinan dikalangan publik luas. Dengan pengadilan itu, public tahu dan mulai yakin memang ada jaringan terorisme itu, dan sangat penting untuk dibongkar.

Juga pada Agustus ini, pemerintah kembali

melancarkan kombinasi “jab” kearah jaringan terorisme. Kali ini adalah rencana revisi dan amandemen UU terorisme. Walau belum setahun berlaku, UU itu dianggap kurang member keleluasaan kepada pemerintah untuk mencegah aksi terorisme. Amandemen diharapkan lebih memberikan otoritas kepada aparat keamanan, terutama dalam laporan intelijen dan penangkapan. Terorisme memang diniatkan untuk digulung habis-habisan dan secepat-cepatnya.

Ibarat petinju, kembali jaringan terorisme terhuyung-huyung. Ia beruntung masih bisa bersandar di ring tinju sehingga belum jatuh KO. Ditangkapnya Hambali menjadi upper cut yang nyaris meng-KO sang petinju. Apa langkah selanjutnya yang perlu diambil pemerintah agar “pertarungan tinju” ini segera berakhir.

Dari empat peristiwa terror pada Agustus ini, ada satu isu yang benar-benar perlu dieksplorasi secara maksimal oleh pemerintah. Yaitu pematangan rencana amandemen UU Terorisme Tahun 2003. Diharapkan amandemen itu cepat selesai, tanpa kontroversi yang terlalu bertele-tele dimasyarakat. Itu tentu hanya mungkin terjadi jika amandemen cukup memperhatikan penyimpangan atas prinsip hak asasi, yang memang dibolehkan, jika ada alasan rasional yang sangat kuat.

Sedangkan soal Hambali, pemerintah RI tentu tidak perlu membuang waktu meminta Hambali diekstradisi ke Indonesia. Permintaan itu secara riil politik hampir

mustahil walau Hambali adalah warga Negara RI. Posisi Hambali terlalu penting bagi AS. Ia juga dikaitkan pada tragedi 11 September yang menyebabkan lebih dari tiga ribu penduduk tewas di AS dalam waktu sehari. Apalagi, AS merasa akan ada serangan susulan. Hambali menjadi tokoh kunci untuk “dikorek-korek”.

Cukuplah bagi Indonesia untuk mempunyai akses informasi. Karena sudah ada kesepakatan global memerangi terorisme, pemerintah AS tentu tetap terbuka untuk akses itu. Jika jaringan terorisme di Indonesia terbongkar berdasarkan informasi tambahan dari Hambali, tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia dan AS sendiri akan merasakan manfaatnya. Tuntutan akses informasi ke Hambali dari pemerintah Indonesia jauh lebih realistis.

Sedangkan mengenai pengadilan bom Bali, upaya hukum tengah memasuki tahap akhir. Hampir bisa dipastikan, semua tertuduh akan meminta banding. Dengan demikian makin lama lagi kita berurusan dengan pengadilan terorisme. Selama pengadilan itu berlangsung, mulai dari pengadilan negeri sampai kepada kasasi, bahkan grasi, selama itu pula mereka menjadi berita. Efek publikasi memang menjadi salah satu target dari terorisme.

Sedangkan Bom Hotel Marriot mulai pula memfokus kepada para pelaku. Indonesia sudah menunjukkan reputasi yang sangat baik dalam membongkar pelaku bom Bali. Keberhasilan serupa agaknya juga ditunjukkan dalam investigasi bom di Hotel Marriot. Bahkan

investigasi bom di Hotel Marriot sangat mungkin terbuka lebih cepat. Pelaku bom sudah teridentifikasi. Kapolri juga melaporkan sudah sepuluh tersangka ditangkap kerja selanjutnya yang lebih perlu perhatian memang masalah amandemen UU terorisme tahun 2003. Kali ini amandemen dan revisi harus dilakukan sekomprensif mungkin. Jangan sampai baru beberapa bulan disahkan, UU itu kembali diamandemen, dan kembali dimanademen lagi.

Satu argument penting mengapa UU Terorisme itu perlu diamandemen adalah isu migrasi terorisme. Semakin jelas, jaringan terorisme yang kini beroperasi adalah jaringan regional. Hambali adalah warga Negara Indonesia, tapi ia ditangkap di Thailand. Ada pula warga Indonesia, yang tertangkap di Filipina untuk kasus terorisme yang sama. Dr. Ashari adalah warga Negara Malaysia, tapi sedang dicari pemerintah Indonesia karena diduga ikut dalam bom Bali dan bom Marriott.

Jika jaringan itu bersifat ragional, migrasi teroris dari satu Negara ke Negara lain merupakan hal yang biasa. Berlaku hukum alam bahwa jaringan itu akan memilih tempat yang paling nyaman, yang paling lunak terhadap terorisme. Tempat itu, disamping dijadikan markas, sangat mungkin pula dijadikan wilayah untuk meledakan bom. Toh, misinya, misi internasional, yang akan sampai pula secara internasional.

Hukum yang berlaku didunia terorisme regional itu sama dengan hukum bisnis glonal. Capital akan pergi ke tempat yang tekanan buruhnya paling lunak, dan

upahnya semurah mungkin. Jika politik di Negara itu stabil, hukum alam yang akan memindahkan Kapital ke negeri itu.

Jika hukum di Indonesia jauh lebih lunak soal terorisme, dengan sendirinya ini akan menjadi insentif bagi teroris untuk migrasi ke Indonesia. Mengapa harus susah-susah tinggal di wilayah keras, jika di wilayah yang lunak mereka bisa mendapatkan perhatian internasional dengan “prestasi” bomnya.

Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, hukum di Indonesia terhadap terorisme memang lebih lunak. Di Singapura dan Malaysia berlaku ISA (Internal Security Act). Berdasarkan laporan intelijen belaka, pemerintah setempat dapat menangkap teroris. Sang teroris itu dapat ditahan sampai 60 hari. Bahkan jika perlu, menteri dalam negeri dapat menambah masa penahanan.

Sementara di Indonesia, UU terorisme lebih mengkomodasi prinsip hak asasi manusia. Penangkapan belum boleh dilakukan, misalnya, sebelum ada persetujuan dari hakim atau pengadilan. Polisi selaku pemeran utama keamanan juga baru disapih dari induknya ABRI. Ibarat burung, polisi baru dilepas dari sangkar dan kini harus survive dialam luar yang penuh badai.

Mustahil bagi Indonesia untuk memfotokopi ISA dari Malaysia atau Singapura, Pemerintah Indonesia, bahkan Matori Abdul Djalil sendiri memang tidak pula ingin

menghidupkan bulat-bulat prinsip ISA. Di Malaysia, misalnya, ISA dapat digunakan untuk memukul oposisi politik juga tanpa kekerasan yang sebenarnya sah.

Amandemen UU Terorisme tidak mengadopsi prinsip ISA, tapi mungkin akan memudahkan penangkapan, demi pencegahan terorisme. Misalnya, bukti awal intelijen tidak lagi diverifikasi oleh hakim, namun cukup oleh Kapolri saja. Kapolri yang bertanggung jawab jika ada kasus salah tangkap. Penangkapan dengan metode itu hanya boleh digunakan untuk terorisme, tidak untuk oposisi politik tanpa kekerasan.

Disamping itu, aparat militer juga lebih didayagunakan. Polisi tetap menjadi agen utama keamanan. Namun mungkin akan ada korps bersama polisi dan militer, khusus untuk menjaga keamanan dari serangan teroris. Koordinasi intelijen juga makin dikompakkan dibawah satu tangan.

Hambali memang sudah tertangkap. Ibarat petinju, jaringan terorisme kini sedang terhuyung-huyung diatas ring. Satu pulukan upper cut lagi sudah dapat membuat jaringan itu KO. Upper cut itu adalah kapabilitas yang agresif dari pihak keamanan, tentu dengan dukungan perangkat hukum yang memadai. **

Membelah Politik Papua

Untuk sementara, konflik di Papua berhenti. Dua kelompok yang bertikai sepakat untuk damai dengan ritus upacara adat. Deklarasi provinsi baru di Papua ditunda. Papua diputuskan berada dalam posisi status quo, posisi sebelum deklarasi provinsi baru. Masyarakat Papua sudah menyimpan kembali berbagai senjata, mulai dari parang sampai anak panah.

Namun pertarungan kebijakan atas Papua terus berjalan. Belum ada kesepakatan yang kuat bagaimana Papua harus dikelola, baik dikalangan pemerintah pusat, DPR ataupun politisi local di Papua sendiri. Pertarungan kebijakan atas Papua dinginkan dulu. Namun pada waktunya, pertarungan itu bangkit kembali, dan mungkin sekali lagi menimbulkan konflik horizontal di Papua.

Kubu pertama menginginkan Papua diberikan otonomi khusus, seperti yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua Tahun 2001. Tak hanya memiliki kewenangan yang luas, pemerintah daerah Papua juga difasilitasi oleh sebuah institusi MRP (Majelis Rakyat Papua). Institusi ini sejenis MPR ditingkat provinsi yang berisi para tokoh dan pemimpin adat. Seandainya memang Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa provinsi, MPR harus membahas dan menyetujuinya terlebih dahulu.

Kubu kedua menginginkan Papua dibagi menjadi tiga provinsi secepatnya. Kebijakan ini sepenuhnya setuju dan ingin mengkonkretkan UU No. 45 Tahun 1999. Wilayah Papua begitu luas. Dari segi teritori, Papua sendiri sudah menyita 55% dari seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi teknis administrative saja, Papua yang sangat luas itu memang layak dipecah menjadi beberapa provinsi.

Satu provinsi di Papua, apalagi ada otonomi khusus, ada institusi MRP justru dianggap dapat mengkonsolidasi aspirasi Papua merdeka. Sebaliknya, pemecahan Papua menjadi tiga provinsi sejak dini justru didapat memecah kekuatan nasionalisme local di Papua.

Pertarungan dua kubu ini menjadi rumit memang karena persoalan pemekaran provinsi di Papua tidak hanya menyangkut masalah teknis administrative saja. Pemecahan itu juga bukan sekedar menyangkut bagaimana mendistribusikan kekayaan local secara adil

diantara tiga provinsi. Yang membuat konflik di Papua membesar dan sulit karena adanya “ideology politik” dibalik isu pemekaran provinsi di Papua. Sebelum dipastika kebijakan Papua menjadi laten.

Berbeda dengan provinsi di Indonesia lainnya, Papua dan Aceh memang layak mendapatkan perhatian khusus. Hanya di dua daerah ini, gerakan separatisme meluas. Hanya di dua daerah ini pula lahir gerakan bersenjata, yang tidak kungjung ditaklukan sampai sekarang.

Reformasi di Indonesia memang telah membongkar politik sentralisme yang sangat otoriter dan powerfull. Sunguhpun banyak melanggar hak asasi manusia dan demokrasi, praktik politik otoriter ini selama ini mampu meredam gejolak politik local. Walau terdengar ada kerusuhan disana dan disini, dibawah pemerintahan otoriter yang tersentralisasi, tidak ada gerakan politik local yang memecah NKRI.

Karena reformasi, politik yang tersentralisir itu sudah musnah. Namun hasilnya, bukan hanya demokrasi dan kebebasan saja. Beralihnya sentralisme politik menjadi sistem demokratis dimana kekuasaan menyebar ke banyak tangan jelas hal yang positif. Namun bersama dengan hilangnya politik sentralisme itu, hilang pula kontrol pusat yang efektif terhadap daerah. Mengikuti gerak reformasi, politik local bergelora. Ditambah dengan kekisruhan pelaksanaan otonomi daerah, pergolakan daerah semakin menyulitkan pemerintah

di pusat. Berbeda dengan provinsi lain, Papua dan Aceh mengembangkan gerakan separtisme secara lebih terbuka.

Sebagaimana Aceh, karakter provinsi Papua membangkitkan nasionalisme local. Kehendak memisahkan diri sangat besar. Setidaknya, aspirasi merdeka itu didukung oleh beberapa variable penting.

Pertama, Papua adalah wilayah yang sangat kaya. Daerah seperti Freeport dikenal mengandung logam emas kelas dunia. Aktivistis dan pemimpin setempat sangat yakin, dengan modal kekayaan alamnya, Papua dapat sejahtera. Jika merdeka dan lepas dari Indonesia, mereka yakini pemerintah akan lebih cepat menyejahterakan rakyatnya. Tak ada lagi uang yang harus disetor ke pusat. Sebagaimana yang lazim dipraktikkan sebelumnya.

Kedua, pada saat yang sama, Papua juga terdiri dari etnis penduduk yang sangat berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia. Secara etnisa sangat mudah bagi Papua untuk merasa berjarak dengan Indonesia. Jarak fisik dan enis itu juga menjadi sumber yang laten untuk memisahkan diri.

Benar bahwa perbedaan etnis tidak dengan sendirinya melahirka separtisme. Kulit hitam yang minoritas di AS dapat melakukan rekonsiliasi dengan kulit putihnya dan sama-sama merasa warga AS. Kulit putih yang minoritas di Afsel juga dapat menjadi warga dengan hak social yang sama dengan mayoritas kulit

hitamnya. Kesatuan itu terjadi Karena mereka tinggal berbau, tidak terpencil di masing-masing pulau, dan tidak dikecewakan oleh pemerintahan yang didominasi ras tertentu. Kasus Papua sedikit berbeda dengan kasus AS dan Afsel.

Ketiga, Papua juga tidak tumbuh bersama Indonesia sejak awal. Ketika proklamasi dideklarasikan, provinsi lain sudah bergabung dengan Indonesia. Bahkan Aceh sejak awal sudah menjadi wilayah Indonesia. Pemimpin local si Aceh sejak awal ikut mendirikan pemerintahan RI. Sering diulang-ulang betapa pemimpin dan rakyat Aceh menyumbangkan pesawat udara kepada pemerintah pusat untuk segera memerintah.

Berbeda dengan provinsi lain, Papua bergabung dengan Indonesia di tahun enam puluhan. Sunguhpun Papua dan provinsi lain di Indonesia saat itu sama-sama di kuasai oleh kolonial Belanda, namun proses menjadi Indonesiannya berbeda, dalam waktu yang berbeda pula. Ketiadaan pengalaman bersmaa Indonesia sejak proklamasi juga menjadi kerikil dalam kebersamaan Papua dengan Indonesia dalam sebuah nation yang sama.

Keempat, yang membuat Papua perlu mendapatkan perhatian khusus dan laten separatisme adalah kemarahan atas kebijakan pemerintahan pusat. Di era Orde Baru, tokoh dan penduduk local merasa hanya dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Sunguhpun Freeport sangat kaya, namun yang menikmati hasilnya dianggap hanya penduduk Jawa dan para

transmigrannya. Sementara masyarakat Papua jauh tertinggal.

Sejak awal sampai sekarang, sentiment kemarahan atas pemerintah pusat dan orang Jawa sangat kental. Kemarahan dan ketidakpuasan itu adalah bensin bagi menyalanya gerakan separatisme. Mudah sekali public luas diprovokasi. Dengan sedikit mobilisasi dan doktrinasi, sentiment nasionalisme local menyala. Mereka membayangkan akan lahir Papua yang sangat peduli dengan rakyatnya jika kelak merdeka dari Indonesia.

Menghadapi potensi laten separatisme di Papua, memang pemerintah pusat mesti memberikan perhatian ekstra. Papua jangan terlambat ditangani seperti Aceh. Untuk kasus Aceh, pemerintah tidak bisa lain, kecuali angkat senjata demi menjaga keutuhan NKRI. Jalan dialog sudah terlambat dilakukan. GAM sudah terlanjur besar, terlanjur memiliki pemimpin yang kharismatik di Swedia.

NKRI di Aceh akhirnya ditegakkan melalui peluru. Operasi terpadu menjadi tidak terhindari untuk kondisi Aceh sekarang. Tapi jika saja Aceh ditangani lebih awal, mungkin senjata tidak perlu meletus secara massal. Keutuhan NKRI lebih mudah dijaga tanpa membangkitkan konflik horizontal itu. Karena terlambat, susah bagi pemerintah pusat untuk memecah belah kekuatan perlawanan GAM.

Papua belum separah Aceh. Di Papua memang sudah pula hadir OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagaimana GAM di Aceh. Namun belum ada pemimpin Papua yang berdiam diluar negeri, dan secara efektif meggerakkan perlawanan Papua melalui remote control.

Papua juga sudah mengalami internasionalisasi. Sudah pula lahir aneka kelompok lobi diluar negeri untuk memperjuangkan Papua Merdeka. Namun intensitas diplomasi Papua diluar sana belum sehebat GAM. Terlebih lagi diplomasi OPM belum sehebat Timtim sebelum merdeka.

Namun tanpa ditangani sejak dini, sentiment Papua merdeka akan terus mengeras. Kekuatan local Papua akan pula semakin terkonsolidasi. Oleh sebab itu, sejak awal sudah harus ada penanganan Papua, sehingga pemerintah pusat tidak perlu menggelar operasi terpadu seperti di Aceh. Makin awal Papua ditangani, makin Papua terhindar dari penumpasan militer.

Saat itu adalah sekarang. Kebijakan yang paling mungkin, yang kurang buruk dibandingkan lainnya, adalah pemecahan politik Papua melalui pemekaran wilayah. Tentu saja public Papua tidak perlu dipecah belah melalui konflik horizontal. Ongkos social konflik horizontal terlalu mahal dan tidak etis pula secara politik jika itu sengaja direkayasa. Namun kekuatan separatism dan sentiment merdeka itu memang mesti dipecah. Pemekaran Papua menjadi tiga provinsi membuat koordinasi elite Papua untuk berontak

bersama menjadi lebih sulit.

Singkat kata, jika NKRI yang dijadikan basis kebijakan pembelahan politik di Papua, bukan lagi pada kebijakan pemecahan Papua menjadi tiga provinsi. Kebijakan pembelahan dan pemekaran itu jelas dibutuhkan. Persoalannya kini lebih keteknis pengemasannya, marketingnya, PR-nya, agar resistensi di kalangan public di Papua sendiri atas pemekaran itu seminim mungkin. **

Seputar Reformasi Politik Tentara

Lima tahun sudah reformasi bergulir. Apa yang terjadi dengan politik tentara? Disamping persoalan korupsi, hubungan agama dan Negara, hubungan sipil dan militer adalah yang paling krusial dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Setelah lima tahun reformasi, bagaimana pemimpin tentara dan public luas memandang peran tentara sekarang dan masa datang?

Di bawah presiden, Panglima TNI adalah komando tertinggi tentara. Pikiran dan penjelasan TNI adalah acuan resmi perilaku tentara. Panglima TNI Jendral Endiartono Sutarto sudah memberikan sinyal yang sangat jelas. Sutarto menegaskan kembali komitmen tentara untuk tidak berpolitik serta melengkapkan

reformasi internal di tubuh TNI sendiri. Persoalannya, apakah tekad Sutarto akan mudah diwujudkan di dalam politik yang nyata?

Menurut Sutarto, TNI akan menjaga netralitasnya dalam politik. Dalam pemilu 2004, sekali lagi TNI tidak akan menggunakan haknya untuk memilih. Sudah puluhan tahun TNI tidak memilih dalam pemilu. Tak ada masalah jika pemilu kali ini sekali lagi TNI tidak akan memilih.

Dalam alam demokrasi, sebenarnya tentara dibolehkan punya hak pilih. Di Amerika Serikat misalnya, luas diketahui betapa tentara punya hubungan emosional yang tinggi dengan partai Republik. Dibandingkan dengan partai Demokrat, partai Republik lebih memperjuangkan anggaran militer yang tinggi, serta patriotis dan militeristik dalam politik luar negerinya.

Di Indonesia, partai politik juga memiliki nuansa dan perbedaan dalam platformnya. Ada partai yang lebih mungkin sesuai dengan “ideology” tentara, seperti komitmen yang kuat pada NKRI, Pancasila dan pluralism. Adapula partai politik yang menolak Pancasila dijadikan platform nasional. Namun TNI sudah membulatkan tekad ingin memilih partai apapun, walau hak itu dibolehkan dalam demokrasi modern.

Sutarto juga menegaskan sikapnya sebagai purnawirawan yang semakin populer sebagai calon presiden atau pun wakil presiden. Hubungan TNI sebagai lembaga dengan para senior yang sudah

purnawirawan sepenuhnya bersifat moral dan cultural belaka. Secara structural, TNI sudah tidak lagi memiliki ikatan komando dan instruksional. Sutarto menegaskan, TNI tidak akan ikut campur dalam politik para purnawirawan itu. Bahkan terhadap politisi sipil, Sutarto meminta agar TNI jangan ditarik-tarik lagi masuk dalam politik praktis.

Prinsip penting lainnya yang diungkapkan Sutarto adalah soal legislative. Tahun ini adalah tahun terakhir bagi TNI untuk memiliki wakilnya di parlemen. Sesungguhnya berdasarkan konsensus diawal reformasi, berdasarkan toleransi TNI masih memiliki wakilnya di palemen sampai tahun 2009. Sejak 2004, TNI memang sudah lagi duduk di DPR, namun masih di MPR. Inisiatif dari pimpinan tentara sendiri pada akhirnya membuat TNI keluar dari parlemen lima tahun lebih cepat.

Akankah kita memiliki tentara yang pelan-pelan menuju pola hubungan sipil-militer seperti di Negara barat? Ataukah untuk Indonesia, pola hubungan sipil-militer model Turki lebi ideal?di Turki, tentara kembali berpolitik jika prinsip Negara sekuler mulai dikhianati para politisi sipilnya.

Lima tahun reformasi, banyak hal yang sudah berubah dalam struktur kelembagaan TNI. Namun ada pula yang belum berubah., yang menyulitkan reformasi internal TNI sendiri.

Yang sudah berubah dalam kelembagaan TNI

memang punya efek yang signifikan. Sejak reformasi lima tahun lalu, doktrin Dwifungsi sangat fundamental bagi Orde Baru sudah ditinggalkan. Pelan tapi pasti, TNI tidak lagi mengurus secara langsung dan terlibat secara telanjang dalam persetujuan politik praktis. Sebagai gantinya tumbuh partai politik yang kini menjadi pemain dominan politik praktis.

Pelepasan peran TNI dari dunia politik memang tidak mudah. Berbagai koraban politik TNI dimasa lalu seolah bangkit secara serentak menuntut “keadilan”. Berbagai kasus kembali dibongkar, mulai dari kasus Tanjung Priok, sampat Tragedi Trisakti dan Semanggi.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi sedang dipersiapkan untuk menuntaskan aneka tragedy itu. Memang perlu dicari mekanisme win-win solution, yang menjaga persatuan, sehingga TNI juga merasa lebih nyaman untuk meninggalkan panggung politik praktis.

TNI sudah memisahkan secara tegas peran pertahanan dan keamanan. Polisi sebagai lembaga sudah dibuat berdiri sendiri. Dimasa Orde Baru Polisi menjadi mitra junior TNI. namun kini era reformasi, polisi bukan saja berdiri sejajar. Bahkan untuk masalah keamanan, Polisi memegang inisiatif. Peran TNI untuk keamanan tergantung atas permintaan polisi saja, hanya pada kesulitan yang tidak dapat dikendalikan polisi, seperti masalah teroris.

Pemisan peran TNI dan Polisi juga tidak semudah yang diinginkan. Alam banyak kasus terjadi saling

tembak antara satuan polisi dan tentara. Dengan berkuasa di “lahan” keamanan, banyak sekali “lahan” basah dilapangan, seperti control terhadap perjudian, narkoba, hiburan malam, yang mewakili wewenang polisi. Para “oknum” polisi mengambil “jatah” para para oknum tentara. Tentu saja perebutan lahan itu terjadi diantara sesama oknum, tidak secara kelembagaan polisi versus tentara. Namun acap kali pula sang oknum membawa-bawa satuannya dalam konfli itu.

Melalui waktu pemisahan polisi dan tentara juga akan menjadi tradisi yang diterima kedua belah pihak. Pelan-pelan profesionalisme dalam tugasakan menjadi acuan baru, bagi polisi maupun tentara. Apalagi panglima TNI Sutarto menegaskan bahwa peran TNI akan lebih difokuskan pada pertahanan saja. Melalui waktu, para oknum yang berkeberatan dengan tugas baru yang makin focus itu akan melemah dengan sendirinya.

Pembaruan penting lainnya dari lembaga tentara sejak reformasi adalah depolitisasi tentara aktif. Pimpinan atau kader tentara yang aktif tidak lagi di karyakan untuk menduduki jabatan sipil. Tak lagi dibolehkan tentara aktif menjadi gubernur, menteri, atau bupati. Puncak dari depolitisasi adalah lengsernya fraksi tentara dari DPR dan MPR pada 2004. Lengkaplah sudah reformasi internal dibidang politik TNI.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang tersisa. Dibidang ekonomi dan bisnis, tentara sebagai sebuah lembaga masih banyak yang aktif. Ini berangkat dari struktur APBN yang tidak membiayai kebutuhan

tentara sebagai lembaga secara penuh. dari semua kebutuhan ekonomi tentara sebagai lembaga, disinyalir APBN hanya memberikan dana kurang dari lima puluh persen dana yang dibutuhkan.

Akibatnya TNI sebagai lembaga harus mencari tambahan sendiri. Berkembang berbagai usaha tambahan itu, terutama untuk menambah kesejahteraan prajurit. Namun di alam kompleks dan sulit seperti sekarang, tidak semua ikhtiar dapat meningkatkan martabat dan kewibawaan tentara. Kasus transparansi Freeport, yang mengklaim memberikan “dana” atau “upeti” kepada TNI menjadi salah satu contoh saja.

Lima tahun reformasi, sisi ekonomi dan bisnis ini menjadi dimensi krusial dalam reformasi internal TNI. Sudah harus mulai dibuatkan rencana gradual dan sistematis agar kebutuhan tentara dipenuhi melalui APBN saja. Lalu tentara sebagai kelembagaan tidak perlu lagi bersusah payah terlibat di dunia bisnis agar tidak terjadi conflict of interest yang dapat mengurangi martabat dan kewibawaan TNI. Tak ada Negara yang kuat bila tentaranya kehilangan wibawa.

Masalah lain yang juga masih dihadapi TNI adalah perannya yang pas dalam menjaga konstitusi Negara. Memang benar itu menjadi tugas semua komponen bangsa untuk menjaga konstitusi Negara. Secara formal, Mahkamah Konstitusi sudah ditunjuk oleh konstitusi sendiri sebagai lembaga yang paling punya hak dan

wewenang untuk melindungi dan menafsir konstitusi.

Bagaimana konstitusi itu yang menjamin Negara modern dan plural justru berada dalam bahaya akibat maneuver politisi sipil?. Bahwa tentara sudah tidak lagi terlibat di dunia politik praktis itu memang sudah menjadi ideal. Namun bagaimana dengan situasi abnormal?

Dunia Barat tidak memiliki kompleksitas seperti hubungan agama dan Negara. Di dunia Barat agama relative sudah memisahkan dari kancah politik pemerintahan. Ratusan tahun lalu hubungan agama Kristen dan Katolik dengan dunia public telah melahirkan bentuk pemerintahan sekuler. Para pemimpin agama itu sendiri menyadari bahwa justru dengan pemerintahan sekuler itu pluralism agama dapat dilindungi.

Namun Indonesia, dan Negara yang mayoritasnya Muslim, punya kompleksitasnya sendiri. Untuk persoalan hubungan Negara dan agama di dunia Muslim, Turki menjadi contoh yang paling majudan konkret. Kemal Ataturk meletakkan fondasi Negara Turki modern setelah kejatuhan kerajaan Internasional Islam terakhir, Ottoman Empire.

Ataturk awalnya mencontoh dunia Barat sebagai masa depan Turki. Namun tidak dapat sepenuhnya menjadi Barat. Ia perlu melakukan sedikit penyimpangan. Sentiment Negara agama di Turki masih cukup kuat. Berbeda dengan dunia Barat, militer di Turki diberikan

tugas tambahan untuk mengawali sekulerisme pemerintahan.

Politisi sipil diberikan hak penuh untuk menata pemerintahan. Namun, sekali prinsip Negara sekuler dilanggar, tentara mengambil alih kekuasaan. Sudah tiga kali tentara memotong kekuasaan politisi sipil. Ini dilakukan semata-mata menjaga fondasi Negara Turki modern seperti yang diwariskan Atatürk.

Kasus Turki menjadi tambahan pekerjaan rumah bagi tentara Indonesia menghadapi lima tahu reformasi. Untuk menjaga Pancasila dan NKRI, mungkin memang tentara diberika ruang untuk berpolitik hanya jika para politisi sipil sudah membahayakan platform Pancasila dan NKRI, seperti di Turki. **

PKI, Militer, GAM, dan Nonpri

Ini suatu peristiwa yang sangat langka dan sekaligus sangat monumental. Keluarga dari para pelaku sejarah yang terlibat konflik politik mendalam di masa silam berkumpul. Ada wakil tentara (Mayjen Salamun), serta putri pahlawan revolusi Ahmad Yani (Amelia A Yani). Hadir pula putra Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit (Ilham Aidit), serta putra Marsekal Omar Dani (Perry Omar Dani).

Bersama mereka juga hadir putra Tokoh Utama DII/TII Kartosuwiryo (Sarkono Kartosuwiryo). Tak ketinggalan cucu sesepuh yang dihormati oleh Gerakan Aceh Merdeka Teungku Daud Beureuh (Ahmad Zahedi) juga hadir. Melengkapi pertemuan itu hadir

pula symbol dari komunitas Tionghoa Indonesia yang acapkali menjadi korban politik, Yap Hong Gie (putra Yap Thiam Hien).

Mereka bergabung dalam sebuah forum yang diberi nama FSAB (Forum Silahturahmi Anak Bangsa). Ikrar pun dinyatakan, bahwa mereka tak ingin generasi mendatang mewarisi pertikaian dan dendam politik masa lalu. “Kami berikrar menghargai kesetaraan diantara kami sesama warga Indonesia” Tak diduga, permusuhan politik yang sangat besar di masa silam, secara simbolis ingin diakhiri oleh keluarga pelaku dengan ikrar merah-putih.

Peristiwa di atas menjadi salah satu fundamen bagi rumah besar demokrasi Indonesia. Sebagaimana membangun rumah, demokrasi perlu dirakit secara bertahap melewati berbagai fondasi. Setelah fondasi kebebasan diletakkan melalui reformasi di tahun 1998, kini fondasi utama menuju rekonsiliasi anak bangsa secara simbolis sudah pula ditancapkan.

Sebelumnya, fondasi yang tak kalah penting sudah pula ditanamkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk pertama kali dalam sejarah, pasal dalam undang-undang dibatalkan secara legal dan demokratis oleh sebuah lembaga negara. Keputusan politik para wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dalam pemilu 1999, yang sudah disetujui pula oleh presiden, dibatalkan oleh para hakim konstitusi.

Hilang pula dasar hukum yang mendiskriminasikan

mantan PKI. Selama hampir empat puluh tahun, PKI menjadi momok dalam politik Indonesia. Mereka disingkirkan dari politik praktis. Bahkan keluarga mereka juga terkena doktrin bebas lingkungan. Setelah reformasi bergulir dan kebebasan menjadi nada dasar politik Indonesia, para aktivis dan mantan PKI tetap menjadi warga kelas dua. Mahkamah Konstitusi menutup momok itu secara legal, formal dan demokratis.

Dua peristiwa di atas adalah sisi yang sangat terang dari politik reformasi. Lima tahun pemilu reformasi yang pertama di tahun 1999 telah ditutup dengan adegan yang sangat fenomenal. Sebuah kebetulan yang sangat manis, sebelum pemilu kedua reformasi dimulai tanggal 11 Maret nanti, hanya beberapa hari lagi, dua peristiwa penting di atas terjadi. Reformasi menjadi potret yang bewarna-warni.

Sebelumnya, lima tahun setelah reformasi publik memang sangat kecewa. Pengangguran cukup tinggi, Korupsi terus terjadi. Partai politik hanya digunakan sebagai mesin pengumpul suara dalam pemilu, tapi tidak untuk pendidikan politik masyarakat.

Survei yang dilaksanakan LSI dan PPIM menunjukkan grafik kemarahan atas reformasi. Sejak tahun 1999 sampai November 2003, responden nasional dielaborasi dengan pertanyaan “apakah mereka merasa lebih baik hidup di era Orde Baru atau era Orde Reformasi.”

Di tahun 1999, yang menjawab lebih baik di era

reformasi cukup tinggi di atas 60%. Kini angka itu merosot di bawah 25%. Sebaliknya, yang merasa lebih baik di era Orde Baru di tahun 1999 hanya di bawah 20%. Kini angka ini menaik di atas 55%.

Potret buram atas reformasi juga disuarakan oleh lembaga internasional. TI (Transparency International) melakukan penilaian atas korupsi di dunia. Sejak reformasi, skor korupsi Indonesia tidak membaik. Indonesia masih di ranking bawah. Freedom House tak pula ketinggalan menilai skor kebebasan di Indonesia. Sejak reformasi, skor kebebasan kita juga masih Partly Free. Skor itu kalah jauh dibandingkan tetangga kita Filipinan, Thailand dan Korea Selatan yang sudah dikategorikan Free.

Dua peristiwa menjelang Pemilu 2004 menambah warna lain reformasi. Tak hanya ada warna buram, reformasi juga memberikan warna yang sangat cerah. Mustahil membayangkan akan ada penghapusan diskriminasi politik atas mantan PKI tanpa didahului oleh reformasi. Mustahil pula membayangkan terjadinya rekonsiliasi keluarga pelaku konflik bersejarah, tanpa didahului oleh reformasi.

Yang menarik, dua peristiwa itu dilakukan oleh komunitas di luar partai politik. Hal itu menegaskan pula bahwa kontributor bagi bangunan demokrasi di Indonesia tak hanya datang dari partai politik. Civil society dan aparat hukum sudah pula membuat fondamen bagi demokrasi yang kokoh.

Untuk kepentingan analisis, politik Indonesia dapat dibagi dalam lima segmen. Pertama adalah political society yang bertarung dalam pemerintahan. Mereka umumnya komunitas partai politik. Kedua adalah civil society yang berada di luar pemerintahan. Mereka menjadi gerakan masyarakat yang tidak bertarung untuk mengambil pos pemerintahan.

Ketiga adalah aparat hukum yang sama sekali dilarang untuk menjadi partisan dalam politik. Mereka adalah berbagai lembaga yang bertugas menjalankan hukum agar menjadi pedoman masyarakat. Keempat adalah economic society yang menjadi pelaku utama transaksi bisnis dan ekonomi masyarakat. Maju dan mundurnya perekonomian suatu negara sangat bergantung pada peran mereka. Kelima adalah birokrasi yang menjadi mesin utama pemerintahan. Kualitas dan kompetensi birokrasi sangat menentukan bagaimana kualitas dari eksekusi keputusan politik pemerintahan.

Political society sudah memberikan sumbangan sangat besar bagi reformasi, Karya utama mereka adalah amendemen UUD '45. Spirit baru konstitusi itu menjadi fondasi utama kehidupan politik Indonesia. Aparat hukum melalui Mahkamah Konstitusi sudah pula meletakkan sumbangan yang sangat berharga berupa penghapusan diskriminasi politik bagi mantan PKI.

Kini civil society juga sudah meletakkan fondasi lain yang bermakna. Para keluarga pelaku konflik di

masa silam ingin rekonsiliasi dan menutup dendam dan beban masa lalu.

Kini kita menunggu fondasi berbeda dari segmen yang lain, birokrasi. Segmen itu dapat meletakkan fondasi itu jika mereka membuat inovasi bagi eksekusi kebijakan pemerintah yang kompeten dan bersih. Praktek birokrasi dapat meminimalkan korupsi yang sudah menjadi “kanker” di negeri ini. Sementara itu, dari segmen economic society, kita harapkan terobosan untuk mengurangi pengangguran dan praktek bisnis yang inovatif.

Seberapa besar efek politik dari ikrar “rekonsiliasi” keluarga militer, PKI, DI/TII, GAM, dan Nonpri itu? Akankah dalam waktu cepat rekonsiliasi di Indonesia terjadi? Amerika Serikat butuh waktu seratus tahun untuk mengobati luka masyarakat akibat perang sipil antara bagian utara dan selatan. Afrika Selatan butuh lebih dari satu generasi untuk melupakan sama sekali praktek rasisme atas kulit hitam.

Dari dua negara itu ada tiga tahapan penting untuk mengobati trauma dan permusuhan politik masa silam. Pertama, diciptakan sistem hukum dan hak warga negara yang sederajat bagi semua pihak. Warga Amerika Serikat di selatan maupun utara memiliki hak yang sama menjadi pejabat publik. Hal yang sama terjadi di Afrika Selatan untuk kulit hitam dan putih. Kedua, adanya komitmen yang besar dari pimpinan

politik pihak yang bertikai untuk melupakan masa lalu. Pemimpin dari Amerika Serikat bagian selatan dan utara acap kali berkumpul di masa awalnya dan ingin memulai kehidupan yang baru. Di Afzel, Nelson Mandela dan De Klerk sendiri secara bersama, mewakili kulit hitam dan putih, membuat komitmen itu.

Ketiga, adanya partisipasi dalam pemerintahan. Setelah luka relatif terobati, pemerintahan juga terbuka bagi semua. Baik warga selatan maupun utara di Amerika Serikat kemudian menjadi menteri atau presiden. Hal yang sama berlaku di Afrika Selatan. Kulit putih maupun hitam duduk sebagai wakil presiden, menteri atau anggota kongres.

Rekonsiliasi di Indonesia jika ingin sukses juga harus melampaui tiga tahapan itu. Diskriminasi harus dihapuskan tidak hanya dalam politik legislatif, tapi juga dalam UU Pilpres (pemilu presiden). Konsekuensinya, semua pihak secara hukum diberikan hak dan perlakuan yang sama. UU Pilpres, misalnya, harus pula di-judicial review pada waktunya. Juga aturan lain yang masih mendiskriminasi, perlu direvisi.

Komitmen untuk rekonsiliasi memang sudah dimulai oleh keluarga pelaku. Namun komitmen itu harus terus digaungkan dan diulang-ulang oleh segmen masyarakat lain. Hasilnya, komitmen dari segelintir keluarga itu meluas mencakup populasi besar publik Indonesia.

Yang terpenting, pemerintahan harus pula mulai terbuka kepada semua warga negara. Jika sudah

waktunya, keluarga mantan PKI dapat pula menjadi menteri. Komunitas nonpri ada yang menjadi wakil presiden, misalnya. Partisipasi dalam pemerintahan itu tak perlu dipercepat atau diperlambat. Biarkan semua tahapan itu berjalan secara alami. Indonesia memang terlalu besar dan terlalu beharga untuk terus dihantui oleh pertikaian politik masa silam. **

**BAGIAN KEDUA
POLITIK MENJELANG
PEMILU LEGISLATIF**

Komplikasi Pemilihan Presiden

Sebelum RUU pemilihan presiden disahkan, harus dilakukan debat publik sekeras-kerasnya. Setidaknya, ada dua alasan mengapa prinsip dalam RUU itu benar-benar “diteropong di bawah mikroskop”.

Pertama, pemilihan presiden secara langsung adalah pengalaman yang sangat baru. Selama lebih lima puluh tahun merdeka, baru pertama kali kita akan memiliki presiden yang dipilih secara langsung. Segala hal yang baru dan pengalaman yang pertama, acapkali mengandung komplikasi dan biaya social. Sebagian komplikasi itu mungkin sudah dapat diraba secara jelas, sebagian lagi mungkin masih tersembunyi dan perlu dilakukan investigasi ekstra.

Jabatan presiden sangat penting dalam konstruksi politik Indonesia. Apalagi dimasa krisis. Seorang presiden akan dapat membuat krisis selesai atau justru

membuatnya lebih mendalam. Maksud RUU presiden sangat jelas ingin mendapatkan seorang presiden yang kuat. Dalam mekanisme politik dan desai kelembagaan, seorang presiden hasil RUU itu diharapkan akan lebih kuat daripada posisi presiden sebelumnya.

Namun jika aturan pemilihan yang baru itu tidak benar-benar dielaborasi, justru hasil sebaliknya akan terjadi. Presiden baru akan tidak dibiarkan bekerja secara penuh. Kritik, koreksi protes dan protes dan kemarahan terus terjadi, mulai dari proses pemilihan, dan terus berlanjut sampai terpilihnya presiden baru. Akar kemarahan itu bisa saja bersumber dari aturan pemilihan yang dianggap punya cacat serius.

Kedua, kita sudah punya pengalan buruk dengan semua presiden kita. Dari empat presiden terdahulu, keempatnya berakhir dengan buruk. Tiga presiden diturunkan ditengah jalan, sementara satu presiden ditolak pidato pertanggung jawabannya. Nasib Megawati belum pula kita ketahui. Gerakan protes yang meminta Megawati turun terus berlanjut.

Berdasarkan fakta itu sendiri, sudah dapat kita sadari mungkin ada yang salah dalam dunia perpolitikan kita. Sulitnya posisi presiden dalam konstruksi politik kita, jangan lagi diperparah oleh aturan main pemilihan presiden yang "cacat". Mumpung RUU pemilihan presiden itu belum di sahkan, segala upaya yang membuatnya "anti bocor" harus dilakukan.

Setidaknya ada satu prinsip dalam RUU yang benar-

benar harus diuji sebelum di sahkan. prinsip itu tidak lain adalah keharusan 20 persen. Sedang diperimbangkan dalam RUU, bahwa yang dapat mencalonkan presiden hanyalah partai atau gabungan partai yang perolehan kursinya di DPR minimal 20 persen. Ada tiga kritik atas pembatasan itu: kritik konstitusi, kritik politik, dan kritik tekhnis.

Hal yang lumrah jika pemikir dibalik RUU ingin presiden juga punya dukungan yang kuat di DPR. Angka minimal 20 persen bagi pencalonan presiden dibuat agar partai yang memback-up presiden minimal punya pengaruh minimal 20 persen. Dengan dukungan itu minimal presiden yang baru kelak dapat memulai negosiasi untuk menjinakan DPR.

Tanpa angka pembatas 20 persen, partai tang sangat kecil, bahkan mungkin yang tidak punya kursi di DPR, secara teoritis dapat saja punya calon presiden. Secara teoritis, calon presiden dari partai yang sangat kecil itu mungkin terpilih. Akibatnya, presiden baru akan sangat lemah sekali di DPR. Sangat mudah bagi mayoritas di DPR “mengobok-obok” presiden baru.

Persoalanya, pembatas 20 persen itu potensial melanggar konstitusi. Sebaik apapun motif dan hasil sebuah mekanisme pemlihan, jika secara telanjang ia dapat dibuktikan melanggar konstitusi, aturan mai itu sangat rentan. Hasil sebaliknya dapat terjadi. Atas nama konstitusi akan banyak lahir gerakan protes yang membuat presiden baru tidak nyaman.

Konstitusi jelas-jelas mengatur pemilihan presiden dalam pasal 6 Ayat 2. Bunyinya secara lengkap” pasangan presiden wakil presiden yang diusulkan oleh oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemiliha umum. Aturan itu tidak dapat diterjemahkan lain. Setiap partai politik peserta pemilu punya hak untuk memajukan calon presidennya.

Secara konstitusional, semua parati peserta pemilu punya pilihan. Partai itu boleh memajukan calon presiden oleh partainya sendiri, atau melalui gabungan partai. Apakah partai itu inginbersama-sama dengan partai lain untuk calon presiden yang sama, ataukah partai itu ingin maju sendirian, hal itu sepenuhnya menjadi hak partai peserta pemilu.

Namun pembatasan 20 persen dari RUU pemilihan presiden mengubah dan mengurangi hak konstitusional itu. Akibatnya tidak semua partai peserta pemilu punya hak mengajukan calon presiden. Hanya partai besar yang punya suara minimal 20 persen yang punya hak itu. Sedangkan partai kecil hanya boleh punya calon jika mereka bergabung bersama dan gabungan itu berkekuatan minimal 20 persen kursi DPR.

Dalam konstitusi, jika ada 40 partai peserta pemilu maka dimungkinkan aka nada 40 calon presiden. Namun dalam RUU, karena ada pembatasan 20 persen, paling banyak hanya aka nada 5 calon presiden. Dalam konstitusi, parati peserta pemilu yang perolehan kursi DPR dibawah 20 persen, bahkan tidak punya wakil

di DPR sama sekali, dibolehkan mengajukan calon presiden untuk dipertarungkan. Namun dalam RUU, hak partai kecil itu sudah dibuang.

Bisa dibayangkan, apa akibatnya jika prinsip pembatasan 20 persen disahkan? Walau pun tujuan pembatasan itu baik, namun berbagai elemen akan terus mempersoalkan keabsahan pemilihan presiden. Presiden baru dianggap hasil konspirasi DPR lama yang melanggar konstitusi. Atas nama konstitusi, semua pihak berhak "menurunkan kembali" presiden baru karena cacat konstitusi.

Secara politik, pembatasan 20 persen itu juga dapat dikritik. Apa kepentingannya dibuat angka 20 persen itu bagi pencalonan presiden? Dipahami calon presiden harus punya kaki yang kuat di DPR. Tetapi kekuatan 20 persen di DPR tidak banyak artinya.

Kita coba bayangkan scenario RUU pemilihan presiden itu. Jika pembatasan 20 persen diikuti, maka akan ada paling banyak lima paket calon presiden. Masing-masing calon presiden didukung oleh kekuatan partai yang memiliki 20 persen kursi di DPR. Lalu salah satu calon itu terpilih menjadi presiden.

Itu berarti partai yang mendukung presiden di DPR minimal 20 persen. Gabungan partai lainnya, yang menjadi saingan partai presiden menguasai 80 persen kursi di DPR. Oposisi terhadap presiden mendominasi DPR. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka voting

dilakukan. Dalam voting, prinsip yang berlaku hanyalah kuantitas suara. Dapat dipastikan, untuk setiap voting oposisi terhadap presiden yang menang. Lalu apa artinya pembatasan 20 persen itu, jika dalam kenyataannya posisi presiden tidak tertolong di DPR?

Pembatasan minimal 20 persen disamping jelas-jelas melanggar konstitusi, juga tidak memberikan jaminan dukungan politik atas presiden dari DPR, seperti yang diharapkan. Lain halnya jika angka pembatasan itu 50 persen. Angka 50 persen menjadi jaminan bahwa gabungan partai yang mencalonkan presiden itu benar-benar mendominasi parlemen. Tetapi jika minimal 50 persen ditetapkan, hanya akan muncul satu paket presiden saja. Tanpa saingan. Ini juga persoalan yang rumit.

Secara teknis, pembatasan 20 persen itu juga dapat dikritik keras. Dengan ada pembatasan, mau tak mau pemilihan presiden harus menunggu dulu hasil pemilihan anggota DPR. Karena dalam pemilihan presiden berlaku dua tahap, maka secara nasional kita akan melakukan pemilu tiga kali. Satu untuk pemilihan DPR, satu untuk pemilihan presiden tahap pertama, satu lagi untuk pemilihan presiden tahap kedua. Ketiga tahapan pemilu itu harus dilakukan dalam waktu yang berbeda, yang satu menunggu hasil yang lainnya.

Secara yekhnis, jelaslah ini menjadi pemilu yang sangat mahal. Padahal Negara dalam kondisi keuangan yang sangat sulit. Kini uang Negara dikuras untuk tiga tahap pemilihan, hanya karena ada konsepsi yang

salah tentang pembatasan presiden 20 persen. Belum lagi dihitung kemungkinan yang lebih buruk. Jika semua tahapan pemilu direncanakan seperti semula, sangat mungkin terjadi kekosongan kursi presiden, jabatan presiden lama sudah berakhir 20 oktober 2004. Namun karena rumitnya pemilihan presiden itu yang harus melalui tiga tahap itu, sampai 20 oktober 2004 belum juga terpilih presiden baru. kondisi ini akan melahirkan krisis politik masyarakat.

Bagaimana solusinya? Pembatasan 20 persen dalam RUU presiden itu adalah sumber penyakit. Sebaiknya RUU presiden mengikuti secara bulat saja aturan konstitusi. Bahwa semua partai yang sudah lolos pemilu dibolehkan memajukan calon presidennya sendiri. Toh tahap kedua pemilihan presiden kelak, hanya akan tersisa dua calon teratas.

Maka pemilu untuk presiden dan DPR dapat dilakukan serempak. Disamping biayanya jauh lebih murah, pemilu nasional yang hanya dua kali ini juga lebih menjamin untuk tidak menghasilkan kemungkinan vakumnya kursi presiden. Agar presiden baru punya dukungan kuat di DPR, itu adalah kerja politik praktis presiden baru untuk berkoalisi dengan kekuatan partai lain, sehingga juga dapat mendominasi DPR. **

Calon Presiden Golkar?

Akankah partai Golkar kembali memimpin pemerintahan? Itu terjadi jika calon presiden Golkar memenangkan pemilihan presiden secara langsung tahun 2004. Jika itu terealisasi, hanya lima tahun Golkar mundur dari kekuasaan Karen interupsi gerakan reformasi. Setelah momentum gerakan reformasi kembali menjadi rutin, selaku partai berpengalaman Golkar mengembangkan inovasi dan kembali merebut pemerintahan secara demokratis.

Kemungkinan itu niscaya direnungkan hamper oleh semua komunitas politik. Merespons pemilihan presiden secara langsung, hanya partai Golkar yang memberikan respons berbeda dan segar. Semua partai menjadi konservatif dan hanya mencalonkan ketua umumnya masing-masing. PDIP mencalonkan Megawati. PAN dengan Amien Rais. PPP hamper dapat dipastikan mencalonkan Hamzah Haz. Semnetara PBB

terus menggosok-gosok Yuzril Ihza Mahendra. Sikap PKB belum diketahui.

Bagi Golkar, ketua umum partai tidak harus menjadi calon presiden. Golkar membuka peluang bagi putra-putir terbaik bangsa untuk dicalonkan. Mereka yang berminat menjadi calon dipersilakan mempengaruhi pendukung Golkar di daerah kabupaten dan provinsi. Dukungan daerah akan mneyeleksi calon Golkar. Mekanisme perekrutan seperti itu akan memabantu Golkar mendapatkan calon presiden yang lolos uji coba public dan mengakar.

Secara tentatif dan resmi, Golkar kemudian menyebut nama calon yang sudah bergaung di daerah. Mereka adalah Yusuf Kalla, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Hamengku Buwono, Agum Gumelar, dan Wiranto. Calon presiden itu masih mungkin berubah. Daerah mungkin akan menambah jumlah mereka dan menyeleksinya.

Tak banyak intelektual dalam partai besar yang menyadari bahwa perubah sistem politik meminta juga respons yang berbeda. Amandemen konstitusi UUD 1945 sudah mengubah format politik Indonesia secara radikal. Khususnya soal pemilihan presiden, sistem kita tengah bergeser dari sistem yang kuasi parlementarian menuju sistem presidensial murni. Dua sistem besar itu memiliki aturan dan logika yang berbeda. Satu mekanisme partai yang dapat unggul

dalam sistem parlementarian, jika diterapkan dalam sistem presidensial akan terperosok.

Sistem parlementarian atau kuasi parlementarian diberlakukan di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Dalam sistem itu, hanya ada satu kali pemilu oleh rakyat banyak untuk memilih pemerintahan. Rakyat banyak hanya memilih anggota parlemen. Untuk konteks Indonesia saat itu, anggota parlemen adalah anggota DPR dan MPR. Anggota MPR itu yang kemudian memilih presiden. Terpilihnya seorang presiden tidak membutuhkan pemilihan umum tambahan diluar pemilihan anggota MPR/DPR.

Dengan sendirinya dalam mekanisme parlementarian itu, peran partai sangat besar. Hanya fraksi partai diparlemen yang dapat memajukan calon presiden.. sementara posisi ketua umum sangat penting untuk mempengaruhi siapa yang akan dimajukan fraksi sebagai calon. Berdasarkan konvensi parlementarian, calon presiden tidak lain dan tidak bukan adalah ketua umum partai itu sendiri.

Dalam Negara yang murni parlementarian, bahkan berlaku hokum otomatis. Tidak perlu lagi ada pemilihan di parlemen. Ketua umum partai terbesar dalam pemilihan anggota parlemen, secara otomatis menjadi perdana menteri. Jika tidak ada partai yang menang mutlak, partai itu harus koalisi dengan partai lain. Nemun tetap saja ketua umum partai yang terbesar diantara partai yang berkoalisi, secara otomatis menjadi perdana menteri.

Tetapi sistem presidensialisme yang dianut UUD 1945, pasca amandemen sudah memiliki atura dan logika yang berbeda. Pemilihan umum diselenggarakan dua kali. Satu untuk memilih anggota parlemen, satu lagi untuk memilih presiden. Partai A dapat saja dominan di parlemen. Tetapi calon presiden dari partai A itu sangat mungkin dikalahkan oleh calon presiden dari partai lainnya. Partai yang dominan di parlemen tidak otomatis juga mempunyai calon yang kemudian menjadi presiden.

Lebih dari itu, bukan pula ketua umum partai yang harus menjadi calon presiden partai itu. Lihatlah Amerika Serikat. Negara itu sudah ratusan tahun menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Umumnya yang dicalonkan oleh partai adalah kader terbaik. Kompetisi pencalonan dibuka seluas-luasnya. Yang kemudian terseleksi menjadi calon adalah mantan gubernur, mantan wakil presiden, atau jenderal purnawirawan, atau senator.

Sistem presidensial murni sudah mereduksi posisi dan status ketua umum partai. Dalam sistem presidensial, ketua umum partai hanyalah pejabat administratif partai. Ia menjadi fasilitator dan koordinator untuk memaksimalkan sumber daya partai. Siapa yang akan menjadi anggota parlemen atau presiden tidak lagi ditentukan oleh ketua umum partai.

Partai Golkar sangat jeli menangkap perubahan sistem akibat amandemen UUD 1945. Mungkin awalnya itu disebabkan oleh posisi ketua umum Golkar

itu sendiri yang sedang bermasalah secara hokum. Di tingkat pengadilan tinggi, Akbar Tandjung masih diputus bersalah. Belum diketahui, apakah ditingkat kasasi, Akbar Tandjung akan dibebaskan. Namun akan beresiko bagi masa depan partai jika mereka bertaruh menjagokan Ketua Umum Akbar Tandjung sebagai calon presiden Golkar.

Kasus Akbar Tandjung menjadi blessing in disguise bagi Golkar. Justru karena ketua umumnya bermasalah, terbuka kesempatan bagi Golkar untuk membuat inovasi. Penyaringan calon presiden Golkar dibuat sedemikian luas dan segar. Tidak hanya ketua umum, tidak hanya pengurus DPP, tidak hanya anggota partai, bahkan orang luar, dan siapa pun dapat menjadi calon presiden Golkar.

Akibatnya Golkar memiliki kesempatan mengembangkan mekanisme seleksi yang panjang dan keras. Jika proses panjang itu dilalui, dapat dipastikan pihak yang nantinya dicalonkan Golkar sebagai presiden sudah teruji secara publik. Sang calon dipaksa oleh mekanisme itu untuk lebih mengenal situasi di daerah untuk merebut simpati daerah itu. Sang tokoh juga berupaya untuk mengasah visi politik dan teknik komunikasi agar dapat berdebat dengan calon partai Golkar lain. Lebih dari itu, sang calon juga memiliki track record yang dapat dibanggakan, karena proses seleksi akan menelanjinginya.

Justru karena canggihnya mekanisme Golkar dalam menjaring presiden, banyak pihak menduga, dalam

waktu dekat ini Golkar kembali merebut pemerintahan secara legal dan demokratis.

Jika itu terjadi, sebagian ia disebabkan oleh kejernihan pemimpin Golkar. Sebagian lagi ia disebabkan oleh buruknya kepemimpinan partai yang lain yang masih terpaksa kepada ketua umumnya masing-masing untuk menjadi calon presiden.

Secara tentative, sudah disebutkan lima calon presiden dari Golkar. Antara lain, Hamengkubuwono, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar dan Wiranto. Kelima tokoh itu sudah menunjukkan leadershipnya masing-masing, dengan seluruh kekuatan dan kelemahannya.

Dari segi probabilitas, pencalonan Hamengku Buwono justru dapat menyulitkan posisinya sendiri. Ia adalah raja dan simbol budaya Jawa. Jika menjadi calon dan kemudian menjadi partisan, apalagi jika kelak dikalahkan, justru akan merusak semua pencapaian dan charisma yang sudah ia punyai. Lingkaran terdekatnya, apalagi yang masih kuat dipengaruhi mistisme sentiment kultur Jawa, akan berupaya membuat Hamengku Buwono diatas segala golongan. Menjadi calon presiden sebuah partai dianggap mengganggu.

Hal yang sama terjadi pada Wiranto, namun untuk alasan yang berbeda. Sebagai tokoh, tidak ada yang meragukan peran penting yang dimainkan Wiranto selama ia duduk dipemerintahan. Tetapi perkembangan

zaman tidak menguntungkan posisinya. Citranya terlalu kental dengan aroma Orde Baru, Soeharto, Timor Timur, kasus Trisakti dan Semanggi. Akan terlalu banyak klarifikasi yang dibutuhkan agar Wiranto dapat lolos dari kemarahan public atas masa silam.

Dari lima calon golkar diatas, tampaknya yang dapat terus melenggang adalah Jusuf Kalla, Agum Gumelar dan Susili Bambang Yudhoyono. Siapapun yang terpilih kelak antara tiga, posisi wakil presiden sangat penting. Calon wakil presiden dapat dipikirkan dari tokoh yang menambah jumlah segmen pemilih. Calon wakil presiden harus seorang kharismatik yang dapat menarik pemilih primordial.

Jangan tanggung-tanggung, Golkar sekali lagi dapat mencontoh pengalaman partai politik di Amerika Serikat, buatlah konvensi partai tingkat nasional, setelah terpilih calon presiden, serahkan konvensi partai mencari siapa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden. Ini yang dilakukan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Setelah dua atau tiga kali pemilihan presiden secara langsung, metode yang dikembangkan akan diikuti oleh partai lain. Dalam system presidensial murni, memang demikian logikanya. Ketua Umum partai semakin tidak penting. Yanpa diminta pun, seorang presiden tidak akan bersedia merangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai. Tanpa menjadi Ketua Umum partai, seorang politisi dapat menjadi presiden. **

Kuburan Kecil Partai

Tidak lama lagi politik indonesia akan menjadi kuburan bagi ratusan partai kecil. Partai yang sudah mendaftarkan diri untuk dilegalisasi berjumlah 200 partai. Jumlah itu akan terus bertambah mengikuti masa batas akhir pendaftaran partai politik untuk pemilu 2004.

Dapat dipastikan bahwa mayoritas partai politik akan berguguran di tengah jalan. Undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu yang sudah direvisi sangat ketat dan keras terhadap partai kecil. Untuk disahkan sebagai partai yang boleh ikut pemilu, diperlukan sejumlah kriteria yang sulit. Sebagaimana pada pemilu 1999, partai yang lolos ikut pemilu 2004, mungkin hanya 20-40 partai.

Sisanya, yang berjumlah ratusan partai kecil itu, akan lunta-lantung nasibnya. Sebagian besar mungkin langsung mati ditinggalkan pengurusnya. Karena kecewa partainya tidak lolos seleksi, seketika itu pula partai kecil dicampakkan. Sebagaimana mungkin terus dihidup-hidupka oleh pengurusnya. Apalagi jika partai itu memang didirikan dengan idealisme perjuangan yang tinggi. Tetapi tanpa bisa ikut pemilu, partai kecil itu berubah fungsinya hanya menjadi sejenis LSM. Tidak bisa lagi disebut sebagai partai politik yang riil, walau oleh pengurusnya masih diberi nama partai politik.

Sebagian partai kecil yang tidak lolos pemilu mungkin terus dikonsolidasikan oleh para pendirinya. Dengan harapan partai itu kelak dapat ikut pemilu 2009. Namun pemilu 2009 masih terlalu lama. Penantian yang panjang akan membuat partai politik itu kehilangan energy dan semangat. Partai itupun menjadi mati tidak mau, hidup pun ogah-ogahan.

Akankah setiap putaran pemilu politik nasional terus menjadi kuburan ratusan partai politik kecil? Sehatkah politik jika begitu banyak partai yang harus dikuburkan karena gagal seleksi sebagai peserta pemilu?

Di setiap Negara yang baru mengalami transisi demokrasi, mengalami masa yang disebut puber politik. Sebagaimana gadis remaja yang puber dan berangkat dewasa, banyak sekali gerak-geriknya yang berlebihan dan salah tingkah. Hal yang sama terjadi dalam skala

politik nasional. ledakan kebebasan demokrasi juga membuat sebagian elite politik menjadi puber, dan berlomba-lomba membuat partai politik. Seolah mereka tidak peduli membangun partai itu memerlukan basis massa yang cukup. Ideology yang tegas, dan sumber dana yang besar.

Tumbuh ratusan partai kecil di Indonesia adalah produk yang biasa dalam era puber politik. Sebagian elite yang mendirikan partai baru, adalah orang-orang serius. Mereka memang punya cita-cita dan pemikiran alternative. Abgi mereka tidak cukup lagi hanya bicara kalangan pers atau ditempat-tempat terbatas. Jika ingin mempengaruhi kebijakan public dan merebut pemerintahan., partai adalah kendaraan satu-satunya . begitu banyak orang serius dan pintar dengan leadership yang tinggi, menjadi pelopor partai baru.

Sebagian elite yang mendirikan partai baru, adalah tokoh partai lama mungkin saat itu partai mereka gagal menembus batas threshold 2 persen sehingga tidak boleh lagi menggunakan nama dan atribut partai lama. Kegagalan mereka saat ini tidak harus menjadi bukti kurangnya bakat dalam politik praktis. Kini mereka mencoba sekali lagi dengan pengalaman yang lebih matang.

Banyak pula yang membuat partai baru karena kekecewaan pada partai lama. mereka melihat partai yang dulu diperjuangkan sudah berubah etos perjuangannya. Setelah menjadi partai besar, partai lama itu tidak lagi

tajam platformnya. Bahkan oleh elite pimpinannya partai suah direduksi fungsinya haya untuk kekuasaan., dan permainan partai money politics. Mereka keluar ari partai lama, dan mendirikan partai baru dengan motif yang lebih murni an idealis.

Mungkin pula ia mendirikan partai baru karena tersingkir dalam pertarungan politi praktis didalam partai yang lama. Menjadi orang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidaklah nyaman. Mereka ingin menjadi orang yang pertama berkuasa di partai. Mumpung ada dalam aam kebebasan, mereka membelot dari partai lama, hengkang, mendirikan partai baru dan langsung menjadi pimpinan tertnggi

Banyak yang ingi mendirikan partai baru karena ilusi dan ingin melakukan petualangan politik. Mereka merasa diri orang besar, bagi mereka, dialam demokrasi, kebesaran pribadi belum lengkap jika tidak memimpin partai. Dalam ilusi dan halusinasinya, mereka merasa punya begitu banyak pengikut dan dikenal luas. Apa salahnya mencoba keberuntungan dengan memimpin partai baru?

Begitu banyak motivasi dibalik pendirian lebih dari 200 partai baru. Mulai dari motivasi idealsme, oportunist sampai kepada yang bersifat ilusi atau paranoia. Dialam demokrasi semua hal itu boleh-boleh saja. Namun banyak yang melupaka bahwa membangun partai politik itu, yang benar-benar berfungsi sebagai partai politik dalam pengertian modern, bukan main susahya. Tak heran jika ratusan partai politik baru itu seketika harus

dikubur karena gagal seleksi sebagai peserta pemilu.

Diseluruh dunia, tidak Negara demokrasi yang hidup dengabagi pendirian ratusan partai politik. Di Amerika Serikat, bahkan hanya hidup dua partai politik saja. Di eropa barat dan di wilayah lai dengan system multu partai yang tumbuh subur, tetap saja hanya ada tiga sampai lima partai yang hidup bagi Negara demokrasi yang stabil dan plural, mempunya enam partai politik besar saja sudah terlalu banyak.

Berbagai cara digunakan untuk memperkecil jumlah partai politik yang hadir di parlemen. Alam demokrasi tentu tidak akan menggunakan pelarangan secara langsung bagi pendirian partai politik. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara berbagai macam prosedur system pemilu. Secara sah, legal, dan demokratis, system pemilu menjadi alat rekayasa yang apat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang.

System distrik, misalnya, cenderung membuat partai hanya menjadi dua. Dalam siste distrik, teritori sebuah Negara dibagi menjadi sebuah distrik. Banyaknya jumlah distrik sebanyak jumlah anggota parlemen yang akan dipilih. Setiap distri akan dipilih satu wakil rakyat.

Dalam sistem distrik berlaku the winner takes all. Partai minoritas tidak akan pernah mendapatkan wakilnya, atau menggabungkan diri dengan partai

lain, agar menjadi mayoritas. Melalui waktu, akibatnya hanya tinggal dua partai besar. Partai kecil lainnya terkubur degan sendirinya.

Sistem proporsional juga memiliki mekanisme sendiri untuk mengubur partai kecil. Berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional memungkinkan partai kecil dan partai minoritas untuk mempunyai wakil di DPR. Di sebuah provisi, misalnya, partai yang hanya mendapat 1 persen suara sangat mungkin mendapatkan kursi jika dalam provinsi itu dibagikan lebih dari seratus kursi parlemen.

Namun sistem proporsional menghadang partai kecil dengan menerapkan sistem electoral threshold. Ada batas minimal persentasi yang harus dimiliki partai untuk dapat aktif di parlemen. Di Indonesia, misalnya, ditetapkan threshold 2 persen suara. Partai yang tidak mencapai kursi DPR sebanyak 2 persen tidak mempunyai fraksi. Itu sebabnya partai keadilan tidak memiliki fraksi dan bergabung dengan fraksi PAN menjadi Fraksi Reformasi. Lebih dari itu, partai yang tidak lolos threshold dilarang pula mengikuti pemilu selanjutnya. Melalui aturan threshold, Indonesia hanya memiliki enam partai : PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.

Aturan threshold di Indonesia tergolong sangat lunak. Di Turki misalnya persentasi threshold adalah 10 persen. Partai yang tidak mencapai 10 persen tidak diijinkan punya wakil di parlemen suara perolehan partai itu dinyatakan hangus., dan diambil alih oleh

partai lain yang lolos. Melalui threshold itu, partai kecil kembali terkubur secara demokratis.

Melihat perbandingan dunia lain, terkuburnya ratusan partai kecil dan partai baru adalah pemandangan yang lazim. Jika memang menginginkan demokrasi yang stabil, sebagaimana layaknya demokrasi dunia maju, memang tidak boleh ada banyak partai politik. Dua partai cukup. Seleksi dilakukan melalui system pemilu yang ketat. Seleksi itu sah adanya dan demokratis.

Di masa depan, Indonesia agaknya tidak akan punya partai politik yang mampu hidup lebih dari lima partai. Hal itu didasarkan kepada analisis segmen politik Indonesia. Untuk komunitas Islam, aka nada dua partai. Satu mewakili segmen NU, satu lagi mewakili segmen Muhammadiyah dan islam lainnya. Untuk kalangan kebangsaan dan Soekarno, juga akan ada satu partai. Untuk kalangan yang lebih populis, akan ada satu partai. Dan untuk kalangan liberal, hadir pula satu partai.

Pada 1955, NU diwakili oleh partai NU, komunitas Islam lainnya diwakili oleh Masyumi. Komunitas kebangsaan dan Soekarno diwakili oleh PNI. Yang populis diwakili oleh PKI. Yang liberal oleh PSI. pada 1999, NU diwakili oleh PKB. Sedangkan komunitas Islam lainnya diwakili oleh PAN, PPP, PBB, PK. Dan yang kebangsaan dan Soekarno diwakili oleh PDI-P, sebagian diambil juga oleh Golkar. Sedangkan yang populis tidak mempunyai

wakil karena komunisme dilarang.yang liberal juga belum terwakili karena reinkarnasi PSI belum tampak.

Pada 2004, 2009, 2009, apalagi 2013, lima partai yang mewakili lima segmen politik Indonesia akan lebih muncul. Diluar lima partai itu, semua akan terkubur. Memang jika hal yang biasa jika politik nasional menjadi kuburan ratusan partai politik. **

Satu Gus Dur, Dua PKB

Di seputar Mukernas PKB, terjadi tiga kejutan yang dating secara beruntun. Kejutan pertama, organ NU secara alklamasi tidk mencalonkan Gus Dur sebagai presiden untuk tahun 2004. Mereka meminta PKB mencalonkan Hasyim Muzadi. Bagi pihak luar, jelas ini sebuah langkah yang tidak biasa. Selama ini Gus Dur sudah berkembang menjadi legenda dan jimat kalangan NU. Dengan tidak dicalonkannya Gus dur, apakah ini berarti era politik di basis islam tradisonal. Islam itu sudah berakhir?

Kejutan pertam belum memudar, kemudian kembali muncul kejutan kedua. Kini kejutan itu berasal dari ruang pengadilan. Diluar dugaan, pengadilan memutuskan bahwa Matori Abdul Jalil adalah ketua Umum PKB yang sah sampai tahun 2005. Pemecatannya

dianggap gugur bersandar pada aturan yang ada

Padahal mungkin selama ini PKB Matori mungkin sudah dianggap hilang dari peredaran. Walaupun belum punya kekuatan hokum, public pilitik semakin menganggap bahwa PKB Alwi Shihab adalah PKB yang mempunyai basis massa riil. Melalui waktu, PKB Alwi Shihab akan disahkan oleh hokum sebagai satu-satunya PKB yang sah.keputusan pengadilan negeri yang memenangkan Matori kembali menghidupkan dua PKB dalam politik Indonesia. Ruang maneuver Matori dalam politik praktis semakin terbuka.

Belum selesai kejutan kedua, muncul lagi kejutan ketiga. Tiba-tiba, PKB Alwi Shihab mengumumkan Gus Dur sebagai satu-satunya calon presiden PKB. Memang ada calon lain. Namun calon itu disimpan dalam brankas saja. Padahal sebelumnya sudah berkembang wacana lain. Setidaknya sembilan tokoh akan diumumkan sebagai calon PKB. Memalui waktu, jumlah calon akan dikurangi menjadi lima, tiga, dan pada waktunya mengerucut menjadi satu calon presiden resmi PKB.

Tetapi, situasi mutakhir sgaknya mengubah scenario semula. Secara sigap, PKB Alwi Shihab memotong kompas, dan langsung keluar dengan calon tunggal, Gus Dur. Hanya jika UU Pemilihan Presiden menghalangi pencalonan Gus Dur, calon lain akan dimunculkan. Politik Indonesia kembali panas. Kini ada dua PKB. Celaknya, dua-duanya kini memperebutka Gus Dur.

Pertarungan internal antara dua PKB itu tidak hanya berlangsung di level hokum. Siapa diantara dua PKB itu yang akan disahkan oleh hokum ditingkat kasasi kelak. Perselisihan dua PKB itu juga tidak hanya memperebutkan Gus Dur sebagai mascot politik kalangan Islam tradisional. Yang jauh lebih fundamental, sedang terjadi pertarungan antara idealisme politik versus realisme politik di kalangan dua PKB itu.

Baik bagi PKB Matori ataupun Alwi Shihab, berdasarkan ukuran idealisme politiknya masing-masing, sebenarnya tidak lagi menganggap Gus Dur sebagai tokoh yang layak untuk dijadikan symbol moral atau symbol perjuangan politik. Namun bersandarkan pada realisme politik yang ada, Gus Dur punya pengikut yang riil. PKB yang mana akan didukung Gus Dur, PKB itulah yang akan menjadi besar. Tidak mengherankan jika du PKB itu nyaris memberikan apa saja untuk Gus Dur, agar Gus Dur memihak.

Sebenarnya, bagi PKB Matori, Gus Dur tidaklah ideal. Matori sendiri terlibat secara aktif dalam sidang istimewa MPR yang akhirnya memecat Gus Dur. Saat itu, PKB secara lembaga dan partai resmi menolak Sidang Istimewa MPR. Secara resmi, PKB membuat instruksi pula untuk melarang semua organ dan anggotanya untuk hadir dalam siding itu.

Tetapi, Matori mengambil sikapnya sendiri. Padahal saat itu, ia adalah ketua umum resmi PKB. Ia memberikan alasan bahwa kedatangannya dalam Sidang Istimewa bukan mewakili PKB, tetapi karena posisinya selaku

Wakil Ketua MPR. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar, ia harus mendahulukan lembaga MPR ketimbang partainya sendiri. Saat itu, posisi politik Matori dipuji oleh banyak kalangan. Secara jelas pula, Matori tidak ingin ikut karam bersama Gus Dur. Bagi Matori, Gus Dur segera menjadi mas silam.

Ketegasan sikap Matori semakin jelas lagi ketika terjadi pembentukan pemerintahan baru. Oleh Gus Dur dan pengikutnya, itu pemerintahan yang tidak sah. Seluruh proses pemecatan Gus Dur dan naiknya Megawati dianggap tidak lebih dari maneuver sebuah komplotan jahat politik. Bahkan untuk waktu yang lama, di kantor PKB versi Alwi Shihab tidak ada foto Megawati dan Hamzah Haz selaku Presdien dan Wakil Presiden RI yang baru.

Berbeda dengan respons Alwi Shihab dan kawan-kawan, Matori justru memperkuat pemerintahan yang baru. Ia duduk bahkan salah satu di posisi kunci selaku Menteri Pertahanan. Maju mundurnya pemerintahan yang baru, berhasil tidaknya cabinet Megawati juga sangat bergantung pada prestasi politik Matori dalam pemerintahan baru. Semakin jelas betapa Matori sudah menganggap Gus Dur sebagai fenomena masa silam.

Sikap Matori lebih konkret lagi ketika ia membawa masalah PKB ke pengadilan. Munculnya fenomena dua PKB tidak bisa diselesaikan lagi oleh aneka perundingan dan islah. Pengadilan menjadi pemberi suara akhir. Sekali lagi yang ia gugat di pengadilan, termasuk Gus Dur sendiri. Mantan guru politik itu oleh Matori

mau tidak mau harus ia gugat agar PKB versinya yang dianggap sah. Lengkap sudah konfrontasi Matori versus Gus Dur.

Tetapi, dalam politik praktis, tidak ada prinsip yang kaku dan lurus-lurus saja. Matori melihat kenyataan. Ternyata PKB versinya tidak kunjung mendapatkan sambutan dan simpatisan yang banyak. Anggota DPR PKB yang membela versinya tidak kunjung bertambah. Sementara posisi Gus Dur secara politik di kalangan NU tetap kuat.

Realism politik itu akhirnya mengalahkan idealism politik Matori. Sebagai politisi kawakan, Matori mendahului Alwi Shihab dalam mencalonkan kembali Gus Dur sebagai presiden. Bahkan ketika PKB Alwi Shihab masih ragu-ragu mencalonkan Gus Dur, secara tegas Matori mengatakan Gus Dur adalah satu-satunya calon presiden PKB verinya. Ketika pengadilan negeri memenangkan Matori, dengan tegas pula Matori mengatakan posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB sudah dipulihkan kembali.

Pada mulanya, Gus Dur juga sudah tidak lagi menjadi symbol moral yang ingin “dijual” oleh PKB Alwi Shihab. Bahkan oleh NU sendiri, Gus Dur cenderung akan dihormati sebagai sesepuh saja, tetapi tidak lagi sebagai wakil yang layak “dijual” keluar. NU mulai berpaling kepada tokoh alternative yang didukung banyak pihak luar, Hasyim Muzadi. Apalagi terdengar kabar pula

bahwa PDI-P dan Golkar mulai melirik Hasyim Muzadi, setidaknya untuk calon wakil presiden.

Ketika NU tidak lagi mencalonkan Gus Dur, tetapi Hasyim Muzadi, banyak pihak yang mngerti walaupun terkejut. Mungkin saatnya NU memang mencari “jimat” yang lain diluar Gus Dur. Bahkan warga NU dan pimpinan PKB Alwi Shihab banyak pula yang mulai terang-terangan. Dengan bercanda, mereka mengatakan bahwa tidak mampu melawan Gus Dur. Tetapi mereka berharap dapat menggunakan UU Pemilihan Presiden agar Gus Dur didiskualifikasi sebagai calon presiden.

Banyak pula pemimpin di PKB Alwi Shihab yang bersikap realistis. Bagaimanapun PKB adalah partai besar, namun sulit untuk menjadi yang terbesar. Mampu bertahan sebagai partai keempat saja, seperti pada1999, sudah merupakan prestasi yang besar. Persaingan politik bertambah keras. Banyak pula muncul partai baru yang tidak kalah mempesona.

Dalam hitungan politik, mungkin lebih baik jika PKB Alwi Shihab mengembangkan calon wakil presiden saja. Atau calon ketua DPR saja, tetapi mendukung pasangan presiden dan wakil presiden partai lain. Kompensasi yang diharapkan PKB Alwi Shihab adalah beberapa kursi kementerian. Jika ini yang dijadikan scenario politik, dengan sendirinya, Gus Dur memang sudah harus dilupakan. Mustahil bagi Gus Dur nersedia menjadi apa pun selain presiden.

Namun manuver Matori ternyata sangat mengganggu

PKB Alwi Shihab. Jika mereka tidak memberikan konsensi yang membuat senag Gus Dur, bisa jadi Gus Dur beralih kembali mendukung PKB Matori. Jelas itu kerugian yang luar biasa. Basis massa di NU yang fanatic kepada Gusdur, akan segera beralih ke Matori. Sementara untuk posisi hokum di pengadilan, belum tentu pula PKB Alwi Shihab dimenangkan.

Apa daya demi sebuah realisme politik, Gus Dur harus kembali direbut. Mukernas PKB akhirnya terpaksa membuat keputusan mengejutkan. Gus Dur kembali diusung sebagai calon utama presiden PKB versi Alwi Shihab. Lengkaplah sudah, realisme politik mengalahkan idealism politik.

Memang tidak ada yang abadi dalam politik. Selalu terbuka kemungkinan, posisi dua PKB itu terhadap Gus Dur kembali berubah. Jika pengadilan sudah mempunyai keputusan tetap, dan anggota legislatif sudah dipilih, sangat mungkin, baik pihka Matori ataupun Alwi Shihab, dua-duanya meninggalkan Gus Dur kembali. Saat itu, membela Gus Dur mungkin dipandang tidak lagi menguntungkan bagi posisi partai.

Politik di Indonesia selamanya akan tidak stabil jika pertimbangan realisme politik jangka pendek selalu mengalahkan komitmen dan idealisme jangka panjang. Inilah yang menjadi salah satu problem tersulit politik Indonesia di era transisi. **

Pemerintahan Tiga Partai

Menjelang pemilu 2004, politik Indonesia akan dipenuhi dengan makin banyak politisi yang berwatak politikus ketimbang politisi yang berwatak political designer. Politisi umumnya berpikir secara mikro politik. Yang ia pentingkan agar bagaimana dirinya terpilih kembali. Paling jauh ia berfikir agar bagaimana partainya menang. Tak ada yang salah dengan cara berfikir itu. Diseluruh dunia, dan disemua Negara demokrasi, memang demikianlah cara berfikir politikus. Horizon mereka bersigat jangka pendek dan self-interest.

Sementara itu orang political designer lebih berfikir dalam kerangka politik makro. Sebagai politisi tentu saja ia masih ingin terpilih kembali atau partainya menang pemilu. Namun ia juga dipenuhi oleh obsesi

lebih jauh mengenai kondisi makropolitik negaranya. Buat apa menang pemilu atau terplih kembali, misalnya, jika kondisi politik nasional tengah ambruk? Kerangka berfikirnya lebih menyangkut jangka panjang. Manfaat yang ia capai lebih untuk kepentingan luas, melalui partainya sendiri, atau kelompok partisannya sendiri.

Indonesia membutuhkan dua-duanya. Politisi dengan watak politikus sangat dibutuhkan agar dinamika partai dapat terus bergerak. Seperti yang dikatakan Adam Smith, melalui invisible hand, umumnya self interest dan cara berfikir jangka panjang dapat mengontrol dan meminimalisasi. Hasilnya, saling control itu membuat manfaat bagi public luas. Contohnya jika masing-masing sebuah unit usaha ingin menang sendiri, ia akan membuat kualitas terbaik dengan harga murah. Walaupun motifnya hanya cari untung, untuk dirinya sendiri, namun public luas juga diuntungkan dengan harga murah dan kualitas bagus.

Sementara politisi dengan corak political designer juga dibutuhkan untuk melengkapi perilaku politikus. Political designer lebih bertarung untuk lapangan politik makro. Ia misalnya, juga akan memikirkan bagaimana agar bagaimana demokrasi di Indonesia stabil. Dengan demikian, dalam pemilu 2014 nanti, ia juga akan berfikir bagaimana Indonesia mampu melewati transisi demokrasi yang sangat rawan.

Saya membayangkan seorang political designer yang

professional. Apa yang ia persiapkan untuk Indonesia pasca 2014? Berdasarkan pengalaman transisi dinegara lain, konsolidasi memerlukan waktu empat sampai lima kali pemilu. Diperlukan 20-25 tahun agar demokrasi mengalami pelembagaan dan mengakar dalam kultur politik.

Mengubah undang-undang dari yang propolitik otoriter menuju propolitik demokratis dapat dilakuka secara cepat. Jika DPR sepakat hanya bersidang beberapa kali, undang-undang yang demokratis itu apat di buat. Namun mengubah prilaku politik yang pro kepada prinsip demokrasi perlu waktu yang lebih lama. Perlu waktu sekitar 25 tahun agar umumnya elite yang berkuasa menerima prinsip demokrasi sebagai satu-satunya aturan main mereka tidak lagi mencari aturan main lain. Seperti Negara agama, atau system coba-coba lainnya.

Tetapi pula dibutuhkan satu syarat. Selama 20-25 tahun itu, politik di era transisi sangat stabil. Jika politik gaduh dan pemerintahan turun naik dalam tempo yang sangat cepat, transisi demokrasi dapat gagal sama sekali. Tak banyak yang apat dilakukan jika politik Indonesia instabil.

Seorang political designer akan memutar otaknya secara cepat. Apa yang dapat membuat politik Indonesia stabil dalam jangka waktu 20-25 tahun, jangka waktu yang dibutuhkan dalam era transisi?salah satu jawabannya, Indonesia diperintah oleh rezim yang sama. Selama dua puluh atau dua puluh lima tahun,

tidak terjadi perubahan platform ekonomi atau politik yang radikal.

Bayangkan dibawah ini. Jika setiap lima tahun, Indonesia diperintah oleh rezim yang berbeda, maka pelembagaan politik dan ekonomi nyaris tidak terjadi. Misalnya, lima tahun pertama, rezim mengatur ekonomi subsidi. Lima tahun berikutnya kembali ekonomi subsidi. Dan lima tahun berikutnya, ekonomi pasar kembali. Selama dua puluh lima tahun itubaik ekonomi pasar atau pun ekonomi subsidi tidak akan terjadi.

Agar ekonomi subsidi atau ekonomi pasar melembaga, selama dua puluh lima tahun, paradigm itu harus memerintah tanpa diinterupsi.

Jika rezim yang sma harus memerintah Indonesia selama 25 tahun, melalui pemilu, rezim apakah itu? Dari partai mana pula rezim itu paling mungkin berasal? Sudah pasti rezim yang dimaksud bukanlah pemerintahan satu partai. Di era multi partai seperti sekarang, partai terbesar sulit untuk menang dan meraih lebih dari 35 persen suara. Rezim itu hanya mungkin berasal dari gabungan dua atau tiga partai, yang sepakat untuk sama-sama memerintah, power sharing selama 25 tahun.

Jika tiga partai, partai mana yang mungkin? Ada beberapa criteria. Pertama, gabungan dua atau tiga partai itu harus mendominasi politik Indonesia selama 25 tahun. Tiga partai itu haruslah partai besar. Kedua,

tiga partai itu mewakili segmen terbesar politik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada segmen penting yang besar yang tidak terwakili. Secara riil tiga partai itu sudah menggambarkan aliran politik nasionalis dan Islam. Ketiga, partai itu memiliki platform yang kurang lebih sama sehingga kesepakatan mendasar yang menjadi kerangka bersama dapat disepakati dan dihayati.

Untuk Indonesia, platform bersama itu cukup dua hal. Kesepakatan tentang Pancasila sebagai ideology bersama. Dengan menyebut Pancasila, secara eksplisit berarti tiga partai ini menolak Negara agama dan menolak Piagam Jakarta sekaligus,

Kesepakatan lainnya mengenai prinsip NKRI. Ketiga partai sepakata tidak akan pernah melepas satu wilayah Indonesia mana pun. Tak pernah pula ada tawaran referendum bagi wilayah mana pun yang bergolak. Dengan criteria diatas, tiga partai dimana Indonesia saat ini yang memenuhi syarat? Partai yang dapat dipisahkan kedalam dua kelompok. Pertama, konfederasi PDIP-Golkar dan PKB. Kedua, konfederasi PAN, dan aneka partai lainnya. Jika konfederasi itu dapat dibentuk niscaya politik Indonesia akan lebih kuat dan konfederasi itu dapat berkuasa dua puluh lima tahun tanpa interupsi.

Malaysia dapat dijadikan contoh. Di Malaysia ada Barisan Nasional yang merupakan konfederasi tiga partai. Tak hanya partai kaum Melayu, tapi juga partai

etnis Cina dan India yang bergabung disana. Walau di Malaysia berlaku pemilu dan multipartai, Barisan Nasional sudah memerintah Malaysia selama lebih dari 25 tahun tanpa interupsi.

Katakanlah seandainya pemerintahan tiga partai dapat dibentuk di Indonesia yang menyerupai Barisan Nasional, tapi siapa yang harus memimpin konfederasi itu? Misalnya, PDIP, Golkar dan PKB berkonfederasi, dari ketiga partai itu calon presiden bersama dating dari partai mana? Apakah calon presiden diambil secara berganti-gantian dari setiap partai setiap lima tahun?

Ada dua model. Model pertama, setiap partai yang berkonfederasi itu, masing-masing memiliki calon presidennya sendiri. Tak ada amasalah mereka bertarung secara normal sebagaimana layaknya pertarungan calon presiden di Negara demokratis. Namun asa kesepakatan di antara pemimpin partai itu. Siapapun yang kelak menang, akan mengajak dua partai lainnya untuk membentuk pemerintahan bersama. Power sharing kelak dibagi berdasarkan kekuatan riil partai itu pada hasil pemilu, DPR terakhir, misalnya.

Model kedua, ada kesepakatan tiga partai itu untuk muncul dalam paket calon presiden yang sama. Misalnya satu partai diberi jatah calon presiden. Partai lainnya wakil presiden, dan partai ketiga kursi Ketua DPR. Lalu Kementrian, bahkan lembaga tinggi Negara seperti MA, MK, Ketua DPD, Ketua MPR juga dapat dibagi sesuai

kesepakatan. Apa basis pembagian itu? Yang paling fair adalah hasil terakhir pemilu DPR.

Realistiskah scenario itu? Jawabnya sangat realistis. Apakah berharga jika konfederasi itu direalisasi? Jawabnya sangat berharga. Mungkinkah tiga partai itu bersedia berkonfederasi? Di sini letak masalahnya. Jika tiga partai itu banyak politisi yang berwawtak political designer, konfederasi atau pemerintahan tiga partai itu mudah terbentuk. Sebaliknya, jika partai didominasi oleh politisi berwatak politikus, konfederasi itu sangat sulit. **

Kompromi Menjaring Presiden

Akhirnya, aneka pasal krusial dalam RUU pemilihan presiden apat disepakati. Berbagai pihak yang selama ini berbeda persepsi dan kepentingan tentang syarat calon presiden, melakukan negosiasi dan kompromi. Persoalannya apakah itu kompromi yang baik, netral atau buruk bagi kehidupan bernegara kita?

Sebelumnya kompromi dilakukan , masing-masing pihak memasang criteria calon presiden yang cukup tinggi jika semua tuntutan itu dipenuhi, calon presiden kita memang sangat terbatas. Untuk sah dinominasikan, sang calon presiden harus minimal sarjana, tidak berstatus terdakwa, yang diancam hukuman lima tahun penjara dan dicalonkan oleh partai dan gabungan partai yang minimal punya kursi di DPR minimal 20 persen.

Niscaya akan begitu banya calon presiden yang berguguran, dan dikalahkan justru sebelum pemilu dimulai. Megwati terpaksa didiskualifikasi karena masalah pendidikannya, Akbar Tandjung harus pula tersingkir sebelum memasuki arena pertandingan karena status hukumnya. Angat mungkin Amien Rais juga bermasalah karena kesulitan mencari gabungan partai 20 persen.

Kompromi akhirnya membuka peluang bagi semuanya. Megawati masih bisa ikut masuk kedalam arena pemilihan karena syarat minimal sarjana dihapuskan. Akbar Tandjung juga dapat ikut serta, jika belum nyaman sebagai calon presiden, dapat maju sebagai calon wakil calon wakil presiden. Amien Rais mulus menuju kursi presiden karena partainya hampir pasti dapat kursi diatas 3 persen untuk DPR.

Apa daya “pemegang saham” utama dari setiap pembuatan undang-undang adalah partai politik. Anggota DPR umumnya dapat dikendalikan oleh partai politik yang mengutusnyanya. Kepentingan partai politik menjadi menu utama yang mesti dilakukan oleh anggota DPR itu. Kompromi jenis ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi disemua Negara demokrasi modern, persoalannya hanyalah apakah hasil kompromi itu bermasalah, secara hukum atau politik?.

Berbeda dengan perumusan undang-undang lainnya, khusus untuk RUU pemilihan presien, kepentingan

partisan setiap partai politik sangat terasa. Berbagai usul dan bunyi pasal sangat dipengaruhi oleh masalah dan kendala yang dihadapi partai itu. Yang akan diatur dalam RUU itu adalah seputar presiden. Dan presiden adalah puncak kekuasaan Negara. Setiap partai berfikir jangan sampai perumusan RUU itu sudah menyingkirkan peluang mereka sejak awal. Sebelum pemilu dimulai.

Persoalan menjadi kompleks Karena berbagai partai besar punya ketua umum yang “bermasalah“. Padahal, ketua umum dari masing-masing partai adalah kandidat yang paling kuat untuk menjadi presiden. Mengan benar, presiden sudah dipilih langsung. Tetapi masih perlu waktu panjang untuk mencari calon presiden dari luar partai. Kenyataannya, partai di Indonesia masih partai “milik” ketua umum.

Karena ketua umum PDI-P bukan sarjana, suka tidak suka PDI-P harus menentang persyaratan presiden yang mengharuskan sarjana sebagai syarat minimal. Alasan itu dapat dicari. Sangat muah mencari argumentasi mengapa presiden tidak harus sarjana, sebagai syarat sangat mudah pula mencari alasan yang sebaliknya.

PARTAI Golkar juga tidak ketinggalan, status hukum Akbar Tandjung selaku ketua umum sangat tidak menguntungkan diukur dari kapabilitas, leadership, Akbar Tandjung mungkin kini mengungguli semua calon lainnya. Tidak bisa tidak, partai Golkar harus pula melawan semua ketentuan yang dapat membuat Akbar Tandjun didiskalifikasi. Terdakwa pun harus boleh

menjadi calon, sebelum ada keputusan final pengadilan

Aneka partai kecil lainnya, yang suaranya di DPR tahun 1999 dibawah 20 persen tidak ketinggalan gusar. Bagi PAN misalnya jelas Amien Rais menjadi calon nomor wahid ia adalah lokomotif reformasi. Dibandingkan calon lainnya, mungkin Amien Rais dikenal pula tidak punya masalah buruk dengan KKN. Namun, Amien rais dapat tersingkir sebelum pemilu jika syarat minimal 20 persen kursi di DPR itu dijadikan kriteria. Sangat sulit berkoalisi dengan partai lain, apalagi sesama partai Islam, untuk mau bersama-sama dan memberikan tempat kepada Amien Rais sebagai calon bersama.

Memang PPP, PAN dan PBB, dapat bergabung dengan syarat minimal 20 persen itu terlampaui. Namun apakah Hamzah Haz bersedia mengalah menjadi wakilnya Amien? Apakah Yusril juga bersedia mengalah untuk tidak menjadi calon presiden? Karena ingi menggolkan Amien, bagi PAN tidak bisa tidak, syarat minimal 20 persen itu harus dilawan.

Disinilah letak seni politiknya. PDI-P sambil membela syarat minimal SMA, menyerang pihak lain dengan syarat minimal 20 persen dan larangan terdakwa menjadi calon presiden. Golkar pun mengambil "jurus silat" yang kurang lebih sama. Disamping membela syarat yang terdakwa boleh menjadi presiden, Golkar juga menyerang syarat minimal sarjana dan 20 persen diterakan. PAN tidak ketinggalan manuver, sambil menolak syarat minimal 20 persen, PAN mengajukan calon presiden minimal sarjana dan tidak boleh

terdakwa.

Jurus “bela dan serang” agaknya sudah menjadi nada dasar untuk “dagang pasal” di DPR. Karena dead lock, didesak oleh waktu, dan tekanan public agar RUU pemilihan presiden segera selesai, masing masing serangan dibatalkan. Golkar member jalan kepada PDI-P dan PAN. Sebagaimana PAN member jalan kepada Golkar dan PDI-P. PDI-P pun melakukan hal yang sama. Ibaratnya “sesama bus kota dilarang saling mengganggu”.

Mereka sepakat membuat rumusan yang tidak menjadi halangan bagi Megawati, Akbar Tandjung, Amien Rais, untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Namun apakah kompromi itu baik atau buruk? Apakah ukuran sebuah kompromi dapat diklaim baik atau buruk? Ukurannya dapat dilihat dari hukum tata Negara dan kebiasaan politik di Negara lain sejauh mana kompromi itu tidak menentang aturan hukum yang lebih tinggi, secara ketata negaraan semua kompromi oke-oke saja. Sejauh hasil kompromi itu dipraktekan dan dilakukan dinegara lain., secara politik ia aman-aman saja.

Dalam tataran ketata negaraan murni, ada yang bersih dan ada yang kontroversial. Syarat minimal SMA untuk calon presiden sama skali tidak menentang konstitusi. Tidak ada aturan satu pasal pun di

konstitusi yang melarang tamatan SMA untuk maju menjadi calon presiden. Hal yang sama berlaku dengan syarat terdakwa. Tidak ada larangan terdakwa menjadi presiden sejauh memang ia nanti dipilih sendiri oleh rakyat banyak. Yang tidak dilarang oleh konstitusi, mengapa harus dilarang oleh undang-undang yang lebih rendah?

Yang bermasalah adalah syarat partai atau gabungan partai minimal 3 persen untuk mengajukan calon presiden. Dalam konstitusi, jelas-jelas diatur semua partai politik yang menjadi peserta pemilu, baik sendiri maupun bergabung, dapat mengajukan calon presiden. Partai itu mungkin nantinya dapat memperoleh suara diatas 3 persen, tetapi mungkin juga tidak. Namun konstitusi tetap membuka partai yang sangat kecil untuk mengajukan presidennya sendiri.

Kesepakatan itu dapat dikalim melanggar aturan konstitusi. Padahal konstitusi adalah dokumen tertinggi yang melindungi hak dan kebebasan. Hak yang sudah dijamin oleh konstitusi harus dijamin pula oleh undang-undang dibawahnya. Hak partai peserta pemilu walau tidak dapat kursi 3 persen di DPR, seharusnya juga dibolehka mengajukan calon presidennya sendiri, tanpa harus menggabungkan diri dengan partai lainnya.

Karena masih ada masalah dengan konstitusi. RUU pemilihan presiden itu belum tentu mulus. Partai kecil atau partai yang merasa mendapat suara di bawah 3 persen mungkin bereaksi pada hari RUU itu disahkan, mungkin dihari itu pula mereka akan meminta judicial

review atas RUU itu.

Bagaimana dengan evaluasi politik atas kompromi itu? Tak ada yang salah dengan syarat minimal SMA. Di AS, Negara dimana pemilihan presiden dilakukan secara langsung, syarat pendidikan tidak pernah disinggung. Begitu pula banyak sarjana yang buruk, dan non sarjana yang berbakat. Untuk Indonesia sendiri, Sutan Syahrir, Sudjatmoko, atau Agus Salim bukanlah sarjana. Tetapi tak ada yang meraguka kematangan dan intelektual politiknya.

Juga tidak ada masaah dengan terdakwa sebagai calon presiden. Di Thailand, juga Negara yang demokratis, ada Thaksin Shinawatra yang kini perdana menteri. Ketika pemilu berlangsung, Thaksin juga seorang terdakwa atas kasus korupsi. Ia juga suda dijatuhi hukuman di pengadilan tingkat pertama. Namun Negara tidak melarang Thaksin untuk terus melaju dalam pemilihan.

Ia terus bertarung an akhirnya terpilih sebagai perdana menteri. Setelah ia menjabat, pengadilan negeri membebaskannya. Jika Thailand yang demokratis membolehkan terdakwa menjadi calon, mengapa tidak Indonesia?

Secara politik sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan makin anyakna jumlah calon presiden yang akan terjaring melalui RUU itu. Pada akhirnya, rakyat sendiri yang aka memilih secara langsung. PR yang menyajikan menunya. Rakyat yang memilih menu apa yang akan disantap. Jika memang bagi rakyat sang calon tidak

pantas, ia tidak akan terpilih. Tak peduli apakah ia profesor atau tamatan SMA ulama atau terdakwa, dari partai besar atau partai kecil.

Kecuali syarat 3 persen yang masih bermasalah dengan hukum tata Negara, aneka kompromi RUU pemilihan presiden tidak dapat dipandang buruk, baik ditinjau dari hukum tata Negara maupun kebiasaan politik dinegara lain. Bravo. **

Kebutuhan Koalisi Partai

Bukan sekali ini Gus Dur dan PKB merasakan hasil pahit dari rencana koalisi partai politik. Selaku partai besar di Jawa Timur, di daerah yang menjadi basis utama NU, wajar saja jika Gus Dur dan PKB menginginkan kadernya menjadi gubernur. Semua strategi dan taktik disusun agar calon PKB dan restu Gus Dur yang menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor satu di provinsi Jawa Timur.

Komunitas politik nasional menyaksikan kembali peristiwa yang diduga semula akan sulit terjadi. Gus Dur melakukan terobosan bertemu dengan ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Lebih dari itu, Gus Dur juga berjumpa dengan Keyua umum PAN Amien Rais. Selama ini, Gus Dur marah minta ampun kepada

kedua tokoh itu yang dianggap bertanggung jawab atas kejatuhannya dari kusi presiden. Namun demi sebuah tujuan politik, dan sikap pragmatisme dalam berpolitik, tidak ada kata jera. Kesepakatan baru dapat dibuat dan konflik dimasa silam segera dilupakan.

Seegera komunitas politik nasional membayangkan embrio kembalinya Poros Tengah. Di tingkat nasional, koalisi Poros tengah ini, juga dengan tokoh utama Gus Dur, Akbar Tandjung dan Amien Rais, berhasil mengalahkan ketua umum partai pemenang pemilu 1999 Megawati Soekarno Putri, dalam perebutan kursi presiden RI pada tahun itu. Kini tiga tokoh itu terkesan kembali bersama lagi, dengan sasaran politik local, juga untuk mengalahkan calon dari PDI-P, dalam perebutan kursi gubernur Jatim.

Pertemuan tiga tokoh itu semakin besar gaungnya karena Pemilu Pemilihan Presiden tahun 2004 semakin dekat. Kesepakatan merebut kantor Gubernur Jawa Timur diduga hanyalah proyek awal. Jika sukses, tiga tokoh dan tiga partai ini mungkin pula menggarap proyek nasional, memenangkan Pemilu Presiden 2004, yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia dengan model pemilihan langsung.

Namun semua spekulasi diatas berantakan hanya dalam hitungan hari. Dengan kegeraman yang khas, Gus Dur menyatakan koalisi itu ternyata koalisi gombal. Gus Dur merasa dikadali atau hanya "ditipu" oleh dua tokoh yang diajaknya berpartner. Calon Gubernur PKB kalah telak. Kisah sukses Poros tengah tahun 1999

justru terbalik di tahun 2003 untuk kasus Pemilihan Gubernur Jatim.

Apakah ini berarti koalisi partai politik memang tidak relevan dalam model dan kultur politik seperti Indonesia? Koalisi di tingkat local, dan juga di tingkat nasional kok berkahir dengan buruk? Jika koalisi hanya dibangun dengan tujuan jangka pendek, tentu saja itu tidak diperlukan. Apalagi jika koalisi itu dibangun justru untuk saling mengakali, terlebih lagi koalisi partai itu justru dapat merusak.

Buruknya hasil koalisi partai yang pernah dicoba, sebenarnya bukan karena bangunan koalisi partai politik itu tidak kongruen dan sebangun dengan model dan kultur politik Indonesia. Koalisis itu menjadi buruk karena dilakukan tanpa penghormatan dan infrastruktur yang kukuh bagi kultur koalisi.

Di Negara dimana koalisi partai politik itu kukuh asda dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hadirnya komitmen yang tinggi antar pimpinan partai untuk berkompromi dan maju memperjuangkan sebuah tujuan bersama. Setelah kesepakatan dan kompromi dibuat, pimpinan partai teguh memegang janji.

Kesepakatan politik bukanlah seperti perjanjian bisnis yang misalnya dibuat dalam perjanjian tertulis, atau disahkan oleh notaries. Kesepakatan politik bersifat gentlemen agreement yang tidak tertulis, tetapi dijalankan. Tanpa hadirnya penghormatan pada

kesepakatan, koalisi justru dapat menjadi perhimpunan yang dapat membuat pimpinan partai untuk saling mengakali dan saling menjatuhkan.

Kedua, pimpinan partai harus pula mampu mengontrol “pasukannya” di tingkat yang lebih rendah. Misalnya pimpinan tertinggi partai sepakat, semua organ penting partai di DPR, atau pun di kalangan pemerintah eksekutif mengikutinya. Jika “pasukan di lapangan” tidak peduli lagi dengan pimpinan nasionalnya, kesepakatan pimpinan tertinggi itu tidak berguna.

Apapun yang dikompromikan oleh para pimpinan partai tertinggi itu, dengan mudah dikhianati atau diabaikan begitu saja.

Rusaknya koalisi partai dalam kasus Indonesia era reformasi karena tidak dipenuhinya dua syarat itu. Gus Dur sendiri bahkan mencontohkan bentuk “pengkhianatan” atas koalisi partai ketika ia menjadi presiden. Saat itu, mustahil Gus Dur menjadi presiden jika tidak terjadi koalisi partai yang kemudian dikenal sebagai Poros Tengah.

Sebagai calon presiden, PKB yang menjadi kendaraan Gus Dur hanyalah partai kecil saja. Namun ternyata Gus Dur dapat mengalahkan calon dari partai terbesar Megawati Soekarnoputri, karena dukungan dari partner koalisinya: PPP, Golkar, PAN dan PBB. Ketika menjadi presiden, memang aneka tokoh dari partai itu ia angkat menjadi menteri.

Tetapi komitmen dan kesepakatan itu tidak berlangsung lama. Komitmen koalisi itu diingkari sendiri oleh Gus Dur. Hamzah Haz dari PPP, Jusuf Kalla dari Golkar, Yusril Ihza mahendra adri PBB dan bambang dari PAN, yang semuanya menjadi menteri cabinet Gus Dur, satu per satu ia pecat. Tak hanya dipecat, sebagian dari mereka bahkan dituduh tidak kompeten bahkan KKN. Poros tengah pun pecah dan pada gilirannya justru Gus Dur sendiri yang akhirnya menjadi korban.

Kegagalan koalisi Poros Tengah karena tidak dipenuhinya syarat pertama, pimpinan partai tidak memenuhi janji dan komitmen. Sementara itu, kegagalan koalisi didaerah bisa disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat kedua, “pasukan” di lapangan mengkhianati atau mangabaikan instruksi pimpinan partai.

Nukan sekali atau dua kali, instruksi pimpina partai di pusat tidak dijalankan di daerah. Ini menimpa hampir semua partai. Beberapa kali, misalnya, instruksi pimpinan partai sperti PDI-P diabaikan begitu saja. Tokoh yang punya charisma seperti Megawati, yang bahkan menjadi presiden, dapat dilibas begitu saja oleh “pasukannya”. Tak heran dalam banyak kesempatan pemilihan gubernur atau bupati berakhir dengan hasil yang tidak diduga.

Money politics dilapangan sering kali lebih kuat dari sekedar instruksi pimpinan partai. Sekelompok

orang di DPRD akan mudah sekali membelot jika di depan hidungnya ada “segepok” uang. Dengan kultur politik uang yang sudah sedemikian merusak, kalisi partai politik tidak pernah established. Kewibawaan pemimpin partai, yang sudah bersusah payah membuat kesepakatan, mudah sekali diabaikan akibat adanya kultur money politics.

Namun apakah ini berarti koalisi partai tidak relevan dibangun? Kesimpulan ini adalah kesalahan logika. Kendala lapangan yang menyebabkan sulitnya koalisi partai tidak berarti koalisi itu tidak perlu. Sebaliknya, tanpa koalisi partai yang dijalankan secara benar, dengan penuh komitmen, politik di Indonesia tidak akan pernah stabil.

Memang benar Indonesia sekarang sudah memilih presiden secara langsung. Benar pula bahwa model politik Indonesia sudah mengarah kepada system presidensialisme. Namun Indonesia bukanlah Amerika Serikat. Di AS, system presidensialisme berdiri dalam model politik dua partai. Hanya ada dua partai besar, yang mendominasi politik AS selama dua ratus tahun Negara itu merdeka.

Dengan konstruksi dua partai itu, memang pemerintahan dapat dijalankan oleh dominasi satu partai saja. Jika presiden dari Partai Republik terpilih, misalnya, seluruh cabinet dapat terdiri hanya dari partai republic saja. Begitu pula jika calon dari Partai Demokrat yang terpilih.

Memang dapat saja terjadi kondisi terbalik di legislative. Presiden dari partai republic, tapi kongres di AS dikuasai oleh Partai Demokrat. Atau presiden dari Partai Demokrat., tapi kongres dikuasai oleh Partai Republik. Namun karena sudah kuatnya kultur demokrasi, dan berbagai kelompok kepentingan dapat menjadi jembatan menuju settlement, pemerintahan oleh satu partai saja di AS dapat jalan.

Indonesia memiliki bangunan politik yang sama sekali berbeda. System presidensialisme kita beridiri diatas politik multipartai. Tak ada satu partai pun di Indonesia, di era pemilu bebas, yang mendapatkan suara lebih dari 35%. Hamper dapat dipastikan, siapapun yang terpilih menjadi presiden, partai presiden hanyalah minoritas di parlemen. Dalam kultur politik yang masih buruk di Indonesia, tanpa posisi yang kuat di parlemen, presiden akan menjadi bulan-bulanan para petualang politik di DPR.

Demi politik yang stabil, koalisi antar partai dibutuhkan. Koalisi itu diharapkan tidak hanya mendominasi pemerintahan eksekutif, tetapi juga mendominasi parlemen. Bahkan jika bisa, koalisi itu mampu menguasai politik Indonesia selama 25 tahun, sebelum demokrasi di Indonesia menjadi stabil. Tetapi sekali lagi, koalisi yang dimaksud disini adalah koalisi yang benar, bukan sekedar kerja sama jangka pendek, yang penuh akal-akalan. Atau tepatnya, yang kita butuhkan adalah konfederasi partai seperti Barisan Nasional di Malaysia. **

Godaan Terakhir Nurcholis Madjid

Sampai usianya yang sekarang, Cak Nur (panggilan populer Nurcholis Madjid) sudah lulus dari aneka godaan. Untuk itulah, public sepakat melebel Cak Nur sebagai guru bangsa, bahkan ikon moral dalam kepemimpinan di Indonesia. Kearifannya, keluasan pengetahuan, kerendahan hati, keinginan membuat semua pihak mendapatkan manfaat sudah teruji dari waktu-kewaktu.

Kini Cak Nur menghadapi godaan terakhir, atau the last temptation untuk menuju kesempurnaan diri. Godaan terakhir bagi Cak Nur ini justru yang terberat. Godaan itu adalah keinginan Cak Nur menjadi presiden. Dengan seluruh niat baiknya, Cak Nur ingin menjadi penguasa politik formal tertinggi di eksekutif.

Godaan ini menjadi godaan yang terberat justru karena godaan itu penuh dengan tujuan luhur. Dibalaik keinginan menjadi presiden itu, ada harapan untuk

ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa. Adapula keinginan agar moralitas pemimpin semakin menolong bangsa ini keluar dari krisis etika bahkan krisis hukum. Ada pula banyak harapan jika Cak Nur menjadi presiden mungkin kita akan melihat Indonesia yang berbeda dan baru.

Godaan yang berisi nafsu kriminal tentu saja sudah lama mampu diatasi oleh Cak Nur. Namun terhadap godaan yang penuh niat luhur itu, mampukah Cak Nur bertahan dan bilang tidak? Ambisi menjadi presiden mungkin bagi Cak Nur atau pendukungnya sendiri tidak dipersepsikan sebagai godaan? Ambisi menjadi presiden itu bahkan mungkin dianggap sebagai jalan pengabdian dan pengorbanan?

Kita menyebutnya godaan karena tidak sinkronnya jabatan presiden dengan kepribadian Cak Nur. Jika Cak Nur dan pendukungnya masih terus memaksakan diri, seluruh proses menuju kursi kepresidenan mungkin akan menyakiti Cak Nur. Lebih dari itu, mungkin pula proses politik itu membawa Cak Nur dalam pertikaian politik yang mengalienasi personalitasnya. Bahkan sangat mungkin hal itu mengganggu integritasnya pula sebagai ikon moral.

Sementara kepribadian Cak Nur sendiri belum tentu pula pas dengan karakter pemimpin politik yang dibutuhkan Indonesia di era sulit seperti sekarang. Menjadi presiden di era sekarang membutuhkan karakter pemimpin yang hanya tidak tegas dan tega, tetapi juga bersedia berkompromi. Banyak hal yang

mungkin sedikit abu-abu bahkan “hitam” harus dilakukan presiden demi terciptanya politik yang stabil, dan mendapat dukungan dari aneka pihak yang berpengaruh.

Cak Nur sebenarnya sudah mundur selangkah terhadap godaan itu. Ia sudah mundur dari konvensi Partai Golkar, walau oleh banyak pihak, mundurnya Cak Nur dianggap terlambat. Ia ambil keputusan itu disaat hasil sementara dukungan DPD Golkar tidak terlalu menggembirakan. Dari segi urutan dukungan, Cak Nur dibawah, bukan saja Akbar Tandjung, tetapi dibawah pengusaha Surya Paloh, Aburizal bakrie, dan bahkan Wiranto.

Mulai terdengar keluhan dari Cak Nur. Bahwa Golkar didaerah tidak hanya ingin mendengar visi dan misi saja. Soal visi dan misi tidak ada visi misi kandidat presiden lain yang lebih canggih dari Cak Nur. Kenyataan politik ternyata meminta hal yang lain pula, seperti “gizi”. Istilah yang merujuk pada money politics yang harus disediakan oleh calon presiden.

Agak naif jika Cak Nur dan para pendukungnya tidak menyadari hal ini sejak awal. Money politics dalam dunia “persilatan” di Indonesia sudah demikian tersohor dan menjadi pengetahuan umum.

Sayangnya Cak Nur hanya mundur dari Golkar. Cak Nur ternyata tidak menghilangkan ambisinya untuk menjadi calon presiden. Ia hanya ingin ganti kendaraan saja. Jika Golkar tidak efektif, Cak Nur mencari

kendaraan politik lain. Kini ia membayangkan koalisi partai kecil yang beragam, antara partai Islam an partai Kebangsaan, yang berniat mencalonkan dirinya.

Menjadi intelektual yang baik dan menjadi presiden yang berhasil meminta persyaratan yang berbeda. Mereka yang begitu hebat sebagai intelektual belum tentu mahir menjadi presiden. Sebaliknya mereka sukses menjadi presiden, belum tentu pula dapat menjadi intelektual yang dihormati.

Karakter Cak Nur dan keseluruhan kepribadiannya adalah karakter seorang intelektual. Ia selalu mengedepankan perspektip yang strategis dan jangka panjang. Komitmen yang diberikan adalah komitmen moral. Hal ini semakin ditunjang oleh pengetahuan dan kedalaman wawasan Cak Nur.

Maka jadilah Cak Nur seorang guru bangsa, yang imbauannya didengar oleh semua pihak. Tak mudah menjadi guru bangsa, mungkin lebih mudah menjadi seorang presiden. ISetidaknya untuk jabatan presiden di Indonesia akan dipilih presiden setiap lima tahun. Jabatan presiden itu akan selalu terisi. Namun posisi guru bangsa belum tentu akan selalu terisi. Posisi guru bangsa tidak dipilih secara regular. Kelebihan intelektual setelah Imelampai dan di tes oleh waktu yang panjang menentukan apakah seorang dapat dianggap publiknya sebagai guru bangsa.

Karakter seorang presiden, politikus praktis

menuntut persyaratan yang berbeda. Apalagi untuk presiden di era transisi. Kondisi politik yang masih berlumuran “lumpur”. Katakanlah tingkat korupsi Indonesia berada di level 80%. Dalam tataran praktis, level ini tidak bisa diturunkan menjadi 0% oleh siapapun yang kelak menjadi presiden. Terlalu banyak pihak yang akan mengacaukan negeri ini jika korupsi dibalikkan begitu mudah dan cepat.

Dibutuhkan seorang dengan visi yang jauh namun bersedia berkompromi. Jelas level korupsi itu harus diturunkan, namun mungkin bertahap. Dari level 80%, setahap diturunkan 60%, lalu 40% dan seterusnya. Pemimpin praktis itu harus bersedia sedikit berkotor tangan. Dunia praktis dan birokrasi bukan dunia ideal. Kita ragukan apakah Cak Nur bisa berkompromi seperti itu.

Menjadi presiden dimasa sulit seperti Indonesia saat ini harus pula mereka yang punya pengalaman memimpin birokrasi. Berbeda dengan dunia intelektual, birokrasi pemerintahan punya “aturan” dan intriknya sendiri. Seorang pemimpin yang berhasil harus benar-benar lihai, kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus menjual, dan kapan harus membeli

Pengalaman Cak Nur di Golkar menunjukkan karakter Cak Nur yang matang sebagai intelektual, namun masih naif sebagai politisi. Ia matang sebagai intelektual karena Cak Nur tampil sangat elegan

cara konseptual. Ia kemukakan apa yang menjadi platformnya. Umumnya ucapan Cak Nur tentang politik sangat visioner.

Namun pada saat yang sama terasa pula kenafian Cak Nur sebagai politisi. Ia misalnya terlalu cepat melangkah ke Golkar. Akibatnya, bukan Golkar yang melamar ke Cak Nur, tetapi Cak Nur yang melamar Golkar. Di tengah jalan, terasa pula betapa Cak Nur ragu-ragu, maju dan mundur. Padahal sebagian besar politisi, sejak awal ia harus mengesankan seorang yang tegas dan sadar lapangan.

Jika dalam menghadapi Golkar saja, ketidaktegasan, keraguan, ketidaksiapan Cak Nur sudah tampak, apalagi jika nantinya Cak Nur menghadapi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jauh lebih dahsyat dibandingkan Golkar, “ular dan harimau” dalam belantara Indonesia jauh lebih banyak. Padahal siapa pun yang ingin memimpin Indonesia di masa krisis ini harus sudah menjadi politisi yang lihai dan matang di hari pertama dilantik. Tak ada waktu lagi untuk belajar.

Kita mengemukakan hal ini justru karena wujud kecintaan kita pada Cak Nur. Jelaslah Cak Nur adalah the right man. Namun jabatan presiden bukanlah the right place bagi Cak Nur. Bangsa ini memerlukan Cak Nur sebagai guru bangsa, sebagai bagian dari kekuatan masyarakat, sebagai perekat berbagai komunitas, serta pemberi arah dan penguatan moral.

Jabatan presiden biarlah diserahkan pada mereka

yang karakternya memang sekelas politisi praktis yang lihai. Cak Nur dan para pendukungnya harus melihat bahwa ambisi menjadi presiden itu adalah godaan yang paling canggih, yang justru dapat menjatuhkan Cak Nur sendiri. Kita yang mencintai Cak Nur seharusnya ramai-ramai mengembalikan Cak Nur sebagai guru bangsa saja. **

Ribut-Ribut di PDI-P

Ketika menang dalam pemilu pertama reformasi tahun 1999, banyak pihak berharap kepada PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Partai ini diduga memainkan peran sebagaimana partai Kongres di India. Paham kebangsaan yang plural dan demokratis mengakar di India pada tahun-tahun awal berkat kendali partai kongres. PDI-P diharapkan menjadi partai Serupa, miniature Indonesia dan mengawal paham kebangsaan Indonesia yang juga plural serta demokratis di masa transisi.

Partai Kongres, nyaris mendominasi politik di India puluhan tahun lamanya. Nehru dan para kadernya mengawal India yang rawan dengan konflik keagamaan dan miskin, untuk tetap plural dan demokratis. PDI-P juga diharapkan memenangkan rangkaian pemilu awal era

transisi di Indonesia. Jika bisa tidak hanya pemilu 1999, tetapi juga beberapa pemilu sesudahnya dimenangkan oleh PDI-P. Bukan hanya PDI-P nya sendiri yang penting, tetapi paham kebangsaan yang dititipkan partai ini.

Namun setelah empat tahun reformasi, semakin banyak pesimisme yang lahir mengenai PDI-P. Jangankan memenangkan serial pemilu sampai tiga atau empat kali, ansib PDI-P dalam pemilu 2004 juga masih diragukan. Dikhawatirkan PDI-P hanya menjadi partai satu musim saja., partai yang menang pada pemilu pertama saja. Karena kelalaian pengurusnya dan buruknya konsolidasi partai, PDI-P dikhawatirkan tidak pernah menjadi partai besar. Akibatnya pihak yang mendukung paham kebangsaan, mengalihkan dukungan ke partai lain.

Kini PDI-P sungguh berada disimpang jalan. Peluang untuk menjadi partai konres seperti di India masih terbuka lebar. Pada saat yang sama, peluang untuk menjadi partai yang semusim saja, sama terbukanya. Aneka survey yang dibuat berbagai lembaga, menunjukkan PDI-P sudah tidak lagi berada dipapan atas.

Ketika Golkar mendapatkan roh baru, kegairahan wacana dengan konvesinya, PDI-P semakin terpuruk dengan isu money politics, permainan vulgar dalam pemilihan gubernur, sampai pada pertenggaran elite.

Bagaimana prospek PDI-P? tentu ini sangat tergantung dari kapabilitas pemimpin dan tokoh partai menyelesaikan kemelut internalnya. Pulik luas kini

sedang menonton PDI-P menyelesaikan dua kasus yang sedang menyimpannya. Pemilihan Gubernur Bali masih mengambang. Sementara kasus aksi menyempal atas ketua umumnya juga terus menggelora dibawah permukaan.

Kasus pemilihan Gubernur Bali menunjukkan betapa lemahnya koordinasi ditingkat pimpinan partai pusat. Kasus ini semakin buruk efeknya bagi PDI-P karena terkesan berbagai tokoh pusat main sendiri tanpa koordinasi.

Berita mengenai beredarnya uang controversial dalam pemilihan Gubernur Bali sudah tidak dapat dibantah lagi. Kader PDI-P daerah sendiri yang membocorkannya. Tak tanggung-tanggung bukti traveler check sudah ditunjukkan. PTUN Bali sudah meminta DPRD untuk menunda pelaksanaan keputusan mengenai Gubernur dan wakilnya. Kini anggota DPR Jakarta mulai menyuarakannya.

Sayang cara pimpinan pusat merespons kasus ini, bertentangan satu sama lain. Mulanya dikatakan dan diakui bahwa memang ada dana yang diberikan kepada anggota PDI-P Bali, namun dana itu bukan untuk pemilihan gubernur yang dicalonkan. Dana itu sepenuhnya untuk konsolidasi partai. Dikatakan pula bahwa kebetulan dana konsolidasi diberikan menjelang dan dekat-dekat pemilu gubernur.

Publik bisa percaya, bisa pula tidak dengan

keterangan itu. Namun setidaknya ada suara resmi dari pusat yang konsisten. Namun tidak lama kemudian, keterangan ini dibantah lagi oleh pimpinan pusat PDI-P lainnya. Kini dinyatakan lagi bahwa tidak pernah ada dana konsolidasi dari PDI-P pusat. Jika ada dana itu harus keluar dari bendahara partai. Sampai saat ini bendahara partai tidak pernah mengeluarkan dana sepeserpun untuk DPRD dan anggota PDI-P di DPD Bali.

Pimpinan pusat agaknya kewalahan menghadapi tekanan daerah lain. Jika Bali diberikan konsolidasi, mengapa provinsi lain tidak? Apa keistimewaan Bali dibanding provinsi lain? Jika akhirnya provinsi lain diberikan dana konsolidasi, berapa banyak yang harus disediakan PDI-P pusat. Katakanlah jika setiap orang di Bali disediakan lima puluh juta, satu provinsi dibutuhkan ratusan juta sampai miliar, bagaimana jika ada tiga puluh provinsi?

Tidak konsistennya pendapat dari tokoh pusat semakin menjadi tontonan nasional. Jika kondisi ini tidak cepat diselesaikan, atau diambangkan begitu saja, memang tidak terjadi pergolakan. Namun PDI-P akan kehilangan nuansanya sebagai partai yang membanggakan. Akan semakin sedikit orang yang bersedia mengidentifikasinya dirinya dengan PDI-P. Mustahil PDI-P akan menjadi partai yang melegenda jika tidak mampu membuat sekelompok orang-orang baik bangga kepada partai itu.

Terkesan selama ini PDI-P tidak benar-benar

dikendalikan dengan matang dalam perebutan kursi gubernur di daerah. Strategi yang digunakan terasa vulgar, citra PDI-P dan dukungan arus bawah tidak dihiraukan. Ini dapat berakibat PDI-P wins the battle but loses the war (memenangkan pertempuran tapi kalah dalam peperangan). Alam jangka pendek PDI-P akan mendapatkan kursi gubernur. Namun untuk jangka panjang, ia kehilangan simpati dan kebanggaan public luas atas perannya.

Hal lain PDI-P yang menjadi tontonan public luas adalah cara partai yang menangani kritik internal. Luas diberitakan bahwa kelompok kritis di Balitbang PDI-P tempo hari mengadakan jejak pendapat. Dalam survey itu diproyeksikan bahwa mungkin PDI-P hanya akan menang di dua provinsi saja. Secara keseluruhan, perolehan PDI-P merosot dan berada dibawah Golkar. Popularitas Megawati sebagai calon presiden juga merosot.

Sebenarnya tidak ada yang baru dengan temuan ini. Survey serupa yang dibuat lembaga lain, hasilnya kurang lebih sama. Namun yang menarik adalah cara partai menyelesaikan kemelutnya. Mereka yang kritis mencari solusi pada kepemimpinan partai. Sebagian ada yang menganjurkan Megawati sebagai presiden, dan Megawati selaku ketua umum partai. Jika kedua jabatan itu dirangkap, maka akan mengganggu keduanya.

Rekomendasi itu cukup rasional walau belum tentu

benar. Mengiringi rekomendasi itu lalu muncul isu recall. Beberapa aktivis yang ikut dalam rekomendasi itu akan dicabut keanggotaannya dari DPR. Untung isu itu tidak direalisasi. Seandainya kebijakan recall, sekali lagi PDI-P akan semakin terpuruk. Partai ini dinilai tidak lagi elegan mengatasi konflik elitnya.

Solusi dari kemelut ini cukup moderat. Tak ada Recall, walau Balitbang dirombak. Pihak yang tersingkir dari balitbang sudah pula mendirikan LSM, untuk melakukan pengkajian yang sama.

Kini para pemimpin dan elite PDI-P mesti benar-benar merenung. Apa yang dapat membuat partai besar, bahkan menjadi lebih besar. Ada pula yang membuat partai ini terpuruk, dan oleh sejarah dikenang sebagai partai semusim saja. Karena partai ini hanya menang pemilu satu kali saja. Akibat ketidak seriusan dan ketidak mampuan elitnya, misalnya PDI-P yang potensial besar, mengerucut menjadi bonsai.

PDI-P hanya dapat menjadi partai besar yang melegenda seperti partai kongres di India, jika ia mampu membuat semakin banyak pihak untuk mengidentifikasi diri dengannya. Sebaliknya, PDI-P menjadi bonsai, jika banyak pihak yang enggan dan malu berasosiasi dengannya.

Segmen besar PDI-P adalah komunitas politik yang mendukung paham kebangsaan, nasionalisme, atau Indonesia yang plural. Mereka berharap ada partai yang menjadi miniatur Indonesia. Partai ini didukung karena

mengawal paham kebangsaan itu. Selama ini PDI-P yang paling tepat memanggulnya. Tentu ada juga partai lain seperti Golkar.

Jika PDI-P tidak kunjung membaik, dapat dipastikan segmen besar ini akan lari kepartai lain, terutama Golkar. Jika Golkar tidak juga membaik, segmen besar ini akan kehilangan gairah. Partai baru atau partai kecil lainnya mungkin belum cukup signifikan untuk di titip platform itu. Akibatnya dalam politik nasional, platform kebangsaan yang plural dan demokratis mungkin tidak lagi dominan. Ini sungguh buruk bagi masa depan demokrasi dan pluralisme.

Demi paham kebangsaan itu, setahun ini, agaknya PDI-P harus membuat terobosan signifikan. Megawati mungkin masih terlalu penting bagi symbol partai. Ia tetap menjadi presiden dan ketua umum partai. Namun sudah harus difikirkan adanya ketua harian yang full time mengurus partai. Partai tidak bisa diurus sambil lalu dengan kewenangan terbatas.

Guna mengatasi persoalan ini, sebaiknya dibentuk sejenis pelaksana harian baru, dengan kapabilitas, kewenangan dan pengaruh yang cukup besar. Saatnya pula partai ini menggunakan jasa konsultan professional yang mengerti cara menjalankan partai modern. **

Konvensi Golkar Sebagai Strategi

Agar tidak bingung dan kecewa, saatnya komunitas Partai Golkar tidak memahami Konvensi Partai Golkar semata sebagai mekanisme demokratis untuk menjaring calon presiden dari bawah. Lebih dari itu, konvensi harus pula dilihat sebagai strategi untuk memenangkan Golkar dalam pemilihan legislatif dan pemilihan langsung presiden.

Sebagai strategi, lumrah saja jika aturan dalam konvensi itu diubah mengikuti dinamika politik yang ada, dengan dua syarat. Pertama, perubahan itu dapat diterima oleh akal sehat dalam rangka memperkuat posisi partai menghadapi Pemilu 2004. Kedua, perubahan itu diputuskan oleh mayoritas pimpinan Partai Golkar dari DPD II sampai ke DPP. Dengan kata lain, perubahan itu mengikuti mekanisme pengambilan

keputusan yang sah sesuai prosedur organisasi dan aturan partai.

Respons di atas muncul secara spontan di kepala saya setelah membaca perkembangan terakhir dalam Konvensi Partai Golkar. Berbeda dengan aturan sebelumnya, ternyata Pra-Konvensi yang digelar tidak berakhir dengan lima bakal calon presiden. Yang lolos dibiarkan tujuh bakal calon presiden sekaligus: Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tandjung, Yusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan HB X.

Tujuh calon itu juga akan mengerucut menjadi satu calon saja. Namun sekali lagi, waktu untuk memilih satu calon itu kembali diubah. Aturan semula, sang calon sudah dipilih sebelum pemilu legislatif, Februari 2004. Kini aturan diubah. Sang calon tunggal baru ditentukan setelah berakhirnya pemilu legislatif, setelah 5 April 2004. Sebelumnya, Partai Golkar dapat mengusung dan sekaligus mengkampanyekan satu calon presiden mereka dalam kampanye untuk DPR 2004. Kini yang harus diusung tujuh calon sekaligus.

Pro dan kontra perubahan aturan di tengah permainan sangat tampak di kalangan DPP Partai Golkar dan balak calon presiden. Apa daya keputusan sudah diambil. Bahkan salah satu tokoh Golkar, Agun Gunandjar, membuat pernyataan keras. Calon presiden Golkar yang tidak setuju pengunduran waktu lebih baik dicoret saja. Keputusan Rapim kali ini akibatnya harus ditelan mentah-mentah bagi semua calon yang masih berminat.

Namun sekali lagi, jika Konvensi Partai Golkar dihayati sebagai strategi untuk memenangkan partai, kekecewaan itu akan memudar. Bahkan dapat kita prediksi, pada waktunya mungkin sekali lagi aturan konvensi itu diubah. Namun saat itu perubahan dibuat untuk memenangkan kursi presiden.

Ada tiga alasan yang membuat perubahan aturan konvensi di tengah permainan itu dapat diterima. Pertama, sifat uji coba konvensi di tengah permainan itu dapat diterima. Kedua, keistimewaan posisi ketua umum partai dalam politik Indonesia saat ini. Ketiga, kalkulasi rasional untuk kemenangan partai.

Memang idealnya aturan main jangan diubah karena permainan sudah berlangsung. Ibarat permainan sepak bola, sebelum pluit pertandingan berbunyi, aturan dapat diubah semaunya. Namun setelah pluit berbunyi, aturan yang disepakati dipertahankan sampai pertandingan selesai. Para pemain sudah keluar keringat dan pikiran untuk menang dalam aturan yang ada. Sangat celaka jika kemenangan hampir di tangan, aturan main diubah.

Idealnya memang semua kelemahan aturan main yang ada dijadikan bahan catatan dan rekomendasi buat konvensi selanjutnya lima thun mendatang. Demi asas fairness dan kepastian, apa yang sudah diputuskan sebagai aturan main terus diberlakukan. Kepastian aturan main itu justru dapat lebih melembagakan partai.

Namun, kondisi ideal dapat dipatahkan jika ada

kepentingan partai yang lebih urgen. Pertama, ini memang konvensi partai yang pertama tidak hanya bagi Golkar tetapi juga bagi dunia kepartaian di Indonesia. Belum ada preseden yang dapat dijadikan guideline. Karena ini yang pertama, segala bentuk uji coba dieksperimenkan.

Awalnya diduga, misalnya, konvensi akan lebih baik jika menghasilkan satu calon presiden sebelum pemilu legislatif. Namun kemudian berkembang pemikiran sebaliknya. Jika sebelum pemilu legislatif sudah dipilih satu calon presiden, bagaimana jika terjadi kekecewaan yang besar dari calon lain yang tidak terpilih? Lalu sang calon kemudian justru memobilisasi semangat anti-partai? Bukankah lebih baik semua calon yang ada dibiarkan tetap potensial menjadi calon presiden sehingga mereka lebih solid membantu partai?

Awalnya diduga cukup dengan lima calon presiden di bulan Oktober 2003. Pra Konvensi memilih lima dari lebih banyak calon yang memenuhi syarat. Namun kemudian berkembang pula pemikiran lain. Membuang dua calon dari tujuh calon agar menjadi lima tidak pula menguntungkan partai. Apalagi dari tujuh calon itu dengan caranya masing-masing dapat memperkuat partai dalam pemilu legislatif.

Kedua, ada pula fenomena khusus posisi ketua umum partai dalam sistem kepartaian Indonesia saat ini. Memang benar bahwa presiden sudah dipilih secara langsung. Benar pula kiranya, jika mengikuti tradisi pemilihan presiden langsung di Amerika Serikat, posisi

ketua umum partai tidak lagi penting. semua calon presiden AS umumnya bukan mereka yang saat itu menjabat ketua umum partai.

Namun pemilu presiden langsung di Indonesia masih fenomena yang sangat baru. Pada saat ini partai yang ada masih menjadi “milik” ketua umumnya. Hampir semua partai yang ada memang mengutamakan ketua umumnya. PDI-P tetap menjagokan Megawati, ketua umumnya sebagai presiden. PAN juga menjagokan sang Ketua Umum, Amien Rais. PPP tidak ketinggalan mendahulukan Hamzah Haz selaku ketua umum. Hal yang sama terjadi bahkan dengan partai baru, seperti Partai PIB dengan ketua umumnya Sjahrir.

Kasus khusus membuat Golkar menyimpang. Ketua Umum DPP Golkar, Akbar Tandjung bermasalah secara hukum. Kondisi ini menjadi semacam blessing in disguise, bencana yang kemudian justru menjadi berkah bagi Partai Golkar. Golkar membuka peluang pihak lain untuk menjadi calon presiden Golkar melalui Konvensi Partai. Sepanjang tahun, Golkar mendapatkan perhatian ekstra dari media dan publik. Golkar meraih pula citra partai dengan ide inovatif.

Namun sekali lagi, posisi ketua umum masih diutamakan. Lebih khusus lagi ini berlaku bagi Akbar Tandjung. Lebih dari ketua umum lainnya, Akbar Tandjung sudah “pasang badan” menyelamatkan partai dalam kasus Buloggate 2. Lebih dari ketua umum partai lain, Akbar Tandjung pula paling sering turun ke bawah, dan berhasil mengonsolidasikan partai.

Keputusan Mahkamah Agung yang akan menentukan nasib Akbar Tandjung belum dapat diduga. Namun setidaknya, partai memberikan waktu yang lebih panjang bagi Akbar Tandjung yang sudah berjasa itu. Jika memang ia diputuskan bersalah, Akbar harus mundur dari konvensi. Namun jika diputuskan tidak bersalah, setidaknya Akbar punya waktu yang lebih panjang untuk recovery, dengan cara memundurkan waktu konvensi.

Tetapi, alasan perubahan aturan konvensi Partai Golkar yang paling utama adalah kalkulasi rasional kemenangan partai Golkar sendiri. Seperti yang banyak diprediksi berbagai lembaga polling, Golkar kembali akan menjadi partai utama Indonesia. Jika tidak ada perbaikan berarti di tubuh PDI-P, dan tidak ada kesalahan mendasar Partai Golkar, Pemilu 2004 nanti akan kembali didominasi Golkar, dengan perolehan yang diprediksi sekitar 31%.

Kemenangan Golkar akan lebih pasti jika partai ini masih di-backup secara penuh oleh semua calon presiden Golkar yang potensial. Dari tujuh calon yang ada, tiga berlatar belakang pengusaha, Aburizal Bakri, Surya Paloh, Yusuf Kalla. Dua berlatar belakang militer: Wiranto dan Prabowo. Satu ketua umum partai, Akbar Tandjung. Dan satu gubernur dan “Raja Jawa”: Sri Sultan HB X.

Memang jauh lebih menguntungkan partai Golkar jika tujuh kandidat itu kampanye sepenuh hati untuk Golkar ketimbang hanya satu kandidat. Jika ada “gizi”

dan logistik yang mengalir ke daerah untuk kampanye, dengan bertahannya tujuh calon itu, kemungkinan “gizi” yang mengalir juga lebih besar. Kepastian kemenangan partai Golkar lebih tinggi.

Namun tentu saja tetap ada risikonya. Waktu sosialisasi calon presiden Golkar kelak, ketika sudah dipilih satu, akan jauh lebih pendek. Golkar dapat menang dalam pemilu parlemen, namun kalah dalam pemilu presiden.

Untuk menghindari kemungkinan buruk itu, Partai Golkar sebaiknya jangan tanggung-tanggung. Jika memang konvensi partai diposisikan sebagai instrumen untuk memenangkan partai, sekali lagi aturan konvensi harus siap diubah di bulan April 2004. Yang menjadi tujuan perubahan itu adalah perhitungan rasional memenangkan calon presiden dari partai Golkar.

Harus dibuatkan “sekoci” tambahan, agar Golkar tidak hanya memenangkan parlemen tetapi juga memenangkan kursi presiden. Di bulan April 2004 itu, sekali lagi Rapat Pimpinan Golkar diperlukan, untuk menyusun strategi baru menghadapi dinamika politik terkini. **

Koalisi Menghadang Megawati?

Berdasarkan hasil jajak pendapat aneka lembaga kredibel, hampir dapat dipastikan, tidak ada satu calon presidenpun yang akan menang mutlak di putaran pertama pemilihan presiden. Tak ada calon presiden yang langsung memperoleh lebih dari 50% suara dan mendapatkan minimal 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pemenang mutlak, maka putaran kedua pemilu presiden akan terjadi antara dua calon presiden yang memperoleh peringkat tertinggi pada putaran pertama.

Hampir pula dipastikan, jika tidak ada perubahan berarti, salah satu calon presiden yang lolos di putaran kedua adalah Megawati Soekarnoputri. Selaku juara bertahan, sangat mungkin Megawati di putaran kedua menjadi the common enemy, musuh bersama

kekuatan politik lain. Semua calon dan partai di luar pendukung Megawati, yang bertarung habis-habisan di putaran pertama pemilu presiden, sangat mungkin menggabungkan kekuatan dalam Koalisi Besar Menghadang Megawati.

Bisa dipahami alur berpikir dan strategi yang kini tengah disusun berbagai pihak. Amien Rais, di pertengahan bulan Oktober 2003 membuat pernyataan yang penting di Solo. Menurut Amien, yang dikutip detik.com, lima partai berbasis Islam dan satu ormas yang juga berbasis Islam telah membuat konsensus. Mereka akan mendukung siapa pun calon presiden yang lolos di putaran kedua untuk menghadang Megawati.

Partai yang dimaksud adalah PPP, PKB, PAN, PBB, dan PKS. Di putaran pertama, masing-masing partai Islam itu bebas memiliki calon presiden masing-masing. Namun di putaran kedua, konsensus dibuat. “Jika Megawati maju dan menang lagi, saya yakin tidak ada perubahan,” ujar Amien. Tiga tahun pemerintahan Megawati, sambung Amien lagi, tidak ada perubahan berarti di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan penanggulangan korupsi. “Jika ingin berubah, yang ingin mereform harus bersatu.”

Koalisi dan konsensus politik memang tidak terhindarkan dalam pertarungan politik. Adalah sah saja membuat koalisi besar menghadang siapa pun, baik menghadang Megawati, menangkal Amien Rais atau tokoh favorit lainnya. Namun untuk kepentingan politik Indonesia yang masih rawan, sebaiknya koalisi

besar itu tidak berbasis sentimen agama. Setiap koalisi hendaknya mencampurbaurkan antara kekuatan Islam dan nasionalis sekaligus.

Demi kepentingan yang lebih luas, semoga dikotomi kubu politik Islam versus kubu politik nasionalis sekuler tidak terjadi. Baik kubu Megawati, ataupun yang ingin menghadang Megawati, sebaiknya tetap menghadirkan baik komunitas Islam dan nasionalis secara signifikan dalam kubunya masing-masing.

Pengkubuan Islam Politik versus Nasionalis Sekuler punya efek yang buruk bagi politik Indonesia setidaknya untuk tiga alasan. Pertama, polarisasi itu akan membuat politik Indonesia tidak pernah stabil. Di tingkat partai politik, ataupun di tingkat civil society dan masyarakat pemilih, segmen politik Islam dan segmen politik nasionalis relatif sama banyaknya.

Dapat dikatakan, konstruksi politik Indonesia berdiri pada dua kaki. Satu kaki nasionalis. Satu lagi kaki Islam. Politik Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika ditopang oleh dua kaki itu. Siapapun yang menjadi pemimpin, jika salah satu kaki menarik jarak, pemerintahannya akan goyah karena kurang dukungan. Yang dilakukan justru sebaliknya. Kubu nasionalis dan Islam mesti berbaur, dan sama-sama terwakili dalam kepemimpinan puncak pemerintahan. Dalam warna masyarakat seperti di Indonesia, pemerintahan hanya oleh satu kubu, akan sama goyahnya dengan sang

politisi yang hanya berdiri dengan satu kaki.

Tak terhindari di era kebebasan yang plural, lahir partai politik atau ormas yang hanya mempunyai satu ciri: politik Islam atau politik nasionalis sekuler. Kehadiran kelompok politik dengan warna politik yang tunggal ini hal lumrah dan justru menjadi cermin aspirasi politik yang riil. Namun ketika aneka partai dan ormas jtu ingin berhimpun dalam satu barisan yang lebih besar, rekayasa yang lebih rasional mesti dilakukan. Sekeras mungkin diupayakan agar himpunan politik yang besar itu tetap berisi elemen politik Islam dan politik nasionalis sekaligus.

Kedua, pengkubuan politik Islam versus politik nasionalis justru akan mengentalkan kembali politik aliran. Akibatnya yang menjadi fokus pemerintahan dan politik adalah isu primordial, bukan program dan platform kebijakan publik. Dapat dikatakan semakin politik primordial mendominasi cara pandang politisi, semakin politik yang programatis terlupakan.

Padahal kelemahan utama politik di era reformasi adalah absennya platform dan program yang ditawarkan baik oleh politisi, partai politik ataupun pemerintahan. Pemilu, misalnya, tidak diwarnai oleh debat program. Konflik politik yang terjadi, baik sebelum ataupun setelah pemilu, bukan konflik karena perbedaan atas program dan platform pemerintahan. Padahal efek sebuah pemerintahan atau partai politik terhadap komunitas besar justru tersalurkan lewat program yang nyata. Bagaimana aneka program itu dapat memberikan

hasil maksimal jika kurang didebatkan secara publik akibat isu primordial yang lebih mengemuka.

Antara politik aliran dan program tidak ada hubungan yang otomatis. Politik Islam sebagaimana politik nasionalis dapat menjadi pendukung politik demokrasi ataupun otoriter. Politik nasionalis, sebagaimana juga politik Islam, dapat pula memajukan ekonomi rakyat atau ekonomi pasar. Politik Islam ataupun politik nasionalis mungkin pula mendukung depolitisasi militer atau sebaliknya.

Polarisasi politik Islam versus politik nasionalis justru menghalangi politik untuk semakin terfokus pada program dan platform yang konkret.

Ketiga, pengkubuan politik Islam versus politik nasionalis justru dapat memicu konflik primordial. Indonesia termasuk negeri yang tidak hanya beragam secara etnis dan agama, namun juga punya riwayat konflik primordial yang panjang. Sejak reformasi tahun 1998, sudah lebih dari sepuluh ribu nyawa yang terbunuh hanya karena konflik primordial. Konflik itu dapat mengambil bentuk melalui Islam versus non-Islam, pri versus nonpri atau etnis pendatang versus etnis lokal. Dari semua jenis konflik itu, konflik antara Islam versus non-Islam yang paling berbahaya.

Jika terbentuk kubu politik Islam versus kubu nasionalis sekuler, maka Islam dapat menjadi variabel pembeda. Oleh demagog yang lihai unsur pembeda itu dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik.

Sebagaimana dalam pengalaman Pemilu 1999, bahkan para ulama dapat pula dimobilisasi untuk semakin menghangatkan isu primordial. Dalam kondisi komunitas Indonesia yang sedang luka, isu primordial itu dapat menjadi bensin bagi rumput yang kering. Api akan mudah berkobar. Salah-salah, bahkan api itu dapat membakar penyulutnya sendiri.

Adalah kenyataan bahwa isu primordial kini di Indonesia tetap menjadi unsur pemersatu ataupun pemecah kubu politik. Justru kenyataan itu yang harus diubah dan tidak diperparah. Adalah kenyataan pula bahwa pengkubuan politik dalam era demokrasi tidak akan pernah dihindari. Namun pengkubuan yang dimaksud dapat direkayasa untuk tidak bersandar pada basis politik aliran.

Idealnya pengkubuan politik di Indonesia bersandar kepada program dan platform ekonomi dan politik. Sebagaimana terjadi di negara demokrasi yang matang, pengkubuan antar partai memang bersandar kepada program. Begitu banyak perbedaan program yang dapat menjadi unsur pemersatu atau pemecah lintas partai dan komunitas politik. Misalnya, isu program kesejahteraan bagi rakyat miskin, program penanggulangan pengangguran, program pendidikan murah, program ekonomi kerakyatan versus ekonomi pasar, program penurunan pajak, program toleransi agama, dan program affirmative action golongan minoritas atau kelompok lemah.

Politik yang Islam ataupun yang nasionalis saling berbaaur dalam aneka koalisi ataupun barisan. Himpunan politik Islam dan nasionalis yang satu berhadapan dengan himpunan politik Islam dan nasionalis lainnya untuk isu ekonomi, politik, pendidikan, ataupun isu kebudayaan. Publik tidak dihadapkan lagi pada pilihan politik Islam atau politik nasionalis, tetapi pada pilihan pada program tertentu.

Persoalannya, bagaimana mengubah polarisasi politik, dari politik Islam versus politik nasionalis, menjadi polarisasi pada program semata? literatur transisi demokrasi sangat kaya dengan penyebab perubahan polarisasi politik. Sebagian menyatakan bahwa pembangunan ekonomi secara otomatis akan mengubah polarisasi. Sejalan dengan naiknya level pendidikan dan eksposur dunia modern, ikatan primordial tidak lagi dianggap penting untuk menentukan pilihan politik.

Banyak pula literatur yang mengarahkan kepada perubahan kultur. Semakin liberal sebuah kultur dominan di sebuah negeri, semakin mayoritas penduduk menghayati keberagaman. Di saat itu, ikatan primordial juga dianggap tidak penting untuk menjadi basis pilihan politik.

Namun literatur muthakhir lebih menyerahkan perubahan polarisasi itu kepada peran pemimpin. Terlepas dari kondisi ekonomi dan kultur sebuah bangsa, para pemimpin akan lebih menentukan apakah sentimen politik aliran itu penting atau tidak sebagai basis politik. Karena besarnya peran pemimpin, kita

harap para pemimpin yang ada sekarang tidak bermain api. Begitu besar risikonya jika para pemimpin sekarang ini tidak bersikeras agar polarisasi kubu politik Islam dan politik nasionalis sekuler jangan terjadi.

Sangat sah jika pimpinan dan calon presiden sejak sekarang membuat anjang-angang koalisi besar menghadang calon presiden favorit. Tetapi sebaiknya, koalisi besar jangan bersandar pada sentimen agama. Api sentimen agama itu akan membakar semuanya. **

Heboh Tutut Sebagai Capres

Tidak banyak tokoh yang mendapatkan perhatian publik begitu luas. Berturut-turut selama beberapa hari, Tutut menjadi berita utama pers. Dunia berita menampilkan Tutut dari berbagai sudut. Ada yang mempertarungkannya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai bagian dari pertarungan Orde Lama versus Orde Baru. Ada pula yang melihat kemunculan Tutut sebagai tanda kegagalan reformasi .

Apa arti kehebohan publik merespons Tutut? Apakah itu hanya gejala sesaat? Publik heboh hanya karena ada unsur kejutan kemunculan Tutut? Namun, bersama waktu, publik kembali normal, dan Tutut menghilang dari peredaran? Ataukah kehebohan ini gambaran kerinduan publik atas stabilitas politik dan

pertumbuhan ekonomi era Soeharto? Kemunculan Tutut dianggap representasi dari kerinduan publik atas pemimpin nasional yang kuat? .

Banyak pemimpin dan aktivis partai yang me-review peta politik. Tampilnya Tutut kembali dalam pentas nasional, jika memang Tutut bersedia, dianggap dapat mengubah peta kekuatan politik dan pola aliansi. Mulai dihitung, jika Tutut muncul, popularitas capres mana yang akan terganggu dan terambil suaranya oleh Tutut. Dianalisis pula, partai mana yang paling dirugikan dan diuntungkan dengan munculnya PKPB, partainya Tutut.

Lembaga survei tidak ketinggalan menjadi repot. Daftar calon presiden yang harus ditanyakan ke publik luas bertambah. Tutut terlalu penting untuk diabaikan dalam jajak pendapat. Lembaga survei harus pula membuat desain pertanyaan untuk menguji apa yang publik suka atau tidak suka dengan kehadiran Tutut sebagai capres. Tutut harus dihadap-hadapkan juga bertanding dengan satu capres terkuat, lalu dua, tiga, lima sampai sepuluh capres lainnya. Dari disain pertanyaan itu dapat dianalisis seberapa serius kekuatan Tutut sebagai capres di mata pemilih.

Sebelum ada data yang empiris dari hasil surveil beberapa spekulasi analisis dapat diberikan untuk kasus Tutut. Lain dulu lain sekarang. Tutut di era kejayaan Pak Harto akan berbeda dengan Tutut di saat

lima tahun setelah jatuhnya Soeharto. Jarak waktu lima tahun itu belum terlalu lama. Kemarahan publik atas figur Soeharto belum sepenuhnya terkisis. Memang publik merindukan nuansa Orde Baru. Tetapi yang dirindukan hanyalah prestasi ekonomi dan stabilitas politik, bukan figur Soeharto, Dinasti Soeharto, bukan pula rezim otoriternya

Akan berbeda pula kondisinya dengan Tutut setelah sepuluh, 15 atau 20 tahun era reformasi. Saat itu, memori kolektif publik atas Soeharto mulai netral. Apalagi jika reformasi justru membuat negara semakin terjatuh dalam krisis. Pada 2009, 2014, atau 2019, Tutut lebih mudah dipopulerkan ke hadapan publik luas.

Di era kejayaan Soeharto, setidaknya sampai awal tahun 1990-an, Tutut sangat prospektif. Saat itu mungkin tidak ada figur lain yang lebih menjanjikan ketimbang Tutut. Ayahnya sedang berada di puncak kewibawaan. Baik pengusaha, pimpinan militer bahkan tokoh pesantren berlomba-lomba mendekati Tutut. Lebih dari tokoh lain, Tutut dianggap calon pemimpin nasional yang paling mungkin.

Kita ingat Gus Dur. Sebagai Ketua Umum PBNU, dan tokoh masyarakat yang sangat populer, saat itu Gus Dur justru menggandeng Tutut keliling pesantren. Tak lupa Gus Dur mengucapkan sejenis “pesan sponsor” Menurut Gus Dur, Tutut adalah calon pemimpin nasional masa depan. Para kiai dan santri, banyak yang mengamini pernyataan Gus Dur.

Pemimpin militer kala itu banyak pula yang merapat ke Tutut. Yang paling menonjol adalah Hartono, Ketua Partai Karya Peduli Bangsa saat ini. Padahal, saat itu, Hartono adalah pimpinan militer yang aktif. Tidak sungkan ia menggunakan dan memakai jaket kuning Golkar. Ia mengesankan betapa nyamannya tentara menjadi kader Golkar, mendampingi Soeharto dan Tutut sebagai anak Soeharto yang paling potensial di panggung politik.

Para pengusaha tidak ketinggalan mendekat. Ibarat semut, Tutut adalah gula yang dicari. Aneka pengusaha besar mencari cara untuk membangun usaha dengan Tutut. Lebih dari anak pejabat lain, Tutut berkembang menjadi pengusaha yang menjanjikan. Kedekatannya dengan sumber kekuasaan, membuat aneka usaha besar apa saja dapat berkembang jika dekat dengan Tutut.

Jika saja saat itu Soeharto menjalankan apa yang dipilih oleh Lee Kwan Yew, masa depan Tutut sebagai presiden Indonesia tahun 2004 hampir pasti. Di Singapura, Lee Kwan Yew memilih lengser justru di puncak kewibawaannya. Sungguhpun lengser, Lee Kwan Yew tetap menjadi paramount leader, pemimpin informal yang paling didengar. Lee sendiri menunjuk Goh Chok Tong sebagai penggantinya. Namun, semua tahu, pengganti itu hanya sementara sebelum anak kandung Lee Kwan Yew sendiri yang akan naik ke pentas nasional sebagai pemimpin tertinggi.

Jika saja sebelum tahun 1998, katakanlah pada 1995 Soeharto mengundurkan diri, suasananya sangat berbeda

buat Tutut. Katakanlah saat itu, Soeharto lengser dan menyerahkan kursi kekuasaan kepada Try Sutrisno atau Habibie. Sampai hari ini, Soeharto akan menjadi paramount leader dan pemimpin informal yang sangat efektif. Pada 2004, Soeharto masih punya kekuasaan meminta agar Tutut dipilih sebagai pemimpin nasional berikutnya.

Lengser gaya Lee Kwan Yew tidak terjadi. Soeharto keburu dilengserkan. Pada 1998, Soeharto menjadi common enemy, musuh publik nomor satu. Tak hanya mahasiswa dan buruh, tetapi hampir seluruh elemen penting masyarakat menjauhinya. Mantan murid Soeharto di MPR dan kabinet bahkan secara publik minta ia mundur. Apalagi tokoh oposisi seperti Amien Rais, Ali Sadikin dan lainnya. Golkar sendiri saat itu terpecah dua.

Kini, lima tahun kemudian, waktu belum terlalu kondusif bagi kembalinya dinasti Soeharto. Karena kesalahan Soeharto sendiri dalam proses lengsernya, masih dibutuhkan waktu yang lebih lama agar dinastinya dapat kembali tampil di panggung nasional.

Akankah PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) pimpinan Hartono menjadi partai besar? Akankah partai itu tertolong jika mengusung isu Tutut sebagai capres di tahun 2004?

Lapangan politik Indonesia sangat kejam terhadap partai baru. Tak mudah bagi partai baru tumbuh

dan besar. Pemilih Indonesia kini berjumlah sekitar 145 juta. Mereka tersebar di 32 provinsi, empat ratus lebih kabupaten, dan ribuan desa-kota. Tak mudah pula menjangkau mereka. Apalagi sebagian hidup di pelosok, tidak mudah dijangkau transportasi bahkan televisi sekalipun. Agar mereka mengenal partai baru, dibutuhkan upaya yang luar biasa.

Pemilu 1999, menunjukkan pengalaman konkret pemilih Indonesia dengan partai baru. Saat itu partai baru yang memperoleh suara lumayan hanya PKB dan PAN. PKB dapat populer karena ia menggunakan jaringan NU. PAN dapat mendulang suara di atas 5 persen karena ada dukungan Muhammadiyah.

Apa yang terjadi dengan partai baru lainnya? PBB hanya mendapatkan suara kurang dari 4 persen. Partai Keadilan lebih sedikit lagi. Terlampau banyak partai baru yang hanya mendapatkan kursi apa adanya, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan kursi.

Parlemen saat itu masih dikuasai partai lama, PDI (P), Golkar dan . PPP. Suka atau tidak, mau tidak mau, memang hanya tiga partai itu yang dikenal publik. Pemilu Orde baru yang berulang kali, memang hanya diikuti oleh tiga partai itu. Dalam kondisi euforia reformasi sekalipun, publik Indonesia hanya mengizinkan tambahan PKB, PAN dan PBB untuk lolos threshold. Padahal, saat itu pada 1999, baru ada tiga pemain partai politik lama.

Kini pada 2004, sudah ada tujuh pemain lama, PDIP,

Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan PK (5). Semakin sulit bagi partai baru untuk masuk ke dalam lima bahkan tujuh besar. Dari berbagai hasil survei, termasuk LSI (Lembaga Survei Indonesia) 2003, partai baru memang tidak menjanjikan. Peringkat ketujuh partai besar masih ditempati oleh pemain lama.

Penghalang yang paling serius bagi partai baru adalah kesadaran pemilih. Umumnya partai baru hanya dikenal di kalangan 35 persen pemilih. Sementara pemain lama, apalagi PDIP, Golkar dan PPP sudah dikenal oleh lebih dari 85 persen pemilih. PKPB, partainya Hartono dan Tutut juga akan mengalami nasib sama.

Walau didukung Tutut, perolehan partai itu tidak signifikan. Pada 1999, PAN bahkan didukung tokoh sekaliber Amien Rais. Padahal saat itu Amien Rais sangat populer, bahkan mungkin paling populer.

Amien Rais dianggap publik sebagai pahlawan reformasi. PAN didukung pula oleh banyak kader Muhammadiyah. Ternyata PAN hanya memperoleh suara 7 persen. Tutut saat ini tidak sepopuler Amien Rais di tahun 1999. PKPB juga tidak mempunyai akar rumput seluas PAN.

Jika memang PKPB tidak signifikan untuk Pemilu 2004, bagaimana peluang Tutut secara pribadi sebagai calon presiden? Tutut sangat dikenal. Penampilannya di publik bahkan dianggap lebih menarik, lebih supel, lebih ramah dibandingkan Megawati. Uangya juga

dipercaya masih cukup banyak untuk kampanye.

Penasihat politik yang andal akan memberikan saran profesional yang paling baik buat Tutut. Jika tidak pasti menang menjadi presiden tahun 2004, sebaiknya Tutut memang jangan dulu maju. Tahun 2004 digunakan untuk membaca lapangan saja. Pada 2009, apalagi 2014, Tutut dapat benar-benar dipersiapkan sebagai calon presiden yang serius.

Soeharto adalah tokoh yang terlalu penting dan terlalu terkenal untuk politik Indonesia. Kesalahannya akan dimaafkan publik terlebih lagi jika publik mengingat jasa yang sudah ia berikan kepada negara. Bagi Dinasti Soeharto, karier politik di Indonesia sudah merupakan jaminan. Sama menjamainya karier politik keturunan Nehru di India.

Persoalan bagi Tutut hanya masalah kerangka waktu. Pemilu 2004 masih terlalu cepat buat kemunculannya. Jika Tutut memaksakan tampil, akibatnya justru dapat fatal. Kemarahan publik atas Soeharto justru dapat dibangkitkan kembali oleh aneka lawan politiknya. Tutut justru dapat kembali menyatukan kekuatan reformasi untuk melawannya. Padahal kekuatan reformasi kini relatif sudah terpecah belah

Sebagai pribadi yang matang, Tutut pun akan wait and see. Kehebohan media atas Tutut agaknya hanya sementara. Tutut kembali akan tenggelam, dan terlahir kembali menjadi sosok yang sangat kuat sebagai capres pada 2009, atau 2014. **

Soekarnoputri vs “Soehartoputri?”

Apa jadinya jika di tahun 2004 kita harus memilih antara Megawati versus Tutut? Katakanlah saat itu hanya dua “srikandi” ini yang lolos ke putaran kedua pemilu presiden? Yang satu putri sulung Bung Karno dan satu lagi putri sulung Pak Harto, dua tokoh yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia modern. Bung Karno penguasa mutlak Orde Lama. Sedangkan Pak Harto penguasa mutlak Orde Baru.

Sekitar 35 tahun lalu, di tahun 1965-1966, politik Indonesia diwarnai kompetisi dan konflik antara Bung Karno dan Pak Harto. Pertarungan dua tokoh itu bukan saja mewakili pertarungan dua kelompok politik yang berbeda. Ia juga pertarungan dua “zaman” dan dua “rezim.” Kemenangan Bung Karno atau keunggulan Pak Harto dalam pertarungan itu akan menghasilkan masa

depan Indonesia yang berbeda.

Kini pertarungan dua tokoh itu sangat mungkin dilanjutkan oleh kedua putri kesayangan mereka, Megawati Soekarnoputri dan Tutut “Soehartoputri.” Belum dapat kita prediksi, jika dua “srikandi” itu bertarung, apakah ini hanya pertarungan dua kelompok politik saja? Ataukah ini juga pertarungan dua “masa depan” Indonesia yang berbeda? Belum dapat dikalkulasi, apakah itu juga akan menjadi pertarungan dua rezim politik dan ekonomi yang berlainan?

Dua puluh tahun dari sekarang, mungkin pertarungan berikutnya antara para cucu Bung Karno dan cucu Pak Harto. Dan seterusnya, dan seterusnya. Suka atau tidak, Bung Karno dan Pak Harto potensial menghasilkan “darah biru” dalam politik Indonesia. Anak, menantu, cucu, pengikut utama dua tokoh itu akan mendapatkan “bobot politik” yang otomatis. Persoalan yang tersisa hanyalah kemampuan dari generasi keturunannya itu untuk memaksimalkan politik darah biru.

Adalah fenomena lazim jika keturunan dari tokoh besar sebuah bangsa mempunyai kharisma politik yang besar. Di era kerajaan, keturunan raja otomatis menjadi raja. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun. Ketika kerajaan berubah menjadi republik, pemimpin republik yang kuat juga melahirkan kharisma kepada keturunannya.

Di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Burma hal itu

terjadi. Tapi di Dunia Ketiga, kasus yang mencolok berlangsung di India. Sebagaimarla Bung Karno, dan mungkin juga Pak Harto, Nehru di India tidak hanya menjadi pemimpin yang berpengaruh. Ia juga menjadi pendiri sebuah dinasti politik atau darah biru politik. Sejak awal kemerdekaan India, Nehru mendominasi politik India dengan aneka gagasannya, dengan personalitasnya, dan dengan manuver politiknya.

Selesai era Nehru, putri kesayangannya, Indira Gandhi, tampil ke pentas politik. Sebagaimana ayahnya, Indira Gandhi menjadi pemimpin tertinggi Partai Kongres, partai ayahnya. Setelah itu, sebagaimana ayahnya, ia menjadi Perdana Menteri India. Semua tahapan itu dilakukan sesuai dengan prosedur demokrasi. Rakyat banyak yang memilih Indira Gandhi dalam pemilu demokratis.

Indira Gandhi akhirnya juga harus turun dari takhta. Darah biru kemudian dilanjutkan oleh cucunya Nehru atau putra Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Sebagaimana sang putri, sang cucu juga menapak kekuasaan dengan jalur yang sama. Ia mengambil alih kepemimpinan partai. Setelah itu bertarung dalam pemilu demokratis dan menjadi Perdana Menteri. Rajiv Gandhi terbunuh. Kini pimpinan partai dilanjutkan oleh menantunya Indira Gandhi atau istrinya Rajiv Gandhi, Sonya Gandhi.

Dinasti biru itu tidak hanya fenomena Dunia Ketiga. Bahkan di jantung dunia modern, di Amerika Serikat, darah biru politik juga terjadi. Kennedy sudah pula menjadi “dinasti politik” yang memberikan kharisma

ekstra kepada keluarga besarnya. Tidak hanya John F. Kennedy menjadi Presiden AS. Adiknya Robert Kennedy hampir pula menjadi presiden namun terbunuh. Adiknya lagi Teddy Kennedy menjadi senator utama.

Tak hanya adik, putra dan keponakan John F. Kennedy juga menjadi pemain politik AS. Mereka menjadi anggota kongres, senator ataupun kandidat gubernur. Arnold Schwarzeneger juga tidak lepas dari pesona “dinasti” Kennedy. Ia adalah suami dari anggota keluarga besar Kennedy.

Mengapa dalam sistem politik demokratis masih mungkin terlahir sebuah “dinasti” politik? Baik di Dunia Ketiga ataupun di Dunia Pertama, “dinasti” politik adalah fenomena “kepahlawanan.” Darah biru politik itu selalu didahului oleh lahirnya tokoh besar yang sangat membekas dalam ingatan kolektif publik. Nehru, Kennedy, Bung Karno dan Pak Harto tidak hanya menjadi pemimpin negaranya di sebuah masa. Mereka juga sudah menjadi ikon zamannya.

Ingatan kepada Nehru atau Kennedy diwariskan oleh para pengikutnya kepada anak, mantu, bahkan ke generasi para cucu. Kekaguman, perasaan berutang budi, kesamaan cita-cita publik luas kepada tokoh tersebut terus hidup dan tumbuh. Untuk kasus Nehru dan Bung Karno, bahkan ingatan kolektif itu dapat melahirkan loyalitas pemilih kepada aneka simbol sang pemimpin.

Pendiri dinasti tampil sebagai pemimpin yang sangat kuat di zamannya. Ia sudah menjadi pusat emosi publik. Ia menjadi inspirasi. Ia menggerakkan motivasi. Bahkan ia juga memberikan perspektif, pandangan dunia kepada pengikutnya untuk memberi makna kehidupan berbangsa. Lebih dari itu, para pendiri dinasti itu juga membangun sebuah rezim yang khas, yang dapat melahirkan sejenis ideologi seperti Sukarnoisme, Nehruisme, ataupun Soehartoisme.

Bung Karno segera menjadi ikon sebuah periode pertumbuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun identitas. Setelah kolonialisme pergi, para pemimpin bangsa sibuk menyatukan teritori yang minta ampun luasnya. Persatuan Indonesia segera menjadi slogan untuk menyatukan aneka budaya dan pulau yang maha banyak itu. Bung karno hidup dengan politik membangun karakter bangsa Indonesia .

Karena perannya yang khas, ideologi nasionalisme di Indonesia akhirnya berpusat kepada figur Bung Karno. Aneka kebijakan ekonomi dan politik juga terpengaruhi oleh sentimen nasionalisme itu. Akibat politik yang beragam, ikatan persatuan bahkan pernah dipaksakan kepada kelompok nasionalis, agama dan komunis. Akibat kecintaan yang tinggi kepada kemandirian bangsa, pernah pula dikembangkan sentimen negatif kepada pinjaman utang luar negeri.

Kini, hampir empat puluh tahun setelah selesainya era Bung Karno, sentimen nasionalisme itu tidak ikut menghilang. Memang zaman sudah berubah di sana dan

di sini. Globalisasi sudah memberikan nasionalisme aroma yang berbeda. Namun patriotisme, kecintaan pada persatuan, pembelaan kepada NKRI, sentimen membangun aliansi politik yang plural, suka atau tidak, akan selalu terkait dengan figur Bung Karno.

Sedangkan Pak Harto menjadi “raksasa” politik dan ikon untuk zaman yang sama sekali berbeda. Setelah melewati tahap pembangunan karakter serta persatuan Indonesia, kerja selanjutnya adalah modernisasi. Membangun solidaritas dan membangun ekonomi negara memang membutuhkan dua tipe kepemimpinan yang berbeda.

Bertolak belakang dengan Bung Karno, Pak Harto justru bergandengan erat dengan dunia Barat. Bantuan luar negeri bukan saja dibolehkan tapi justru menjadi mesin utama modernisasi Indonesia. Ekonomi negara dibangun tidak lagi berdasarkan slogan. Para teknokrat, yang memang belajar teknis ekonomi diberi peran sangat besar untuk menumbuhkan ekonomi nasional.

Politik yang gonjang-ganjing juga disederhanakan oleh Pak Harto. Stabilitas politik dibutuhkan untuk memodernkan Indonesia. Apa daya saat itu stabilitas politik berarti politik yang otoriter. Partai politik disederhanakan hanya menjadi tiga. Satu partai dijadikan kendaraan pemerintah dan diupayakan selalu memenangkan pemilu. Aneka ormas dan civil society juga dikontrol. Oposisi dikooptasi, jika gagal, direpresi.

Lahirilah Soeharto sebagai Bapak Pembangunan.

Indonesia di bawah Soeharto pernah menikmati pujian internasional sebagai bagian dari macan Asia. Modernisasi berlangsung secara cukup cepat di bawah kepemimpinan Pak Harto. Namun akhirnya datang pula masa yang menunjukkan betapa modernisasi itu berdiri dalam fondasi yang rapuh. Krisis yang melanda Indonesia menjadi sulit diatasi karena kerapuhan fondasi itu.

Sebagaimana Bung Karno, Pak Harto juga dijatuhkan di akhir masa kekuasaannya. Namun figur Bung Karno, sebagaimana dengan Pak Harto, akan terus hidup dalam ingatan kolektif. Dalam satu masa, mungkin ada represi politik atas tokoh itu. Tetapi sekali lagi attachment publik kepada dua tokoh itu sudah terlalu besar. Pada waktunya ingatan publik itu lahir kembali dan sekali lagi merindukan simbol Bung Karno ataupun Pak Harto.

Simbol terpenting Bung Karno ataupun Pak Harto adalah gagasannya. Namun di zaman yang cepat berubah seperti sekarang, aneka gagasan mudah menjadi usang. Simbol yang lebih lejang dan tahan lama, tidak lain adalah putra dan putri tokoh itu sendiri. Megawati menjadi penting sebagian besar karena ia menyandang, g Soekarnoputri di belakang namanya. Tutut juga menarik perhatian publik karena “Soehartoputri,” bahwa ia putri kesayangan Pak Harto.

Sudah terbukti bahwa Megawati akhirnya menjadi Presiden Indonesia. Akan terbukti pula pada satu masa,

keturunan Pak Harto, menjadi Presiden Indonesia. Dua tokoh itu terlalu penting untuk diabaikan. Pengikut dua tokoh itu juga terlalu banyak untuk disepelekan.

Pekerjaan selanjutnya ada pada lingkaran pertama putra dan putri Bung Karno atau Pak Harto. Tak perlu disesali, jika putra dan putri Bung Karno atau Pak Harto tidak memiliki kecerdasan atau leadership yang legendaris seperti ayah mereka. Namun politisi, para ideolog, dan para ahli strategi di ring utama, dapat memolesnya. Akhirnya, walau putra dan putri itu hanya “dipakai” sebagai simbol, tetapi itu adalah simbol yang bermakna dan penting. Pembantu di ring utama, misalnya, sudah memoles mereka dengan platform yang dibutuhkan zamannya.

Demikianlah kehadiran Soekarnoputri atau “Soehartoputri,” “Soekarnocucu” atau “Soehartocucu” akan terus meramaikan politik Indonesia. Suka atau tidak, dua tokoh ini, Bung Karno dan Pak Harto, melebihi semua tokoh lain, akan mewariskan darah biru dalam politik Indonesia. **

Dua Momen Pemilu di 2004

Bagaimanakah tahun 2004 akan dikenang? Ini pertanyaan yang aling sentral menyambut tahun baru, tahun 2004. Pergantian ahun tidak hanya pergantian angka, dari 2003 menjadi 2004. Pergantian tahun juga menjadi pergantian spirit, pergantian harapan dan pergantian keberuntungan. Begitu banyak peristiwa terjadi dalam satu tahun itu yang akan potensial membentuk harapan baru.

Lebih dari tahun biasa, tahun 2004 punya keistimewaan sendiri. Untuk pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, satu tahun mempunyai tiga kali pemilu nasional. Setelah selesai pemilu legislatif, segera menyusul pemilu presiden tahap pertama. Selanjutnya menyusul pemilu presiden tahap kedua.

Untuk pertama kali pula dalam sejarah Indoensia, presiden dipilih secara langsung. Selama ini presiden

dipilih melalui badan perwakilan seperti MPR. Siapa yang akan menjadi presiden ditentukan oleh segelintir kepala yang menjadi anggota MPR. Presiden Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh negosiasi politik elite.

Namun kini yang menentukan presiden Indonesia adalah seratus empat puluh lima juta pemilih. Mereka tersebar dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Dalam pemilihan langsung ini, suara seorang profesor bernilai sama dengan suara seorang yang buta huruf. Suara seorang aktivis yang sangat paham politik juga dinilai sama dengan suara seorang yang sama sekali tidak peduli masalah politik. Ini konsekuensi dari demokrasi, one man one vote.

Dengan peristiwa tiga pemilu, akankah tahun 2004 mengubah wajah politik Indonesia? Jawabannya sangat tergantung pada apa yang terjadi pada dua momen pemilu.

Momen pertama terjadi pada akhir April 2004. Pada momen itu, secara resmi diumumkan perolehan kursi DPR secara nasional. Partai mana yang diklaim sebagai partai besar atau partai kecil, ditentukan oleh perolehan kursi DPR. Partai mana yang menjadi pemain utama dan pemain figuran dalam politik Indonesia, juga ditentukan oleh perolehan kursi itu.

Momen itu sangat penting karena ia menentukan beberapa hal sekaligus. Ia menentukan partai politik yang memiliki fraksi dan yang tidak memiliki fraksi

DPR. Aturan yang sudah disepakati, hanya partai yang memperoleh minimal 3% kursi DPR yang memiliki fraksi. Dengan fraksi, partai itu mempunyai perpanjangan tangan untuk turut membentuk politik DPR, baik di bidang perundang-undangan, budget nasional dan pengawasan pemerintahan.

Pada Pemilu 1999, hanya enam partai yang memiliki fraksi: PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB. Partai keadilan yang tidak lolos threshold menggabungkan diri dengan PAN dan menjadi fraksi reformasi. Keenam partai itu menjadi pemain utama DPR. Ke mana lembaga DPR dibawa, sepenuhnya ditentukan oleh negosiasi, pilihan dan kompromi serta pertarungan dari enam fraksi tersebut.

Pemilu 2004 diharapkan melahirkan jumlah fraksi yang lebih sedikit. Tak ada demokrasi yang stabil jika terlalu banyak partai politik dan fraksi di DPR. Secara natural diharapkan, Pemilu 2004 membawa politik Indonesia kepada multipartai yang lebih sederhana. Jika di tahun 1999 ada enam fraksi, sebisa mungkin di tahun 2004 tinggal lima fraksi, atau empat fraksi.

Namun berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di bulan November 2003, pemain di DPR justru bertambah. Partai politik yang ada gagal bertambah besar. Partai politik yang sudah besar di tahun 1999 gagal menyerap kelompok politik lain sehingga jumlah partai yang memiliki fraksi makin sedikit. Yang terjadi justru sebaliknya. Di tahun 2004, dari enam fraksi akan bertambah menjadi tujuh sampai sepuluh fraksi.

Akibatnya, negosiasi dan kompromi di DPR untuk suara mayoritas makin sulit karena DPR diisi oleh lebih banyak fraksi.

Yang penting juga dalam momen ini adalah penentuan partai yang berhak ikut Pemilu 2009. Sudah pula ditentukan bahwa partai politik yang berhak ikut Pemilu 2009 hanya partai yang memperoleh minimal 3% kursi DPR atau 5% suara Pemilu 2004. Partai yang gagal memperoleh perolehan itu akan gugur. Jika masih berminat ikut Pemilu 2009, partai yang gugur mesti menggabungkan diri dengan partai yang berhasil, atau membentuk partai dengan nama baru dan ikut seleksi .

Jika mekanisme itu dilakukan berulang-ulang, niscaya dalam 25 tahun mendatang ada partai yang terus-menerus menjadi peserta pemilu. Peserta tetap itu potensial menjadi pemain utama dalam politik Indonesia. Ada pula partai yang terus berganti nama di setiap pemilu. Partai yang acapkali berganti nama itu cenderung menjadi pemain figuran. Hanya peristiwa yang luar biasa saja yang mampu membuat partai figuran menjadi partai besar.

Di tahun 1999, partai yang lolos threshold hanya enam partai. Tiga di antaranya adalah pemain lama, Golkar, PDI-P dan PPP. Hanya tiga partai baru yang mampu lolos threshold 2% saat itu, PKB, PAN dan PBB. Tiga partai itu beruntung karena punya jaringan masyarakat yang luas. PKB dengan NU, PAN dengan

Muhammadiyah, and PBB dengan jaringan Masyumi lama.

Begitu kejam politik Indonesia terhadap partai baru. Padahal di tahun 1999, semangat terhadap partai baru sedang tinggi-tingginya. Di saat itu partai politik lama hanya tiga partai. Di tahun 2004 situasi lebih sulit bagi partai baru. Saat ini pemain lama sudah ada enam partai: PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.

Berdasarkan hasil survei LSI November 2003, sekitar 85% suara akan tetap menjadi pemilik enam partai lama plus PKS. Sisa suara, sekitar 15% akan diperebutkan oleh sekitar 17 partai baru. Partai yang memiliki jaringan luas, sumber dana dan SDM yang berpengaruh, lebih berpeluang untuk juga mencapai threshold.

Dari jajaran partai baru itu yang berpeluang adalah Partai Demokrat yang menggandeng Susilo Bambang Yudhoyono, PKPB yang membawa Tutut Suharto, Partai Pelopor dengan komandan Rachmawati Soekarnoputri dan Partai Bintang Reformasi dengan KH Zainudin MZ. Partai lain juga punya peluang 10105 threshold tetapi dengan perjuangan yang lebih sulit, seperti PNBK, partai PIB dan Partai PDK.

Momen kedua yang cukup penting di tahun 2004 terjadi di awal Mei, tepatnya tanggal 1-7 Mei. Jika tidak terjadi perubahan jadwal, tujuh hari di awal Mei itu akan menjadi seminggu yang terpanjang dan paling panas dalam pentas politik nasional di tahun 2004.

Hanya dalam waktu sepekan itu dibuka pendaftaran paket presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden tahap pertama.

Himpunan terbatas presiden dan wakil presiden Indonesia sudah diplot di awal bulan Mei. Siapa yang akan menjadi presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung hanya salah satu dari calon yang diresmikan di awal Mei itu. Siapa yang akan menjadi inovator utama politik Indonesia pasca-Pemilu 2004 adalah salah satu dari beberapa paket yang diresmikan di awal Mei itu.

Sesuai dengan aturan pemilu presiden, hanya partai politik yang punya wewenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Tak ada calon presiden independen dalam politik Pemilu 2004. Juga diatur bahwa tidak semua partai pemilu yang punya wewenang itu, tetapi hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 5% suara atau 3% kursi DPR. Satu partai yang berwenang hanya boleh mengajukan satu paket presiden dan wakil presiden. Calon presiden Indonesia sangat terbatas.

Berdasarkan survei LSI November 2003, lima partai hampir pasti memiliki wewenang mengajukan calon presiden dan wakil presiden, PDI-Pf Golkar, PPP, PKB dan PAN. Dua partai lainnya mungkin lolos threshold dan juga punya kewenangan yang sama, PBB dan PKS. Tujuh partai itu diprediksi menguasai sekitar 85% kursi DPR.

Sisa 15% kursi DPR jika dibagi batas threshold 3% akan menghasilkan paling banyak lima paket presiden dan wakil presiden tambahan. Dengan asumsi setiap partai atau gabungann partai yang berhak memiliki paket presiden dan wapres yang berbeda, paling banyak ada 12 paket yang diresmikan di awal Mei. Karena selalu ada kemungkinan koalisi antarpartai dalam paket itu, mungkin jumlah itu dapat menyusut menjadi lima paket saja.

Dengan perhitungan kasar dan sederhana model di atas, pada awal Mei 2004, akan bertarung sekitar lima sampai dua belas paket calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Ini sebuah kompetisi yang sangat ramai dan panas. Pertarungan presiden itu membuat 2004 sangat dinamikf sekaligus sangat rawanf mencemaskan tetapi romantik pula.

PDI-P sudah pasti menjagokan Megawati Soekarnoputri. PAN sudah pula pasti mengelus Amien Rais "Putra Nusantara." Sejauh ini hanya dua calon itu yang sudah tegas menyatakan pencalonannya dan aman karena partainya hampir pasti lolos threshold. Pencalonan Gus Dur melalui PKB masih 'abu-abu. Sangat mungkin di akhir deadline, Gus Dur mengundurkan diri dan menyerahkan pencalonan presiden PKB kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Hamzah Haz juga masih menghitung kemungkinan. Ia tentu lebih merasa aman jika tetap menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri. Yusril Ihza Mahendra juga masih menunggu hasil pemilu legislatif.

Karena usianya masih muda, Yusril tidak terlalu ngotot menjadi calon presiden. Ia juga sadar bahwa ia belum mempunyai bobot politik untuk menyaingi Megawati Soekarnoputri atau Amien Rais. Posisi paling aman buat Yusril menjadi wakil presiden bagi Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono.

Calon presiden partai Golkar yang sedang ditunggu. Berbeda dengan partai lain, berdasarkan hasil survei LSI dan lembaga lain yang kredibel, Golkar akan menjadi pemenang Pemilu 2004. Slogan Golkar “Mari Bung Rebut Kembali” yang merupakan seruan untuk kembali meraih supremasi pemilu DPR akan terealisasi jika Golkar sepanjang kampanye tidak membuat kesalahan besar.

Namun sejauh ini belum ada tanda siapa yang akan memenangkan konvensi calon presiden Golkar. Keputusan Mahkamah Agung mengenai kasus hukum Akbar Tandjung akan sangat menentukan. Dengan kasus Akbar Tandjung itu, jika Golkar ingin menang pula di pemilu presiden, harus ada inovasi tambahan.

Misalnya, Golkar ikut mendukung calon presiden lain yang potensial mengalahkan Megawati. Kompensasinya, Golkar diberikan wewenang menentukan 50% kabinet. Tokoh yang dapat diajak Golkar adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilihan, strategi, kompromi, negosiasi dan konflik elite partai di dua momen Pemilu 2004 di atas akan sangat menentukan nasib reformasi. **

Akbar Tandjung Pascakasasi

Sebelum divonis bebas oleh Mahkamah Agung, posisi popularitas Akbar Tandjung tidak buruk. Berdasarkan data survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) di 370 desa dan kota di seluruh provinsi pada bulan November 2003, ia menempati urutan nomor dua sampai enam. Di urutan yang sama, terdapat pula nama Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Sri Sultan, dan Gus Dur. Jarak popularitas kelima tokoh ini tidak banyak, masih di bawah sampling error.

Di urutan teratas, masih bertahan Megawati Soekarnoputri. Sebagai presiden yang masih berkuasa, posisinya memang lebih diuntungkan. Megawati berkesempatan untuk terus muncul di layar televisi hampir setiap hari. Namun popularitas Megawati sudah memasuki angka bahaya, hanya sekitar 18 persen. Angka ini hampir sama dengan perolehan dukungan PDI-P.

Berarti, lebih dari delapan puluh persen pendukung

yang tidak lagi memilih Megawati. Persoalannya, memang belum ada tokoh lain yang melampaui Megawati. Calon presiden Partai Golkar belum bersatu suara mendukung satu calonnya. Susilo Bambang Yudhoyono juga masih belum secara resmi mendeklarasikan pencalonannya. Megawati masih teratas, lebih karena saat ini hanya Amien Rais yang sudah resmi mencalonkan diri dan datang dari partai yang sudah pasti lolos threshold.

Kini Akbar Tandjung sudah dibebaskan oleh kasasi Mahkamah Agung. Sudah pasti hilang pula kendala hukum yang dapat mendiskualifikasi Akbar Tandjung. Sangat mungkin publik yang tadinya ragu-ragu mendukung Akbar Tandjung kini mulai berbulat hati. Bahkan cendekiawan Nurcholish Madjid membuat pernyataan yang sangat lugas. Jika dibebaskan oleh Mahkamah Agung, menurut Nurcholish, Akbar Tandjung akan mengalahkan Megawati dengan mudah. Benarkah demikian?

Di depan, ada beberapa perkembangan yang signifikan terhadap posisi popularitas Akbar Tandjung. Sebagian akan memberikan kontribusi positif. Sebagian lagi akan membuat dampak sebaliknya, negatif. Hanya survei lapangan dengan metodologi yang ketat dapat menjawab secara akurat berapa persen sumbangan kontribusi positif dan negatif itu bagi popularitas Akbar Tandjung.

Namun sebelum survei nasional LSI berikutnya

dilakukan di bulan Maret 2003, beberapa spekulasi prediksi dapat dibuat. Efek positif pertama bagi Akbar Tandjung tentu saja berasal dari kewibawaan Mahkamah Agung melalui kasasi. Dilepaskannya Akbar Tandjung menjadi bebas, tidak hanya membuat Akbar Tandjung dapat bersaing dengan status hukum yang sejajar berhadapan dengan calon presiden lain.

Kasasi bebas Akbar Tandjung dapat menjadi momentum awal baginya untuk melakukan recovery dalam citra publik. Sekitar dua tahun lamanya Akbar Tandjung menjadi bulan-bulanan opini publik. Persepsi yang buruk atas dirinya, baik sengaja atau pun tidak sengaja sudah digembar gemborkan di aneka media. Puluhan demonstrasi dan hujatan disaksikan langsung oleh publik luas baik melalui mata kepala sendiri ataupun melalui televisi, koran dan majalah.

Pembunuhan karakter atas Akbar Tandjung selama ini memang menampakkan hasilnya. Berdasarkan survei LSI, umumnya ketua umum partai memperoleh dukungan dan popularitas mendekati dukungan atas partainya. Megawati, Amien Rais, Gus Dur dan Hamzah Haz memperoleh tingkat popularitas yang hampir sama dengan PDIP, PAN, PKB dan PPP.

Hanya Akbar Tandjung yang memperoleh dukungan jauh di bawah partainya. Golkar sebagai misal, memperoleh dukungan sekitar 30 persen, jauh di atas PDI -P. Tapi Akbar Tandjung memperoleh dukungan di bawah 10%, Jauh di bawah Megawati Soekarnoputri. Jika data ini dianalisis, kasus hukum menimpa

Akbar Tandjung membuat publik ragu-ragu dengan karakternya. Publik yang ragu ini tidak memberikan dukungan kepada Akbar Tandjung, dan mengalihkannya kepada tokoh lain.

Kini para PR dan pendukung Akbar Tandjung dapat menggunakan momentum kebebasan Akbar Tandjung melalui kasasi Mahkamah Agung. Mereka dapat menjual citra bahwa selama ini Akbar Tandjung sudah dizalimi oleh opini publik. Kini terbukti bahwa Akbar Tandjung tidak bersalah menurut hukum. Publik umumnya sangat tersentuh dengan mereka yang terkesan dianiaya. Apakah PR ini berhasil meyakinkan publik? Hal ini tentu belum sepenuhnya dapat diprediksi.

Hal kedua yang menguntungkan Akbar Tandjung adalah perkembangan Partai Golkar. Semua lembaga survei dengan metodologi yang standar, seperti LSI, IFES, dan IRI memberikan gambaran yang sama. Golkar kembali di posisi teratas, bertukar tempat dengan PDIP. Jika selama waktu yang tersisa sampai 5 April 2004, Golkar tidak melakukan blunder besar, dan partai lain tidak membuat inovasi yang sangat gemilang, posisi itu tidak akan berubah.

Sangat mungkin di akhir April 2004, KPU mengumumkan bahwa Partai Golkar menempati posisi juara dalam pemilu 2004. Saat itu harga politik Akbar Tandjung akan semakin menanjak. Ia dianggap ketua umum dari partai terbesar. Ia juga dianggap berhasil memimpin partai. Dalam status hukum yang pada saat itu masih dipersoalkan, Akbar Tandjung masih mampu

memimpin partai untuk menuju kemenangan.

Citra kompetensi teknis Akbar Tandjung sebagai pemimpin akan kuat sekali. Keberhasilan Akbar Tandjung sebagai leader akan mudah sekali dijual oleh para pendukungnya. Posisi politik Akbar Tandjung semakin berwibawa. Publik luas semakin berkesempatan untuk menghitung kembali pencalonan Akbar Tandjung sebagai presiden.

Namun tentu saja tidak semua perkembangan di depan menguntungkan Akbar Tandjung. Ada pula perkembangan yang justru memberikan efek politik sebaliknya, yang mengurangi dukungan politik Akbar Tandjung.

Momentum kasasi Mahkamah Agung dapat menjadi awal perlawanan. Publik luas, terutama dari segmen mahasiswa, aktivis, LSM, intelektual, pers dan lawan politik Akbar Tandjung akan terus mengeksplorasi rasa ketidakadilan hukum.

Secara benar ataupun salah, mereka anggap kasasi atas Akbar Tandjung adalah permainan politik. Sekali lagi mereka akan mencoba membunuh karakter Akbar Tandjung sebagai pemimpin yang lihai, licin, tetapi dianggap berbahaya untuk memimpin negara.

Mundurinya Sri Sultan Hamengkubuwono dari konvensi Partai Golkar dan salah seorang hakim yang pernah mengadili Akbar Tandjung juga akan dijadikan

elemen perlawanan. Sri Sultan mungkin punya alasan sendiri yang tidak ia ungkapkan ketika mundur dari Konvensi Golkar. Namun setidaknya, dalam pernyataan publik, ia mengatakan bahwa seharusnya morality is the foundation of laws. Sri Sultan “menembakan peluru” ke arah Akbar Tandjung.

Walau ia harus menghormati keputusan hukum Mahkamah Agung, hati nuraninya tidak bisa menerima rasa keadilan yang tidak ditegakan. Ia memilih mengikuti hati nuraninya dan mundur dari Konvensi Golkar. Ketidakpercayaan substansial atas keputusan Mahkamah Agung dapat memperlambat recovery Akbar Tandjung dalam citra publik.

Gerakan protes yang akan “membunuh” citra Akbar Tandjung akan terus bergulir. Yang masih belum kita ketahui, berapa lama gerakan protes ini bertahan? Dan Apakah efeknya cukup signifikan untuk mempengaruhi political mood pemilih? Sebagian gerakan protes ini murni dari hati nurani. Namun sebagian lagi dimobilisasi oleh lawan politik Akbar Tandjung. Justru karena ia dimobilisasi, gerakan protes itu dapat dipertahankan dalam waktu yang lama, sejauh sumber dayanya ada.

Pascakasasi Mahkamah Agung, posisi politik Akbar Tandjung masih tidak pasti. Saran terbaik yang dapat diberikan kepada Akbar Tandjung adalah wait and see sampai dengan datangnya Konvensi Golkar sekitar minggu ketiga atau keempat bulan April 2004.

Yang penting bagi Akbar Tandjung, selaku ketua

umum partai yang sangat mungkin menjadi partai terbesar pemilu 2004, ia harus ikut menentukan bulat lonjongnya kekuasaan. Sebagai pimpinan partai terbesar, secara de facto ia dapat ikut berkuasa.

Persoalan Akbar hanyalah pilihan politik. Apakah ia dapat berkuasa dengan menjadi presiden RI, ataukah cukup wakil presiden, atau cukup King Maker saja? Seandainyaapun posisi terbaik Akbar hanya sebagai wakil presiden atau King Maker, karena posisinya sebagai ketua umum partai terbesar, ia dapat meminta hak menentukan 50% kursi kabinet.

Semuanya harus dihitung berdasarkan electability, atau kenlampuan terpilih. Jika ia bisa terpilih dengan maju sebagai calon presiden tentu itu adalah pilihan terbaik dari sisi kepentingan Akbar Tandjung sendiri. Namun jika perlawanan terlalu keras, posisi calon presiden sangat mungkin justru membuat Akbar Tandjung kelak tidak mendapatkan apa-apa karena akan mudah dikalahkan calon presiden lain.

Jika recovery nama baiknya sangat lambat, Akbar Tandjung dapat mundur hanya menjadi wakil presiden saja, tetapi untuk calon presiden yang paling mungkin terpilih. Pilihan presidennya menjadi sangat terbatas, Megawati, Amien Rais atau Susilo Bambang Yudhoyono. Mendukung Amien Rais mungkin sulit karena Amien sudah memilih wakil dari kalangan militer.

Memilih Megawati tampaknya juga bukan hal mudah. Megawati sendiri semakin melirik wakil dari

kalangan Islam, Hasyim Muzadi, Hamzah Haz atau Yusuf Kalla. Pilihan terbuka Akbar Tandjung adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Akan lebih kuat lagi posisi Akbar Tandjung jika duet Akbar Tandjung dan Susilo Bambang Yudhoyono didukung oleh PKB dan Gus Dur pula. **

Balada Surya Paloh vs Akbar Tandjung

Partai Golkar di Indonesia sedang menjalankan Konvensi Partai sebagaimana Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) saat ini. Di Partai Demokrat AS, John F Kerry dan Howard Dean merupakan dua tokoh Capres Partai Demokrat terkuat. Mereka terlibat dalam kompetisi dan “pertengkaran” yang sangat panas. sementara itu, di Partai Golkar, Indonesia, Akbar Tandjung dan surya Paloh juga dua kandidat capres terkuat di samping Wiranto. Mereka berdua juga terlibat dalam “komunikasi” yang unik dan rivalitas yang panas.

Namun konvensi partai di AS sudah terselenggara lebih dari seratus tahun. Akhir dari konvensi partai sudah terduga. Kini, John Kerry dan Howard Dean bergandengan tangan, membesarkan partai, menghadapi

musuh bersama: George Bush dari Partai Republik. Akankah Surya Paloh dan Akbar Tanjung menjadi Howard Dean dan John Kerry ala Indonesia, yang juga akhirnya bergandengan tangan, bahu-membahu bersatu di partai, menghadapi musuh bersama? Ataukah mereka justru membuat partai terpecah?

Era kampanye pemilu legislatif Partai Golkar kali ini menjadi sangat unik. Aneka partai lain tampak harmoni, menari dalam gendang yang sama, menarik pendukung sebanyak-banyaknya. Partai Golkar yang selama ini dikenal paling solid dan terlembaga, paling modern dan moderat, menunjukkan gejala berbeda. Di tengah imbauan coblos tanda gambar No 20, aroma persaingan para calon presiden Partai Golkar menguat.

Pers membesar-besarkan “komunikasi” unik antara dua capres Konvensi Golkar. terpenting: Akbar Tanjung dan Surya Paloh. Pada mulanya, tidak ada yang salah dan aneh. Surya Paloh, sebagaimana banyak jurkam partai lain, mengangkat isu korupsi. Suasana menjadi sedikit “meriah” ketika Surya Paloh membuat pertanyaan kepada publik luas, “Apakah di partai Golkar ada koruptor?” Surya Paloh menjawab sendiri pertanyaannya, bahwa di Golkar pun ada koruptor. Karena itu, Partai Golkar juga bertekad membersihkan dirinya sendiri, dan memimpin Indonesia yang lebih bersih.

Bagi banyak orang, pernyataan dan pertanyaan Surya

Paloh itu bersayap. Di satu sisi, Surya Paloh dianggap mengembangkan citranya sebagai Golkar Putih. Tertangkap oleh publik, ia menunjukkan kecintaannya kepada partai, ingin partainya tidak hanya tumbuh besar, namun juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Di luar Golkar Putih, ada Golkar Hitam yang sudah membuat partai terpuruk dan mereka harus diberantas demi kemajuan partai dan politik Indonesia.

Di satu sisi, bagi sebagian orang, gaya kampanye Surya Paloh justru menjadi tambahan daya tarik partai Golkar. Selama ini Golkar dianggap oleh aneka LSM sebagai “Partai Busuk”, diisi oleh banyak “politikus busuk” dan tidak hendak mensukseskan gerakan antikorupsi. Orasi Surya Paloh menetralkan citra itu. Dikesankan bahwa ada dan banyak pula tokoh dan senior Partai Golkar yang akan berjuang memberantas korupsi di tubuh Golkar sendiri dari dalam.

Dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, masuk akal jika setiap partai besar memiliki koruptornya sendiri-sendiri. Ketika Surya Paloh mengatakan, ada koruptor di Partai Golkar, itu sudah menjadi pengetahuan umum, sebagaimana ada koruptor di partai lain, di birokrasi, di pengadilan, di kepolisian, bahkan di kalangan LSM sendiri. Tak ada yang istimewa di sana.

Namun di sisi lain, kampanye Surya Paloh dianggap oleh sebagian justru memukul Partai Golkar sendiri. Itulah sebabnya DPP Partai Golkar mengeluarkan surat teguran. Surya Paloh dianggap melakukan

negative campaign. Bukannya upaya meraih tambahan pendukung, kampanye Surya Paloh justru dikhawatirkan mengemboskan partai dari dalam.

Lebih jauh lagi, sebagian publik yang berimajinasi, menganggap Surya Paloh “memukul” Akbar Tandjung. Imajinasi publik memang liar. Akbar Tandjung secara legal memang sudah dibebaskan MA dari tuduhan korupsi. Namun karena Surya Paloh dan Akbar Tandjung bersaing dalam konvensi, surya Paloh dianggap “mencuri start” memukul pesaingnya. Isu ada “koruptor” di tubuh Golkar, oleh sebagian, pernyataan itu dianggap dialamatkan kepada Akbar Tandjung, terlepas apakah hal itu memang dimaksudkan atau tidak, oleh surya Paloh sendiri. Imajinasi publik memang tidak dapat dikontrol.

Terjadilah “komunikasi” yang unik antara Surya Paloh dan Akbar Tandjung. Golkar memberikan teguran. Namun teguran resmi Partai Golkar tidak menyurutkan langkah surya Paloh. sebaliknya, ia justru lebih bersemangat lagi mengampanyekan gerakan antikorupsi. Partai Golkar yang dikendalikan Akbar Tanjung juga bereaksi lebih keras lagi. surya Paloh diancam akan dicoret sebagai juru kampanye nasional.

Seketika kita teringat “komunikasi” antara Howard Dean dan John F. Kerry ketika mereka masih bersaing memperebutkan tiket nominasi Konvensi Partai Demokrat di AS. Pada mulanya, Howard Dean

bersinar sebagai calon pemenang konvensi. Ia sudah diproyeksikan menantang George Bush dalam pemilu Presiden AS, November mendatang.

Dukungan politik dari tokoh senior Partai Demokrat kepada Howard Dean berdatangan. salah satu yang terpenting adalah dari Al Gore. Dukungan politik Al Gore menambah bobot Howard Dean.

Kemudian berkembanglah aneka situs di internet yang banyak sekali menghantam Howard Dean. Puncaknya, ketika Howard Dean membuat sedikit kesalahan, situs internet itu memaksimalkan serangannya. Dua kesalahan Howard Dean menyumbang “kejatuhannya.” Pertama, saat Saddam Hussein terangkap. Publik di AS merasa lega dan menyambut berakhirnya Saddam Hussein secara suka cita.

Namun Howard Dean justru memberikan reaksi sebaliknya. Dean khawatir popularitas Bush meningkat pesat akibat tertangkapnya Saddam Hussein. Dean mencoba menggambarkan bahwa perang Irak belum usai. Akan masih banyak kantong mayat perwira AS yang dikirim pulang. Namun publik AS menganggap reaksi Dean berlebihan. Reaksi Dean dianggap terlalu pribadi, terlalu berkepentingan menyerang Bush, dan kurang patriotik.

Kedua, Howard Dean melakukan kesalahan ketika ia ingin menghidupkan kembali pidato terkenal Martin Luther King, “I Have a Dream.” Namun oleh Howard Dean, pidato ini dipelintir dan, menjadi “I Have a

Scream.” Pemelintiran itu pada awalnya disiapkan untuk mengangkat kembali pamor Howard Dean. Yang terjadi justru sebaliknya. Publik semakin tidak bersimpati padanya.

Serangan kepada Howard Dean dieksplorasi dan dipancarkan dari berbagai situs internet. Karena diolah secara matang dan dipublikasikan secara terus-menerus, berita dari situs internet itu bergaung dan disambut oleh pers besar. Howard Dean mencurigai ada “tangan lihai dan tidak terlihat” di balik aneka situs internet tersebut.

Segera Howard Dean melakukan serangan balik. Kepada publik luas ia menyatakan bahwa saingannya, John F Kerry berada di balik aneka situs internet itu. Ia bahkan menuduh kelompok John Kerry ikut membiayai aneka situs internet itu. Tujuan akhir serangan internet karena Kerry ingin merebut nominasi Partai Demokrat dari tangannya. Dukungan Howard Dean memang merosot dan digantikan oleh John F Kerry.

Pertarungan Howard Dean dan John F Kerry menjadi sangat personal. Mereka acapkali saling menyerang. Namun di sinilah letak keindahan demokrasi di AS dan kebesaran jiwa para pemimpinnya. Kini John F Kerry berfoto bersama Howard Dean, dikelilingi oleh tokoh Partai Demokrat lainnya, seperti Bill Clinton, Jimmy Carter dan Al Gore. Kepada pendukungnya Howard Dean menyatakan bahwa ia akan bekerja sekuat tenaga untuk membantu John Kerry mengalahkan George Bush.

Howard Dean juga menyerukan agar para pengusaha yang dulu membantunya diharapkan kini membantu John F Kerry. Semua kemarahan dan “komunikasi” unik antara Howard Dean dan Kerry sirna. Hubungan mereka berdua diganti oleh semangat rekonsiliasi untuk membesarkan partai dan memenangkan pemilu presiden.

Akankah akhirnya Surya Paloh dan Akbar Tandjung melakukan hal yang sama dengan apa yang dibuat Howard Dean dan John F Kerry? Baik Surya Paloh maupun Akbar Tandjung adalah dua tokoh yang sudah matang dan “mumpuni” dalam “dunia persilatan.” Mereka berdua tentu ingin meletakkan batu pertama dari tradisi yang sehat dalam Konvensi Partai. Demi tradisi berpolitik yang benar dan kebesaran partainya, kita menduga Surya Paloh dan Akbar Tandjung akan beribarat tangan seperi Howard Dean dan Kerry.

Lingkaran terdekat di pihak Surya Paloh dan Akbar Tandjung harus pula meniru lingkaran terdekat Howard Dean dan John F Kerry. Lingkaran terdekat itu harus meyakinkan bosnya masing-masing bahwa ujung dari kompetisi adalah rekonsiliasi. Publik Indonesia perlu diberikan pembelajaran sebuah kompetisi dalam kehangatan. Jangan menjadi sebaliknya, mengadu domba bosnya masing-masing dan memperoleh keuntungan dari perpecahan.

Berbagai pihak menduga Surya Paloh dan Akbar

Tandjung tidak lagi dapat didamaikan dan mereka akan saling memukul. Kita termasuk yang optimis bahwa dua tokoh itu terlalu penting untuk hanya masuk ke dalam wilayah persaingan pribadi. Dua tokoh itu harus menjadi ikon yang memberikan teladan bahwa ada kepentingan yang lebih besar.

Dua puluh tahun dari sekarang publik terutama di Partai Golkar akan menjadikan Surya Paloh dan Akbar Tandjung sebagai contoh yang baik. Betapa ujung dari perseteruan itu adalah rekonsiliasi, bersama-sama saling mendukung membesarkan partai melawan musuh bersama. Bukan sebaliknya, membawa perpecahan partai yang membuat partai makin lemah dalam pertarungan yang lebih keras kelak, pemilu presiden. **

**BAGIAN KETIGA
POLITIK SETELAH
PEMILU LEGISLATIF**

Siapa Mencuri Start Kampanye?

Berdasarkan verifikasi awal KPU, makin jelas hanya lima paket capres dan cawapres akan bertarung dalam pemilu presiden 2004. Paket Gus Dur-Marwah Daud Ibrahim agaknya terganjal karena alasan kesehatan. Siapa yang akan memimpin Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2004 salah satu dari lima paket itu, Megawati-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla, Amien Rais-Siswono, Wiranto-Gus Solah, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Menghadapi pemilu presiden, kembali kita mendengar istilah yang aneh dalam politik demokrasi, “mencuri start kampanye”. Istilah itu sangat populer di tangan Panwaslu yang memang oleh undang-undang dan aturan KPU melarang peserta pemilu untuk berkampanye sebelum waktunya. Diasumsikan bahwa

ada periode yang memisahkan antara era kampanye dan era sebelum kampanye. Diasumsikan pula ada kategori yang jelas sekali yang membuat publik tahu apa itu kampanye dan apa yang bukan kampanye.

Istilah “mencuri start kampanye” itu tidak pernah dikenal di Amerika Serikat, misalnya, yang sudah ratusan tahun mempraktekan pemilu demokratis. Istilah itu “kreativitas” politisi Indonesia yang acapkali senang dengan keunikan. Akibatnya, antara KPU dan Panwaslu acapkali terjadi perbedaan persepsi.

Kini Panwaslu sudah memberikan peringatan kepada pasangan tertentu yang dianggap telah “mencuri start kampanye”. Panwaslu’ mengakui bahwa aturan mengenai kampanye presiden itu belum dibuat. Namun ada pasangan yang ia klaim sudah memanfaatkan celah hukum yang ada untuk kepentingan kampanye. Jika belum menjadi presiden saja sudah memanfaatkan celah hukum, ujar Panwaslu, apalagi jika sudah menjadi presiden.

Yang lucu, pernyataan Panwaslu segera mendapatkan bantahan dari “bos’nya sendiri, KPU. Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa iklan dan poster yang ada saat jni tidak bisa dianggap mencuri start kampanye pemilu presiden. Iklan itu adalah sosialisasi, bukan kampanye. Dapat kita duga “pertengkaran” KPU dan Panwaslu akan terus berlanjut karena memang aturan “mencuri start kampanye” itu janggal dan tidak masuk akal.

Pemilu yang akan datang, tahun 2009, sebaiknya aturan mengenai periode kampanye dihapuskan saja. Jika dihapuskan, berarti kita tidak akan pernah lagi mengenal istilah mencuri start kampanye. Ada dua alasan yang cukup kuat untuk menghapuskan periode kampanye.

Pertama, adalah hak warga negara dan kelompok untuk mempengaruhi opini publik. Mereka boleh mempengaruhi publik kapan saja. Baik partai politik maupun politisi dibebaskan menjajakan programnya, keunggulannya dan nilai lebihnya kepada publik luas. Semua medium bisa mereka gunakan, mulai dari media massa sampai kepada pertemuan langsung dengan publik luas.

Publik memang perlu dipengaruhi tidak hanya sebatas era menjelang pemilihan umum. Publik juga boleh dan harus memberikan reaksi, perdebatan dan kritik atas wacana yang dikembangkan politisi ataupun partai politik sejak jauh hari. Semua kebijakan itu justru akan menjadi sangat matang, justru jika sudah diperdebatkan jauh hari sebelumnya. Ketika kebijakan dan tokoh itu bersaing dalam pemilu, publik sudah sangat mengenalnya.

Kegiatan itu adalah kampanye. Itu sah dilakukan kapan saja. Tak perlu pula ada pembatasan seberapa banyak slot iklan yang boleh digunakan seorang politisi atau partai di media massa. Jika memang mampu, mereka boleh membeli siaran TV selama mungkin. Iklan dan segala macam bentuk transaksi ekonomi dalam rangka

berkampanye juga diserahkan saja sepenuhnya kepada pasar.

Tangan pemerintah tidak perlu terlalu banyak ikut campur. Semakin “kreatif” pemerintah atau panitia pemilu ikut campur acapkali keindahan demokrasi justru rusak.

Yang perlu diatur pemerintah hanyalah kesempatan yang sama dan prinsip netralitas terhadap semua kandidat. Pemerintah memang perlu mengatur bahwa semua organisasi pemerintah tidak boleh memberikan keuntungan kepada salah satu kandidat. Ini tentu penting karena tidak boleh ada diskriminasi atas calon.

Pemerintah juga perlu mengatur bahwa seluruh jaringan mass media yang ada harus memberikan harga dan waktu yang sama kepada kandidat. Jika sang kandidat tidak memanfaatkan waktu iklan yang diberikan, karena keterbatasan dana, itu sudah di luar kewenangan pemerintah.

Dalam politik Amerika Serikat, tidak pernah ada silang pendapat mengenai apakah seorang calon sudah mencuri start kampanye atau tidak. Memang dalam sistem demokrasi tidak perlu ada pembatasan kapan kampanye harus dimulai dan kapan harus dihentikan. Al Gore, misalnya, sudah mempersiapkan diri menjadi presiden AS, dan mulai mempengaruhi opini publik justru saat ia baru saja dilantik menjadi wakil presiden. Ia terus berkampanye bahkan sampai detik terakhir hari pemungutan suara.

DPR dan Presiden yang akan datang, yang bertanggung jawab membuat undang-undang pemilu tidak perlu lagi terlalu “kreatif” menciptakan periode kampanye. KPU dan Panwaslu juga tidak perlu lagi secara terlalu “kreatif” menciptakan istilah mencuri start kampanye. Istilah itu di kalangan yang paham aturan demokrasi kini menjadi “olok-olok”.

Kedua, kompetisi pemilu presiden atau pemilu parlemen bukanlah seperti lomba lari maraton. Dalam lomba lari maraton, memang semua peserta berada pada titik nol yang sama. Siapa yang kalah dan menang hanya ditentukan dalam periode perlombaan itu. Siapa yang mencuri start bergerak lebih dulu, memang harus dilarang. Yang bergerak lebih dulu secara tidak adil sudah mencuri waktu dan kemenangan.

Namun dalam pemilu demokratis, posisi kandidat tidak pernah sama di titik nol. Persepsi publik mengenai mereka sudah berbeda.

Jika ada masa kampanye seperti di Indonesia, katakanlah sebulan, masa kampanye itu mempengaruhi publik secara terbatas saja. Persepsi publik atas kandidat sudah terbentuk jauh hari. Tak ada gunanya membuat aturan kapan kampanye harus dimulai.

Survei LSI, bulan Maret dan April 2004, membuktikan itu. Yang menentukan pilihannya di era kampanye, hanya 30% pemilih sementara 70% lainnya, yang mayoritas, sudah punya pilihan. Kampanye tidak

mempengaruhi 70% itu.

Posisi capres dan partai juga sudah berbeda ketika era kampanye dimulai. Partai lama dan tokoh lama menikmati keuntungan karena sudah dikenal publik. Sementara itu, tokoh baru dan partai baru dirugikan karena sebelum kampanye mereka belum dikenal. Mustahil publik memilih tokoh atau partai yang belum mereka kenal. Aturan mencuri start kampanye secara diskriminatif justru menguntungkan pemain dan partai lama, serta merugikan pemain dan partai baru.

Survei LSI bulan April 2004 juga menunjukkan dukungan atas capres yang ada sebelum era kampanye sangat berbeda. Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan dukungan sebesar 41%. Dukungan itu tinggi sekali. Jika sampai 5 Juli 2004 dukungan itu tidak berubah, Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan maju ke babak kedua pemilu presiden. Jika SBY lebih beruntung lagi, ia bahkan dapat memenangkan pemilu presiden di tahap pertama. Babak kedua pemilu presiden tidak diperlukan.

Di tempat kedua Megawati Soekarnoputri. Namun dukungan atas Megawati hanya 15%, kurang dari separuh dukungan atas SBY. Di tempat selanjutnya capres papan tengah, Amien Rais, Wiranto dan Hamzah Haz. Posisi tiga capres ini kurang lebih sama di bawah 7%. Sekali lagi, jika aturan larangan mencuri start kampanye diterapkan secara ketat, jelas SBY yang diuntungkan dan capres papan tengah yang dirugikan. Apalagi era kampanye hanya mampu merubah 30%

persepsi pemilih saja.

Sebaiknya memang istilah “mencuri start kampanye” dihapuskan dalam kosa kata politik Indonesia. Sebaiknya otoritas pemilu kita jangan “terlalu kreatif” menciptakan aturan yang berbeda dengan umumnya yang berlaku di negara demokrasi. **

Mesin Politik Versus Citra Capres

It is showtime! Peristiwa bersejarah itu akan dimulai Selasa besok, 1 Juni 2004. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden akan dipilih sendiri secara langsung oleh rakyat. Siapa presiden Indonesia berikutnya? Tak lain dan tidak bukan, ia adalah salah satu dari lima paket yang akan bertarung. Jika tidak Megawati- Hasyim Muzadi, pastilah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, atau Wiranto-Gus Solah, atau Amien Rais- Siswono Yudo Husodo, atau Hamzah Haz-Agum Gumelar. Satu bulan penuh mereka akan berkampanye, membujuk, meyakinkan dan menawarkan gagasan.

Ujungnya, 147 juta pemilih yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di sekitar 60.000 desa dan kota, akan menjadi “Hakim Tertinggi”. Para pemilih ini akan

menentukan siapa yang layak maju di babak kedua pemilu presiden. Atau jika beruntung, ada satu paket yang bisa saja langsung memenangkan pemilu presiden satu tahap. Babak kedua tidak lagi diperlukan. Ini hanya terjadi jika sang capres itu teramat populer, didukung oleh lebih dari 50 persen pemilih dan minimal 20 persen dukungan di sekitar 16 provinsi.

Namun menjelang era kampanye pemilu presiden, dipopulerkan sebuah mitos bahwa mesin politik akan menjadi penentu siapa pemenang pemilu presiden. Yang dimaksud mesin politik disederhanakan pula menjadi perolehan kursi di parlemen. Jika capres dan cawapres A, misalnya, didukung oleh kombinasi partai dengan perolehan kursi 35 persen, maka mesin politik mereka bermodal awal 35 persen. sebaliknya, jika paket capres dan cawapres B didukung oleh partai yang perolehan kursinya 10 persen, modal awal dan mesin politik sang capres hanya 10 persen. Disimpulkan bahwa paket A lebih berpeluang menang dibandingkan paket B.

Itu bentuk kesalahpahaman luar biasa atas hukum besi pemilihan presiden secara langsung. Kesalahpahaman ini dapat dipahami karena memang pemilu langsung untuk presiden itu baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. sesungguhnya, apa yang paling menentukan kemenangan paket capres dan cawapres?

Tentu saja mesin politik itu penting. Apalagi jika mesin politik itu diartikan sebagai keseluruhan aktivitas

pendukung sang calon. Popularitas sang calon memang tidak jatuh dari langit. Popularitas itu buah dari kerja simultan aneka aktivitas itu.

Namun jika mesin politik hanya diartikan sebagai perolehan kursi di parlemen, jelas ini kesalahan teramat fatal. Calon dari partai terbesar belum tentu juga paling populer di mata masyarakat. sejarah pemilihan langsung di AS, misalnya, menunjukkan seringkali terjadi “Divided Government” Calon presiden dari partai kecil di kongres justru menang pemilu presiden. Kongres di kuasai Partai Demokrat, misalnya. sementara calon dari Partai Republik, yang minoritas di Kongres, justru terpilih sebagai presiden.

Fenomena di Filipina, tetangga kita, juga dapat dijadikan pelajaran. Tahun 1992, untuk pertama kalinya presiden Filipina dipilih langsung. Saat itu Fidel Ramos ikut konvensi partai agar dicalonkan oleh partai terbesar LDP. Namun Ramos dikalahkan oleh Ramon Mitra untuk mendapatkan nominasi partai. Tak putus asa, Ramos keluar dari partai dan mendirikan partai baru. Partai Ramos sangat kecil. Namun justru, ia terpilih sebagai presiden mengalahkan Ramon Mitra yang menjadi capres dari partai terbesar saat itu.

Pengalaman PDIP di Indonesia juga dapat memberikan renungan. Dilihat dari mesin politiknya, jelas PDIP di tahun 2004 lebih kuat dibandingkan PDIP tahun 1999. Di tahun 1999, PDIP relatif baru. Ini partai yang direpresi di era Pak Harto. Mereka tidak punya kekuatan di parlemen saat itu, yang diwakili oleh PDI

versi soerjadi. Mereka juga belum punya uang.

Namun PDIP tahun 2004 sangat berbeda. sebagai mesin politik, partai ini paling besar di parlemen. Jaringan di akar rumput juga sangat mengakar. Berbagai pelatihan hingga tingkat cabang dilakukan oleh partai ini. Sumber dana juga mungkin paling besar di PDIP. Ini partai dari pihak yang berkuasa. Lihat saja perbandingan iklan TV PDIP dengan partai lain. Dibandingkan PDIP tahun 1999, jelas PDIP tahun 2004 adalah versi raksasanya.

Namun apa yang terjadi dengan perolehan suara? Tahun 1999, PDIP memperoleh hampir 34 persen. Sebaliknya di tahun 2004, ketika mesin politiknya sangat kuat, PDIP hanya mendapatkan dukungan tinggal hampir separuhnya saja, di bawah 20 persen. PDIP justru sangat merosot ketika mesin politiknya justru paling kuat.

Jika bukan mesin politik, bukan dukungan di parlemen, lalu apa yang paling menentukan dalam pemilu langsung? Yang paling penting adalah sentimen publik. Arah angin sentimen publik itu akan menjadi kekuatan spontan yang mampu menggerakkan jutaan pemilih secara sukarela untuk mendukung kandidat tertentu.

Di tahun 1999, sentimen publik Ini menjadi motor dan energi PDIP serta Megawati Soekarnoputri. Jatuhnya Soeharto dan dimulainya era reformasi, membuat publik

inginkan perubahan. Mereka mencari tokoh dan partai alternatif. Sentimen itu di tahun 1999 hinggap di PDIP dan Megawati. Tak terbendung, PDIP mengalahkan Golkar. Megawati akhirnya juga menjadi presiden.

Namun sentimen publik yang sama di tahun 2004 justru lari dari PDIP dan Megawati. Harapan publik akan perubahan dan perbaikan sangat besar. Sementara warisan Orde Baru begitu parahnya. Di sisi lain, Megawati tidak menunjukkan leadership yang dibutuhkan. Sementara PDIP juga tidak berprestasi seperti yang diharapkan.

Akibatnya sungguh fatal. Walau mesin politik PDIP semakin besar, publik justru “menghukum” PDIP. Tak peduli walaupun tokoh PDIP membuat target 40 persen, publik justru menghukumnya dan hanya memberikan suara kurang dari 20 persen. Jika tidak ada perubahan yang berarti, sentimen publik ini akan kembali “menghukum” Megawati dalam pemilu presiden.

Sentimen publik paling menentukan kemenangan bukan mesin politik partai. Sebesar apapun partai itu, publik justru dapat saja menjauhinya. Apalagi jika partai itu sendiri sudah mengecewakan para anggota partainya. Penghianatan dan perlawanan internal partai dapat terjadi terhadap kandidat presiden dari partainya sendiri.

Kemana arah sentimen publik itu saat ini? Sentimen publik dapat dibaca melalui tingkat popularitas atau dukungan kepada calon presiden. Berdasarkan survei

dua lembaga yang ketat metodologinya, LSI dan IFES, arah sentimen itu jatuh ke Susilo Bambang Yudhoyono. Data LSI diambil sebelum Konvensi Partai Golkar. Sedangkan data IFES diambil sesudah Konvensi Partai Golkar.

Posisi SBY berada di urutan pertama, dengan dukungan sebesar 40-41. persen. Setelah Konvensi Golkar, data IFES menunjukkan Wiranto dan Megawati bersaing di posisi kedua dengan dukungan yang jauh lebih kecil, sekitar 10-11 persen saja. Tapi mengapa sentimen publik itu jatuh ke SBY?

Sebagian menganggap itu fenomena politik gelombang sabun atau buble politics belaka. Saat ini, menurut pandangan itu, SBY “lebih indah dari warna aslinya.” Menurut perspektif ini, gelembung sabun itu akan pecah. SBY dianggap akan menurun ke “harga” yang asli. Persoalannya, kapan gelembung sabun SBY pecah? Jika pecahnya setelah pemilu presiden, SBY tetap akan diuntungkan.

Namun bagi sebagian lainnya, tidak ada istilah buble politics atau gelembung sabun dalam persoalan citra seorang capres. Citra sama sekali masalah persepsi, bukan masalah fakta. Hal yang biasa saja jika persepsi itu lebih indah dari faktanya, atau sama saja, atau lebih buruk daripada aslinya. Itu semua adalah persoalan marketing.

Strategi pemasaran SBY saat ini dianggap tepat. la

menampilkan citra diri seorang tokoh yang moderat, santun, menghindari diri menyerang orang lain, kompeten, cerdas dan mengesankan tokoh yang kuat. Citra ini yang ditanamkan terus menerus dan kebetulan sedang pas dengan “kebutuhan pasar” atau keinginan publik. Hasilnya, SBY disukai dan paling populer.

Lima capres dan cawapres harus merenungi hukum besi pemilu langsung itu. Bukan mesin politik, tetapi citra seorang tokoh dan sentimen publik atasnya yang paling menentukan kemenangan.**

Kampanye Negatif Calon Presiden

Tiga minggu sudah berlangsung kampanye pemilu presiden. Kian hari kian terasa kerasnya pertarungan dalam meraih simpati publik. Para kandidat umumnya menunjukkan politik yang elegan, tidak ingin mengkeritik secara terbuka kepada para kompetitornya. Namun tim pendukung sang kandidat, baik resmi maupun tidak, terbuka maupun tersembunyi, terlibat dalam “perang opini”.

Publik luas sepenuhnya tidak dapat mengerti, siapa yang menggerakkan perang opini itu. Apakah ia bagian dari strategi yang memang disetujui sang kandidat sendiri, tetapi harus dimainkan secara tersembunyi dan rahasia. Ataukah perang opini itu sepenuhnya inisiatif pendukung rahasia yang bergerak tanpa persetujuan dan pengetahuan sang kandidat.

Demikianlah perang SMS, selebaran gelap, desas-desus dan rumors mewarnai kampanye pemilu presiden. Dilihat dari corak informasi yang disebar, perang opini itu mengambil dua bentuk. Sebagian dapat diklasifikasikan sebagai kampanye negatif. Baik SMS maupun selebaran dibuat untuk menunjukkan data dan fakta negatif calon presiden tertentu. Namun data dan fakta itu masuk akal dan sangat mungkin memang benar adanya.

Sebagian lagi dapat diklasifikasikan sebagai propaganda hitam. Istilah itu merujuk kepada informasi yang tujuannya memang untuk membunuh karakter saingan. Dalam propaganda hitam, hampir pasti informasi yang disebarkan itu hanya berupa fitnah dan kebohongan saja. Persoalannya, sebagian segmen publik mungkin tidak bisa memisahkan mana yang kampanye negatif, mana yang propaganda hitam.

Mulai dari Wiranto, SBY, Megawati, Amien Rais dan Hamzah Haz terkena objek “perang opini”. Bahkan orang dekat capres itu terkena pula serangan serupa. seberapa besar pengaruh perang opini tersebut bagi pemilih dan apa fungsinya bagi terpilihnya kandidat yang paling kurang bermasalah?

Amerika Serikat sudah berpengalaman lebih dari seratus tahun dengan pemilihan presiden langsung. Memang propaganda hitam yang penuh fitnah akan mendapatkan antipati dari masyarakat justru

kepada penyebar fitnah. Namun kampanye negatif justru diapresiasi sebagai upaya publik mengenal sisi lemah sang kandidat. Karena kandidat akan menjadi orang nomor satu yang menentukan bulat dan lonjong negara, publik sejak masa kampanye justru harus tahu kelemahan dan rekor negatifnya.

Justru di masa kampanye, publik tahu Clinton ternyata di masa mudanya pernah mengisap mariyuana. Publik juga mengetahui ternyata Clinton juga seorang *womenizers* yang punya banyak “kawan wanita.” George Bush yunior yang saat ini menjadi Presiden AS juga terungkap bahwa ia pernah mabuk-mabukan di masa mudanya.

Yang menarik, daftar data negatif calon presiden itu kadang tidak hanya diungkap oleh lawan politiknya. Tim pendukung capres itu sendiri juga kadang mengungkapkannya lebih dulu sebelum lawan sempat menginvestigasinya. Jika tim suksesnya sendiri yang mengungkapkan ke publik, tim itu sudah siap pula dengan manuver jawabannya. sebelum isu itu merusak karakter capres, aneka latar belakang dan alasan sudah disiapkan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Bahkan terdengar kabar CIA dan FBI sendiri tidak jarang menyuplai informasi mengenai karakter negatif dan data buruk capres di masa lalu. Itu dilakukan bukan karena CIA dan FBI memihak, tetapi sepenuhnya untuk kepentingan negara. Di negara yang sudah sangat transparan, di mana kebebasan pers dan keahlian investigasi publik sudah sedemikian canggih, rahasia

apa pun mengenai pemimpin nasional akan terkuak.

Jauh lebih baik jika publik sudah mengetahui hal buruk soal capres mereka sebelum sang kandidat itu terpilih. Dengan pemaparan dan kampanye negatif, publik mendapatkan informasi lengkap mengenai capresnya, baik yang bagus maupun yang buruk. Seandainya publik tetap memilih sang capres, maka pilihan itu sudah diambil termasuk menerima kelemahan sang capres itu di masa lalu.

Akan buruk bagi negara jika data negatif dari sang pemimpin terungkap setelah ia dilantik. Presiden terpilih tidak akan dapat memerintah secara efektif. Legitimasinya akan turun. Publik merasa dibohongi. Mereka memilih sang calon dengan asumsi bahwa sang calon itu tidak melakukan hal negatif yang baru saja diketahui justru setelah ia terpilih.

Tak seperti yang diduga publik dan politisi Indonesia, kampanye negatif justru bermanfaat. Jika kandidat dan team suksesnya hanya boleh menyatidakan visi dan misinya saja, yang terungkap di publik luas hanya yang baik-baik saja. Lalu dari manapublik akan mengetahui sisi negatif sang capres yang akan menjadi pemimpin nasional?

Karena kampanye negatif di Indonesia dilarang, perdebatan mengenai sisi buruk capres tidak berlangsung terbuka. Sisi buruk capres akibatnya tersebar melalui media bawah tanah, baik dalam

bentuk SMS, selebaran gelap maupun aneka desas-desus. Publik justru lebih sulit memisahkan mana data negataif capres yang memang benar, dan mana yang hanya fitnah.

Setiap capres akhirnya harus melakukan klarifikasi atas isu yang tidak jelas asal-usulnya. Capres pun serba salah. Jika ia diam saja, publik mungkin makin percaya kepada isu itu. Namun jika sang capres menjawab, akan aneh juga. Bagaimana mungkin capres menghabiskan waktu hanya untuk menanggapi isu yang tidak jelas asal-usulnya itu?

Siswono Yudhohusodo akhirnya harus bicara juga. Menurutnya isu negara Islam hanya fitnah belaka. Ia menolak rumor yang luas beredar bahwa jika Amien Rais dan dirinya terpilih, Indonesia segera menerapkan negara Islam. Bagi kami, negara Pancasila dan NKRI sudah final.

Amien Rais bahkan memberikan reaksi yang lebih keras lagi. Ia diisukan akan melarang beberapa ritual Islam yang biasa dilakukan warga NU. Isu itu meluas di Jawa Timur. Ujar Amien Rais, hanya orang sinting yang mau melarang ritual itu. Ia adalah seorang muslim yang menghormati pluralisme.

Kubu Wiranto tidak kalah kerepotan. Sebagian dari isu negatif itu memang punya alamat penyerang yang jelas. Kivlan Zein dan Fadli Zon secara terbuka menyebut keterlibatan Wiranto soal Tragedi Mei dan Pamswakarsa. Bahkan mereka menyebut tokoh lain

yang diharapkan dapat menjadi saksi keterlibatan Wiranto.

Namun tidak kalah banyak gosip negatif atas Wiranto yang sumbernya tidak jelas. Ia dituduh menerima dana dari konglomerat hitam. Ia pula dituduh berada di belakang black propaganda atas capres lain.

Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi kasus serupa. Lebih aneh lagi, serangan atas Yudhoyono sangat kontradiktif. Di kalangan kristen dan minoritas, ia dituduh ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Jika terpilih, Indonesia diisukan akan menjalankan Piagam Jakarta yang menakutkan kelompok minoritas.

Namun di kalangan pemilih muslim, isu sebaliknya dikembangkan. Susilo Bambang Yudhoyono justru akan melakukan kristenisasi. Disebarkan informasi yang salah mengenai komposisi caleg terpilih Partai Demokrat. Seolah-olah lebih banyak orang kristen dibandingkan muslimnya. Untuk kasus Yudhoyono, propaganda hitam itu sangat terasa. Bagaimana mungkin satu kandidat dapat menerapkan Piagam Jakarta sekaligus kristenisasi? Bukankah dua isu itu saling bertentangan?

Hamzah Haz terkena isu serupa. Bahkan kehadirannya dalam pemilu capres diisukan hanya untuk mengambil suara Amien Rais. Jika Hamzah tidak mencalonkan diri, Amien Rais akan menjadi satu-satunya capres dengan latar belakang Islam yang kental. Dengan adanya Hamzah Haz, dukungan pemilih muslim ke Amien Rais terbagi. Hamzah Haz juga sudah

mengklarifikasi isu itu.

Nasib Megawati juga tidak berbeda. Beredar SMS yang banyak sekali mengenai dana yang dikucurkan Megawati bagi pondok pesantren. Dalam rangka perebutan suara warga NU, money politics digosipkan telah dimainkan melalui Hasyim Muzadi. Tim Megawati juga diisukan di balik pembunuhan karakter calon dari kalangan militer. Pihak Megawati juga sudah menjelaskan dan membatah gosip itu.

Menjelang 5 Juli 2004, kampanye negatif dan propaganda hitam para capres akan semakin ramai. Di masa datang, kampanye negatif itu sebaiknya dibolehkan walau propaganda hitam dilarang. Jika kampanye negatif dibolehkan, publik diuntungkan untuk dua hal. Pertama, publik berkesempatan mengetahui capres secara lebih lengkap, termasuk sisi negatifnya. Kedua, debat sisi negatif capres akan berlangsung dalam format terbuka, tidak lagi tersembunyi. Publik juga akan lebih dapat membedakan mana data negatif yang benar, dan mana yang fitnah.**

Tuduhan Polri Memihak Megawati?

Kemanakah kasus itu akan bergulir? Akankah sasaran tembaknya terbatas hanya kepada institusi Polri saja, seperti tuntutan Kapolri harus mundur karena tidak netral dalam pemilu? Ataukah sasarannya lebih kepada capres tertentu, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri? Misalnya, dikembangkan tuduhan bahwa Megawati selaku presiden yang sedang memerintah menggunakan fasilitas dan aparatur pemerintahan untuk kepentingannya?

Ataukah target kasus itu lebih horor, seperti menyerang legitimasi pemilu presiden? Ujung dari gerakan ini kemudian tuntutan pemilu presiden ulang? Jika tuntutan itu menggelinding negara Indonesia

berada dalam krisis yang besar. Atau sasaran kasus itu jauh lebih sederhana dan agung, ingin pemilu berjalan secara adil, dimana semua aparatur negara menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dan netral?

Aneka skenario di atas seketika berhamburan di kepala saya setelah membaca aneka berita koran, Senin pagi, 26 Juli 2004. Kasus ini secara jurnalistik dan politik memang sangat seksi ditinjau dari berbagai aspek. Kasus ini juga dapat menjadi bola liar yang hasil akhirnya sangat mungkin berbeda dengan yang dimaksud pihak penggulir kasus itu.

Pihak yang membuka kasus itu cukup berwibawa, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI). Sejak lama UI memang dikenal sebagai kampus perjuangan. Reformasi 1998 awalnya juga digulirkan di kampus itu. Bahkan hampir di semua momen penting perubahan politik Indonesia, kampus UI terlibat, baik melalui mahasiswanya ataupun alumninya. Kini sekali lagi, alumni UI menjadi tuan rumah dari kasus panas.

Tuduhan yang dikemukakan juga cukup hot: Polri memihak Megawati. Tuduhan ini bisa benar dan bisa salah. Namun sebagai tuduhan, jelas itu berita besar. Polri baru saja “disapih” dari induknya ABRI. Masalah keamanan negara kini sepenuhnya berada di pundak Polri. Karena kekuasaan yang dimilikinya, dan sifatnya sebagai aparatur negara, Polri dengan sendirinya diwajibkan netral. Jika Polri berpihak, jelas akan

menjadi skandal tingkat tinggi.

Yang dijadikan alat bukti juga cukup canggih dan “keras”. Bukti itu bukan pamflet atau selebaran. Tak tanggung-tanggung, alat bukti itu rekaman gambar dan suara sekaligus, dalam bentuk VCD. Pihak yang hadir dalam acara Iluni itu dapat menyaksikan sendiri adegan yang tidak sedap.

Aneka koran memberitakan, betapa seorang perwira berbicara yang buruk tentang capres lain. Sebaliknya, ia memuji dan bicara yang baik sekali soal pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi. Misi dari perwira polri itu tertangkap dengan jelas. Ia mengarahkan anggota Bhayangkari dan purnawirawan polisi untuk mendukung Megawati Soekarnoputri. Di bagian akhir adegan, amplop uang dibagikan untuk transpor.

Follow up dari kasus itu juga cukup seksi. Ikatan alumni UI mendesak KPU dan Panwaslu menyikapi pelanggaran itu. Ikatan Alumni UI juga mendesak Kapolri Da'i Bachtiar untuk mundur. Namun siapa yang dapat mengontrol bergulirnya kasus ini?

Secara umum, tidak hanya di Indonesia, transisi demokrasi memang periode yang rawan. Di era transisi, mungkin hukum normatif sudah tertata dengan baik. Apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan oleh aparat pemerintah mungkin sudah digariskan dalam reformasi undang-undang dan peraturan.

Tapi kultur politik dan mental aparatur negara sangat mungkin jauh lebih lambat untuk berubah. Kebiasaan di zaman sebelumnya yang otoriter, di mana aparatur negara “menghamba” kepada pihak yang berkuasa jauh lebih sulit ditata. Tanpa diminta oleh penguasa sekalipun, sangat mungkin aparatur itu sendiri yang mengambil inisiatif untuk berpihak kepada “tuannya”. Apalagi jika ada permintaan khusus dari penguasa, atau lingkaran terdekat penguasa, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi.

Tak heran dalam pemantau pemilu di negara yang sedang bertransisi ke demokrasi, perilaku aparat pemerintahan dan tindak tanduk penguasa yang sedang memerintah menjadi sorotan utama.

Prinsip demokrasi menghendaki persaingan yang fair, adil dan terbuka di antara para capres, termasuk capres yang masih menjabat sebagai presiden. Juga menjadi prinsip demokrasi, bahwa semua aparatur negara dan fasilitas pemerintahan harus dinetralkan. Politisi datang dan pergi tergantung siapa yang memenangkan pemilu. Tetapi aparatur negara, birokrasi dan fasilitas pemerintahan tetap di sana, dan tunduk kepada siapapun yang terpilih.

Berdasarkan pengalaman negara lain, dari berbagai kesalahan aparatur, manipulasi perhitungan suara adalah yang paling fatal dan sering terjadi. Dalam pemilu yang riil, misalnya, capres yang menjadi penantang menang. Tapi aparatur pemerintahan, termasuk kepolisian, bermain dan membuat skenario seolah-olah

penantang itu kalah. Suara rakyat didistorsikan.

Itu sebabnya mengapa Quick Count yang diselenggarakan pihak swasta yang kredibel menjadi penting. Para peneliti dan LSM independen ikut serta menghitung hasil pemilu secara sangat cepat dengan sistem sampel. Hanya dalam waktu satu hari, hasil akhir pemilu diketahui. Jika komisi pemilu menghasilkan perhitungan suara yang berbeda, dengan segera kecurangan itu diketahui.

Model Quick Count begitu penting bagi pemilu yang bersih. Apalagi dalam sejarah pemilu di berbagai negara transisi, Quick Count menghasilkan akurasi dan presisi yang sangat hebat. Di Indonesia, Quick Count itu dilaksanakan oleh NDI dan LP3ES. Publik luas dan pihak yang berkepentingan dengan pemilu yang jujur bukan saja harus mendukung Quick Count itu. Bahkan jika perlu juga ikut berpartisipasi sehingga ada lembaga tandingan untuk membuat Quick Count, tentu dengan metodologi dan kontrol kualitas yang standar.

Tapi Quick Count hanya mengontrol hasil perhitungan suara. Sementara kecurangan dapat terjadi justru untuk mengarahkan suara pemilih. Harus pula dikembangkan mekanisme lain untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara dan aparatus. Tak hanya Polri yang mesti dikontrol, tetapi juga keseluruhan fasilitas seperti TVRI, RRI, BUMN, intelijen, birokrasi dan, bahkan TNI.

Negara Indonesia terlalu besar dan terlalu berharga

untuk dikorbankan oleh kepentingan sesaat para elitnya yang ingin curang. Pemilu presiden dan pergantian kekuasaan harus dianggap sebagai hal yang rutin dan normal saja. Kemenangan dan kekalahan adalah permainan yang biasa sejauh semua aturan dan aparat dibuat netral dan fair. Saatnya kita punya LSM yang secara khusus mengawasi penggunaan fasilitas dan aparat negara selama pemilu. **

Golkar Mendukung Siapa?

Capres mana yang akhirnya didukung oleh Partai Golkar dalam pemilu presiden putaran kedua? Ataukah Golkar memilih bersikap netral, tidak mendukung capres mana pun, namun berkomitmen membentuk pemerintahan yang kuat bersama capres mana pun yang terpilih?

Dua minggu ke depan, politik Indonesia mungkin didominasi oleh berita seputar manuver elite Golkar. Kini elite Golkar itu disibukkan oleh tiga arus kuat. Pertama, tokoh yang dekat dengan Wiranto, dan secara formal berada dalam pimpinan tim kampanye, memilih wait and see. Dengan simpatik, Wiranto-Gus Solah membawa kasus penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Solusi hukum jauh lebih baik ketimbang

jalan pintas lain untuk menyelesaikan keberatan penghitungan suara KPU.

Elite Golkar yang kini menahan diri untuk tetap bersama Wiranto memiliki pertimbangan sendiri. Jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, selalu terbuka kemungkinan Wiranto-Gus Solah menggeser posisi Megawati-Hasyim Muzadi, untuk lolos ke putaran kedua. Jika akhirnya Megawati tergeser, Golkar dipastikan tetap bersama Wiranto. Efek politik atas keputusan Mahkamah Konstitusi tentu akan besar sekali. Namun karena Indonesia negara hukum, asas hukum harus lebih didahulukan ketimbang segala macam perhitungan efek politik.

Mungkin pula elite Golkar yang masih bersama Wiranto lebih karena persoalan psikologis dan perkawanan. Secara rasional, mungkin mereka menduga Wiranto tetap tidak mampu menggeser posisi Megawati. Mungkin akan ada kesalahan perhitungan suara yang dikoreksi. Tapi koreksi itu terlalu kecil untuk melampaui Megawati. Hanya karena “tidak enak” dengan Wiranto, mereka menjaga diri dan tetap bersama Wiranto.

Kedua, ada pula elite Golkar yang mengembangkan penajakan ke arah lain. Tentu mereka tetap menghormati keputusan Partai Golkar yang masih menunggu kasus Wiranto. Tapi penajakan ke capres lain, Megawati Soekarnoputri, sudah dilakukan. Bahkan mereka sudah berhasil mempertemukan Megawati dan Akbar Tandjung. Jalan kerja sama menuju koalisi PDIP-

Golkar di pemerintahan dan parlemen terbuka.

Ketiga, sebagai tandingannya, elite Golkar lainnya mengambil jalan yang berbeda. Mereka justru menjajaki kerja sama Golkar dengan SBY-Jusuf Kalla. Aneka alasan dikembangkan. Jusuf Kalla sendiri dianggap bagian dari Partai Golkar. SBY dirasakan sudah menjadi simbol perubahan yang dibutuhkan untuk imej Golkar Baru. Last but not least, berdasarkan survei tiga lembaga yang kredibel, LSI dan IFES, popularitas SBY saat ini jauh di atas Megawati, dengan margin sekitar 40 persen.

Melampaui partai lainnya, sikap Golkar atas pemilu presiden babak kedua lebih mendapatkan perhatian. Tidak bisa dibantah, Golkar adalah partai paling modern. Susah dibayangkan presiden terpilih kelak akan mulus jika mendapatkan oposisi dan gempuran habis-habisan dari Golkar secara kelembagaan.

Dilihat dari porsi di parlemen, Golkar adalah partai terbesar. Tanpa menyertakan Golkar, perlu upaya ekstra keras bagi siapa pun presiden terpilih untuk meraih mayoritas parlemen. Tanpa mayoritas parlemen, aneka pembaharuan lewat undang-undang, dan APBN akan mengalami jalan terjal bahkan mungkin jalan buntu.

Dilihat dari SDM-nya, tidak ada pula partai yang memiliki pengurus serta politisi sekelas elite Golkar. Mereka jauh lebih berpengalaman dengan jam terbang lebih tinggi dalam manuver politik. Wawasan mereka dalam berpolitik lebih moderen, tetapi sekaligus juga

mampu untuk lebih pragmatis. Kemampuan mereka membuat negosiasi, menjalin konsensus, ataupun menggalang oposisi jauh lebih canggih dibandingkan elite partai manapun.

Dilihat dari jaringan ke daerah, Partai Golkar juga paling kuat. Partai yang kini ada umumnya partai baru. Sementara Golkar sudah sekitar 32 tahun malang melintang dalam politik di era Orde Baru. Hubungan Golkar dengan komunitas di daerah dan elite lokal jauh lebih kuat dan mengakar. Jika bekerja dan mampu dimobilisasi, jelas mesin politik Golkar lebih efektif diarahkan ke mana pun.

Dengan kelebihan itu, Golkar memang diharapkan mengambil inisiatif yang konstruktif bagi siapapun presiden terpilih. Sebagai partai paling modern dan terbesar, Golkar memikul tanggung jawab untuk menyukseskan pemerintahan lima tahun mendatang. Jika tidak, bukan saja presiden yang baru akan rugi, 'tetapi Indonesia juga mengalami risiko politik dan ekonomi yang berat.

Tahun 2004-2009 masa ujian Indonesia yang mungkin terberat. Toleransi rakyat banyak atas era transisi sudah berakhir. Publik tidak semudah dulu lagi memaafkan aneka kelemahan pemerintahan. Hanya memberikan kebebasan semata, reformasi dianggap tidak cukup. Publik juga butuh kesejahteraan ekonomi. Mustahil ada kesejahteraan ekonomi jika pemerintahan mendatang tidak kuat dan stabil. Mustahil pemerintahan stabil jika Golkar beroposisi atas presiden yang terpilih.

Tahun 2004-2009 politik Indonesia juga semakin berat. Tak seperti yang diduga, politik semakin terfragmentasi. Di tahun 1999-2004, ada lima partai yang memperoleh dukungan parlemen di atas 5 persen. Kini, tahun 2004-2009, ada tujuh partai yang punya dukungan parlemen di atas 5 persen.

Parlemen lebih banyak pemain, dan lebih membutuhkan negosiasi. Jika Golkar memilih berposisi, semakin sulit pemerintahan baru bernegosiasi untuk mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.

Dengan alasan di atas, sangat arif dan menentramkan jika Golkar bersikap netral saja dalam pemilu presiden babak kedua, dengan beberapa catatan. Siapapun presiden yang nanti terpilih, sebaiknya Golkar siap bekerja sama untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Golkar perlu juga memberi catatan bahwa sebagai partai paling modern, Golkar menghendaki presiden yang terpilih punya inisiatif perubahan dan pembaharuan yang pekat.

Manuver elite Golkar untuk membuat partai ini mendukung Megawati atau SBY akan berisiko. Bagaimana jika Golkar mendukung Megawati misalnya, ternyata Megawati kalah? Sulit bagi Golkar untuk membina hubungan dengan SBY yang selama pemilu presiden babak kedua bertentangan. Hal serupa jika Golkar secara resmi mendukung SBY.

Publik juga akan lebih mudah menerima Partai

Golkar yang netral tetapi berkomitmen ikut dalam pemerintahan siapapun presiden yang terpilih. Sementara elite Golkar yang ada juga dibebaskan untuk mendukung Megawati ataupun SBY. Jika SBY yang menang, elite Golkar pro SBY ikut dalam pemerintahan. Demikian pula jika Megawati yang menang. **

Proklamasi di Era Transisi Demokrasi

Freedom house membuat laporan tahunan mengenai grafik indeks kebebasan aneka negara di dunia. Dalam laporan itu diketahui, kualitas kebebasan sebuah negara dapat naik dan turun. Bahkan lebih ekstrem lagi, sebuah negara dapat berpindah-pindah dari sistem yang demokratis menuju sistem otoriter dan balik menuju sistem yang demokratis lagi dan kembali pula menjadi sistem otoriter.

Masa transisi demokrasi memang menjadi pertarungan. Taiwan, Korea Selatan, Afrika Selatan dan Brasil merupakan negara-negara yang dapat dikategorikan on the right track menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Sementara itu, Yugoslavia dan Uni Sovyet menjadi contoh gagal transisi demokrasi. Dua negara itu bahkan sudah hilang dari peta bumi sejarah.

Sehari menjelang Proklamasi 17 Agustus 2004

merupakan momentum yang baik untuk melakukan refleksi. Kita lupakan dulu pertarungan politik yang sangat praktis, seperti siapa yang akan menjadi presiden baru, atau apa implikasi politik dukungan Golkar bagi Megawati.

Siapa pun yang menjadi presiden, apa pun komposisi pemerintahan baru, mereka akan menerima banyak pekerjaan rumah. Sukses atau gagal terhadap pekerjaan rumah itu, tidak hanya berdampak kepada kinerja mereka sendiri, tetapi juga nasib demokrasi Indonesia di era transisi.

Ada empat pekerjaan rumah yang harus disukseskan jika kita ingin demokrasi di Indonesia mengalami konsolidasi, dan tidak ingin Indonesia hilang dari peta dunia seperti kasus Yugoslavia dan Uni Soviet.

Pekerjaan rumah pertama adalah soal economic recovery. Pemerintahan baru, siapa pun presidennya, harus bertekad menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengangguran menciptakan proses dehumanisasi. Namun pekerjaan tidak akan datang jika tidak ada investasi. Investasi tidak akan datang jika lingkungan yang ada tidak kondusif.

Seratus hari pertama pemerintahan, presiden terpilih diharapkan membangkitkan kepercayaan para investor. Mereka harus diyakinkan, semakin yakinnya, bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan

menguntungkan untuk investasi. Pembenahan akan dilakukan dan untuk tujuan itu, harus ada perubahan yang drastis dalam kepastian hukum, sistem keamanan, sistem perburuhan, sistem perpajakan, dan kompetisi berusaha yang sehat.

Tak ada gunanya pemerintahan dan reformasi jika ia tidak mampu membuat rakyat bertambah sejahtera. Begitu banyak dana pengusaha kita sendiri yang diparkir di luar negeri. Begitu banyak pengusaha asing yang ingin menanamkan investasi di Indonesia. Namun investasi tidak mengenal Tanah Air. Ia akan pergi dari wilayah yang tidak subur, tidak aman, tidak pasti dan tidak nyaman. Ia akan datang ke mana saja sejauh wilayah itu kondusif bagi berkembang biaknya dunia usaha secara sehat, bebas, pasti dan adil.

Pekerjaan rumah kedua adalah rekonsiliasi. Masa silam tidak dapat lagi diubah. Pergantian kekuasaan dalam sejarah politik kita terjadi tidak secara damai dan elegan. Empat presiden kita terdahulu dipuja di awal namun dicerca di akhir masa jabatannya. Bung Karno, Pak Harto dan Gus Dur dipaksa berhenti di tengah jalan sementara Habibie ditolak pidato pertanggungjawabannya. Semua itu terjadi dalam kompleksitas politik yang tidak dapat dikendalikan oleh satu kekuatan mana pun.

Konflik, dendam, kemarahan, dan luka sosial tercipta akibat proses politik di masa silam. Ditambah

lagi dengan keberagaman agama, etnis, dan suku bangsa, potensi perpecahan di Indonesia sangat tinggi. Disharmoni itu tidak boleh dibiarkan berjalan apa adanya. Ia dapat berkembang seperti virus yang makin lama menyerang sendi-sendi bangsa dan menjadi beban masyarakat.

Rakyat berhak untuk hidup tenteram dan damai dengan sesama warga negara. Harus ada proses yang sengaja dibuat pemerintah untuk menyembuhkan aneka luka sosial politik. Pemerintahan baru diharapkan merekatkan kembali kebersamaan dalam proses rekonsiliasi. Indonesia harus menjadi tenda besar buat semua warga negara. Tak boleh ada satu pun warga Indonesia yang mengalami diskriminasi hanya karena warna kulit, agama maupun keyakinan politiknya. Indonesia adalah satu dan untuk semua. Merah Putih menjadi pengikat batin.

Pekerjaan rumah ketiga adalah profesionalisasi aparat keamanan. Tan ada negara yang kuat tanpa tentara dan polisi yang kuat. Namun tidak ada pula negara demokrasi tanpa profesionalisasi tentara dan polisi. Rakyat berhak atas rasa aman baik dari serangan luar negeri maupun ancaman dalam negeri.

Salah satu proyek besar di era transisi adalah reposisi militer dan profesionalisasi polisi. Zaman sudah sedemikian berubah. Tentara aktif tidak perlu lagi terlibat ke dalam politik praktis. Secara bertahap

tetapi pasti, militer aktif dibuat tidak lagi menempati jabatan publik dan tunduk kepada supremasi sipil.

Kita semua antimiliterisme. Namun jangan dilupakan bahwa dalam sejarah dunia, militerisme dapat dilakukan baik oleh pimpinan militer maupun pimpinan sipil. Hitler dan Stalin adalah dua pemimpin yang justru paling militeristik di dunia.

Banyak pula contoh pemimpin yang demokratis, baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan militer. George Washington dan Dwight David Eisenhower adalah beberapa contoh purnawirawan militer yang cukup demokratis dan dihormati ketika mereka terpilih menjadi pemimpin nasional.

Polisi kini sudah terpisah dari militer. Mereka berdiri di depan untuk menjaga keamanan masyarakat. Profesionalisasi di tubuh polisi harus menjadi agenda utama capres terpilih. Harus ada perbaikan kurikulum, peningkatan disiplin serta mekanisme kontrol di tubuh Polri sendiri, sehingga polisi benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Peristiwa brutalisme polisi bulan Mei 2004 di Makasar tidak boleh terjadi lagi.

Pekerjaan rumah keempat adalah reformasi politik dan konsolidasi demokrasi. Kebebasan politik, partisipasi publik dan kompetisi yang terbuka bagi rakyat dalam memperebutkan jabatan publik adalah buah terpenting dari reformasi.

Demokratisasi itu tidak boleh henti. Kebebasan yang ada justru menjadi energi yang efektif bagi semua pihak untuk saling mengontrol dan meminimalkan kesalahan.

Kompetisi terbuka dalam bisnis membuat harga menjadi lebih murah dan kualitas produksi menjadi lebih baik. Kompetisi terbuka dalam politik melahirkan hal yang sama. Output dan produk politik juga akan lebih berkualitas.

Rakyat banyak akan mendapatkan berkahnya. Walau kadang dinilai tidak efisien dan berujung kepada konflik terbuka, mekanisme demokrasi dan partisipasi rakyat justru harus terus diperkuat dan dikonsolidasikan. Selamat HUT ke-59 RI! **

Golkar Versus Koalisi Kebangsaan?

Harian Kompas, Senin 23 Agustus 2004, mempublikasikan hasil jajak pendapat mengenai Koalisi Kebangsaan. Dari berbagai isu yang dielaborasi, ada satu bahasan yang sangat menarik untuk direnungkan. Jajak pendapat itu menanyakan bagaimana respons pemilih Golkar terhadap Koalisi Kebangsaan. Publik mengetahui, Koalisi Kebangsaan itu diikuti oleh Partai Golkar. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, diangkat menjadi pimpinan Koalisi Kebangsaan itu.

Hasilnya cukup mencengangkan. Menurut jajak pendapat itu, lebih banyak pemilih Golkar yang menentang daripada yang mendukung. Tepatnya, harian itu menunjukkan angka persentase. Yang mendukung koalisi sebanyak 45 persen, sementara yang menentang

koalisi 48 persen. Jajak pendapat itu bahkan juga menunjukkan kekhawatiran publik atas koalisi.

Jika koalisi memenangkan pemilu presiden, dengan Megawati sebagai presidennya, dan didukung oleh mayoritas parlemen dalam koalisi, 59 persen khawatir reformasi akan stagnan. Bahkan sebesar 69 persen publik khawatir, jika koalisi itu menang, justru memunculkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jajak pendapat itu memang sangat terbatas, menjangkau hanya pemilih kota. Metode jajak pendapat yang menggunakan telepon, memang tidak bisa menjangkau sekitar 90 persen pemilih Indonesia yang tidak memiliki telepon. Namun, jajak pendapat itu dapat memberikan gambaran awal kecenderungan publik perkotaan yang dinamis.

Tidak dieksplorasi, mengapa lebih banyak pemilih Golkar yang menentang keputusan elite partainya. Mengapa koalisi kebangsaan itu tidak populer di kalangan komunitas Golkar yang justru menjadi insiator dan pemimpin koalisi itu.

Dua partai terbesar dalam Koalisi Kebangsaan adalah PDI-P dan Golkar. Walau memiliki platform partai yang relatif mirip, namun massa kedua partai itu punya kendala psikologis. Ada tiga alasan mengapa akhirnya lebih banyak pemilih Golkar yang menolak mendukung Ketua Umum PDI-P, berdasarkan data dari jajak pendapat itu.

Alasan pertama, pemilih Golkar dan pemilih PDI-P sudah lama berada dalam situasi persaingan. Walau berasal dari segmen yang kurang lebih sama, namun mereka tidak harmoni. Elite masing-masing partai mungkin dengan mudah dapat loncat sana dan loncat sini. Misalnya, dari PDI-P pindah ke Golkar, atau sebaliknya.

Namun, massa pemilih di bawah dan di grass root lebih punya memori panjang. Mereka bersaing di Pemilu 1999. Ketika PDI-P mengalahkan Golkar pada 1999, goresan pemilih Golkar sudah dimulai. Konflik Buleleng di Bali sebelum dan menjelang Pemilu 2004 makin mempertegas pengotakan itu. Apalagi, saat itu terjadi saling sambut antarelite Golkar dan PDI-P bahwa haram bagi mereka untuk saling mendukung.

Alasan kedua, di samping berkompetisi, massa pemilih Golkar dan PDI-P juga masih diwarnai oleh permusuhan dua orde. Megawati dan PDI-P bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dengan figur Sukarno dan bayangan Orde Lama. Sementara Golkar bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari figur Soeharto dan Orde Baru.

Jelas PDI-P sudah berubah dan mereformasi diri. Jelas pula Golkar sudah berubah dan melepaskan diri dari bayangan Soeharto dan Orde Baru. Namun, sentimen publik di akar rumput tidak bergerak selincah para elitnya. Permusuhan dua orde dan konflik dua figur politik besar itu masih meninggalkan bekas. Para elite boleh berbalik arah dari berkawan, bersaing, bermusuhan, lalu berkawan lagi. Tetapi, massa di

bawah punya emosi dan kemarahan yang lebih stabil.

Alasan ketiga, bagi pemilih Golkar, Jusuf Kalla yang merupakan kompetitor Megawati, masih dianggap keluarga besar Partai Golkar. Jusuf Kalla sendiri masih merupakan tokoh Golkar. Bahkan di Indonesia bagian timur, terutama di Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla mungkin menjadi tokoh Golkar paling populer.

SBY juga masih dianggap berada dalam komunitas Golkar. Ia sendiri pernah dicalonkan untuk ikut konvensi Partai Golkar. Secara historis, SBY juga pernah di parlemen mewakili Fraksi ABRI. Hubungan Golkar dan ABRI saat itu sangat mulus.

Apakah hasil jajak pendapat itu akan stabil? Pada 20 September nanti, masihkah lebih banyak pemilih Golkar yang menolak Koalisi Kebangsaan dibandingkan yang mendukungnya?

Hal itu sangat bergantung pada dua hal. Pertama, seberapa efektif mesin politik Partai Golkar bekerja. Kedua, sangat bergantung pula pada apakah manuver saingannya, SBY-Jusuf Kalla, mampu mengimbangi untuk tetap menarik pemilih Golkar. Jika SBY- Jusuf Kalla membuat blunder, misalnya, yang terkesan antipati kepada Golkar, justru membuat pemilih Golkar pergi dari mereka.

Dalam dua pemilu, baik pemilu parlemen maupun pemilu presiden tahap pertama, mesin politik Golkar

bekerja secara berbeda. Mesin partai Golkar sangat efektif dalam pemilu parlemen. Saat itu di semua cabang di tingkat grass root, mesin partai Golkar bekerja.

Sebagian hal itu disebabkan oleh kecintaan pemimpin lokal atas partainya sendiri. Namun, sebagian besar, hal itu disebabkan pemimpin lokal yang juga tengah memperjuangkan diri untuk menjadi caleg. Tidak mengherankan, hasilnya Golkar mengalahkan PDI-P dan menjadi juara pemilu parlemen.

Sebaliknya, dalam pemilu presiden tahap pertama, mesin Golkar tampak lumpuh. Ibarat mobil yang mampu berlari kencang, Golkar hanya berlari sangat pelan. Akibatnya, pasangan Wiranto-Gus Solah, yang juga didukung oleh PKB, terpuruk ke urutan ketiga. Pemimpin Golkar di aneka daerah tidak begitu menggebu memperjuangkan Wiranto-Gus Solah.

Jika memperjuangkan calonnya sendiri saja pemimpin lokal tidak bersemangat, bagaimana memperjuangkan calon partai lain dalam koalisi kebangsaan? Tentu itu sangat bergantung pada insentif dan "penggemplengan" yang dilakukan pihak koalisi kebangsaan.

Di sisi lain, kompetitor Koalisi Kebangsaan juga potensial mempengaruhi suara pemilih Golkar. Musuh terbesar dari SBY- Jusuf K'alla adalah membuat blunder. Sejauh mereka tetap simpatik, pemilih Golkar, sebagaimana pemilih partai lain yang capresnya kalah di babak pertama, akan terpecah.

Headline beberapa koran mengutip pendapat Jusuf

Kalla bahwa ia tidak hendak mengajak kader Golkar dalam pemerintahan baru. Ia membiarkan partai yang mendukung Megawati berposisi jika dirinya terpilih. Pernyataan itu tentu harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan makna ganda.

Jika ia sama sekali menafikan Golkar sebagai partai, jelas itu sebuah blunder. Pemilih Golkar yang banyak itu akan pergi darinya. Namun, jika dengan pernyataan itu ia maksudkan adalah pengurus partai Golkar yang tidak properubahan, tetapi ia tetap mengakomodasi kader Golkar yang properubahan, ia justru menumbuhkan simpati yang luas di komunitas Golkar sendiri. .

Pemilu 20 September, tinggal hitungan hari. Hasil jajak pendapat itu dapat menjadi renungan bagi semua pihak. Tak hanya politisi, tetapi akademisi juga perlu mengelaborasinya dalam rangka memahami perilaku pemilih menghadapi pemilu presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung di Indonesia. **

Cak Nur Melemah, Gagasannya Menguat

Seorang pemikir dan gagasannya adalah dua entitas yang terpisah. Sang pemikir terikat dengan kesehatan fisiknya, sementara gagasan sang pemikir hanya terikat oleh relevansi zaman. Sebagai pemikir, ia dapat melemah dan lesu akibat kondisi tubuhnya. Namun pada saat yang sama, gagasan yang dilontarkan justru dapat semakin sehat dan kuat.

Demikianlah potongan pikiran yang melintas di benak saya ketika menjenguk Cak Nur, sebutan akrab Nurcholish Madjid. Di rumah sakit National University, Singapura, Cak Nur tampak sangat lesu. Kulitnya lebih hitam akibat cangkok hati yang mengalami infeksi. Kami berjarak sekitar tiga meter tetapi dipisahkan oleh ruang kaca.

Cak Nur mencoba menggerakkan tangannya. Namun ia tidak kuasa. Hanya ekspresi matanya yang tertangkap. Berbagai selang dan mesin menopang daya tahan tubuh Cak Nur. Saya kirimkan doa untuk kesehatannya. Air mata menetes di wajah Cak Nur. Hanya ekspresi itu yang mampu dikomunikasikan Cak Nur saat ini. Sang istri dengan penuh sabar dan kasih menyeka air mata Cak Nur.

Sangat lama bayangan Cak Nur mengisi pikiran saya. Tak saya duga, kondisi guru bangsa secara fisik sudah selemah itu. Pada saat yang sama, gagasan Cak Nur untuk Indonesia muncul kembali dalam ingatan saya, satu per satu. Gagasan itu justru sangat relevan untuk Indonesia saat ini, siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden.

Pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 tidak hanya mengurus masalah teknis dan praktis seperti krisis ekonomi atau koalisi parlemen. Ia juga menghadapi persoalan yang jauh lebih dalam dan besar seperti pertemuan agama Islam dan budaya barat di Indonesia. Jika Indonesia ditamsilkan seperti manusia, ibu kandungnya adalah peradaban Islam. Namun ayah kandung Indonesia adalah peradaban barat.

Bagaimanakah mempertemukan peradaban barat dan Islam itu di Indonesia? Lebih spesifik lagi, bagaimanakah mengharmoniskan Islam dan demokrasi dalam kultur politik Indonesia? Ini pertanyaan generasional yang

memang tidak bisa dijawab dan diselesaikan oleh satu generasi saja. Namun setiap pemerintahan dapat menyumbangkan “beberapa batu bata” bagi “dinding” harmonisasi dua peradaban itu.

Banyak hal yang membuat kita optimistis walau banyak kendala di lapangan. Islam di Indonesia, umumnya di Asia Tenggara, dianggap berbeda dengan di Timur Tengah. Dua komunitas itu percaya dengan kitab suci dan prinsip dasar yang sama. Namun konteks sosial politik dua kawasan itu menyebabkan interpretasi Islam yang berbeda. Sudah menjadi konvensi, bahwa praktik politik Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, lebih moderat.

Bahkan Indonesia diharapkan menjadi laboratorium eksperimen Islam dan demokrasi. Bagaimanapun, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kegagalan harmonisasi Islam dan demokrasi, ataupun kesuksesannya, segera menjadi percontohan dunia.

Berbagai data dunia yang ada mengenai masyarakat muslim memang beragam. Ada sisi yang memprihatinkan. Freedom House, misalnya, secara rutin mengeluarkan indeks kebebasan aneka negara di dunia. Data itu dapat pula dianalisis berdasarkan perbedaan negara muslim versus negara non-muslim. Memang terlihat secara jelas, indeks kebebasan di negara muslim umumnya lebih rendah.

Transisi demokrasi kini menjadi fenomena global.

Demokrasi tidak hanya tumbuh di kawasan Eropa dan Amerika. Kini di berbagai negara Asia, Afrika dan Amerika latin, demokrasi sudah pula menjadi pilihan politik. Namun ketika kembali dibedakan antara kawasan negara muslim dan non-muslim, kembali terlihat perbedaan yang mencolok mengenai praktik demokrasi.

Sebagian menjelaskan secara hitam putih bahwa antara Islam dan demokrasi tidak bisa dicampurkan seperti minyak dan air. Bahkan banyak pula lahir pemikir yang mengonfirmasi perseteruan antara Islam dan demokrasi. Bahkan lebih jauh lagi, sangat minimalnya negara demokrasi di wilayah muslim dianggap sebagai buah dari konflik peradaban, antara Islam versus barat.

Jika analisis itu benar, tentu Indonesia akan mengalami kesulitan permanen. Tak bisa dibantah, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Tak juga bisa dibantah bahwa demokrasi kini sedang diuji- coba. Apakah ini berarti praktik demokrasi di Indonesia tidak akan pernah berhasil? Apakah ini berarti menumbuhkan demokrasi dalam masyarakat muslim di Indonesia seperti menaburkan minyak di atas air? Apakah dua entitas itu tidak mungkin bersatu?

Untunglah banyak pemikir dan akademisi membuktikan sebaliknya. survei internasional yang diselenggarakan Pipe Norris, akademisi dengan reputasi internasional, melihatken kenyataan lain.

Justru mayoritas penduduk muslim di negara yang didominasi warga muslim, menginginkan demokrasi. Norris lalu membuat pernyataan yang cukup berwibawa, bahwa tidak ada perbedaan antara warga muslim dan warga non-muslim dalam mengapresiasi demokrasi.

Dalam agama, segala hal tergantung dari interpretasi. Agama Islam, sebagaimana agama lain, dapat diinterpretasikan dan dipraktekkan untuk menentang demokrasi. Sebaliknya, Agama Islam, sebagaimana agama lain, dapat pula sangat selaras dengan demokrasi.

Samuel Huntington sendiri memaparkan hubungan antara agama Katolik dengan Demokrasi. sebelumnya, Katolik juga dianggap menentang demokrasi. Bahkan beberapa tokoh besar Katolik secara sangat tegas antidemokrasi. Berbeda dengan Protestan yang bisa menerima dan selaras dengan demokrasi sejak awal.

Namun terjadi perubahan interpretasi yang luar biasa di kalangan petinggi Katolik. Konsili Vatikan kedua, yang menyatakan ada keselamatan di luar gereja, mengubah banyak hal dalam memandang konsep di luar agama Katolik. Demokrasi akibatnya tidak lagi dianggap dunia di luar Katolik, tetapi sistem politik yang justru harus didukung. Berbagai negara yang didominasi Katolik, seperti Filipina, dapat mempraktikkan demokrasi.

Hal yang sama mungkin terjadi pula pada agama Islam. Diperlukan pemikir yang sangat berwibawa untuk mengelaborasi bahwa antara Islam dan demokrasi, dan antara Islam dan dunia barat sebenarnya ada

persinggungan. Seseorang dapat menjadi muslim yang taat sekaligus pejuang demokrasi yang gigih. Menjadi Muslim dapat sekaligus menjadi demokrat. Rajin ke masjid pada saat yang sama dapat pula melindungi sistem politik demokratis.

Pada titik ini kita melihat peran besar yang dimainkan oleh Nurcholish Madjid. Sejak mahasiswa, Cak Nur sudah sangat menonjol sebagai pemikir Islam. Keluasan pandangannya, kerendahan hatinya, integritas kepribadiannya, membuat sosok Cak Nur bahkan dijuluki guru bangsa.

Kini Guru Bangsa itu sedang lesu. Sakit yang dideritanya sangat parah. Namun gagasannya justru semakin sehat dan perkasa. Siapapun yang terpilih menjadi presiden merasa terbantu oleh gagasan Cak Nur untuk mengharmoniskan praktik politik Islam dan praktik demokrasi. **

**BAGIAN KEEMPAT
POLITIK
SETELAH PEMILU PRESIDEN**

Politik Setelah Pemilu Presiden

Kompetisi dan oposisi memang hal yang lazim dalam politik demokrasi. Itu semua bagian dari dinamika politik. Namun apakah itu dinamika politik yang sehat, di mana berbagai kekuatan politik yang penting saling mengontrol untuk meminimalkan kesalahan? Ataukah itu dinamika yang saling merusak, dan ujungnya negara semakin terpuruk?

Situasi politik pasca-pemilu presiden saat ini membuat publik luas dalam kebingungan. Penuh harapan, kita ingin optimistis bahwa aneka gontok-gontokan yang kini ada hanyalah dinamika masa transisi biasa yang akan menghilang bersama waktu.

Namun tidak bisa pula dihilangkan perasaan cemas, khawatir suasana konfliktual yang ada akan terus

mewarnai politik Indonesia lima tahun ke depan dan menggali krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam.

Tiga kasus kini terpampang secara telanjang di parlemen, di lembaga presiden dan dalam hubungan parlemen dengan lembaga presiden. Di parlemen, kekisruhan terus terjadi. Sidang DPR terus-menerus gagal mencapai kuorum karena diboikot oleh sejumlah fraksi. Akibatnya lembaga DPR berada dalam posisi macet. Segala keputusan yang diambil akan cacat secara hukum karena tidak memenuhi kuorum berdasarkan tata tertib yang ada.

Sebuah langkah inovasi diambil. Kelompok yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan mengubah tata tertib. Segera setelah itu, mereka memilih pimpinan komisi DPR berdasarkan tatib baru. Dengan strategi ini, tidak heran, pimpinan komisi DPR didominasi oleh Koalisi Kebangsaan.

Namun kubu lain, yang sering disebut sebagai Koalisi Kerakyatan, mengambil serangan balasan. Mereka tidak mengakui perubahan tata tertib karena anggota DPR yang mengubah itu tidak memenuhi syarat kuorum. Koalisi Kerakyatan bahkan membuat komisi tandingan. Dengan sendirinya, pimpinan komisi tandingan itu didominasi oleh partai pengikut Koalisi Kerakyatan.

DPR pun terbelah dua. Mereka berada dalam satu

lembaga, satu atap, terbelah ke dalam dua perangkat politik. Lebih jauh lagi, kubu Koalisi Kerakyatan melayangkan mosi tidak percaya kepada ketua DPR. Alasan mereka, ketua DPR sudah memihak hanya kepada satu kubu saja dengan mengabaikan aturan main. Belum kita ketahui efek politik dan hukum dari gerakan mosi tidak percaya itu. Yang kita ketahui, DPR hasil pemilu demokratis semakin gungjang gungjang.

Lembaga presiden terkena hantaman serupa. Hubungan presiden, wakil presiden dan para menteri tampak cukup solid dan terus berkonsolidasi. Namun serangan datang dari luar, baik pihak pers, LSM ataupun aneka tokoh berpengaruh. Yang diserang adalah para menteri yang bermasalah secara moral.

Pemerintahan SBY dan JK sudah telanjur populer dengan simbol perubahan dan tekad pemerintahan yang bersih. Harapan publik akibatnya sangat tinggi dengan pemerintahan baru. Semakin tinggi harapan akibatnya semakin mudah kecewa.

Beberapa menteri dianggap justru bertentangan dengan simbol perubahan dan sinyal pemerintahan yang bersih. Beberapa koran secara terus-menerus memberitakan kasus beberapa menteri yang berhubungan dengan pat gulipat uang negara atau kasus morallainnya. Sungguhpun serangan ini belum jitu secara legal formal, namun dapat menurunkan wibawa pemerintahan baru.

Kasus ketiga justru terjadi akibat hubungan yang

kurang harmonis antara lembaga presiden dan DPR. Hal ini dipicu oleh persoalan yang datang dari presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri. Isu yang muncul juga cukup sensitif mengenai pergantian panglima TNI. Sampai saat ini kasus itu belum putus.

Di satu sisi terdengar kabar, DPR sebagai lembaga akan segera memproses pengunduran diri panglima TNI lama dan akan menyetujui panglima TNI baru yang diusulkan oleh Presiden Megawati. Namun berita itu segera batal karena presiden baru menarik keputusan presiden lama. Panglima TNI lama dengan demikian tetap bertugas seperti biasa.

DPR semakin gonjang-ganjing. segera muncul usul interpelasi DPR . untuk memanggil presiden baru. Akan segera dieksplorasi oleh DPR mengenai alasan presiden baru yang membatalkan surat presiden lama mengenai proses pergantian panglima TNI.

Namun berita kembali berganti. Terjadi komunikasi politik antara presiden baru dan pimpinan DPR. Terkesan bahwa ada kesepakatan untuk tetap mempertahankan panglima lama. Dan ada pula pengertian bahwa pada waktunya presiden mungkin akan mengajukan nama panglima baru yang tidak berbeda seperti yang diajukan presiden lama.

Pro dan kontra terus bergulir. Kondisi politik setelah pemilu presiden mungkin tidak menyenangkan dan setenang yang banyak diharap. Mulai muncul skeptisme akankah pemilu demokratis ini berujung pada pemerintahan

yang efektif. Jika tidak tertangani secara baik, yang kita khawatirkan akan muncul pesimisme bukan saja kepada pemerintahan baru, tetapi kepada sistem demokrasi itu sendiri.

Sebenarnya tidak ada masalah dengan pemerintahan baru. Tak juga ada masalah dengan sistem demokrasi. Yang potensial membawa masalah adalah sistem besar politik kita sendiri yang sudah mengundang kesulitan, terlepas siapa pun yang menjadi presiden dan anggota DPR.

Para ahli politik komparasi berkali-kali mengingatkan kombinasi buruk sistem politik kita. Setelah UUD 1945 diamendemen, kita mengombinasikan sistem presidensialisme di mana presiden dipilih langsung dengan konteks sistem multi partai. Di AS, presidensialisme dapat bertahan karena hanya ditopang oleh sistem dua partai saja.

Dalam sistem presidensialisme dengan konteks multipartai, akibatnya, selalu mungkin terjadi pemerintahan minoritas ekstrem. Karena kapabilitas dan pesona pribadinya, sangat mungkin presiden dari partai kecil yang terpilih. SBY menjadi presiden berasal dari Partai Demokrat yang posisinya di parlemen sekitar 10 persen saja. Hal yang masuk akal jika 90 persen lainnya dapat menjadi bola liar yang menjadikan presiden sebagai “tawanan.”

Dalam kondisi makro seperti ini, apapun yang dilakukan presiden baru akan serba salah. Apalagi

jika kultur politik di parlemen bukanlah politik yang berdasarkan prinsip the good governance. Jika presiden baru bersikap tegas dan lempeng, tanpa kompromi, hanya berdasarkan prinsip normatif, ia segera mendapatkan oposisi mayoritas.

Sebaliknya, jika ia ingin mendapatkan dukungan parlemen, ia segera harus berkompromi. Celakanya, publik di luar parlemen tidak suka dengan kompromi.

Siapa pun yang terpilih menjadi presiden kini berada dalam situasi dilematis. Ia berlomba pula dengan waktu. Aneka goyangan dan terpaan politik akan terus terjadi. Setelah lebaran, aneka demonstrasi tampaknya akan semakin membuat gerah politik praktis. Hanya inovasi dan leadership yang luar biasa yang dapat menyelamatkan negeri ini. **

Sentuhan Terakhir Megawati Soekarnoputri

Baik Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keduanya berada dalam posisi yang beruntung. Mereka berdua menjadi capres pertama yang bertarung dalam pemilihan presiden secara langsung. Mereka berdua, bukan orang lain, juga punya kesempatan sejarah untuk meletakkan tradisi peralihan kekuasaan yang damai, sehat dan bermartabat.

Megawati sudah mengawali tradisi itu dengan baik. Sehari setelah KPU mengumumkan pemenang resmi, Megawati sebagai pihak yang kalah sudah memberikan pernyataan. Di hari TNI, 5 Oktober 2004, ia meminta semua pihak menerima hasil pemilu, terlepas dari siapa

pun yang menang dan kalah. Seruan Megawati itu setidaknya mencegah anarkhisme pengikutnya yang fanatik urltuk menolak hasil pemilu.

Kini, sebelum tanggal 20 Okrober 2004, kita tengah menunggu sentuhan terakhir Megawati Soekarnoputri. Ia segera akan dik.enang sebagai negarawan sejati jika melakukan dua langkah penting lainnya di era transisi peralihan kekuasaan.

Pertama, segera secara terbuka Megawati mengucapkan selamat kepada SBY selaku pemenang. Itu dapat ia lakukan dengan cara menelepon SBY secara publik. Atau ia minta dibuatkan pertemuan khusus di wilayah yang netral. Dalam peristiwa itu, ia menyalami SBY dan menyerukan kebersamaan.

Memang agak unik jika Megawati tidak kunjung mengucapkan selamat kepada SBY secara personal. Aneka pimpinan negara lain sudah memberikan selamat kepada SBY. Terasa kurang nyaman jika Presiden RI sendiri belum melakukannya.

Kedua, segera pula Megawati melakukan komunikasi dengan SBY menyiapkan pemerintahan transisi. Mereka berdua berbicara pada tingkat tinggi mengenai apa yang sebaiknya diketahui bersama dalam hal teknis pemerintahan nanti. Sudah diatur bahwa tanggal 20 Oktober, mandat kepemimpinan nasional sudah beralih ke tangan SBY. Sejak hari pertama, SBY sudah harus siap memerintah.

Urusan negara sedemikian kompleks. Dibutuhkan masa transisi sebelum SBY resmi memerintah. Pertemuan Megawati dan SBY menjadi penting untuk menyiapkan peralihan itu. Pada tingkat teknis, tim kedua pemimpin itu kemudian mengoperasionalkan peralihan secara lebih detail.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat acapkali menjadi rujukan, walau kita tidak bisa mengambil alih semua kasus di sana mentah-mentah. Masa pemerintahan mulai di hari pemungutan suara sampai pelantikan presiden dibuatkan sebagai masa yang khusus.

Pada era peralihan itu, presiden berkuasa secara hukum dan etik sudah tahu apa yang disebut dengan “the do and the don’t” apa yang jangan dikerjakan dan apa yang sebaiknya dikerjakan. Presiden, misalnya, tidak melakukan pengangkatan pejabat yang signifikan. Presiden tidak pula membuat keputusan penting yang dapat menjadi persoalan presiden berikutnya. Walau masih menjadi presiden, di era itu ia juga dilarang menghabiskan uang negara untuk kegiatan ekstra di luar rutin.

Sebaliknya di era peralihan pula, presiden yang kalah melakukan hal tertentu. Di malam pertama setelah pemungutan suara dan hasilnya diketahui melalui quick count, pihak yang kalah segera mengangkat telepon. Sang calon yang kalah menjadi orang pertama yang diliput secara sangat luas mengucapkan selamat kepada

presiden terpilih, mantan saingannya. .

Ketika ia mengangkat telepon, televisi dan aneka media massa lainnya sudah berkerumum. Pembicaraan mereka umumnya diketahui publik. Atau bisa juga ditempuh cara lain. Pembicaraan telepon dan ucapan selamat itu dilakukan secara rahasia. Namun kubu kedua belah pihak mengumumkan kepada publik bahwa pihak yang kalah baru saja menelepon dan mengucapkan selamat kepada pihak yang menang.

Ucapan selamat itu kemudian diikuti oleh tradisi berpidato di hadapan massa pendukungnya. Untuk kasus George Bush yang dikalahkan Clinton, pidato itu sangat sederhana namun bermakna. “Demokrasi kita,” Ujar George Bush. “Sudah berbicara. Rakyat sudah memilih. Kita bersama ucapan selamat kepada pemenang.”

Tak lupa dalam pidato, pihak yang kalah, meminta semua pendukungnya untuk berdiri di belakang presiden terpilih. Ucapan yang sering dinyatakan, “Ketika pemilu, ia menjadi lawan politik kita. Karena rakyat sudah memilih, dan ia menang, maka sekarang ia menjadi presiden kita semua, termasuk presiden kita yang pernah menjadi lawan politiknya.”

Tak lama kemudian, dua tokoh yang bersaing itu berkomunikasi dan menyiapkan pemerintahan transisi. Dalam kasus AS, pergantian pimpinan nasional acapkali diikuti oleh pergantian banyak sekali pejabat di birokrasi di level pimpinan. Kubu yang lama kemudian

memperkenalkan kepada kubu baru hal ihwal yang bersangkutan dengan dokumen negara dan mekanisme kerja. ketika presiden dilantik, di hari pertama, sang presiden dan timnya siap memerintah.

Akankah Megawati bersedia mengerjakan dua ekstra tambahan dalam rangka meletakkan pondasi dan tradisi peralihan pemerintahan yang baik? Tentu itu yang kita harap dan publik akan mengamatinya sampai tanggal 20 Oktober 2004.

Ke depan, untuk tahun 2009, 2014, dan seterusnya, beberapa tips di bawah ini dapat dihayati oleh kubu capres yang bertarung.

Kedua kubu hendaknya menyiapkan dua skenario sekaligus, baik skenario menang maupun skenario kalah. Di AS sebagai contoh, kedua kubu juga sangat menyiapkan dua jenis pidato, baik untuk pidato ketika menang, maupun pidato ketika kalah.

Dengan dua skenario itu, pihak yang bertarung sudah siap secara psikologis dengan apa pun hasil pemilu. Apalagi, pemilu itu adalah ritual politik reguler yang terjadi setiap empat tahun atau lima tahun atau tujuh tahun, tergantung dari negara yang bersangkutan. Kalah dan menang harus dilihat sebagai hal biasa dengan kaca mata yang lebih rileks.

Kompetisi politik akan lebih dapat dihayati sebagai kegiatan publik yang rasional. Jangan terlalu

banyak unsur personal yang bermain dalam wilayah kompetisi politik itu. Semakin banyak unsur personal yang muncul akan membuat sang tokoh mengalami guncangan psikologis yang tidak perlu, seperti rasa malu, kebanggaannya terluka, sedih berkepanjangan, dan sebagainya.

Kedua kubu yang bersaing seharusnya juga mencermati hasil survei lembaga yang kredibel secara lebih santai pula. LSI, IFES dan LP3ES adalah lembaga profesional yang hasil surveinya dapat dipercaya. Untuk kasus LSI, misalnya, tiga kali selama tiga pemilu hasil penelitiannya terbukti.

Tanggal 16 September 2004, LSI adalah lembaga pertama yang mengumumkan SBY menjadi presiden RI berikutnya. Trans TV dan Metro TV saat itu menyiarkan secara langsung angka yang disodorkan LSI. Menurut survei LSI, angka SBY 56%, Megawati 36% dan rahasia dan undecided 8%. Jika suara yang rahasis/undecided tidak diperhitungkan, hasilnya sangat mirip dengan hasil KPU, sekitar 60%: 40%.

Namun hasil survei tiga lembaga itu bukannya dijadikan referensi untuk perbaikan kinerja. Yang terjadi justru manuver yang mendelegitimasi lembaga survei dengan aneka tuduhan yang beragam. Akibatnya, kubu tersebut tidak mendapatkan manfaat sebuah penelitian ilmiah.

Memang benar banyak lembaga survei yang ecek-ecek yang dibuat dengan metodologi sembarangan.

Namun berdasarkan track record, team pemikir kedua kubu seharusnya sudah dapat membedakan lembaga mana yang kredibel dan tidak. Sungguh kita banyak belajar dari peristiwa besar pemilihan presiden secara langsung yang pertama di Indonesia. **

Selamat Datang Kabinet Baru

Apa yang akan terjadi dengan SBY-JK setelah lewat era bulan madu seratus hari pertama? Kini SBY memang tengah menjadi magnet yang menyerap semua perhatian. Semua gerak-geriknya, bahkan orang dekatnya, menjadi pusat berita. Harapan atas kepemimpinannya melambung. Apakah luapan harapan itu akan terus bersinar? Ataukah luapan itu ibarat kembang api yang mulai kuncup setelah lewat era bulan madu?

Semuanya sangat bergantung pada kinerja pemerintahan SBY- JK. Setelah seratus hari pertama, yang akan publik lihat adalah hasil konkret pemerintahannya. Sedangkan kinerja pemerintahan sebagian besar bergantung pada kapabilitas kabinetnya. Gagasan sebaik apa pun dari presiden akan lumpuh jika mesin kabinetnya jomplang. Sedangkan kapabilitas kabinet sebagian besar tergantung pula pada kualifikasi

personalia dari para menteri itu sendiri.

Kini SBY-JK tengah berada di proses final penyusunan personalia kementerian. Struktur formal dan keorganisasian kabinet itu sudah dituntaskan. Kerja selanjutnya menyusun penempatan dan rekrutmen calon menteri. Begitu serius dan hati-hatinya SBY-JK dengan kualitas kabinet, proses diskusi dan kontrak kerja dilakukan dengan calon menteri .

Namun justru di tahap ini, tekanan politik berada pada puncaknya. Aneka demo sudah digelar bahkan langsung datang ke Cikeas, wilayah kediaman SBY sendiri. Mereka menolak aneka nama yang selama ini sudah muncul sebagai calon. Sebagian dari demo itu murni ungkapan keprihatinan para pendukung. Namun sebagian lagi adalah kerja politik para elite dalam perebutan kursi kabinet.

Tekanan dari partai politik tidak kalah serunya. Mulai muncul ancaman partai tertentu yang akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan. Aneka alasan pun ditampilkan. Yang elegan, alasannya mengenai konsistensi platform SBY dengan beberapa menteri yang diduga melukai platform itu. Namun yang tidak banyak diungkap, sebenarnya ada pula alasan yang lebih konkret bahwa mereka ingin nama tertentu dijadikan menteri untuk pos tertentu.

Sebagian tim sukses SBY-JK tidak pula kalah garang. Mereka bahkan mengklaim meninggalkan SBY-JK. Selaku orang-orang yang berkeringat dan membantu

SBY-JK sejak mereka belum populer, mereka merasa kurang dilibatkan dalam proses final penyusunan personalia kabinet. Akibatnya ada beberapa nama calon menteri yang kontroversial, yang menurut mereka bertentangan dengan kesepakatan awal.

Sungguhpun presiden sudah dipilih langsung, dan walaupun kini kita menganut sistem presidensialisme, presiden terpilih agaknya tidak dibiarkan menentukan kabinetnya secara bebas.

Aneka tekanan, ancaman, hasutan dan intrik terus dimainkan. Sebagian bersifat positif sebagai kontrol dan input. Namun sebagian lagi justru negatif karena dapat menurunkan kualitas kabinet itu sendiri.

Ini test case pertama bagi presiden terpilih. Seberapa mampu SBY mengatasi tekanan maha hebat, dan akhirnya keluar dengan susunan personalia yang dapat dikategorikan sebagai the dream-team?

Secara konseptual, SBY sendiri sudah menggariskan kriteria kabinetnya secara komprehensif. Sebagai konsep, kriteria itu sangat bagus. Namun ketika masuk ke dalam realitas politik praktis, dan keterbatasan sumber daya partai pendukung, seberapa kuat kriteria itu dipegang?

Berulang-ulang dinyatakan bahwa SBY akan membentuk kabinet para ahli. Mereka adalah para tokoh yang kompeten, kapabel dan berkemampuan untuk

menyelesaikan masalah. Mereka menjadi menteri tidak lain dan tidak bukan bertujuan mewujudkan agenda perubahan yang dijanjikan SBY selama kampanye. Tak ada alasan tokoh itu menjabat kecuali untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah di bidang kerjanya.

Kompetensi itu dapat dilihat dari aneka ukuran. Jenjang pendidikan tentu merupakan indikator paling formal untuk melihat kapabilitas sang calon menteri. Pengalaman memimpin organisasi besar dan keberhasilannya juga menjadi cara melihat kepemimpinannya. Jika sang tokoh pernah menjadi menteri sebelumnya, tentu itu menjadi bekal yang lebih baik lagi.

SBY-JK agaknya bertekad membentuk zaken cabinet atau kabinet para ahli. Sebisa mungkin semua tokoh yang ada di kabinet SBY-JK adalah para ahli yang berpengalaman itu. Namun disadari karena banyak partai politik yang harus diakomodasi, jumlah profesional di luar partai itu ditetapkan sekitar 60 persen. Mereka ini yang akan menjadi garda terdepan pemerintahan SBY-JK, yang akan menentukan apakah janji perubahan itu dapat terwujud.

Kriteria lain adalah track record dan daya terima publik. Menteri dilantik untuk menyelesaikan masalah bukan justru membawa masalah dan beban. Jika ada menteri yang kontroversial, hari pertama kabinet SBY-JK hanya disibukkan untuk melakukan klarifikasi dan merespon aneka gelombang demonstrasi.

Namun ini era dimana demonstrasi dan respons publik yang dapat dipesan dan dibayar. SBY- JK tentu harus jeli membedakan mana respon yang asli, mana yang hanya bagian dari negosiasi yang ditunggangi elite politik. Sejauh pro dan kontra yang muncul hanya masalah pertarungan beberapa calon berebut posisi, pro dan kontra itu bisa diabaikan.

Namun jika pro dan kontra itu mengenai masalah yang sangat substansial, SBY- JK tentu harus mendengar. Sudah menjadi trademark SBY- JK bahwa mereka simbol perubahan dan pemerintahan yang bersih. Tentu aneh jika menteri yang diangkat justru gambaran tokoh yang korup dan bermasalah dengan keuangan negara.

Pada tataran konsep, sekali lagi, SBY sudah cukup rapi menyelesaikan pro dan kontra itu. Menurut SBY, jika memang ada bukti tertulis, calon menteri bersangkutan punya masalah dengan keuangan negara, SBY tentu bersedia merevisi selaku pimpinan yang ingin taat pada prinsip dasar pemerintahan yang bersih. Data ini bisa menyangkut pembayaran pajak, utang di BPPN, ataupun kasus BLBI.

Kriteria selanjutnya adalah kebersamaan dalam perjuangan dengan SBY- JK. Kriteria ini dikhususkan bagi partai pendukung dan team sukses SBY- JK sendiri. Aneka riset yang kompeten menunjukkan sebenarnya kemenangan SBY tidak disebabkan oleh partai pendukung. Bahkan Koalisi Kebangsaan yang terdiri dari partai yang jauh lebih mapan saja tidak banyak mempengaruhi pemilih. Apalagi jika koalisi pendukung

SBY-JK lebih banyak partai kecil dan partai baru.

Namun aneka tokoh partai itu tetap saja akan diakomodasi. Bahkan ada kompromi kualitas untuk tokoh partai itu. Persyaratan kualitas calon menteri dari partai pendukung mungkin tidak setinggi persyaratan kualitas kelompok profesional.

Yang terbaik jika SBY-JK diserahkan kewenangan memilih siapa di partai itu yang akan diambil dan ditempatkan pada posisi yang pas. Tapi politik praktis bekerja ke arah lain. Dengan seluruh manuvernya, melalui demo, ancaman, intrik, mungkin saja beberapa partai memaksakan nama tertentu pada posisi tertentu.

Lebih repot lagi jika partai yang bersangkutan tidak peduli bahwa tokoh yang dimajukannya itu akan mendapatkan penolakan publik yang besar. Lebih celaka lagi, jika mereka tidak peduli kabinet SBY-JK justru akan cacat di hari pertama pelantikannya.

Inilah tantangan pertama SBY-JK dalam pembentukan kabinet baru. Terjadi ketegangan antara konsep ideal kabinet yang sudah digariskan versus manuver politik praktis beberapa pendukungnya untuk memaksakan kehendak. Semoga SBY-JK berhasil mengatasinya dan benar-benar dapat membentuk kabinet the dream-team.

Loyalitas SBY-JK yang tertinggi bukan kepada partai pendukung, tetapi kepada kepentingan publik negara sudah dalam kondisi teramat parah. Jangan sampai SBY-JK salah memilih menteri.**

Setelah Kabinet Diumumkan

Bagaimanakah nasib dan prospek kabinet SBY-JK setelah lewat seratus hari pertama kelak? Di mata publik luas, apakah ini kabinet idaman, the dream team, yang segera membawa perubahan nasib bangsa, seperti yang dijanjikan ketika kampanye? Ataukah kabinet ini segera menuai kecaman, dan publik kembali seperti semula, kecewa dengan pemerintah?

Untuk sementara, publik luas merespons kabinet SBY-JK dengan perasaan yang bercampur. Di sana-sini banyak terdengar pujian. Namun pada saat yang sama, di segmen yang berbeda, sudah mulai terdengar kecaman dan nada pesimisme. Yang memuji menganggap ini kabinet yang sangat probisnis. Investasi diduga akan segera subur, dan pada waktunya Indonesia akan sejahtera.

Sebaliknya yang mengecam menyatakan, kabinet ini tidak banyak beda dengan Kabinet Gotong Royong

era Megawati Soekarnoputri. Tokoh yang diangkat sebagian karena kompromi politik. Banyak menteri yang ahli namun banyak pula yang diragukan. Bukan saja keahlian di bidangnya tetapi juga komitmen moral serta track record-nya. Yang pesimistis menyatakan, SBY-JK sudah menurunkan sendiri standar kualitas pemerintahannya.

Pada akhirnya, kinerja kabinet ini sendiri yang akan berbicara. SBY memberi sinyal yang kuat sekali untuk mengevaluasi kabinetnya, bahkan di tahun pertama. Kepada para menteri yang bermasalah, seperti melakukan korupsi, diminta mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi. Keraguan publik, seru SBY, harus dijadikan tantangan membuktikan karya dan kinerja.

Selaku warga negara yang patuh, selayaknya kita memberikan fair chance, dukungan dan kesempatan yang fair kepada kabinet ini untuk membuktikan diri. Namun, kendala dan tantangan yang mengancam kabinet ini harus pula dinyatakan agar SBY-JK lebih waspada.

Lapangan politik dan ekonomi yang kini dihadapi SBY-JK cukup sulit. Tiga peristiwa terakhir memberikan sinyal yang kurang nyaman. Peristiwa pertama adalah pelantikan presiden di gedung MPR, namun tidak ada pidato sambutan presiden terpilih. Ini peristiwa yang agak unik di dunia. Seorang presiden dilantik tanpa memberikan sambutan.

Bagi sebagian, hal ini mungkin persoalan teknis belaka. Kebetulan tata tertib sidang pelantikan itu memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pelantikan diikuti pidato. Tak ada masalah dengan hal itu. Presiden dapat berpidato di tempat lain, misalnya di istana.

Namun bagi sebagian, ini sinyal politik yang pesannya cukup kuat. Pesan itu hendak menyatakan bahwa MPR dapat membuat susah presiden. Bahkan jika MPR tidak memberikan tempat bagi presiden untuk pidato, walau itu di luar kelaziman, tidak ada kekuatan presiden untuk melawannya.

Publik segera berimajinasi mengenai kekuatan atau dukungan presiden di MPR. Di sana masih kokoh berdiri Koalisi Kebangsaan dengan dukungan dua partai terbesar, Golkar dan PDIP. Gabungan dua partai ini sudah melebihi 40 persen suara DPR. Hardliners di dua partai itu bahkan berniat mengontrol presiden dengan keras.

Sebelumnya, Koalisi Kebangsaan mendapatkan perlawanan dari koalisi lain yang menjadi pendukung SBY-JK. Namun untuk soal pidato presiden, perlawanan itu tidak tampak. Spekulasi kembali berkembang. Mungkin berbagai partai pendukung SBY-JK juga memberikan pesan politik yang kuat. Mereka dapat pula berbalik arah membuat susah presiden terpilih jika tidak mengakomodasi kepentingan partai pendukung itu.

Apalagi, pelantikan presiden dilakukan sebelum kabinet diumumkan. Partai pendukung juga memasang kuda-kuda untuk menaikkan posisi tawar. Karena jatah partai belum dipastikan oleh SBY- JK, partai itu juga tidak bereaksi dengan agenda pelantikan tanpa pidato itu. Publik luas dan dunia internasional pun terbingong-bengong. Sebagian bertanya, apakah di masa datang MPR akan kembali dengan mudah membuat susah presiden terpilih?

Peristiwa kedua adalah pengumuman kabinet. Sudah terbentuk kesan bahwa presiden akan mengumumkan kabinetnya jam delapan malam. Kemudian waktunya molor. Juru bicara kemudian mengumumkan bahwa presiden akan membacakan susunan kabinetnya jam 11 malam. Kembali waktu pengumuman kabinet itu terlampaui.

Sebagian melihat pengunduran itu bukan masalah teknis belaka, tetapi politik. Komentator di televisi ramai membahas tarik menarik dalam pembentukan kabinet itu. Beberapa nama menteri yang muncul, diduga akan hilang. Ternyata, nama menteri yang sudah hilang dimunculkan kembali. Sebenarnya hal yang biasa terjadi, perubahan nama sebelum pengumuman resmi dibuat.

Namun, perubahan nama untuk kasus SBY-JK dianggap tidak biasa karena menggambarkan seberapa besar tekanan diberikan kepada presiden. Ketika

kabinet diumumkan, publik merasa bahwa tidak semua menteri itu pilihan presiden yang dikenal punya standar yang tinggi. Presiden dianggap telah mengalah demi menjaga kebersamaan. Tapi presiden juga diduga telah mengorbankan beberapa prinsip dasar, seperti kualifikasi menteri di bidangnya.

Di satu sisi, mungkin ini memberikan nilai tambah kepada presiden. Ia dianggap tidak mendahulukan kepentingan pribadinya. Namun di sisi lain, ini juga memberikan rasa tidak nyaman. Presiden SBY, yang dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih partai, dianggap “terlalu baik” terhadap pihak penekan.

Peristiwa ketiga adalah reaksi pasar. Setelah kabinet diumumkan, pasar tidak bereaksi positif. Suara Pembaruan dan The Jakarta Post bahkan mengumumkan bahwa pasar bereaksi negatif. Antusiasme publik atas kabinet baru tidak terlalu menggembirakan. Publik mungkin kurang menyukai kompromi yang tergambar dalam susunan kabinet. Atau publik memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada kabinet akibatnya harapan itu sulit terpenuhi? Semakin tinggi harapan, semakin mudah kecewa.

Tiga respon paling aktual di atas tentu harus menjadi catatan kabinet SBY-JK. Tak ada cara lain untuk meresponnya kecuali bukti kinerja kabinet itu sendiri. Selamat bekerja buat kabinet baru. Hanya prestasi dan success story yang dapat menepis keraguan publik atas pemerintahan baru. **

Politik Elite yang Mengkhawatirkan

Dua minggu setelah presiden baru dilantik, dan lima minggu setelah anggota DPR baru resmi menjabat, politik Indonesia semakin mengkhawatirkan. Tanpa inovasi politik yang gemilang, dan tanpa terciptanya konsensus baru kalangan elite yang berpengaruh, pemerintahan terancam lumpuh. Publik akan kecewa bukan saja pada elite politik, tetapi pada pemilu demokratis yang hanya melahirkan fragmentasi politik dengan sinergi yang negatif.

Seharusnya, masa awal pemerintahan baru melahirkan politik bulan madu. Misalnya, publik melihat DPR baru begitu keras bekerja melahirkan aneka legislasi pro-perubahan. Kantor DPR bersinar siang dan malam

karena para anggota kerja keras ingin membawa bangsa ini keluar dari krisis.

Di sisi lain, misalnya, publik juga melihat presiden dan kabinetnya bekerja tanpa gangguan politik yang berarti. Presiden baru Yudhoyono memang tampak sigap dan penuh perhatian. Ia jemput sendiri tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia. Ia sempatkan datang ke terminal untuk melihat kesiapan angkutan Lebaran. Tak kurang dari itu, presiden juga turl,tn mengecek kantor Jaksa Agung dan pajak.

Seharusnya, memang masa awal pemerintahan baru adalah era trust building. Publik dan investor dibangkitkan dengan persepsi bahwa telah datang pemerintahan baru yang kuat. Masyarakat seharusnya diyakinkan era awal pemerintahan baru memberikan sinyal positif bahwa perubahan yang mendasar di negeri ini segera datang.

Namun, yang kini tampak, justru sebaliknya. Kericuhan di DPR belum selesai. Pertentangan antara Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Kerakyatan belum menemukan kesepakatan baru. Yang diperebutkan bukanlah pertengkaran gagasan mengenai recovery Indonesia, misalnya. Namun yang diricuhkan adalah pelanggaran tata tertib dan rebutan ketua komisi.

Hubungan DPR dan presiden juga menunjukkan sinergi negatif yang sama. DPR siap-siap menyampaikan interpelasi. Yang menjadi masalah ternyata bukanlah tindakan presiden, yang misalnya, bisa diinterpretasikan

sebagai pelanggaran hukum atau korupsi. Pemicunya semata-mata karena presiden baru menarik surat presiden lama, yang secara hukum tata negara, sah adanya. Sangat terasa kasus interpelasi itu kental sekali manuver politiknya.

Apa yang menyebabkan kondisi politik Indonesia kini mengkhawatirkan? Setelah pemilu, politik sepenuhnya dikendalikan oleh elite. Massa pemilih yang berjumlah di atas seratus juta itu tidak lagi punya kekuatan yang terorganisir.

Memang benar, presiden baru terpilih secara telak dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, setelah pemilu usai, rakyat pemilihnya itu tidak lagi mengontrol situasi.

Kini politik sepenuhnya menjadi politik elite. Siapa yang berkuasa dan berpengaruh sangat bergantung pada siap yang menjabat dan siapa yang membentuk opini. Yang kini dominan berkuasa adalah elite partai. Mereka sepenuhnya mengendalikan politik di parlemen. Lebih jauh lagi yang menjadi pemain utama politik saat ini hanya segelintir.

Bulat lonjongnya parlemen dan kabinet mungkin hanya ditentukan oleh tujuh orang. Sebut saja agar mudah, mereka adalah tujuh samurai: SBY, Megawati, Akbar Tanjung, Gus Dur, Amien Rais, Hamzah Haz dan Hidayat Nur Wahid. Mereka adalah orang paling berpengaruh pada tujuh partai terbesar. Pengaruh

Hidayat Nur Wahid pelan-pelan meredup karena ia sudah mundur dari jabatan presiden partai.

Jika tujuh samurai itu dalam harmoni, politik elite dan politik nasional Indonesia akan harmonis pula. Jika mereka terp-cah, sejauh yang menjadi oposisi itu kekuatan yang sangat kecil, perpecahan itu tidak terlalu berarti.

Politik Indonesia menjadi mengkhawatirkan karena perpecahan tujuh samurai itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan oposisi mayoritas terhadap presiden baru. Hamzah Haz, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid memang berada di samping SBY. Namun, tiga samurai lainnya, Gus Dur, Akbar Tandjung dan Megawati mengambil posisi berseberangan.

Tiga samurai itu memiliki kekuasaan yang mutlak di partai masing-masing. Gus Dur menjadi jimat NU sejak lama. Tak ada tokoh yang dapat menandinginya untuk mengarahkan seluruh awak PKB. Memang PKB tidak utuh dan solid di belakang Gus Dur. Namun, sekali Gus Dur memberikan perintah, tokoh yang melawan akan terpental dari partai.

Megawati tidak kalah sakti bagi awak PDI-P. Kharisma Gus Dur di PKB sama besarnya dengan karisma Megawati di PDI-P. Bahkan oleh banyak pihak, Megawati dianggap pemegang “saham tunggal” PDI-P. Sekuat-kuatnya gerakan oposisi di PDI-P, sekali Megawati mengambil keputusan, tidak ada yang dapat membatalkan keputusan itu.

Akbar Tandjung menjadi fenomena berikutnya di Partai Golkar. Memang Akbar adalah tokoh rasional. Ia tidak memiliki kharisma primordial sebagaimana Gus Dur dan Megawati. Namun, Akbar Tandjung termasuk tokoh partai yang paling mengakar. Ia sudah menciptakan mitos di Golkar sebagai tokoh yang sudah pasang badan bagi kejayaan Golkar.

Gerbong yang dibawa tiga samurai itu sudah menguasai mayoritas parlemen. Cukup tiga samurai itu bersatu melawan presiden baru, politik Indonesia yang elitis sudah dapat terpecah belah.

Mungkinkah dicari kompromi agar tujuh samurai itu bersatu dan harmonis? Mungkin susah untuk membujuk Megawati. Persaingan dalam pemilu presiden tempo hari terlalu dihayatinya secara personal. Akibatnya, persaingan politik itu membuat luka psikologis yang sebenarnya tidak perlu.

Susah pula untuk membujuk Gus Dur. Saiah satu unsur surprise dan unpredictable dalam politik Indonesia adalah manuver Gus Dur. Siapa pun tidak dapat menebak apa yang akan dikerjakan dan dipilih Gus Dur. Ia bisa ke kanan dan ke kiri tanpa terlebih dahulu memberikan sinyal pendahuluan. Satu-satunya samurai yang bisa didekati presiden baru adalah Akbar Tandjung. Ia pemimpin politik partai terbesar dan sekjigug memiliki kalkulasi paling rasional. Jika Akbar Tandjung bisa didekati untuk harmoni dengan presiden baru, perlawanan dua samurai, Gus Dur dan Megawati, tidak lagi signifikan.

Apa daya karena politik Indonesia masih sangat elitis, solusi politik jangka pendek juga harus elitis. Presiden baru akan lebih mudah mengendalikan politik Indonesia jika ia mampu mengakomodasi Golkar yang kini sedang dipimpin Akbar Tandjung. **

Akbar, Wiranto atau Surya Paloh?

Setelah pemilu presiden, peristiwa politik paling penting berikutnya adalah Munas Golkar yang memilih ketua umum baru. Jika tidak ada aral melintang, Munas Golkar akan berlangsung pertengahan Desember 2004. Namun kasak-kusuk dan gerilya politik menuju Munas itu sudah dimulai.

Siapa yang akan terpilih menjadi ketua umum dan bagaimana hubungannya dengan Koalisi Kebangsaan serta presiden baru akan menentukan bulat dan lonjong Indonesia. Apa daya pemilu demokratis 2004 berakhir dengan komposisi politik yang mengkhawatirkan.

Politik terlalu terfragmentasi. Tak ada partai besar yang sangat menonjol. Tapi gabungan Golkar, PDIP dan PKB yang kini cenderung berposisi di parlemen sudah menguasai mayoritas. Golkar menjadi unsur penentu untuk memperkuat atau memperlemah oposisi parlemen.

Sementara presiden baru menang mutlak dalam pemilihan langsung. Namun dukungan parlemen dan politik elite bagi presiden baru juga sangat rapuh. Aneka partai yang kini mendukungnya bersikap sangat pragmatis yang sewaktu-waktu dapat berbalik menjadi lawan politik, kecuali Partai Demokrat.

Setelah pemilu selesai, politik kembali sepenuhnya bersifat elitis. Jika Golkar berbalik mendukung presiden baru, posisi presiden dalam I dunia politik elite akan jauh lebih nyaman.

Para pendukung Koalisi Kebangsaan dan presiden baru, keduanya sangat peduli dengan Munas Golkar. Di bawah permukaan, mulai dibangun aneka manuver politik untuk menggolkan calon masing-masing. Masa depan politik presiden baru dan Koalisi Kebangsaan dapat dibaca dari hasil Munas Golkar kelak.

Banyak tokoh yang diperkirakan akan meramaikan bursa pencalonan ketua umum Golkar. Namun sementara ini, tiga tokoh menjadi calon kelas berat. Mereka adalah Akbar Tandjung, Wiranto dan Surya Paloh. Apa kekuatan dan kelemahan masing-masing calon itu dilihat dari probabilitas memenangkan kursi

ketua umum? Akankah terjadi pergeseran dalam sikap politik Golkar atas presiden baru siapapun yang terpilih menjadi ketua umum Golkar? .

Kita akan bedah kekuatan dan kelemahan tiga calon terkuat di atas dan menganalisis basis dukungannya. Akbar Tandjung tentu paling diuntungkan karena posisinya sebagai ketua umum yang masih menjabat. Dibandingkan dengan semua calon lain, Akbar Tandjung yang paling menguasai akses untuk menentukan aturan permainan. Tentu Akbar Tandjung berupaya sekuat tenaga memilih aturan permainan pemilihan ketua umum yang paling menguntungkannya.

Kekuatan Akbar, ia sudah menciptakan mitos sebagai tokoh yang paling berkeringat dan berkorban di Golkar. Dalam kasus Buloggate 2, pengurus Golkar merasa berutang budi karena Akbar Tandjung sudah pasang badan. Jika Akbar membuka kasus itu yang sebenarnya di pengadilan, Golkar sebagai partai mungkin sedang tersangkut di pengadilan, atau bahkan dibubarkan.

Pendukung Akbar menggunakan kasus Buloggate itu untuk menciptakan citra kepahlawanan Akbar dan utang budi Golkar sebagai partai. Demi partai, Akbar dan keluarganya digambarkan sudah menderita akibat kasus Buloggate itu. Lebih dari tokoh lain, Akbar memimpin partai ketika partai ini dihujat di awal reformasi. Golkar bukan saja bertahan sebagai partai yang legal, tetapi kembali menjadi partai terbesar dalam

pemilu 2004.

Hubungan Akbar Tandjung dengan pemimpin lokal Golkar di provinsi juga terjalin emosional. Dibandingkan semua pimpinan partai politik yang ada, Akbar Tandjung mungkin ketua umum yang paling sering turun ke bawah. Waktu yang ada ia habiskan keliling ke daerah bersilahturahmi langsung dengan pimpinan partai daerah.

Dengan sedikit manuver, Akbar dapat menciptakan citra “Golkar untuk Golkar.” Mereka yang berhak menjadi ketua umum haruslah tokoh yang memang sudah berkeringat dan menjadi pengurus partai sejak lima tahun terakhir.

Jika sentimen ini berkembang, tokoh Konvensi Partai Golkar lainnya akan gagal menjadi calon. Akbar juga akan mengunci proses pemilihan hanya kepada DPD tingkat propinsi saja. Mayoritas pimpinan ini agaknya sudah pula dikuasai Akbar Tandjung.

Kelemahan Akbar Tandjung adalah kasus hukum dan citra status quo. Kasus Buloggate memang sudah tuntas. Namun kini muncul kembali kasus Adiwarsita yang dapat membongkar misteri dana sekitar Rp 50 miliar yang diisukan mengalir ke Golkar untuk menutup kerugian negara dalam kasus Buloggate itu. Sementara kekalahan Golkar dalam pemilu presiden dapat pula dimainkan untuk memunculkan isu perlunya perubahan ketua umum Golkar.

Wiranto adalah calon kuat berikutnya. Sudah terbentuk citra bahwa Wiranto paling mampu menjinakkan Akbar Tandjung. Dalam konvensi partai Golkar, Wiranto sudah terbukti mengalahkan Akbar Tandjung di kandangnya sendiri. Baik bagi Koalisi Kebangsaan ataupun kekuatan pro-SBY, Wiranto dapat menjadi simbol yang lebih kuat dibandingkan Akbar Tandjung.

Untuk memimpin oposisi terhadap SBY, figur Wiranto lebih lengkap. Ia sendiri adalah senior SBY. Sebagai sesama militer, bahkan Wiranto diyakini sebagai figur yang lebih tegas dan determinan. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan publik atas figur strong leader.

Sedangkan bagi kekuatan pro-SBY, Wiranto juga menjadi alternatif yang lebih bisa dipercayai. Jika Wiranto memberikan komitmen kepada SBY, akan mengubah politik Golkar untuk tidak memperkuat Koalisi Kebangsaan, pendukung SBY lebih mempercayainya.

Dukungan atas Wiranto di tubuh Golkar masih cukup kuat walau tidak sekuat Akbar Tandjung. Di kalangan sesepuh Golkar, banyak yang bersimpati pada Wiranto. Sementara di kalangan pemimpin Golkar lokal tingkat kabupaten, DPD II, diyakini Wiranto lebih mengakar.

Namun Wiranto tidak punya akses yang kuat untuk mempengaruhi tata tertib pemilihan ketua umum. Dengan mudah Wiranto terpengaruh dari bursa

calon jika syarat menjadi pengurus lima tahun secara terus menerus menjadi pedoman calon ketua umum. Karena presiden baru SBY adalah mantan militer, jika ketua umum Golkar dikuasai juga oleh mantan militer, mungkin publik juga kurang nyaman.

Surya Paloh menjadi alternatif sipil yang paling kuat untuk melawan Akbar Tandjung. Sejak kampanye legislatif, Surya sudah membentuk citranya sebagai bagian dari “Golkar Putih.” Ia paling nyaring menyuarakan isu pemberantasan korupsi bahkan di tubuh Golkar sendiri. Kedekatannya dengan SBY, presiden baru, membuat Surya Paloh dapat menjadi simbol perubahan dan pembaharuan di Golkar.

Jika ketua umum Golkar dipilih secara langsung oleh para anggota Golkar yang puluhan juta, Surya Paloh mungkin akan jauh lebih mudah memainkan simbol perubahan itu. Bahkan jika yang memilih ketua umum adalah ratusan DPD II, Peluang Surya Paloh juga sangat besar.

Namun jika hak suara hanya ada pada 32 DPD tingkat I, pertarungan menjadi sangat berat bagi Surya Paloh. Dibandingkan Akbar Tandjung dan Wiranto, genggamannya Surya Paloh terhadap pimpinan Golkar saat ini tidak terlalu kuat. Surya Paloh dapat menang di opini publik tetapi kalah dalam manuver politik pengurus inti Golkar.

Siapa ketua umum Golkar berikutnya, Akbar, Wiranto atau Surya Paloh? Ini sangat tergantung dari

aturan main pemilihan kelak. Akbar Tandjung kini paling diuntungkan karena ia masih menjabat ketua umum yang dapat mempengaruhi aturan main yang paling menja.min kemenangan dirinya.

Namun siapapun yang akan terpilih menjadi ketua umum, diperlukan kemitraan antara ketua umum Golkar terpilih dengan presiden baru. Jika tidak, konfrontasi presiden baru dengan partai terbesar hanya menghasilkan Indonesia yang hancur-hancuran. Apalagi kartu politik Megawati dan Gus Dur masih hidup. **

Pertaruhan Gus Dur di NU

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang tengah berlangsung di Boyolali, Jawa Tengah, akan menjadi pertaruhan politik KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Siapa yang terpilih sebagai ketua umum NU segera menentukan wibawa, karisma dan sepak terjang politik Gus Dur selanjutnya.

Jika yang terpilih adalah Gus Mus (KH Mustofa Bisri) atau siapapun yang direkomendasikan Gus Dur, cahaya Gus Dur di NU akan semakin bersinar. Posisi Gus Dur bahkan semakin kokoh tidak hanya di NU tetapi juga dalam politik elite nasional. Mungkin Gus Dur akan menjadi politisi sipil yang paling kuat dan berpengaruh di luar pemerintahan.

Namun jika yang terpilih adalah KH Hasyim Muzadi, tokoh yang kini berseberangan dengan Gus Dur, sangat mungkin karir politik Gus Dur memasuki masa senja. Untuk pertama kalinya, Gus Dur dikalahkan di kandangnya sendiri. NU menjadi basis awal dan pondasi paling kokoh bagi Gus Dur. Dikalahkan di NU, berarti Gus Dur terpotong dari akarnya. Wibawa dan legitimasi Gus Dur dalam perpolitikan nasional juga akan ikut redup.

Tentu saja muktamar NU memiliki agenda yang jauh lebih penting ketimbang masa depan politik individual Gus Dur. Namun karena politik Indonesia masih sangat elitis, muktamar NU itu akan lebih sensasional justru karena menjadi indikator prospek politik Gus Dur.

Banyak partai politik yang kini lolos electoral threshold di parlemen hasil Pemilu 2004. Namun politik nasional kini hanya dikuasai oleh lima tokoh saja, yang kita sebut lima samurai. Mereka berkuasa karena posisinya di partai besar, jabatan publik ataupun dukungan grass root-nya. Lima samurai itu adalah SBY, Megawati, Gus Dur, Akbar Tandjung dan Amien Rais.

Di antara lima samurai itu, Gus Dur adalah politisi yang paling senior dan paling mengakar. Ketika Soeharto masih di puncak kejayaannya, Gus Dur sudah tampil sebagai politisi yang diperhitungkan. Di samping memimpin NU, Gus Dur juga sudah memimpin Forum Demokrasi. Melalui Forum itu, Gus Dur sudah

menyampaikan gagasan alternatif dari otoriterisme yang mendominasi politik era Soeharto. Saat itu, empat samurai lainnya masih terbilang junior dan belum diperhitungkan.

Di era Soeharto, Gus Dur menjadi emas yang berkilauan. Dari sisi gagasan, ia tampil sebagai intelektual yang brilian. Di saat politik nasional yang mulai dikhawatirkan ke arah politik sektarian, Gus Dur justru memunculkan wacana pluralisme. Aneka pandangan dan lontaran ia cetuskan yang menunjukkan komitmennya kepada perlindungan minoritas serta kesetaraan warga negara, terlepas dari apapun agama warga negara.

Ia segera menjadi tokoh yang disegani karena komitmennya kepada hak azasi dan politik modern. Berbagai tokoh nasional dari berbagai latar belakang secara sukarela berdiri di belakang Gus Dur. Ketika civil society masih sangat lemah, Gus Dur sudah menjadi tokoh paling terkemuka masyarakat sipil. Interpretasi Islam yang dikembangkannya membuat nyaman warga negara yang tidak memeluk Islam sekalipun.

Terhadap politik yang masih tertutup, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Pak Harto, Gus Dur mulai memunculkan wacana demokrasi. Perlawanannya atas otoriterisme era Pak Harto dimulai dengan pengembangan dan sosialisasi gagasan alternatif.

Akibat wacana berbeda yang dikembangkannya, Gus Dur berkali-kali mendapatkan tekanan politik

dari pemerintah. Namun tekanan itu justru membuat kharisma dan pengaruhnya semakin besar. Hampir semua elite masyarakat yakin saat itu, jika ada tokoh nasional yang diharapkan menjadi pemimpin alternatif, Gus Dur orangnya.

Tekanan kepada Gus Dur yang paling keras ternyata tidak datang dari politik. Problem itu justru muncul akibat kondisi kesehatannya. Ia mengalami gangguan penglihatan. Lebih dari itu, ia juga terkena serangan stroke beberapa kali. Politisi biasa segera akan tamat karir politiknya jika mendapatkan serangan kesehatan seperti Gus Dur. Karena bukan politisi biasa, Gus Dur tetap bisa bertahan, bahkan terpilih sebagai presiden.

Namun kalangan dekat Gus Dur sudah mendeteksi kemungkinan terburuk. Sungguhpun karisma dan wibawa Gus Dur masih tersisa, namun daya tahan emosi dan stabilitas pikirannya tidak sekokoh dulu, sebelum ia sakit.

Sudah mulai muncul aneka rumor yang menggambarkan fluktuasi emosional Gus Dur yang naik turun akibat kondisi kesehatannya.

Ketika menjadi presiden, banyak sekali lontaran Gus Dur yang nyeleneh dan kontroversial. Kalangan dekat Gus Dur memahami bahwa ini bukan nyeleneh khas Gus Dur yang acapkali brilian. Nyeleneh yang itu agaknya karena kesehatan dan stabilitas pikiran serta emosi yang terganggu. Bahkan para kiai yang arif acapkali mengatakan bahwa mereka memaafkan

apapun yang dikatakan Gus Dur karena memahami kondisi kesehatannya.

Gus Dur pun tidak lolos dalam tes kesehatan KPU untuk menjadi calon presiden. Pihak yang mengitari Gus Dur mahfum adanya, walau mereka tidak bisa menghalangi Gus Dur untuk terus menuntut KPU.

Terdengar kembali kabar bahwa memang ada persoalan dengan kemampuan Gus Dur untuk membuat judgement yang kuat akibat gangguan kesehatannya. Mereka yang tahu kondisi kesehatan Gus Dur, tidak lagi menaruh harapan padanya untuk punya peran politik.

Namun sebagai tokoh nasional Gus Dur masih berpengaruh akibat masih banyaknya massa fanatik. Mereka umumnya berbasis di pesantren yang acapkali dikunjungi dan “disirami” oleh Gus Dur. Dalam pemilu presiden tempo hari, Gus Dur bahkan menjadi variabel yang membuat politik nasional semakin sensasional. Apa yang akan diambil Gus Dur, siapa yang akan didukung, tidak pernah terbaca.

Langkah Gus Dur sangat unpredictable dan tidak pasti. Langkah tidak pasti Gus Dur itu mungkin lahir karena kejeniusan politiknya sejak dulu. Atau sebaliknya, itu hanya karena masalah kesehatan Gus Dur saja yang memang sedang berfluktuasi. Pihak luar semakin sulit untuk membedakannya.

Sungguhpun demikian, seburuk-buruknya kesehatan Gus Dur, masalah kesehatan belaka tidak akan menghilangkan Gus Dur dari politik. Yang dapat

membuat Gus Dur hilang dari politik adalah muktamar NU yang tengah berlangsung. Ini menjadi pertarungan Gus Dur yang terakhir. Jika ia bisa mengegolkan calonnya sebagai ketua umum NU yang baru, Gus Dur tetap menjadi salah satu samurai penting politik nasional. Aneka rumor mengenai kesehatan Gus Dur tidak akan didengar orang banyak.

Sebaliknya, jika yang terpilih KH Hasyim Muzadi, Gus Dur mesti siap-siap memasuki era pensiun. Dikalahkan NU akan membawa semangat oposisi Gus Dur untuk juga mengalahkannya di PKB. Kini mulai muncul pemimpin alternatif di NU ataupun PKB yang berada di luar orbit Gus Dur. Pengaruh di NU dan PKB agaknya juga mulai terlepas ke banyak tangan. **

Godaan Politik Nahdlatul Ulama

Sekali lagi komitmen itu dikibarkan dalam Mukhtamar NU yang baru selesai. Kiai Sahal serta Hasyim Muzadi yang terpilih kembali meneguhkan komitmen itu, bahwa mereka tidak akan menyeret NU ke dalam pertarungan politik praktis. Semangat kembali ke Khitah 1926 kembali didengungkan.

Sekilas, mayoritas elite NU menerima komitmen itu. Politik praktis selama ini sudah mengguncang-guncangkan NU. Perahu NU terbelah ke banyak kubu. Puncaknya adalah pertarungan kubu Gus Dur dan kubu Hasyim Muzadi.

Dalam pemilu presiden tempo hari dua kubu itu

sudah berhadap- hadapan. Kini, sebelum dan setelah muktamar NU, kembali kedua kubu itu berkonfrontasi. Pembentukan NU tandingan sudah diwacanakan.

Kembali ke Khitah 1926 dalam jangka panjang dipercayai akan mengurangi fragmentasi kelompok politik di NU. Menjauhkan NU dan pemimpin utamanya dari ingar-bingar politik praktis diyakini akan membuat NU lebih solid, kuat dan independen.

Namun godaan politik praktis bagi NU, komunitas, dan elitnya, jauh lebih besar daripada yang diduga. Menjelang Pemilu 2009, godaan politik itu akan menjelma sebagai raksasa yang kembali menggoyahkan NU.

Tak ada ormas lain di Indonesia yang memiliki kapital politik sebesar NU. Dilihat dari sisi jumlah anggota, NU adalah ormas terbesar. Berdasarkan survei LSI berulang-ulang, sekitar 35% dari seluruh pemilih Indonesia mengidentifikasi diri sebagai keluarga besar NU. Angka itu sangat jauh dibandingkan ormas nomor dua, Muhammadiyah, yang hanya seputar 6-10 persen.

Siapa yang mampu menguasai NU potensial menguasai 35% dari suara pemilih. Dalam pertarungan politik praktis pemilu langsung, jelas angka itu sangat berarti. Hanya mencari tambahan 16%, seorang politisi yang didukung komunitas NU akan terpilih menjadi Presiden RI. Dalam pemilu langsung, kuantitas suara

lebih penting daripada kualitasnya. Siapa pun yang didukung oleh kuantitas suara yang lebih besar akan lebih kuat, tidak peduli kualitas dukungannya.

Hal lain yang membuat NU mahal secara politik adalah jaringannya. Kehadiran NU dalam sejarah Indonesia jelas jauh lebih tua dari partai politik mana pun. NU termasuk ormas yang paling tua yang kini masih beroperasi. Tradisi silaturahmi antarjaringan NU tentu termasuk yang paling mengakar. NU juga hadir di seluruh pelosok Tanah Air, walau ia lebih terkonsentrasi di tanah Jawa.

Untuk dunia politik praktis, jaringan yang solid di seluruh teritori Indonesia sangat bernilai jual. Semua partai yang ikut dalam pemilu belum mengembangkan jaringan yang bersifat kultural dan emosional seperti NU. Jika partai atau politisi itu dapat tersambung dengan jaringan NU, ia segera menjadi kekuatan politik yang mendapatkan dukungan grass root.

Hubungan antara pemimpin lokal NU dan komunitas lokalnya juga memiliki pertautan khusus. Hubungan kiai dan santri paling emosional dan dalam dibandingkan dengan hubungan ketua umum partai dan anggota partai, misalnya. Kiai lokal dengan mudah menjadi representasi komunitas lokal NU. Dengan menguasai kiai lokal, komunitas lokal NU, juga sedikit banyak akan terbawa.

Fenomena itu membuat NU makin menarik secara politik. Jika, komunitas NU terlalu mengambang,

walaupun jumlahnya jutaan, politisi dan partai politik, akan kesulitan “mengailnya.” Namun dengan adanya kejelasan peran kiai lokal, mobilisasi politik akan jauh lebih mudah NU makin tinggi nilai kapital politiknya.

Sejarah NU makin mengentalkan pula daya tarik politiknya. Sejak reformasi, siapa pun yang menguasai NU segera menjadi figur politik penting. Gus Dur yang pernah menjadi Ketua Umum NU tercatat sebagai Presiden RI pertama era reformasi. Hasyim Muzadi yang juga pernah menjadi Ketua Umum NU menjadi cawapres yang diperebutkan. Hanya saja nasib Hasyim tidak sebaik nasib Gus Dur dalam perolehan jabatan publik.

Dengan catatan sejarah seperti itu, nuansa politik NU semakin bersinar. Politisi dan partai politik yang sejati segera melihat NU sebagai emas yang berkilau. Justru hal ini yang membuat NU menjadi berat. Makin terlibat NU ke dalam politik praktis, ormas itu akan makin dilanda perpecahan dan keropos.

Nilai jual politik NU yang tinggi akan menggoda siapa pun. Ia tentu akan menggoda para pemimpin dan elite NU yang kelak akan terpilih dalam muktamar. Sebagai tokoh yang mengendalikan ormas terbesar, apalagi di era pragmatisme seperti saat itu, pimpinan NU tergoda untuk menterjemahkan kapital politik itu sebagai alat negosiasi.

Mungkin tokoh dan elite NU itu sendiri yang tergoda

untuk menjadi pejabat publik seperti dalam kisah Gus Dur dan Hasjim Muzadi. Niat terlibat politik praktis itu mungkin mulia dalam rangka membawa kesejahteraan bagi komunitas NU. Maka NU dapat disulap menjadi “mesin uang” dan “mesin broker jabatan publik” dalam transaksi politik.

Jika elite NU tidak tergoda, tentu politisi dan partai politik di luar sana yang akan terus menggoda. Politisi atau partai ingin kemenangan dalam pemilu. Jika mereka mampu menggandeng pimpinan NU, kemenangan politik itu jauh lebih mudah. Sementara politisi dan partai menguasai semua cara untuk menggoda. Aneka iming-iming bantuan dana bagi pesantren atau jabatan publik bagi elite tertentu di NU segera disodorkan.

Godaan itu ibarat kilauan mata ular. Ia menarik karena berkilau. Namun sekali didekati, NU akan masuk ke dalam mulut ular. Persoalan politik praktis yang melibatkan elite NU yang tengah menjabat segera akan memecah-belah NU sendiri. Kasus pro-kontra atas Hasyim Muzadi tahun 2004 akan segera terulang kembali di tahun 2009, 2014, 2019, dan seterusnya.

Padahal negara yang kuat tidak hanya butuh pemerintahan yang kuat. Negara juga butuh civil society yang kuat dan independen. Tempat terbaik bagi NU menjadi civil society dimana pengurusnya diatur, dikontrol dan diberikan sanksi jika melanggar, agar tidak ikut dalam politik praktis memperebutkan jabatan pemerintahan. Jika konsisten bergerak sebagai civil society yang independen NU akan semakin berwibawa

dan sumbangannya bagi Indonesia jauh lebih mendasar.

Namun kapital politik NU memang terlalu menggoda. Semangat kembali ke Khitah 1926 dalam muktamar yang baru selesai tidak maksimal jika tidak diikuti oleh mekanisme konkret dan hukuman bagi yang kembali memainkan api politik di NU. **

Berebut Ketua Umum Golkar

Menjelang Munas Golkar di Bali, dinamika politik internal Golkar semakin tinggi dan berubah cepat. Semua kompleksitas Munas itu semakin mengerucut ke satu isu saja: siapa yang akan memimpin Golkar kelak.

Para calon kelas berat masih berputar sekitar alumni peserta konvensi. Di samping Akbar Tandjung sendiri, beredar nama Wiranto dan Surya Paloh. Berbeda dengan politik ketika konvensi, terkesan peserta konvensi lain seperti Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie mendukung Surya Paloh. Sementara Prabowo seolah hanya mengincar posisi Sekjen saja. Wiranto memainkan kartu sesepuh Golkar yang semakin hari semakin eksplisit mendukungnya.

Akibat dinamika politik, kini muncul calon kelas berat lainnya, Agung Laksono. Menguatnya nama Agung sejalan dengan perkembangan tata tertib Munas

yang mungkin dapat mengganjal pencalonan Surya Paloh dan Wiranto. Jika syarat pernah menjadi pengurus DPD I atau DPP menjadi kriteria calon ketua umum, segera Surya Paloh dan Wiranto tersisih. Dua tokoh ini segera dikalahkan justru sebelum pemilihan dimulai. Pendukung Surya Paloh dan Wiranto melihat manuver tata tertib itu sebagai senjata buldozer yang memang disiapkan untuk menyingkirkannya.

Kekuatan yang anti Akbar Tandjung segera mencari “kuda pacuan” alternatif. Nama Agung Laksono pun muncul. Posisinya dianggap cukup kuat karena ia memenuhi semua syarat yang sedang diwacanakan untuk menjadi calon ketua umum. Ia juga kini menjadi ketua DPR yang dapat menjadi instrumen penting kapital politiknya. Ia juga dianggap tokoh moderat, yang dapat menjadi tokoh kompromi, baik oleh lawan Akbar Tandjung ataupun kubu pendukung SBY.

Padahal sebelumnya Agung Laksono dianggap tokoh yang akan menjadi barisan pembela Akbar Tandjung. Keberhasilannya menjadi ketua DPR sebagian karena upaya Akbar Tandjung sendiri. Terdengar kabar, sebagai balasnya, Agung diminta tidak menantang Akbar dalam Munas Golkar. Namun dinamika politik berbalik. Agung Laksono yang “diemaskan” Akbar Tandjung justru kini paling potensial untuk mengalahkan Akbar Tandjung di Munas Golkar.

Seketika publik politik teringat kisah Gus Dur versus Hasyim Muzadi. Awalnya Gus Dur adalah mentor politik Hasyim. Adalah Gus Dur yang mati-matian

berjuang agar Hasyim menjadi ketua umum PBNU. Namun dinamika politik berbelok sedemikian rupa. Posisi Gus Dur dan Hasyim tidak hanya berseberangan. Lebih dari itu, Hasyim mengalahkan Gus . Dur dalam Muktamar NU baru lalu.

Akankah kisah Gus Dur versus Hasyim Muzadi berulang dalam kisah Akbar Tandjung versus Agung Laksono? Seberapa besar peluang Wiranto dan Surya Paloh menyusul di tikungan terakhir untuk meraih Ketua Umum Golkar?

Posisi ketua umum Golkar tidak hanya diperebutkan oleh kader Golkar. Kekuatan politik di luar Golkar juga sangat berkepentingan dengan Ketua Umum Golkar. Siapa pun yang menjadi ketua umum segera menjadi orang kuat politik di Indonesia. Pengaruh politiknya sangat mungkin dapat mengimbangi pengaruh presiden RI yang terpilih secara langsung.

Pilihan, strategi, karakter dan ideologi ketua umum Golkar tidak hanya menentukan masa depan Partai Golkar. Ia juga akan sangat menentukan nasib oposisi Koalisi Kebangsaan, politik di parlemen, pemerintahan SBY, bahkan bulat dan lonjong politik Indonesia lima tahun ke depan.

Ketua umum itu mempunyai hak recall yang dapat mengontrol pasukan Golkar di parlemen. Ia dapat mempengaruhi agar Golkar di parlemen mempersulit pemerintahan SBY. Segera koalisi oposisi

dikonsolidasikan di DPR. Aneka agenda legislasi, APBN dan pengawasan atas kabinet SBY diperketat. Bersama dengan pers yang mampu dipengaruhinya, mereka dapat melumpuhkan pemerintahan SBY.

Sebaliknya, Ketua Umum Golkar yang baru dapat saja memilih politik yang berbeda. Ia dapat mengarahkan pasukannya di parlemen untuk berpartner dengan SBY. Ia bertekad membentuk pemerintahan yang harmoni dan solid bersama presiden terpilih. SBY akan merasakan dukungan yang signifikan dari parlemen atas good will dari Ketua Umum Golkar.

Ketua Umum Golkar juga dapat memilih untuk memperkuat jaringan Koalisi Kebangsaan. Baik di parlemen ataupun di luar parlemen, ia dapat memberi insentif bagi gerakan anti SBY. Bahkan dapat pula dikembangkan pasukan “berani mati” dengan target menjatuhkan SBY secepat mungkin. Jika SBY tidak dapat dijatuhkan secara hukum, minimal ia dijatuhkan melalui rekayasa opini publik.

Sebaliknya, ketua umum dapat memilih politik yang sangat berbeda. Ia justru ingin membuat konsensus baru dengan SBY. Koalisi Kebangsaan justru ia perlemah dan akan dimatikannya secara perlahan. Tanpa keikutsertaan Golkar, Koalisi Kebangsaan akan menjadi bunga yang layu. Oposisi Koalisi Kebangsaan menjadi tinggal papan nama.

Ketua Umum Golkar juga berpeluang pula mengembangkan atau merusak komposisi kepartaian

di Indonesia. Jika leadership-nya buruk, Golkar dapat menjadi unsur duri dunia kepartaian. Partai ini tidak akan tumbuh namun dapat menjadi pengganggu yang efektif pula bagi pertumbuhan partai lain. Di tahun 2009, kembali fragmentasi politik terulang. Tak ada partai besar yang melampaui 25% dukungan. Partai semakin banyak namun semakin kecil. Akibatnya, politik Indonesia semakin rapuh.

Namun Ketua Umum Golkar dapat memberi pengaruh yang sebaliknya. Leadership, kompetensi dan pengalamannya justru dapat membuat Golkar berkembang menjadi partai utama. Golkar tidak hanya kembali memenangkan pemilu 2009. Lebih dari itu, Golkar menjadi partai besar dengan perolehan dukungan di atas 30%, bahkan di atas 35%.

Golkar lalu berkembang menjadi partai sekelas Partai Kongres di India, atau LDP di Jepang yang menjadi miniatur politik nasional dengan kekuasaan yang dominan.

Begitu besarnya pengaruh Ketua Umum Partai Golkar. Ibarat gadis yang sangat cantik, tidak heran jika ia banyak diperebutkan oleh banyak 'jagoan// yang rela bertarung "sampai mati" untuk menyuntingnya.

Kini dikembangkan isu "orang dalam" versus "orang luar" dalam perebutan Ketua Umum Golkar. Istilah "orang dalam" merujuk kepada kader Golkar yang kini sedang menjabat sebagai pimpinan baik di DPP ataupun

DPD I. Sedangkan “orang luar” diistilahkan bagi kader Golkar yang sedang tidak berkiprah sebagai pimpinan Golkar saat ini.

Kelompok Wiranto dan Surya Paloh berjuang habis-habisan agar “orang luar” juga diperkenankan menjadi calon ketua umum. AD/ART partai sebagai konstitusi partai juga tidak melarangnya. Kehadiran “orang luar” dianggap justru memperbesar peluang Partai Golkar untuk dikendalikan oleh putra terbaiknya. Hanya dengan kriteria memperbolehkan “orang luar” itu, Surya Paloh dan Wiranto dapat menjadi calon.

Sebaliknya, pendukung calon ketua umum “orang dalam” membuat manuver berbeda. Bagi mereka AD/ART dapat ditafsirkan secara lebih ketat agar terjadi proses pelembagaan yang semakin kuat. Jenjang karir harus dipentingkan. Jika calon ketua umum didesain lebih dulu harus menjadi pimpinan DPP atau DPD I, mereka yang nantinya ingin menjadi calon ketua umum dipaksa untuk lebih dulu memimpin Golkar di lapisan kedua.

Jika tidak, kader Golkar tidak diberi insentif untuk merangkak dari bawah karena bisa menjadi ketua umum tanpa harus melewati jenjang pimpinan kepartaian. Pertarungan memperebutkan Ketua Umum Golkar masih seru. Siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar segera dapat diketahui dengan melihat apakah tata tertib yang disetujui Munas nanti hanya memperbolehkan “orang dalam” untuk menjadi ketua umum. **

Kemenangan Jusuf Kalla di Golkar

Jusuf Kalla mengutip pidato terkenal sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar. “Jika saya salah, kritik saya. Namun jika saya benar, ikuti saya.” Sambung Jusuf Kalla, “Demikian pula posisi politik Golkar seharusnya. Golkar harus tetap kritis terhadap pemerintah jika memang pemerintah salah. Namun Golkar juga harus mendukung pemerintah jika kebijakan pemerintah benar.” Tepuk tangan bergema di ruangan itu.

Ini pidato pertama ketua umum Golkar yang baru saja terpilih. Pergantian ketua umum dari Akbar Tandjung ke Jusuf Kalla tidak hanya menyangkut perubahan personel. Pergantian itu agaknya juga segera diikuti oleh pergantian orientasi politik partai paling besar dan paling modern dalam sejarah politik Indonesia.

Patut diduga, nasib Koalisi Kebangsaan yang beroposisi segera berakhir. Ketua Koalisi Kebangsaan

Akbar Tandjung kini tidak lagi menjadi ketua umum Golkar dan tidak lagi mengontrol partai itu, baik di parlemen ataupun di luar parlemen. Megawati dan Gus Dur, PDI- Perjuangan dan PKB segera kehilangan mitra paling pentingnya. Tanpa Golkar, oposisi PDI-P dan PKB tidak akan sekuat sebelumnya.

Patut pula diduga, politik di parlemen segera berubah. Sebelumnya, parlemen menjadi titik paling lemah pemerintahan SBY. Koalisi Kebangsaan mendominasi parlemen dan potensial melumpuhkan pemerintahan SBY. Kini, tanpa dukungan Golkar, oposisi di parlemen tidak akan lagi sistematis.

Patut pula diduga bahwa peta politik nasional akan ikut berubah. Jusuf Kalla segera menjadi wakil presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia. Bersama presiden, ia dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

Jusuf Kalla juga cukup menonjol dalam kebijakan pemerintahan yang terpenting, dunia ekonomi. Kini Jusuf Kalla sepenuhnya mengontrol partai terbesar. Tak pernah ada wapres sebelumnya yang mempunyai kapital politik sebesar Jusuf Kalla.

Munas ke-7 Partai Golkar di Bali mungkin merupakan Munas yang terpanas dalam sejarah Golkar. Ibarat drama, irama Munas itu penuh kejutan, menegangkan dan diwarnai oleh potensi konflik. Munas itu tidak hanya pertarungan memperebutkan posisi ketua umum.

Munas juga menjadi pertarungan dua gagasan, dua kelompok politik dan dua strategi kemenangan.

Gagasan yang bertempur adalah dua pandangan politik yang sama mulianya. Gagasan pertama yang “dijual” ingin melanjutkan kepemimpinan Golkar dalam Koalisi Kebangsaan. Sisi baik dari gagasan ini adalah pemikiran untuk menciptakan tradisi oposisi di Indonesia. Karena lembaga presiden sudah dikuasai oleh kelompok partai tertentu, Golkar dan partai lain menggunakan parlemen untuk check and Ballances.

Dengan oposisi yang kuat, pemerintah eksekutif harus sangat hati-hati. Kesalahan yang kecil saja dari pemerintah, segera menjadi bulan-bulanan parlemen. Namun sisi buruknya, oposisi ini dapat terjebak menjadi oposisi buta, yang melawan apa saja yang datang dari pemerintah. Akibatnya, pemerintah dapat dilumpuhkan dengan pengawasan parlemen yang ekstra ketat. Bahkan inisiatif pemerintahan dalam legislasi dan APBN dapat pula sengaja “disabotase.”

Masa awal parlemen 2004-2009 setelah pemilu menunjukkan oposisi yang habis-habisan. Seolah oposisi itu mencari semua peluang yang dapat menyulitkan presiden. Berbagai usulan interpelasi dimobilisasi. Sidang paripurna berkali-kali deadlock. Publik dan dunia internasional menjadi tidak nyaman dengan suasana politik Indonesia. Ironisnya, parlemen itu dipilih melalui pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

Gagasan kedua yang melawan gagasan pertama membawa visi yang juga tidak kalah agungnya. Gagasan itu ingin menciptakan demokrasi yang stabil. Semua program ekonomi, politik dan lain-lain segera kucar kacir jika politik tidak stabil. Semua kebaikan wacana dan program segera menguap jika presiden tidak bisa menguasai parlemen. Stabilitas politik menjadi syarat utama dan landasan bagi semua program pemerintah baru agar dapat terealisasi.

Agar stabil, parlemen harus dibuat harmoni dengan langkah pemerintah eksekutif. Pintu masuk harmonisasi itu adalah dengan menguasai Partai Golkar yang menjadi pemimpin oposisi. Pintu masuk menguasai Golkar adalah dengan merebut posisi ketua umum secara sah melalui Munas. Perubahan ketua umum segera dapat membawa Golkar dalam orientasi politik baru.

Namun jika tidak dimainkan secara hati-hati, gagasan kedua ini dapat pula terjatuh pada bentuk terburuknya. Misalnya, Golkar segera menjadi mesin politik yang hanya menjadikan parlemen seperti stempel pemerintahan. Apalagi kini ketua DPR adalah wakil ketua umum Golkar yang menjadi bawahan ketua umum, yang juga menjadi wakil presiden. Padahal secara kelembagaan, posisi DPR dan presiden sejajar. Hanya kearifan dan kematangan politik yang dapat membawa Golkar dalam posisi yang pas.

Di samping pertarungan gagasan, Munas Golkar di Bali juga menjadi pertarungan dua jawara politik, Akbar Tandjung versus Jusuf Kalla. Mungkin Akbar Tandjung

adalah politisi yang paling lihai dan jam terbangnya paling tinggi dari semua politisi yang kini aktif. Oleh kawan politiknya, ia disebut sebagai the man of all season, yang terus bertahan walau cuaca dan musim politik sudah berganti. Namun oleh lawan politik, ia diberi label sebagai “belut licin” yang menggunakan semua strategi agar tidak dikalahkan.

Akbar Tandjung segera memobilisasi semua keahlian dan dukungannya dalam Munas itu. Ia tahu persis bahwa jabatan ketua umum Golkar adalah jabatan publiknya yang terakhir. Ia tidak lagi menjadi pejabat negara, tidak menjadi menteri atau anggota DPR. Jika dikalahkan dalam Munas, Akbar Tandjung terancam “pensiun” dini dalam politik. Untuk itu ia bertarung habis-habisan.

Namun yang kini menjadi lawan Akbar Tandjung juga seorang tokoh yang tidak kalah jawaranya, Jusuf Kalla. Ia seorang wakil presiden, dan pengusaha yang sudah terbiasa bertarung dengan risiko.

Jusuf Kalla juga bertarung habis-habisan karena menyangkut masa depan pemerintahannya sendiri. Bahkan pertarungan itu juga menyangkut harga dirinya jika, misalnya, ia dikalahkan dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden.

Jusuf Kalla tidak sendirian. Ia mengajak para jawara lain untuk bergabung dalam satu kekuatan. Hamengkubuwono X, Aburizal Bakrie, Ginandjar, Surya Paloh, Fahmi Idris, Muladi dan Prabowo berdiri di

belakangnya. Bisa dikatakan, Jusuf Kalla mengumpulkan “sisa dunia” untuk melawan Akbar Tandjung. Munas menjadi pertarungan yang sangat seru.

Yang juga bertarung di Munas adalah dua strategi. Akbar Tandjung memainkan strategi “hati nurani.” Ia mobilisasi sentimen dedikasi, pengorbanan dan loyalitas terhadap partai Golkar. Diceritakan betapa Akbar Tandjung telah memimpin Golkar melewati masa sulit.

Akbar Tandjung juga sudah “pasang badan” untuk melindungi Golkar akibat skandal yang terjadi. “Ketika Golkar dihujat, di mana mereka?” ujar Akbar menyindir para kompetitornya.

Sebaliknya Jusuf Kalla memainkan strategi yang lebih “konkret.” Latar belakangnya sebagai wakil presiden menjadi sangat berpengaruh untuk menguasai pimpinan lokal Golkar yang banyak di pemerintahan daerah. Dukungan kelompok pengusaha juga ia maksimalkan. Jusuf Kalla memainkan opini bahwa Golkar sejak lama menjadi partai utama pemerintahan. Menjadi oposisi adalah hal yang asing bagi Golkar.

Hasil akhir Munas Golkar sudah kita ketahui. Kita ucapkan selamat kepada Jusuf Kalla. Sekaligus juga berharap agar ia memainkan kartu Golkar dengan matang. Sukses atau gagalnya Jusuf Kalla selaku pimpinan Golkar akan ditentukan oleh dukungan atas Golkar dalam pemilu 2009. **

**BAGIAN KELIMA
TAHUN PERTAMA
SBY-KALLA**

Akankah Aceh Mengubah Indonesia?

Amerika Serikat mengalami peristiwa besar 11 September, yang meluluhlantakkan dua menara kota New York. Peristiwa itu mengubah tidak hanya kebijakan luar negeri AS, tetapi juga persepsi mengenai terorisme. Jepang mengalami bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Setelah bom itu, Jepang tumbuh dalam nuansa negara yang sama sekali berbeda.

Kini Indonesia mengalami tragedi Aceh akibat gelombang mahadahsyat tsunami. Akankah tragedi itu mengubah pula Indonesia, sebagaimana tragedi 11 September bagi AS, atau bom Hiroshima dan Nagasaki bagi Jepang?

Dilihat dari korban yang jatuh, mungkin tragedi Aceh adalah bencana alam yang menelan korban terbanyak dalam sejarah. Korban yang kehilangan nyawa

diberitakan sudah menembus angka 100.000 penduduk. Sementara sekitar 500.000 lainnya menjadi pengungsi.

Karena kesulitan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sangat mungkin akan lebih banyak lagi korban yang jatuh. Dibandingkan dengan korban tragedi 11 September di AS, jelas korban tragedi Aceh jauh lebih banyak.

Dilihat dari luasnya pemberitaan, mungkin tragedi Aceh akan melampaui semua berita yang pernah diliput media untuk satu kasus. Pemilu parlemen dan Pemilu Presiden 2004 memang sangat menyita perhatian media. Munas Partai Golkar juga sempat menjadi primadona. Namun, tragedi Aceh sudah dan masih terus menjadi berita selama drama dan sensasi masih terus terjadi. Tahun 2005 agaknya masih akan terus didominasi oleh berita Aceh.

Dilihat dari partisipasi masyarakat, mungkin tidak ada peristiwa lain di Indonesia di mana semua lapisan bergerak menunjukkan solidaritas. Kelompok Media Group mengumpulkan dana menembus angka 100 miliar dari lebih 100.000 orang. Pengusaha, politisi, seniman, kalangan profesional, ibu rumah tangga sampai anak-anak sekolah bahu membahu mengumpulkan dana. Pemimpin dunia internasional juga berkumpul di Jakarta sudah pula berkomitmen memberikan bantuan lebih dari 32 triliun rupiah.

Di luar semua data di atas, akankah tragedi Aceh memberikan efek yang jauh lebih mendalam bagi

kehidupan kita sebagai sebuah bangsa? Ada atau tidaknya tragedi Aceh, apakah membuat Indonesia berbeda?

Pertanyaan di atas membawa kita untuk menengok pengalaman negara lain, Jepang. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki jelas membuat Jepang berbeda. Sebelum bom itu meledak, Jepang adalah matahari dari Asia Timur yang hendak menaklukkan dunia. Sumber daya dalam negeri begitu banyak yang dimobilisasi untuk ekspansi ke dunia luar. Militer Jepang dikenal sebagai salah satu militer paling militan, berani mati dan nekat dalam sejarah peperangan. Kekuasaan Jepang terpusat di tangan seorang kaisar yang sudah dijadikan mitos sebagai keturunan dewa dewi, dan ingin mendominasi dunia secara militer.

Jatuhnya bom atom itu mengawali sejarah baru Jepang. Dari sisi sistem politik, Jepang berubah sangat mendasar. Kekuasaan kaisar dilucuti dan digantikan oleh demokrasi parlementer. Kedaulatan berpindah ke tangan rakyat yang sepenuhnya dikendalikan melalui partai politik. Kaisar hanya menjadi simbol pemersatu, namun tidak lagi mendominasi politik praktis. Titah kaisar sudah digantikan oleh pasal-pasal hukum dalam konstitusi Jepang yang modern.

Militer Jepang juga berubah secara total. Setelah bom atom meledak, militer Jepang dilucuti. Tak ada lagi pasukan militer yang ekspansionis, dan membutuhkan

dana yang sangat besar di Jepang. Justru karena militernya dipangkas, Jepang memobilisasi semua sumber daya dan ekonominya untuk pembangunan. Akibatnya, Jepang justru melesat menjadi negara superpower baru secara ekonomi.

Bersama dengan Jerman, Jepang berubah menjadi the trading state, negara pedagang. sebelum bom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, mendominasi negara lainnya secara militer.

Kini pelan-pelan Jepang kembali mendominasi dunia, tetapi dengan jalan perdagangan. Tentu saja bom atom itu harus dikecam. Namun, tetap ada hikmah dari bom itu yang justru mengantarkan Jepang menjadi the trading state yang teramat menonjol.

Peristiwa 11 September juga mengubah negara AS secara mencolok. sebelum tragedi itu, kebijakan luar negeri AS kehilangan musuh militannya. Komunisme sudah hancur. AS seolah hidup dalam dunia yang sepi, yang digambarkan oleh Francis Fukuyama sebagai the end of history. AS seolah memasuki sebuah dunia yang hanya digerakkan oleh sentimen perdagangan dan motif ekonomi belaka.

Tragedi 11 September memberikan gelora baru bagi AS. Terorisme kini berkembang menjadi musuh baru AS, yang sama militan dan menakutkan sebagaimana komunisme di tahun tujuh puluhan.

Dunia Islam juga menjadi perhatian baru AS. seketika AS menghidupkan kebijakan pre-emptive

strike. Afghanistan dan Irak menjadi korban pertama. Dalam skenario terbaiknya, AS akan mengawali demokratisasi di Timur Tengah. sebagaimana AS yang mendemokrasikan Jepang dan Jerman, kini AS akan pula mendemokrasikan Timur Tengah melalui Irak dan Afghanistan.

Jika skenario terbaik itu berhasil, niscaya tragedi 11 September itu berbuah hal yang tidak terduga, yang sangat historis berupa berubahnya Timur Tengah menjadi kawasan politik demokratis.

Namun akibat “jingoisme” AS, dapat pula terjadi skenario terburuk. Afghanistan dan Irak tidak mengawali demokratisasi di Timur Tengah.

Sebaliknya, dua negara itu justru menjadi medium instabilitas Timur Tengah yang semakin rawan. Lebih dari itu pula, tembok yang memisahkan antara Barat versus Islam semakin meluas. Terorisme justru meluas melalui “jingoisme” AS itu.

Kembali ke Aceh. Skenario terbaik apa yang dapat dihasilkan Aceh bagi Indonesia? Sebelum tragedi tsunami, Aceh selalu membuat Indonesia merasa tidak utuh. Gerakan separatisme melalui GAM begitu sulit diatasi. Presiden boleh berganti berkali-kali, namun seperatisme dan GAM itu terus hidup.

Tragedi Aceh justru dapat menjadi momentum kembalinya Aceh dalam pangkuan Indonesia. Rakyat

Aceh menyaksikan sendiri, betapa saudara mereka satu nusa satu bangsa, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua, berduyun-duyun mengulurkan tangan. Rakyat Aceh melihat sendiri, ketika pemerintahan lokal lumpuh, pemerintah pusat bersama pihak swasta bekerja siang malam buat Aceh.

Dalam suasana penuh solidaritas dan kebersamaan, politisasi yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia semakin terdengar aneh. Karena besarnya sentimen kemanusiaan yang kini hidup di Aceh, semua gerakan yang mengarah kepada fragmentasi politik yang ingin Aceh merdeka, kehilangan momentum. Semakin baik pelayanan pemerintah dan swasta nasional bagi warga Aceh, GAM yang inginkan Aceh merdeka semakin kehilangan relevansinya.

Semua upaya rekonstruksi di Aceh memang akan mengubah Indonesia jika kebersamaan dan solidaritas itu berkembang secara maksimal. Di samping rakyat Aceh hidup normal kembali, dan aneka kota di Aceh bergerak hidup kembali, pasca-tsunami ini kita berharap tumbuh Aceh yang baru, yang erat memeluk induknya, Indonesia Raya.**

PPP, Riwayatmu Kini

Dalam waktu dekat, eksponen dan aktivis PPP (Partai Persatuan Pembangunan) akan menyelenggarakan silaturahmi nasional. Pertemuan itu dimaksudkan menjadi semacam rembuk nasional untuk membicarakan masa depan partai. Segera peristiwa itu menarik perhatian publik luas, mengingat PPP adalah partai paling senior yang berbasiskan asas Islam dalam sebuah negara yang tengah bertransisi ke demokrasi, yang mayoritas pemilihnya adalah Muslim.

Pihak luar tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi dengan partai itu. Sekilas yang tampak, ada dua kekuatan yang terus tarik-menarik. Sebagian eksponen di luar pengurus struktural partai sangat bersemangat dengan silaturahmi itu. Mereka bahkan menjadi panitia dan inisiator acara. Semangat perubahan partai tampak kental sekali di kalangan. Dengan bahasa mereka sendiri,

itu dianggap momentum untuk revitalisasi partai.

Sementara pengurus inti PPP menampakkan gejala sebaliknya. Bukan saja mereka tidak bersemangat dengan pertemuan itu, namun juga melarang eksponen pengurus PPP hadir. Terdengar kabar akan diberlakukan sanksi disiplin partai bagi pengurus resmi PPP yang datang dalam pertemuan itu.

Berbagai pihak memberi perhatian pada dinamika internal PPP untuk berbagai alasan yang berbeda. Bagi akademisi, intelektual, dan pemerhati transisi demokrasi, peristiwa silaturahmi PPP menjadi kasus menarik hanya untuk kepentingan akademis. Partai Islam adalah objek riset untuk mengetahui lebih jauh hubungan Islam dan demokratisasi. PPP adalah representasi partai Islam yang paling besar dan tua untuk menjadi studi kasus.

Bagi media massa dan umumnya komunitas politik, peristiwa PPP menarik karena drama konflik elite di dalamnya. Pertentangan dan kompetisi tokoh yang berpengaruh, apalagi yang sudah berada dalam tahap selebriti, selalu menimbulkan sensasi. Isu, personalitas, aroma kekuasaan, manuver dan trik kompetisi, selalu menjadi bumbu yang membuat kisah itu menjadi drama yang menarik diikuti.

Sementara bagi komunitas dan eksponen PPP sendiri, silaturahmi itu dapat menjadi ajang hidup dan mati karier politik di partai. Suka atau tidak, silaturahmi itu akan menjadi ukuran kekuatan bagi eksponen properubahan

dan status quo partai. Ujung dari silaturahmi adalah pergantian pengurus partai sebelum waktu resmi, atau sebaliknya, konsolidasi pengurus lama partai.

Seusai pemilu presiden, LSI (Lembaga Survei Indonesia) sudah tiga kali menyelenggarakan survei nasional. Riset lapangan dikerjakan pada November 2004, Desember 2004, dan Februari 2005. Dari data November dan Desember 2004, sudah tampak adanya perubahan komposisi partai di mata pemilih. Jika sekali lagi pemilu parlemen dilakukan setelah selesai pemilu presiden, peringkat partai sudah berubah.

Tentu perlu dikemukakan, jika akurasi data diragukan, semua analisis dan rekomendasi dari penelitian itu tidak ada nilainya. Hasil pemilu KPU, baik pada pemilu parlemen dan pemilu presiden, sudah membuktikan akurasi mesin riset LSI. Di dua pemilu itu, prediksi mengenai pemenang pemilu dan peringkatnya selalu tepat.

PPP termasuk partai yang tidak beruntung. Dalam survei mutakhir, PPP terancam menjadi partai gurem. Semakin hari PPP bukan saja semakin kalah pamor dengan sesama partai Islam lain, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PPP pun terancam memperoleh dukungan suara di bawah electoral threshold. Jika pemilu dilakukan setelah pemilu presiden, PPP potensial hanya berada di peringkat ke tujuh. Ini berarti PPP drop dari empat besar menjadi terpelanting ke luar orbit lima besar partai.

Mengapa nasib PPP tidak sebaik partai Islam lainnya, seperti PKS? Partai politik memang gejala baru bagi psikologis publik luas. Umur demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru belum delapan tahun. Ikatan emosional antara pemilih dan partainya belum kuat. aneka survei LSI menunjukkan, lebih dari 40 persen pemilih adalah massa mengambang, yang dengan mudah pindah dari satu partai ke partai lain.

Daya tarik dan inovasi partai di masa awal demokrasi ini menjadi penting. Jika tidak, partai yang terkesan lamban dan tidak memperbaharui diri akan ditinggal. Sebaliknya, partai yang terkesan terus membesar di masa datang, segar dan penuh vitalitas, akan menjadi kekuatan baru.

Banyak alasan dikemukakan pemilih lama PPP yang kemudian meninggalkan partai itu setelah pemilu presiden. Alasan terkuat, pemilih kecewa dengan pragmatisme ekstrem PPP. Terkesan partai ini mudah sekali berubah posisi politik dalam waktu cepat, dan perubahan itu terkesan hanya karena orientasi kekuasaan belaka.

Bahkan sebelum pemilu 2004, pragmatisme eksterm itu sudah terasa. Hamzah Haz sangat dikenal dengan ucapannya, ulama elarang presiden perempuan. Selaku muslim Hamzah Haz mengklaim harus ikut ketentuan ulama. Namun, kemudian Hamzah Haz sendiri secara sukarela menjadi wakil presiden bagi presiden

perempuan, Megawati Soekarnoputri.

Pada pemilu 2004, pragmatisme eksterm kembali dipertontonkan. Dalam pemilu presiden babak kedua, jelas sekali posisi PPP berada dalam Koalisi Kebangsaan, yang menopang Megawati Soekarnoputri. Ketika Megawati dikalahkan, Koalisi Kebangsaan masih bertekad meneruskan perjuangan politiknya selaku oposisi. Namun posisi PPP segera berubah dengan cepat sekali. Justru tokoh PPP menjadi calon ketua DPR berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan. Alasan perubahan posisi itu tidak jelas sama sekali di mata publik. Akibatnya, yang terbaca itu hanyalah godaan kekuasaan belaka.

Yang lebih celaka lagi, setelah dikalahkan dalam pemilihan DPR, PPP terbaca sekali lagi ingin kembali bergabung dengan Koalisi Kebangsaan dalam pemilihan ketua MPR. Akibatnya PPP justru terjepit. Koalisi Kebangsaan menolak PPP. Sementara Koalisi Kerakyatan juga merasa dilukai PPP. Edukasi politik yang diperlihatkan elite PPP saat itu jelas tidak mencerahkan.

Alasan lain yang juga perlu dipertimbangkan oleh PPP adalah orientasi pemilih Muslim di Indonesia. berdasarkan data statistik, sekitar 87 persen pemilih Indonesia adalah Muslim. Namun, dalam sejarah pemilu demokratis di Indonesia, partai dan tokoh yang membawa platform politik Islam tidak pernah menjadi nomor satu.

Tiga kali kita sudah melakukan pemilu. Baik pada 1955, 1999, dan 2004, partai dengan asas Islam tidak pernah di peringkat teratas. Yang selalu nomor satu adalah partai yang di label publik berbasis nasionalisme dan pluralisme. Pada 1955, yang juara adalah PNI. Pada 1999 yang memang adalah PDI-P. Dan pada 2004, yang menjadi juara adalah Golkar.

Hal yang sama terjadi dengan kandidat presiden. Lima kandidat yang bertarung pada 2004 adalah Megawati, SBY, Wiranto, Amien Rais, dan Hamzah Haz. Tiga yang pertama di label publik sebagai calon yang nasionalis. Sementara dua yang terakhir di label calon dengan latar belakang politik Islam. Hasilnya, tiga besar diduduki oleh calon dengan latar belakang nasionalis.

PPP ada baiknya berpikir juga untuk mengubah platform partai untuk lebih menarik perhatian pemilih Muslim Indonesia. Berdasarkan data survei, mayoritas pemilih Muslim Indonesia sangat diwarnai oleh komitmen demokrasi dan pluralisme. Walau Muslim, mereka lebih cenderung memilih partai dan tokoh yang tidak memainkan “sentimen agama di dunia publik”.

Yang membuat PKS semakin besar justru karena pemilih Muslim percaya partai itu memiliki program konkret untuk pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan umum. Sementara PBB (Partai Bulan Bintang) yang acap kali mempropagandakan simbol-simbol “Islam politik”, seperti ingin menerapkan syariat Islam di dunia publik, justru tersingkir dan akan hilang dalam peredaran 2009, karena tidak lolos threshold.

Pemilih Muslim di Indonesia memiliki karakter khusus. Mayoritas mereka adalah demokrat. Hanya minoritas saja yang ekstrem. Karena itulah, demokrasi sangat mungkin tumbuh di Indonesia yang Muslim. PPP hanya dapat bangkit kembali jika merespons pasar politik yang ada.**

Kompensasi bagi Penduduk Miskin?

Saatnya kita memikirkan program bagi penduduk miskin di Indonesia secara lebih sistematis. Naiknya harga BBM terhitung sejak 1 Maret 2005 dapat menjadi momentum dan pintu masuk ke arah itu. Baik yang pro ataupun kontra atas kenaikan harga BBM, dua-duanya menyampaikan kepedulian atas penduduk miskin. Tetapi, argumen yang disampaikan dua kubu itu masih parsial. Penduduk miskin di Indonesia patut mendapatkan perhatian lebih dari itu.

Yang pro kenaikan BBM menyatakan penduduk miskin menjadi kepedulian mereka. Selama ini subsidi BBM sudah salah sasaran. Subsidi itu berlaku umum, dan justru lebih banyak dinikmati orang kaya. Pengalihan subsidi bagi penduduk miskin justru jauh

lebih efektif. Dengan pengalihan subsidi itu, kubu yang pro menunjukkan dengan angka bahwa justru jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Dua sektor yang akan diperhatikan untuk penduduk miskin. Pertama, sektor pendidikan, dan kedua sektor kesehatan. Bagaimana persisnya bentuk kompensasi itu dan bagaimana pula mekanisme penyaluran dan penjaminan tingkat kebocorannya, masih belum dijelaskan secara rinci. DPR juga akan terlibat membicarakannya.

Sebaliknya, yang kontra kenaikan BBM juga mengembangkan argumen dan kepedulian kepada penduduk miskin. Bagi kubu ini, kelompok yang miskin jangan hanya dibatasi pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Justru jauh lebih banyak jumlahnya adalah mereka yang hidup pas-pasan. Label akademik itu, kelompok ini adalah near-poor.

Kelompok near-poor ini yang paling menderita akibat kenaikan BBM. Sementara harga kebutuhan pokok yang mereka beli terus menaik, gaji mereka tetap, dan mereka bukan pula kelompok yang berhak atas kompensasi BBM. Akibat kenaikan harga, kelompok ini justru dapat terjatuh ke dalam situasi lebih miskin.

Bagi kubu yang kontra, argumen berkurangnya angka kemiskinan dari kubu yang pro menjadi lemah. Benar, ia mungkin dapat mengurangi prosentase mereka yang berada di bawah kemiskinan jika skema kompensasi itu berjalan dengan benar. Namun, kenaikan BBM, menurut

kubu itu, justru juga dapat membuat kelompok lain menjadi lebih miskin karena tidak terkena program kompensasi. Jika dua arah itu dihitung, penduduk miskin bukannya berkurang tetapi bertambah.

Lalu, bagaimana sebaiknya penduduk miskin ditangani? Kubu yang kontra kenaikan harga BBM belum memberikan jawaban memadai. Sebagaimana kubu yang pro, kubu yang kontra ini juga memberikan efek emosional yang kuat kepada publik karena klaim kepeduliannya pada penduduk miskin.

Memang saatnya kita memberikan perhatian lebih programatis dan terencana kepada penduduk miskin, setidaknya karena tiga alasan.

Pertama, selama ini penduduk miskin selalu diatasnamakan dan menjadi objek emosional para akademisi dan politisi, namun tanpa ditangani dengan benar-benar tuntas. Penduduk miskin itu pula selama ini dijadikan amunisi untuk saling serang dalam pertengkar elite, baik di wilayah politik ataupun akademik.

Kedua, penduduk miskin itu mudah sekali menjadi sumber kerusuhan sosial. Mereka ibarat rumput kering dalam jumlah yang sangat banyak untuk kasus Indonesia. Sekali terkena sulut, mudah sekali rumput kering terbakar.

Untuk kasus politik Indonesia yang sangat

terfragmeritasi dan para elitnya yang gemar berakrobat, tanpa ada jaring pengaman, penduduk miskin ini mudah sekali dimobilisasi dan dibuat marah. Jika penduduk miskin ini marah dan mengembangkan tuntutan politik, aspek moral dan gangguannya akan sangat kuat.

Ketiga, sudah pula menjadi amanat dalam konstitusi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan penduduk miskin. Di dalam UUD 1945 yang lama, ataupun UUD 1945 yang sudah diamendemen, amanat itu cukup tegas. Keseluruhan Pasal 34 meminta pemerintah lebih aktif untuk melindungi dan membuatkan jaring pengaman bagi penduduk miskin.

Seruan konstitusi itu tidak unik bagi situasi Indonesia. Dalam sejarah peradaban dan kebijakan publik di negara lain, penduduk miskin memang menempati posisi khusus. Seruan membantu penduduk miskin menjadi elemen moral yang sangat kuat tidak hanya dalam dokumen agama besar.

Dalam sejarah dapat kita amati evolusi bantuan untuk orang miskin itu. Perkembangan pertama terjadi dalam sistem keluarga besar di sebuah suku. Karena jumlah mereka yang terikat darah cukup banyak, diferensiasi peran di antara mereka terjadi.

Ada individu yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang lebih dapat mencari nafkah dan ada yang lebih tergantung. Kepala suku menjadi “ayah” bagi semua. Ia yang mengatur bahwa kelebihan dari yang kuat diberikan kepada yang lebih lemah.

Sistem keluarga besar tidak bertahan lama. Jumlah penduduk kian bertambah. Muncul pabrik yang membuat semakin banyak individu tidak lagi bekerja dalam sistem keluarga besar. Muncul keluarga inti sebagai bentuk utama keluarga menggantikan sistem keluarga besar. Tetapi, mereka yang lemah dan tidak mampu, terus hadir. Karena keluarga besar sudah hancur, siapa yang peduli dengan mereka yang papa itu?

Sejarah mencatat, peran pelindung penduduk miskin digantikan oleh banyak sekali lembaga amal. Sebagian besar lembaga itu berafiliasi dengan gereja atau masjid. Sebagian lagi, lembaga itu didirikan oleh philanthropist, orang kaya yang senang memberikan derma.

Peradaban bergerak menuju nasionalisme dan pembentukan sebuah bangsa. Inggris menjadi bangsa utama yang saat itu memulai revolusi industri. Sebagai tanggung jawabnya bagi penduduk miskin, Inggris mengembangkan laws for the poor. Pelan-pelan tugas melindungi orang miskin diambil alih oleh negara. Swasta tetap menjalankan misi sosialnya, namun negara yang lebih melindungi penduduk miskin itu secara sistematis.

Laws for the poor di Inggris adalah hukum pertama yang menjadi fondasi lahirnya aneka program kesejahteraan modern. Dalam hukum itu penduduk miskin dipisahkan dalam dua kategori.

Pertama, deserving poor yang dilabelkan kepada

mereka yang miskin dan sekaligus tua renta, cacat fisik dan mengalami gangguan lain sehingga tidak mampu bekerja.

Kedua, non-deserving poor yang dilabelkan kepada penduduk miskin tetapi secara fisik dan mental mampu bekerja. Dua kategori itu mendapatkan bantuan, tetapi deserving poor lebih mendapatkan perhatian ekstra.

Perang dunia kedua mengubah perhatian atas penduduk miskin secara lebih sistematis. Akibat perang, begitu banyak veteran, pengangguran dan penduduk yang cacat. Amerika Serikat segera menyempurnakan Social Security program untuk menjangkau segmen penduduk yang terancam miskin karena akibat perang. Program kesejahteraan kini berkembang menjadi sebuah industri yang teramat kompleks.

Lebih rumit dibandingkan isu BBM, kini program kesejahteraan di AS membebani anggaran negara. Namun, penduduk yang terkait dengan program itu begitu luas. Perubahan atas program kesejahteraan segera menjadi isu politik yang panas. Sangat jarang sekali politisi yang berani menyentuh isu perubahan program kesejahteraan di masa kampanye.

Itu pula yang membuat program sistematis bagi penduduk miskin berwarna-warna. Di satu sisi, program itu pasti sangat populer karena disukai oleh penduduk miskin dan aneka golongan yang bersimpati kepada penduduk miskin. Di sisi lain, program itu pasti menjadi beban anggaran negara, yang kian hari persentasenya

dapat membesar jika tidak terus-menerus diperbaharui. Jika tidak hati-hati, negara dapat bangkrut dibuatnya.

Apa pun alasannya, penduduk miskin di Indonesia layak mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Pemerintahan Yudhoyono akan sangat dikenang meletakkan fondasi penting negara modern, jika berhasil membuat program sistematis bagi penduduk miskin. Jika program penduduk miskin itu mulai dikerjakan, semua debat kompensasi BBM akan segera menghilang karena tidak lagi relevan di hadapan program yang lebih signifikan. **

Megawati Versus Yudhoyono Jilid Dua?

Megawati terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua umum PDI Perjuangan dalam kongres PDI-P akhir Maret 2005. Akankah ini menjadi awal dari pertarungan Megawati versus Yudhoyono jilid dua? Ataukah dua tokoh ini sebaiknya mengembangkan kemitraan yang baru demi tujuan yang jauh lebih besar?

Megawati mungkin dapat mencontoh Guruh Soekarnoputra. Menjelang pemilihan ketua umum PDI-P, Guruh mengambil sikap yang sangat elegan. Saat itu, Guruh menghadapi pilihan politik yang sulit. Ia sudah telanjur menyatakan perlawanan terhadap Megawati, dan bersedia menjadi calon ketua umum PDI-P berikutnya. Ia didesak untuk bersikap tegas dan ekstrem, membuat kongres tandingan, yang berujung kepada pengurus tandingan, bahkan PDI-P tandingan.

Guruh tahu bahwa jika ia bersedia membuat kongres tandangan, sangat mungkin sekali publik di luar PDI-P mendukungnya. Semangat perubahan dan pembaharuan memang berada di kubunya. Sementara dukungan dana dan sumber daya lain, tidak pula kurang dilihat dari track record eksponen gerakan pembaruan di PDI-P itu. Pemerintah RI dapat dipastikan pula tidak akan ikut campur, atau setidaknya tidak akan merugikan Guruh jika ia memilih ekstrem melawan Megawati.

Namun ada kepentingan lebih besar yang Guruh bela. Ia mengatakan bahwa akan terus mengontrol ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Namun ia tidak ingin PDI-P pecah.

Perpecahan PDI-P dapat pula melemahkan barisan pendukung NKRI. Akibatnya kesatuan NKRI juga akan semakin rawan. Untuk kepentingan yang lebih besar, Guruh memilih tetap berjuang dalam satu partai, mengakui kepemimpinan yang dipilih dalam kongres. Lebih dari itu Guruh sendiri menjadi bagian dari pengurus baru PDI-P.

Guruh Soekarnoputra patut dipuji telah mengambil "Act of Statemanship" yang meletakkan kepentingan lebih besar, dan mengalahkan kepentingan pribadi atau jangka pendek.

Sengaja sikap Guruh Soekarnoputra itu diulas panjang lebar karena sikap itu sangat strategis dan dibutuhkan dalam politik elite yang semakin rusak.

Yaitu sikap yang berkompetisi tetapi tidak bermusuhan. Sikap yang ingin mengontrol tetapi tidak ingin saling menghancurkan.

Guruh sudah menerapkannya pada kasus internal PDI-P. Kini pengurus resmi PDI-P ditantang untuk menerapkan perilaku politik serupa untuk kasus eksternal, menyangkut hubungan PDI-P dengan pemerintahan RI secara resmi. Lebih khusus lagi, sikap Guruh ini sebaiknya yang menjadi platform hubungan politik Megawati dan Yudhoyono jilid dua.

Sikap Guruh menunjukkan bahwa ia memang siap bersaing tetapi tidak berarti ia mengambil sikap bermusuhan atau melakukan pendekatan konflik dengan pesaingnya. Bersaing berarti berlomba menunjukkan program dan kualitas yang lebih baik di hadapan publik luas. Sementara bermusuhan atau berkonflik acap kali dilandasi oleh motivasi untuk saling menghancurkan.

Hal yang sama kita harap dikerjakan Megawati Soekarnoputri terhadap presiden RI yang terpilih secara resmi. Sikap berkompetisi dengan presiden adalah hal yang wajar saja. Apalagi kedua tokoh itu, Megawati dan Yudhoyono, memang saling berhadapan dalam pemilu presiden tahun lalu. Namun Sikap itu jangan sampai menjurus kepada pendekatan konflik atau permusuhan.

Sikap Guruh juga menunjukkan bahwa ia ingin sekali mengontrol pilihan dan praktik politik pengurus PDI-P selama ini. Ia merasa bahwa banyak sekali terjadi praktik yang bertentangan dengan gaya kepemimpinan

yang demokrat dan perjuangan partai yang pro wong cilik. Namun semangat kontrol itu tidak ia arahkan untuk saling menghancurkan dengan membuat kongres tandingan.

Megawati juga diharapkan mengambil sikap politik yang sama. Selaku ketua umum PDI-P yang baru saja terpilih, tentu wajar dan strategis jika Megawati mengembangkan semangat oposisi dan ingin mengontrol pemerintahan. Banyak hal di pemerintahan yang dapat dikritisi.

Namun semangat oposisi itu bukan dalam sikap yang asal beda, atau asal merepotkan pemerintah, apalagi ingin menjatuhkan wibawa presiden secepat dan sekeras mungkin.

Stabilitas politik, kesatuan NKRI dan suasana kondusif bagi pembangunan ekonomi tetap harus dinomorsatukan. Sebagaimana Guruh yang menolak membuat kongres tandingan, Megawati juga diharapkan menolak mengambil semua langkah yang justru dapat berujung kepada kelumpuhan pemerintahan. Jika ini dikerjakan oleh Megawati, niscaya ketokohan Megawati justru semakin kuat.

Yudhoyono sendiri mengembangkan kesantunan politik yang baik terhadap Megawati Soekarnoputri. Di sela-sela tugas kenegaraan yang ketat, Yudhoyono menyempatkan diri mengucapkan selamat atas terpilihnya Megawati kembali sebagai ketua umum PDI-P.

Padahal publik tahu, ketika Yudhoyono terpilih sebagai presiden RI, ia tidak kunjung mendapatkan ucapan selamat dari Megawati Soekarnoputri. Ketika banyak presiden dunia mengucapkan selamat, presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri, justru tidak mengucapkan selamat.

SBY menunjukkan “act of statesmanship” yang elegan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Guruh Soekarnoputra menjelang pemilihan ketua umum PDI-P. Kita harap Megawati, dan elite lainnya, juga semakin sering menunjukkan sikap negarawan itu, dalam pentas politik nasional ke depan.

Setelah terpilih kembali menjadi ketua umum PDI-P, bagaimanakah prospek Megawati? Akankah ia mengikuti kisah sukses Juan Peron di Argentina? Juan Peron pernah tersingkir sebagai presiden, namun ia akhirnya berhasil terpilih kembali menjadi presiden di era berikutnya. Ataukah Megawati hanya menjadi pemimpin dari kelompok kecil komunitas fanatiknya sendiri?

Tentu semua sangat bergantung dari apa yang Megawati lakukan dan contohkan dalam waktu menjelang 2009. Publik Indonesia menyukai tokoh yang kritis, namun tetap terasa rasionalitas tindakannya. Oposisi dalam politik modern sangat tergantung dari isu.

Untuk isu tertentu, tokoh itu mengambil sikap yang

berseberangan karena perbedaan visi dan misi. Namun untuk isu lain, tokoh itu justru memberi dukungan. Dalam politik modern tidak dikenal oposisi buta, yang asal beda dengan apapun yang diambil pemerintah.

Menjadi tokoh atau partai yang beroposisi secara mutlak untuk semua kasus justru menjadi pilihan politik yang akan mengecilkan Megawati dan PDI-P sendiri. Memang daya tarik untuk melakukan oposisi buta cukup kuat.

PDI-P tidak punya wakil di kabinet Yudhoyono saat ini. Hubungan Megawati dan Yudhoyono juga tidak mulus secara pribadi. Apalagi kini pemerintah sudah mengambil kebijakan tidak populer seperti kenaikan BBM.

Megawati dan PDI-P dapat saja memainkan secara maksimal isu BBM misalnya. Namun ujung dari manuver itu akan merugikan semua pihak. Seandainya pun harga BBM dikembalikan seperti semula, semua harga lain sudah terlanjur naik dan tidak mungkin turun kembali.

Wibawa pemerintah akan jatuh dan menjadi contoh buruk untuk kebijakan lain. Indonesia semakin berada dalam krisis. Tak ada yang diuntungkan oleh situasi itu, kecuali segelintir petualang politik.

Pada titik inilah sikap Guruh Soekarnoputra menjadi berharga. Daripada membahayakan NKRI, dan kesatuan partai, Guruh tidak ingin melangkah lebih jauh membuat

kongres tandingan, walau hal itu mungkin dikerjakan. Hal yang sama kita harap ditempuh oleh Megawati dan PDI-P, baik untuk kasus BBM ataupun lainnya.

Justru dengan sikap negarawan seperti itu, Megawati akan mendapatkan simpati yang lebih luas. Siapa tahu Megawati dapat mengulangi kisah sukses Juan Peron di Indonesia? **

Ditangkapnya Mulyana W. Kusumah

Sebelum menjadi heboh di media massa, seorang sahabat, yang juga sahabat Mulyana W Kusumah memberikan info. Menurut keterangan sahabat tersebut, Mulyana W Kusumah saat itu, Sabtu (9/4/05) pagi, sedang berada dalam kesulitan besar. Ia sedang diproses di kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ada kemungkinan Mulyana ditahan sementara.

Agak shock mendengar berita itu. Penulis menanyakan kepada sahabat itu, kasus apa gerangan yang menimpa Mulyana? Ia bercerita, itu semua terkait dengan tender pengadaan barang ketika pemilu tahun lalu. Sebagai anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum), ia dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Namun, menurut sahabat itu, Mulyana dijebak dan dikorbankan karena keluguannya.

Setelah pembicaraan Sabtu pagi itu, ada kiriman SMS (layanan pesan singkat) di telepon seluler dari sahabat yang sama. SMS itu memlnta untuk tidak dulu menyebarkan berita seputar proses hukum Mulyana W Kusumah. Ada kemungkinan Sabtu malam, menurut bunyi SMS itu, Mulyana dibebaskan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak Sabtu sore, berita mengenai Mulyana W Kusumah justru disiarkan banyak TV dan radio. Minggu (10/4/05) pagi, berita itu justru menjadi headline di sejumlah koran terkemuka. Yang menjadi berita adalah percobaan penyuaapan aparat negara oleh Mulyana W Kusumah.

Di sebuah hotel, menurut berita itu, Mulyana tertangkap basah sedang melakukan transaksi kepada seorang anggota BPK (Badar Pemeriksa Keuangan) agar “berdamai” dan mengatur audit keuangan KPU. Sehingga melalui audit itu, tidak ada sama sekali indikasi KPL melakukan korupsi atau merugikan keuangan negara.

Penulis kembali menghubungi sahabat yang juga sahabat Mulyana W Kusumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mulyana dituduh menyuap?

Sahabat itu menjelaskan, ada kemungkinan Mulyana dijebak oleh sebuah konspirasi untuk menutupi korupsi yang lebih besar. Sahabat itu mencoba meyakinkan, Mulyana itu orang miskin. Rumah saja masih tidak punya. Keluguannya dan lemahnya posisi di KPU membuatnya dikorbankan oleh pihak lain.

Tak lama kemudian pengacara Mulyana, Eggy

Sudjana, membuat konferensi pers. Menurut Eggy, Mulyana dijebak. Ia diundang datang ke sebuah kamar hotel. Ketika Mulyana masuk ke ruangan itu, sudah ada uang dan traveler's check yang berserakan. Masih menurut Eggy, uang itu bukan milik Mulyana, tetapi dibuatkan kesan seolah-olah milik Mulyana. Sebagai gantinya, pihak Mulyana akan menuntut KPK dan BPK yang sudah menjebaknya.

Eggy menambahkan, Mulyana datang ke hotel itu juga atas permintaan pimpinan Mulyana sendiri di KPU, Nazaruddin Syamsuddin. Kasus Mulyana tidak boleh dilihat sebagai persoalan Mulyana sebagai individu, tetapi bagian dari lembaga yang lebih besar tempat Mulyana bekerja, yaitu KPU.

Perkembangan kasus Mulyana W Kusumah sudah sangat kompleks. Apa pun yang sebenarnya terjadi, semuanya serba salah. Katakanlah jika Mulyana benar-benar dijebak dan uang itu bukan miliknya, tetap sudah ada di kamar hotel sebelum ia masuk ke kamar itu, sungguh itu akan menjadi cacat besar sebuah lembaga sekelas BPK dan KPK. Bagaimana mungkin lembaga resmi pemerintahan menjebak seorang warga negara yang tidak bersalah?

Seandainya pun keterangan pengacara Mulyana yang salah, kasus itu juga sama kompleksnya. Jika benar ada indikasi penyuapan oleh Mulyana W Kusumah, mengapa pula ia bertindak seburuk dan seabodoh itu?

Bukankah ia ahli kriminologi, seorang aktivis, yang pasti tahu segala kemungkinan hukum di balik penyuapan? Apa pula yang ingin ia lindungi dalam persoalan audit keuangan KPU?

Lebih kompleks lagi jika Mulyana dilihat sebagai bagian dari lembaga KPU. Jika benar Mulyana menyuap, dan datang ke hotel itu diketahui, bahkan diminta pimpinan KPU, berarti ada yang hendak ditutupi di KPU sendiri. Sekelompok LSM memang sejak dulu sudah menyuarkan kemungkinan korupsi yang dilakukan KPU dalam tender barang pemilu.

Semua kemungkinan dapat terjadi. Apa pun yang sebenarnya terjadi, sama buruknya bagi citra pemerintahan. Klarifikasi mengenai nama pihak mana pun yang tidak bersalah. Jika Mulyana tidak bersalah, pasti KPK dan BPK yang bersalah menjebak, yang seolah-olah Mulyana menyuap aparat negara. Jika BPK dan KPK tidak bersalah, pasti Mulyana yang bersalah, ia benar-benar bermaksud menyuap.

Jika tindakan Mulyana tidak diketahui oleh anggota KPU lainnya, Mulyana dapat disalahkan secara pribadi. Ia dianggap bergerak secara individual. Namun itu saja sudah cukup mencoreng nama besar KPU, karena semua itu terkait dengan tuduhan korupsi oleh oknum KPU.

Jika tindakan Mulyana ke hotel itu benar atas persetujuan Nazaruddin, pimpinan tertinggi KPU, pemeriksaan dapat diarahkan kepada KPU sebagai lembaga. Tak hanya Mulyana, tetapi juga kepada

anggota KPU lain terindikasi bersedia memberikan dana kepada pejabat negara untuk menutupi kasus korupsi di KPU, pemeriksaan dapat diarahkan kepada KPU sebagai lembaga. Niscaya hal itu akan menjadi skandal besar bagi penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia.

Klarifikasi dari semua pihak diperlukan agar jatuhnya korban tidak bersalah dapat dihindari. Sampai tahap ini, semua pihak punya kemungkinan yang sama, tidak bersalah. Mulyana tetap punya kemungkinan tidak bersalah jika benar ia hanya dijebak. KPK dan BPK juga punya kemungkinan tidak bersalah jika benar upaya penyyuapan itu benar terjadi. KPU dan Nazaruddin juga punya kemungkinan tidak bersalah jika mereka hanya dijadikan tameng untuk mengalihkan masalah.

Siapa pun yang bersalah, dan pihak mana pun yang ternyata tidak bermasalah, sejak lama memang sudah muncul kekhawatiran di KPU. Situasi saat menjelang pemilu 2004 memang dapat menyulitkan KPU sebagai lembaga. Lembaga itu diberi tugas yang maha berat untuk menyelenggarakan pemilu nasional tiga kali dalam setahun. Tak pernah ada preseden sebelumnya di Indonesia, bahkan di dunia, sebuah negara yang sangat besar menyelenggarakan tiga kali pemilu nasional yang demokratis dalam waktu setahun.

Sementara, waktu yang tersedia bagi KPU untuk penyelenggaraan itu sangat singkat. Memproduksi

pengadaan barang pemilu dan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua menjadi pangkal semua kesulitan. Banyak wilayah Indonesia yang masih sulit dijangkau karena terbatasnya sarana transportasi. Sementara ada deadline yang harus dipenuhi KPU. Jika deadline waktu dilanggar, dapat mengganggu proses pemilu, bahkan dapat membuat pemilu demokratis tidak sah.

Sementara dana yang tersedia untuk pengadaan logistik KPU minta ampun besarnya. Anggota KPU ternyata juga tidak hanya mengurus substansi pemilu, tetapi harus pula menjadi koordinator pengadaan barang. Akademisi “dipaksa” menjadi penanggung jawab tender proyek ratusan miliar rupiah, dengan jadwal waktu yang sangat ketat.

Siapa pun yang menjadi anggota KPU, bahkan malaikat sekalipun, tentu akan mengalami kesulitan dan godaan dalam situasi di atas. Semuanya serba tergesa-gesa dan memberi peluang bagi penyelewengan.

Mulyana mungkin bersalah. Mulyana mungkin pula tidak bersalah. Namun, sampai titik ini, kasus yang menimpa Mulyana sudah memberikan pelajaran yang banyak bagi kita semua menghadapi pemilu demokratis. Semoga kasus yang sama tidak menimpa pihak lain dalam penyelenggaraan pilkada, mulai bulan Juni 2005.

**

Dimulainya Konsolidasi Politik Presiden

Seorang presiden yang baik tidak otomatis berujung kepada kinerja pemerintahan yang memuaskan. Apalagi jika presiden itu memerintah di negara yang sangat terfragmentasi secara politik seperti di Indonesia saat ini. Lapangan politik tempat presiden itu memerintah penuh dengan “akrobat” elite politik. Sementara presiden dan wakil presiden hanya mengendalikan sebagian kekuasaan saja, baik di parlemen ataupun di luar pemerintahan.

Banyak riset yang sudah dikerjakan untuk tema itu. Salah satu yang menonjol adalah karya World Bank melalui tiga pakarnya: Jo Ritzen, William Easterly, Michael Woolcock. Studi mereka diberi judul “On

Good Politicians and Bad Policies: Social Cohession, Institution and Growth.” Studi ini menceritakan betapa fragmentasi politik di masyarakat akhirnya dapat membuat good politicians membuat bad policies.

Di mata publik luas, Susilo Bambang Yudhoyono dipandang sebagai presiden yang baik. Diukur dari tiga kriteria: kapabilitas, integritas dan akseptabilitas, skor Yudhoyono sangat tinggi. Terlepas dari dinamika seratus hari pemerintahannya, Yudhoyono masih dianggap sangat kapabel, berintegritas dan masih populer di mata mayoritas pemilih Indonesia. Hasil survei LSI bulan Desember 2004 dan Februari 2005 menunjukkan bukti itu.

Namun, Yudhoyono menghadapi politik Indonesia yang sangat terpecah belah. Ia terpilih dalam sistem pemilihan presiden langsung. Namun partai yang mendukungnya partai kecil. Mayoritas anggota parlemen bukan berasal dari partainya. Di luar parlemen, berbagai kekuatan civil society, pers, dan tokoh yang berpengaruh tidak kalah terfragmentasinya .

Suka atau tidak suka, Yudhoyono secepatnya harus memperkuat mesin politik yang bekerja untuknya. Mesin politik itu tidak cukup hanya mengandalkan lembaga presiden dan birokrasi pemerintahan. Bahkan mesin politik itu tidak juga cukup hanya mengandalkan kekuatan di parlemen. Mesin politik itu harus juga mampu menjadi konektor presiden dengan berbagai kekuatan dan simpul masyarakat.

Tahun 2005 menjadi tahun pertarungan bagi Yudhoyono. Tahun ini harus menjadi tahun konsolidasi kekuatan politiknya. Jika tidak, good politicians dapat berakhir membuat bad policies, akibat harus melayani dan merespon beraneka kekuatan politik dengan vested interest-nya masing-masing.

Setahap demi setahap memang terlihat terjadinya konsolidasi kekuatan politik di belakangan Yudhoyono. Sebelum pemilu presiden putaran kedua berakhir di ujung tahun 2004, muncul fenomena koalisi kebangsaan yang sangat powerful di belakang kompetitor Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri. Koalisi ini terdiri dari tiga partai terbesar: Golkar, PDIP dan PPP. Koalisi ini juga mampu merangkul Hasyim Muzadi yang merupakan ketua umum (non-aktif saat itu) dari ormas terbesar di Indonesia, NU.

Koalisi Kebangsaan juga bersepakat, jika calon mereka kalah, mereka tetap bersatu menjadi oposisi. Bisa dibayangkan begitu dahsyatnya kekuatan oposisi atas Presiden Yudhoyono jika komitmen Koalisi Kebangsaan terealisasi. Koalisi itu menguasai mayoritas suara di parlemen. Koalisi itu juga dapat terus “main-mata” dengan NU melalui Hasyim Muzadi.

Namun di ujung tahun 2004, dan di awal tahun 2005, konsolidasi politik Yudhoyono terjadi. Koalisi Kebangsaan itu hancur perlahan-lahan. Partai Golkar selaku penyangga utama Koalisi Kebangsaan mengalami

perubahan radikal. Pimpinan Koalisi, Akbar Tanjung, dikalahkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla. Golkar pun berputar arah, dari pemimpin oposisi, kini menjadi instrumen penyangga pemerintah eksekutif yang paling efektif.

PPP pimpinan Hamzah Haz mengalami degradasi. Segera setelah Megawati dikalahkan, elite PPP bermanuver sedemikian rupa dalam perebutan pimpinan DPR dan MPR. Nasib buruk menimpa partai ini karena akhirnya tersisih dalam kepemimpinan di DPR ataupun MPR.

Kini, PPP berada dalam konflik yang sangat tajam. Muncul kelompok pembaruan yang ingin pergantian kepengurusan secepat mungkin. Berdasarkan survei LSI bulan Februari 2005, yang disampaikan dihadapan elite PPP pro-Silaknas, PPP terancam menjadi partai gurem jika tidak ada perubahan mendasar. PPP kini disibukkan dengan konflik internal partainya. Kekuatan PPP sebagai oposisi juga semakin sirna.

Hasyim Muzadi yang dulu menjadi maskot kedua (sebagai calon wapres) Koalisi Kebangsaan, memang terpilih kembali sebagai ketua umum NU. Namun Hasyim terpilih dalam kondisi NU yang semakin dibatasi. Kiprah politik praktis selama ini sudah membuat NU terpecah belah. NU lebih disibukkan oleh kegiatan politik praktis ketimbang agama. Kini pemisahan NU dari politik praktis semakin ditegaskan. Walau terpilih kembali, Hasyim sudah tidak mau lagi, dan tidak mampu lagi menggerakkan NU untuk politik

praktis, apalagi menjadi oposisi pemerintahan resmi.

PDIP adalah satu-satunya partai besar Koalisi Kebangsaan yang masih punya kekuasaan untuk menjadi oposisi. Megawati Soekarnoputri sudah terpilih kembali secara aklamasi bulan Maret 2005. Namun Megawati dan PDIP tidak bisa meJenggang dan bebas seperti dulu. Kini popularitas Megawati dan PDIP jauh merosot dibandingkan tahun 2004, seperti yang diukur oleh survei LSI, Februari 2005.

Sementara konflik internal PDIP juga tidak bisa diremehkan. Aneka kekuatan elite pembaharu PDIP tidak bisa dipandang sebelah mata, seperti Arifjn Panigoro, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Sophan Sopian. Mereka sudah mendaftarkan gugatan atas pengurus baru PDIP di pengadilan. Legalitas pengurus baru PDIP sangat tergantung dari pengadilan dan pemerintah, jika memang kasus itu menjadi kasus hukum secara resmi.

Konsolidasi politik pemerintahan SBY tampak sangat mencolok sekali dengan melihat melemahnya oposisi secara kelembagaan. Khususnya, hal itu semakin mencolok dengan mengamati nasib Koalisi Kebangsaan dan eksponen pendukungnya.

Konsolidasi penting berikutnya yang mesti ditempuh pemerintahan Yudhoyono adalah di luar parlemen dan di luar partai politik. Bangunan politik sebuah negara tidak hanya diisi oleh partai politik saja. Juga menjadi

elemen politik penting adalah civil society, pers dan tokoh individual berpengaruh.

Mobilisasi dukungan politik dari luar parlemen dan partai bagi Yudhoyono menjadi penting. Tak bisa dihindari, oposisi akan terus muncul di parlemen atas pemerintahan Yudhoyono. Apalagi pemerintahan Yudhoyono adalah pemerintahan minoritas karena hanya mengendalikan minoritas anggota parlemen. Yang sepenuhnya mampu dikendalikan Yudhoyono dan Jusuf Kalla hanyalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sementara gabungan dua partai ini masih jauh di bawah 50 persen.

Konstruksi politik itu menyulitkan Yudhoyono-Kalla untuk mengegolkan kebijakan tidak populer seperti kenaikan BBM. Segera Yudhoyono-Kalla menjadi tawanan parlemen karena parlemen tahu persis mayoritas publik tidak mendukung kebijakan tidak populer itu, walau parlemen juga menyadari kenaikan BBM itu perlu untuk ekonomi yang sehat jangka panjang.

Karena tidak sepenuhnya mampu mengendalikan parlemen, kekuatan politik di luar parlemen harus pula dimobilisasi oleh Yudhoyono-Kalla. Bahkan jika parlemen terkesan beroposisi secara buta, asal beda dengan presiden, kekuatan civil society itu yang dapat dimobilisasi.

Tahun 2005 ini akan diwarnai oleh tarik menarik kekuatan civil society, pers dan tokoh individu yang berpengaruh. Pihak Presiden Yudhoyono tentu

berkepentingan agar mampu bermitra dengan kekuatan civil society itu. Sebaliknya oposisi atas Yudhoyono memiliki argumen yang sama untuk membuat civil society menjauh dari Yudhoyono.

Sejauh Yudhoyono-Kalla menawarkan gagasan dan kebijakan yang menarik bagi kekuatan di luar parlemen, konsolidasi politik Yudhoyono- Kalla di tahun 2005 akan semakin kuat. Jika tidak, kita kembali akan melihat pemerintahan yang tidak efektif. Ini akan membenarkan hasil riset World Bank itu mengenai good politicians yang “dipaksa” melahirkan bad policies. **

Dimulainya Perang Melawan Korupsi?

Mulai maraknya upaya pemberantasan korupsi di KPU, di bank pemerintah, membuat kita melayang jauh ke depan. Bayangkan situasi di tahun 2014, sembilan tahun dari sekarang. Saat itu politisi, pengusaha, tokoh LSM, gerakan mahasiswa, diplomat dan para pejabat meributkan laporan terbaru Transparansi Internasional mengenai perkembangan korupsi dunia. Indonesia di tahun 2014 dibahas secara khusus sebagai contoh fenomenal yang berhasil menangani korupsi selama sepuluh tahun terakhir.

Transparansi Internasional yang setiap tahun mengukur indeks persepsi korupsi di berbagai negara meletakkan Indonesia di posisi papan atas negara yang relatif bersih. Padahal sepuluh tahun lalu, Indonesia

selalu menjadi juara sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Berbagai disertasi akademik sudah ditulis mengenai kasus fenomenal Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tahun 2014 itu. Aneka civil society tingkat dunia yang bergerak di bidang korupsi acapkali menjadikan Indonesia sebagai referensi betapa kultur korupsi itu dapat dibasmi. Para tokoh alternatif di negara lain yang korup menyalahkan pimpinan politik di negaranya sendiri yang tidak berlaku sebagaimana pimpinan politik di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir yang berhasil mengganyang korupsi.

Jika kondisi di atas benar-benar terjadi, Indonesia sudah melakukan revolusi kedua. Revolusi pertama adalah bebas dari penjajah. Revolusi kedua adalah bebas dari korupsi yang sudah menjadi kultur bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dianggap the great leaders yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah sebagai presiden dan wapres pertama Indonesia yang bukan saja dipilih secara langsung, tetapi juga sebagai pemimpin pertama yang berhasil membasmi korupsi secara sistematis.

Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, sejarah juga kemudian mencatat prestasi gemilang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, BPK dan Pihak kepolisian yang secara bahu membahu, dengan disiplin yang kuat, tahan godaan, bersama-sama sudah

menangkap aneka koruptor besar dan meletakkan sistem yang membuat korupsi semakin sulit.

Akankah bayangan sembilan tahun ke depan di atas terwujud? Ataukah seperti biasa, bayangan itu hanya wacana, mimpi dan ilusi?

Tanpa disadari, selama ini, praktek korupsi dalam politik Indonesia sudah berkembang menjadi ideologi nasional yang sesungguhnya, walau disembunyikan. Dalam retorika umum, dan pandangan untuk konsumsi publik, berbagai pemimpin menunjukkan komitmen yang tinggi kepada pemberantasan korupsi. Namun dalam praktek politik sehari-hari, pemimpin itu turut korupsi, atau bersikap pasif terhadap meluasnya jaringan korupsi.

Praktek korupsi telah menyatukan Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Barat sampai Timur. Kian hari politik semakin kehilangan idealisme dan romantismenya. Politik semakin tereduksi maknanya hanya sebagai bargaining kekuasaan yang melindungi politik uang.

Selama ini, di semua lini, satu persatu isu korupsi itu terbongkar. Isu korupsi di kalangan legislatif baik di pusat ataupun daerah sudah menjadi berita rutin. Korupsi di kalangan eksekutif, bahkan di departemen agama, sudah tidak lagi mengherankan. Bahkan di kalangan penegak hukum, seperti di tingkat kejaksanaan, kepolisian dan para hakim juga tidak mengejutkan.

Kalangan pengusaha tidak kalah cerdas dan cantiknya dalam bermain uang. Terbongkarnya pat gulipat dalam pengucuran dana bank pemerintah yang bernilai ratusan miliar sampai triliun juga sudah menjadi pengetahuan umum. Bahkan korupsi di kalangan aktivis LSM, akademisi dan institusi demokratisasi seperti KPU juga tidak lagi aneh.

Bukan isu dan tuduhan korupsi itu benar yang menjadikan masalah korupsi di Indonesia berada pada stadium berbahaya. Namun sikap elite politik yang memprihatinkan. Para elite terlalu bersikap kompromis dan lunak atas praktek korupsi.

Mengapa selama ini elite kita begitu lunak dan lembek terhadap praktek korupsi? Kemungkinan pertama, kompetisi di antara para elite itu sangat keras. Mereka butuh konsolidasi kekuasaan. Sementara di era sekarang, konsolidasi kekuasaan membutuhkan uang yang sangat banyak. Para elite itu sendiri sedang sibuk mengumpulkan uang, baik secara halal, ataupun tidak. Sebagian besar dari mereka terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan praktik korupsi itu.

Dalam kondisi ini, wajar saja jika di antara para elite itu ada semacam kesepakatan tidak tertulis untuk tidak saling membongkar. Apalagi korupsi elite tertentu diketahui oleh elite lainnya. Yang satu kebongkar, yang lainnya terancam terbongkar pula. Ada kerja sama saling menutupi praktek korupsi. Ini yang membuat mereka terkesan lembek atas pembongkaran isu korupsi.

Kemungkinan kedua, ada pembagian kerja secara tidak tertulis dalam setiap partai besar. Dalam partai itu, ada pihak yang bertugas mencari uang, dan ada pihak yang terus mengembangkan idealisme politik. Sebenarnya hanya sekelompok kecil elite saja yang terlibat dalam money politics. Namun politik di partai adalah politik jaringan. Jika kartu mati tokoh itu terbuka, yang akan buruk bukan hanya tokoh itu, tetapi juga keseluruhan partai.

Dalam kondisi seperti ini, tanpa disadari sang elite yang korup itu terpaksa dilindungi oleh jaringan politiknya. Jaringan politik itu tidak perlu melakukan pembelaan atas sang tokoh yang dituduh. Mereka cukup bekerja dalam diam dan pasif, sehingga semua inisiatif pembongkaran korupsi akan melemah dan hilang ditelan waktu.

Kemungkinan ketiga, di era reformasi, korupsi dilakukan secara gotong royong dan bersama. Kebebasan politik di era reformasi, membuat praktek korupsi juga semakin canggih. Mereka yang korup tidak memakan uangnya sendirian. Itu mungkin membuat sang koruptor akan dibunuh bersama-sama. Namun uang korupsi itu didistribusikan ke banyak tangan. Semua mendapatkan jatah secara proporsional sesuai dengan posisi dan kevokalannya.

Karena semua (mayoritas) mendapatkan bagian, maka mayoritas elite pula berkepentingan agar praktek korupsi ini tidak dibongkar. Mereka bukan tidak peka dengan isu korupsi, tetapi kebutuhan politik praktis

akan uang, demi lobi politik, sampai kepada gaya hidup, membuat mereka larut. Mereka memang tidak membela korupsi. Namun sikap pasif mereka sudah cukup membuat isu korupsi itu sulit atau mustahil terbongkar dalam proses hukum.

Korupsi memang sudah mengepung kita. Karena mata rantai korupsi sudah sedemikian rumit, dan melibatkan banyak tangan, darimana pemberantasannya harus dimulai? Jawaban yang paling bisa diterima adalah leadership dari pimpinan politik tertinggi.

Kini Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla menunjukkan gejala awal yang sangat membangkitkan optimisme bahwa korupsi tengah sungguh-sungguh diberantas. Dua tokoh ini kita harap bersedia menjadi martir bagi Indonesia yang bersih di masa depan. Sebagai imbalannya, jika berhasil, mereka berdua kelak akan ditulis sejarah dengan tinta emas. **

Drama Panjang di KPU

Bagaimanakah kasus penyelidikan korupsi di KPU itu akan berakhir? Ibarat drama, bagi sembilan akademisi yang menjadi anggota KPU, akankah kasus itu berakhir happy ending? Atau sebaliknya kasus itu berakhir sebagaimana layaknya drama tragedi?

Kisah di KPU berakhir happy ending jika pada akhirnya sembilan anggota KPU itu bebas dari kesalahan. Katakanlah, semua prasangka, bahkan tuduhan dan pengadilan pers yang memojokkan mereka tidak terbukti. Memang benar, sebagian atau keseluruhan dari mereka menerima dana di luar gaji. Namun, mereka memang patut diduga tidak mengetahui asal-usul dana itu. Publik memaafkan mereka.

Atau, sebaliknya, akhir drama itu adalah tragedi bagi sembilan akademisi KPU, karena semakin terkuak bukti yang memberatkan mereka. Berbagai alat bukti yang sah secara hukum diumumkan ke publik. Ada

bukti, mereka bukan saja menerima honor di luar gaji yang diklasifikasikan “uang recehan”. Terbukti pula secara meyakinkan, mereka menerima dana yang selama ini dituduhkan sekitar satu miliar rupiah, yang diambil dari dana taktis 20 miliar rupiah itu.

Bukti itu membuat sembilan akademisi dihukum publik dua kali. Hukuman pertama diberikan karena sembilan akademisi disalahkan menerima dana sangat besar yang seharusnya diketahui bahwa sumber dana itu dari “pat gulipat” praktik mark-up dan korupsi.

Hukuman kedua, sembilan akademisi itu dituduh pula melakukan kebohongan publik. Berulang-ulang, mereka membantah menerima dana taktis yang dituduhkan, padahal akhirnya semua tuduhan itu terbukti.

Tentu saja praduga tidak bersalah harus menjadi nada dasar dari semua persepsi publik mengenai sembilan akademisi anggota KPU. Sebelum dibuktikan bersalah, mereka harus dipersepsikan sebagai tidak bersalah. Persepsi itu penting ditekankan bukan saja karena ia bagian dari proses hukum, namun memang secara faktual sembilan akademisi itu masih mungkin memang sama sekali tidak bersalah.

Publik luas saat ini terbagi dalam dua kubu menyikapi kasus yang menimpa sembilan akademisi. Untuk mudahnya, sebut saja kubu pertama adalah kubu oposisi yang berpendirian sembilan akademisi anggota KPU itu bersalah. Sementara kubu kedua

adalah kubu pendukung yang berpendirian sembilan akademisi anggota KPU tidak bersalah. Dua kubu itu bersilang pendapat tentang dua hal: pertama, apa yang seharusnya kini dilakukan anggota KPU; kedua, sikap atas bukti yang saat ini sudah diketahui publik.

Kubu oposisi berpandangan sembilan akademisi anggota KPU itu seharusnya mengambil langkah “act of statemanship”: atau langkah kenegarawanan. Mereka membayangkan, sembilan anggota KPU itu tampil membuat pengakuan bersalah secara publik.

Secara bersama mereka mengundang konferensi pers, membeberkan semua yang mereka ketahui apa adanya, dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi sambil berjanji mengembalikan semua dana yang diperoleh di luar gaji resmi.

Kubu ini beranggapan, secara hati nurani sudah selayaknya sembilan akademisi anggota KPU itu mengetahui asal-usul dana yang mereka terima di luar gaji. Mereka diharapkan tidak perlu membela diri tidak tahu menahu bahwa sumber dana itu adalah dana taktis. Sebagai akademisi yang sebagian sudah bergelar doktor, apalagi ada pula yang berlatar belakang disiplin hukum, publik percaya mereka tidak selugu itu.

Publik akan mengapresiasi jika sembilan akademisi itu justru membantu membongkar skandal dana taktis itu. Hal yang biasa di negara demokrasi yang sudah mapan jika figur publik membuat kesalahan, mengakuinya dan

kemudian minta maaf. Jika perlu mereka mundur dari anggota KPU atas inisiatif sendiri. Secara hukum tentu mereka akan tetap diproses. Namun, sentimen publik akan memaafkan mereka dan pada waktunya dapat tampil kembali sebagai figur publik yang diapresiasi.

Sebaliknya kubu pendukung memiliki harapan yang berbeda. Menurut kubu itu, adalah kebodohan besar jika sembilan anggota KPU itu meminta maaf secara publik atas dana taktis yang mungkin mereka terima. Walau mereka berlatar belakang hukum dan doktor, mereka memang berkemungkinan tidak tahu menahu sumber dana taktis itu.

Pengakuan Hamid Awaludin dianggap kubu ini sebagai langkah maksimal yang sudah dikerjakan. Yaitu, mereka mengakui menerima dana, tetapi itu prosedural, dalam jumlah kecil dan normal.

Tak perlu pula sembilan akademisi itu mengakui menerima dana sekitar satu miliar itu. Seandainya mereka menerimanya secara bertahap, bukan kewajiban mereka untuk menyatakannya secara publik. Itu adalah kewajiban pihak investigator. Wajar jika sembilan akademisi itu bertindak secara “self-interest” saja, mengakui apa yang sudah dibuktikan di publik, namun menginterpretasikannya secara berbeda. Singkatnya, menurut kubu pendukung, sembilan anggota KPU tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan yang justru akan menjebloskan mereka sendiri.

Dua kubu itu juga berbeda dalam menilai kualitas bukti yang sudah diberitakan media massa. Kubu oposisi beranggapan semua bukti yang ada sudah memberatkan sembilan akademisi anggota KPU itu. Menurut kubu itu, semakin hari semakin banyak bukti hukum yang terkuak yang justru semakin membuat malu sembilan anggota KPU jika mereka terus-menerus membantahnya.

Saat ini baik Presiden, KPK, BPK ataupun tim Jaksa Agung sedang ingin punya prestasi besar. Mereka akan berlomba-lomba, bahu-membahu agar dikenang serius membongkar korupsi. Mereka sudah menemukan partner paling berharga, yaitu biro keuangan KPU yang mulai “bernyanyi”. Sebagai birokrat yang berpengalaman, tentu ia selaku biro keuangan memiliki catatan rapi mengenai semua dana yang diterima dan pengeluarannya.

Birokrat ulung di era Orde Baru ataupun era Reformasi sepenuhnya paham bahwa mereka acap kali dijadikan korban dari kesalahan politisi. Hal yang lumrah jika sejak awal mereka sudah menyiapkan semua bukti, mereka hanya melaksanakan perintah. Kubu oposisi yakin sekali, akan semakin banyak bukti yang sah secara hukum dan membuat merah telinga sembilan akademisi anggota KPU.

Karena keyakinan itu pula, kubu oposisi menyarankan sebaiknya

Dua Partai Kebangkitan Bangsa

Penulis membayangkan Gus Dur, Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, duduk satu meja. Mereka ditemani beberapa kiai khos yang sangat dihormati baik di kalangan PKB ataupun NU. Demi kebesaran PKB dan stabilitas politik di Indonesia, mereka membuat kesepakatan tertulis, yang ditandatangani bersama, yang bersifat win-win solution bagi semua pihak yang bertikai.

Kesepakatan itu dipublikasikan, agar semakin membuat pihak yang bertikai itu menjalankannya. Adapun bentuk kesepakatan sangatlah unik. Mungkin ini bentuk elite settlement yang pertama di Indonesia

dengan power sharing yang tidak pernah ada presedennya.

Muhaimin Iskandar dan Saifullah Yusuf sendiri yang mengumumkannya. Secara bergantian, mereka mengumumkan persatuan PKB kembali. Disepakati paruh pertama kepengurusan, yang menjadi ketua Dewan Syuro dan ketua umum PKB adalah dari kubu Gus Dur- Muhaimin Iskandar. Kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf menjadi wakilnya. Di paruh kedua kepengurusan, secara otomatis posisi berganti.

Yang menjadi ketua Dewan Syuro dan ketua umum PKB dari kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Kubu Gus Dur- Muhaimin Iskandar secara otomatis menjadi wakilnya.

Itulah solusi paling “liar” yang bisa ditemukan untuk mempersatukan PKB. Di luar solusi itu, dua versi PKB akan saling tarung, baik secara hukum ataupun politik. Karena dua versi PKB itu sama kuat, tidak ada pemenangnya. Yang ada semua kalah karena ditinggalkan oleh komunitasnya sendiri.

PKB menjadi contoh ekstrem gagalnya pelembagaan partai politik setelah tujuh tahun gerakan reformasi. Dilihat dari potensinya, sebenarnya PKB termasuk partai yang sangat penting bagi konsolidasi demokrasi di akar rumput.

Dibanding semua partai lain, hanya PKB yang

potensi menyalurkan suara komunitas Islam terbesar di NU. Pemahaman Islam di NU juga sangat moderat, yang dapat menyatu dengan pluralisme Indonesia.

PKB menjadi satu kaki yang penting untuk partnership mengelola pemerintahan. Dukungan dan kesertaan PKB dalam pemerintahan segera dapat membuat pemerintahan tersebut bersinergi dengan ratusan pesantren dan jutaan warga negara yang hidup dalam kultur NU. Demokrasi yang awalnya menjadi benda asing segera lebih mudah berakulturasi dengan kultur Islam di wilayah pedesaan ataupun perkotaan melalui PKB.

Namun, tentu saja PKB yang dimaksud di sini adalah PKB yang solid. Ia solid karena mendapatkan dukungan penuh dari elite dan warga NU yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara. PKB juga hanya solid jika ia didukung secara total oleh para politisi terbaik yang sejak sepuluh sampai lima tahun terakhir sudah malang-melintang dalam kultur politik NU.

Soliditas PKB dan NU awalnya sangat terjaga karena peran sentral Gus Dur. Sepuluh tahun silam, Gus Dur adalah matahari tunggal yang dihormati banyak kalangan. Bagi warga NU, Gus Dur adalah pewaris darah biru yang sangat intelektual. Sementara bagi para akademisi, politisi, civil society kala itu, Gus Dur juga menjadi guru bangsa yang banyak diharapkan. Ketika menjadi presiden, di masa awalnya, tiga kekuatan sekaligus dirangkul Gus Dur: PKB, NU dan civil society modern.

Namun, pelan-pelan matahari Gus Dur mulai redup. Sebagian disebabkan oleh daya tahan Gus Dur sendiri akibat sakit yang dideritanya. Ditambah lagi, banyak kasus dan gosip yang beredar mengenai Gus Dur yang membuatnya semakin jauh dari citra guru bangsa. Puncak dari persoalan politiknya, Gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden. Berlanjut lagi, Gus Dur dikalahkan pula dalam pertarungan elite NU sesudah terpilihnya Presiden susilo Bambang Yudhoyono.

Kini pamor Gus Dur semakin redup karena banyak kiai khos yang mulai meninggalkannya. Dulu ketika Gus Dur berkonflik dengan Hasyim Muzadi, dengan lantang Gus Dur mengatakan kekuasaan riil NU tidak ditentukan oleh pengurus struktural NU. Yang didengar NU adalah para kiai waskita, para kiai khos yang berada di belakangnya. Kini kalimat itu tidak dapat lagi diucapkan Gus Dur. Bahkan kiai khos juga mulai meninggalkan Gus Dur.

Sementara di level politisi PKB, tidak semua elite terkemukanya yang masih setia kepada Gus Dur. Muhaimin Iskandar, Ali Masykur Musa, dan Effendi Choirie masih menemani dan mengikuti Gus Dur. Namun, kini semakin muncul barisan politisi lain yang sudah siap menyatakan “tidak” kepada Gus Dur. Barisan itu dipimpin saifullah Yusuf, AS Hikam, Khofifah Indar Parawansa, dan Alwi shihab sendiri.

Posisi Saifullah Yusuf dan Alwi shihab menjadi kuat secara politik karena di samping menjadi menteri pemerintahan, mereka juga dekat dan didukung oleh kiai

khos. Posisi mereka bertambah kuat lagi karena aturan yang diterapkan menteri kehakiman juga cenderung memperkokoh PKB versi Alwi shihab-saifullah Yusuf.

Banyak pihak dirugikan jika konflik PKB berlarut-larut. semakin hari semakin sulit bagi akademisi, pengamat, dan publik luas menyebut PKB tanpa keterangan lanjutan. Jika PKB disebut, harus ditambahkan pula itu PKB versi siapa? Apakah itu versi Gus Dur-Muhaimin ataukah versi Alwi-saifullah?

Calon kepala daerah di wilayah yang didominasi oleh PKB saat itu sangat tidak diuntungkan. PKB versi siapa yang berhak mencalonkan? Konflik internal PKB dapat ikut memprovokasi konflik di beberapa daerah akibat ketidakjelasan posisi calon. Para pendukung calon kepala daerah PKB dari dua versi itu dapat pula terlibat konflik massal yang emosional.

Namun, yang paling dirugikan oleh konflik yang semakin parah itu adalah konsolidasi demokrasi di Indonesia sendiri. Bagaimanapun, PKB selama ini diharapkan menjadi penyalur aspirasi grass-root komunitas NU yang merupakan representasi umat Islam terbesar. Dukungan NU melalui PKB membuat hubungan Islam dan demokrasi dapat bersenyawa lebih mudah.

Di NU dan PKB sudah berkumpul berbagai kiai waskita yang sangat dikenal ketinggian spiritualnya. Dalam komunitas PKB dan NU sudah bermunculan pula

para politisi profesional dengan jam terbang tinggi. Kini mereka dites untuk mencari solusi terbaik bagi PKB. Win-win solution dan kerelaan untuk sedikit mengalah dalam rangka kepentingan bersama adalah sikap mental yang dibutuhkan. Semoga dalam waktu dekat kita akan mendengar berita baik rujuk PKB. **

Gelombang Pertama Kepala Daerah

Bulan Juni 2005 yang baru saja berakhir akan menjadi monumen sendiri bagi laboratorium demokrasi di Indonesia. Dibandingkan bulan lainnya, Juni 2005 adalah bulan pertama dan momen paling banyak yang menghasilkan kepala daerah hasil pemilihan langsung. Pada Juni 2005 sudah terpilih ratusan bupati dan wali kota baru serta beberapa gubernur.

Kepala daerah yang baru terpilih akan kurang bergantung pada DPRD karena mereka tidak lagi dipilih oleh DPRD. Sangat mungkin kepala daerah yang baru juga kurang bergantung pada partai. Mereka mengetahui, peran partai di era pemilihan langsung sangat minimal. Partai hanya memberikan tiket untuk

dapat ikut kompetisi pilkada. Namun, yang menentukan kemenangan bukan lagi partai, tetapi ratusan ribu bahkan jutaan pemilih.

Dalam sejarah politik Indonesia, belum ada kepala daerah yang dipilih secara langsung. Para gubernur, bupati, dan wali kota yang baru saja terpilih pada Juni 2005 harus mengembangkan inovasi dan improvisasinya sendiri, karena tidak ada referensi sebelumnya. Namun, berdasarkan studi perbandingan dengan negara lain yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung, dapat diidentifikasi dua problem seketika yang akan mereka hadapi, di antara problem lainnya.

Problem pertama adalah tantangan yang disebut dengan paradoks demokrasi. sistem demokrasi memberikan kemungkinan kepada semua pemimpin untuk menjadi pemerintah dengan memenangkan pemilu. Maka meraih suara terbanyak dalam pemilu adalah satu-satunya mekanisme untuk memerintah sebuah negara demokrasi. sejauh dibenarkan oleh hukum, seorang pemimpin akan melakukan aneka hal untuk mendapatkan suara terbanyak.

Menjadi soal jika wilayah pemilihan itu, baik kabupaten ataupun provinsi, adalah teritori yang plural dengan sentimen primordial yang pekat. Para pemimpin akan terdorong pula memainkan sentimen primordial untuk pertarungan politik. Ini yang terjadi misalnya di Bosnia. Ada partai yang sengaja mengambil

hati komunitas Serbia, Ada partai pula yang sengaja mengambil perhatian komunitas Muslim. Ada pula partai yang memainkan sentimen Kroasia. Akibatnya, masyarakat politik terbelah menjadi pendukung Serbia, Muslim, dan Kroasia.

Kasus Bosnia jelas sangat rentan. Dengan sedikit picu, terjadilah konflik etnis dan agama. Mayoritas pemimpin dan partai bahkan larut dan memperdalam konflik komunal itu. Itulah paradoks demokrasi. Kebebasan yang ada di era awal reformasi dan pemilu justru menjadi pemicu politik primordial yang telah membunuh ratusan nyawa serta perkosaan massal secara mengerikan.

Hal yang sama terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Itu negara plural yang terdiri atas banyak wilayah dengan identitas penduduk yang berbeda. Kebebasan yang ada di awal Perestroika dan Glasnost justru menimbulkan kembali sentimen nasionalisme lokal. Paradoks demokrasi kembali terjadi. Letupan kebebasan yang ada justru membuat negara yang bersangkutan terpecah-belah menjadi banyak negara. Tak tanggung-tanggung, Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara independen.

Banyak negara demokrasi baru, sebagaimana Indonesia, yang tidak mempersiapkan diri menghadapi paradoks demokrasi itu. Afrika selatan adalah contoh negara yang sangat siap. sejak awal para pemimpin Afrika selatan, dibantu ahli demokrasi kenamaan Arent Lijphart, menyusun konstitusi baru yang sensitif atas politik komunal itu. Apa pun hasil pemilu, keragaman

etnis itu terwakili dalam pemerintahan bersama. Peralihan dominasi kekuasaan dari kulit putih ke kulit hitam di Afrika selatan dapat berlangsung secara relatif damai.

Indonesia berada di tengah. Kasus Indonesia tidak seburuk Bosnia atau Uni Soviet, namun tidak pula sebaik Afrika selatan. Dalam pemilu pertama, relatif konflik komunal dapat diatasi. Di tingkat elite terjadi negosiasi dan kesepahaman bagaimana kekuasaan baru didistribusikan. Namun di tingkat massa, konflik komunal itu terjadi secara berdarah. Tak ada jaminan elite tidak akan memainkan kembali kartu politik primordial itu. Banyak daerah di Indonesia yang belum melewati masa aman atas paradoks demokrasi.

Di beberapa provinsi dan kabupaten yang baru saja usai dengan pilkada, sentimen primordial itu dimainkan secara agresif. Isu putra daerah, misalnya, sengaja didengung-dengungkan untuk menyingkirkan calon yang bukan berasal dari daerah itu. Atau isu sukuisme dan agama juga ditonjolkan untuk meningkatkan popularitas calon. Namun, kepentingan jangka pendek itu dapat berakibat fatal berupa rusaknya sendi pluralisme dan harmoni masyarakat yang beragam. Tantangan bagi kepala daerah baru di daerah yang primordialnya kuat adalah merekatkan kembali komunitas yang plural tersebut.

Problem kedua bagi kepala daerah baru adalah

kurangnya komitmen para pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis. Tidak semua pemimpin yang terpilih secara demokratis ingin mengkonsolidasikan demokrasi. Untuk tingkat nasional, misalnya, adalah kasus Hitler dan Partai Nazi yang juga dipilih secara demokratis. Namun, mereka justru menghancurkan demokrasi dan membawa dunia ke perang yang maha kejam.

Presiden Fujimori dari Peru terpilih secara demokratis. Namun, Fujimori memberangus pers dan mengekang parlemen. Boris Yeltsin terpilih secara demokratis. Tak lama kemudian, Yeltsin membubarkan Duma, Parlemen Rusia. Presiden Gus Dur terpilih secara demokratis. Tetapi, Gus Dur mengeluarkan Dekrit yang membekukan MPR/DPR dan Partai Golkar.

Mereka yang berada di pucuk kekuasaan sekarang memiliki peran yang sangat strategis, baik untuk membangun demokrasi atau menghancurkannya secara perlahan. Godaan kekuasaan memang sangat besar. Pribadi yang lernah akan mudah goyah dan melakukan apa saja untuk tetap bertahan dalam kekuasaannya. Dapat pula pribadi yang bersangkutan kekurangan visi tentang bagaimana seharusnya pemerintahan demokratis dibangun.

Ratusan kepala daerah baru yang terpilih pada Juni 2005, dan bulan berikutnya akan menghadapi tantangan yang sama. Walau mereka berada di kekuasaan itu karena prosedur dan prinsip demokrasi, mereka akan tergoda untuk mengingkari prinsip demokrasi itu

ketika sudah terpilih. Apalagi jika prinsip demokrasi itu kelak banyak mengganggu pemerintahannya, seperti kerasnya kontrol pihak oposisi, pers, LSM, dan mahasiswa. Gangguan itu akan semakin dirasakan oleh kepala daerah yang kelak bermasalah dengan prestasi dan kinerja pemerintahannya.

Ratusan kepala daerah gelombang pertama yang terpilih pada Juni 2005 ini akan menjadi trend-setter. Berhasil atau tidaknya eksperimen pemilihan langsung di Indonesia akan merujuk kepada prestasi mereka nanti. **

Pemerintah dalam Kontroversi Fatwa MUI

Dua kubu itu sama-sama memahami agama Islam, dan kita asumsikan sama-sama ingin memajukan Islam di Indonesia sebagai percontohan di Asia Tenggara bahkan di dunia. Kubu pertama adalah para kiai yang dihormati di MUI. Kubu kedua adalah para kiai yang juga dihormati beserta cendekiawan seperti Gus Dur dan Masdar Mas'udi. Di kubu MUI banyak yang menjadi pimpinan ormas Islam terbesar NU. Namun, Gus Dur dan Masdar Mas'udi juga pimpinan ormas terbesar NU. Gus Dur sendiri bahkan oleh banyak pendukungnya dianggap “jimat” NU.

Dua kelompok itu berbeda sangat diametral mengenai fatwa yang baru saja dikeluarkan MUI. Yang satu mengharamkan banyak hal seperti ajaran

Ahmadiyah, liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan melarang mengamini pemimpin agama lain dalam doa bersama. Sementara kubu yang satu lagi menentang fatwa pengharaman itu dan menganggapnya sebagai langkah mundur.

Publik luas bertanya. Mengapa dua kubu yang sama-sama ahli Islam, membaca buku suci yang sama, menjadi pimpinan ormas Islam terbesar yang sama, namun berbeda pendapat mengenai fatwa yang sangat substansial itu? Bagaimana pula pemerintah seharusnya berperan dalam kerangka demokrasi konstitusional menghadapi perbedaan pemahaman agama di masyarakat?

Perbedaan paham agama dalam perspektif sejarah dan kasus dunia tidak hanya terjadi di komunitas Islam. Begitu banyak tokoh yang cerdas pandai dan memiliki komitmen dengan agama yang dipeluknya juga saling berbeda. Itu sebabnya mengapa misalnya agama Kristen, Hindu, Buddha dan Islam sendiri saat ini terbagi-bagi dalam banyak sekali kelompok pemahaman.

Di Amerika serikat sendiri misalnya, ada sampai ratusan kelompok pemahaman agama Kristen yang memiliki gerejanya sendiri. Komunitas agama Islam di AS juga terbagi dalam banyak kelompok mulai dari kelompok sunni, syiah, Ahmadiyah, Nation of Islam, Rasyad Khalifah, Black Moslem, dan sebagainya.

Respons atas keberagaman itu juga beragam. Ada kelompok yang menganggap hanya pemahaman

kelompoknya yang diridai dan pemahaman kelompok lain dianggap penyimpangan. Ada kelompok yang ingin lebih jauh lagi menganggap pemahaman kelompok lain sebagai kejahatan. Namun tidak sedikit pula yang merasa bahwa perbedaan itu tidak terhindari dan sebaiknya hidup bersama secara berdampingan.

Mengapa konflik atas ratusan bahkan ribuan pemahaman agama di AS itu sangat minim tingkat kekerasannya? Jawabannya adalah peran pemerintah yang sangat tegas dalam menjalankan konstitusi negara demokrasi .

Ada empat prinsip yang seharusnya pemerintah pegang dalam menghadapi keberagaman pemahaman agama warga negara. Pertama, pemerintah mencoba melindungi keberagaman itu dan mencantumkan hak warga negara untuk beragam dalam konstitusi negara. Negara dengan penduduk yang sangat besar dan heterogen, mustahil hanya memiliki satu paham agama. Apalagi di era modern yang sangat terdiversifikasi, perbedaan pemahaman agama tidak bisa dicegah oleh kekuatan mana pun.

Keberagaman itu dianggap kenyataan sosiologis yang eranya sudah datang. Ratusan bom atom dapat dikerahkan untuk mencegahnya. Jutaan polisi dapat dikerahkan untuk menahannya. Jutaan ahli agama dapat dikerahkan untuk menangkalnya. Namun, seperti dikatakan pepatah, tidak ada yang lebih kuat dari

sebuah realitas yang waktunya telah datang.

Desainer politik modern tidak punya pilihan lain selain mengakomodasi keberagaman itu dan melindunginya. Memiliki persepsi mengenai metafisika, Tuhan, rasul, tujuan hidup, adalah hak paling dasar warga negara. Kepercayaan terhadap suatu iman dan pandangan metafisika tidak dapat dipaksakan.

Kedua, pemerintah tidak ikut campur dan tidak memihak dalam perbedaan pemahaman itu. Setiap komunitas pemahaman tidak terhindari menganggap hanya pemahamannya yang benar. Tak terhindarkan pula pimpinan komunitas itu perlu memberikan pedoman kepada pengikutnya untuk mengkonfirmasi kebenaran pemahaman kelompoknya dan kesalahan pemahaman kelompok lain.

Karena setiap pemahaman memiliki komitmen yang kuat menyelamatkan dunia dan manusia, tidak jarang masing-masing komunitas itu ekspansi dan mempengaruhi kelompok lain untuk meninggalkan pemahaman agamanya atau bahkan menukar imannya. Dalam masyarakat yang lebih keras lagi tingkat konfliknya, tindakan saling mengharamkan antarkomunitas dan pimpinan komunitas itu terjadi.

Namun, pemerintah dalam sistem demokrasi berdiri di tengah. Pemerintah tidak membela salah satu komunitas dan menyalahkan komunitas lainnya. Yang dibela pemerintah hanyalah prinsip konstitusi. Sejauh tidak ada yang menyalahi konstitusi, pemerintah

tidak pernah ikut campur mengharamkan atau melarang eksistensi pemahaman agama mana pun. Sekali pemerintah memihak sebuah komunitas dan meninggalkan prinsip konstitusinya, pemerintah itu justru memulai bencana.

Ketiga, intervensi pemerintah terhadap keberagaman pemahaman agama hanyalah dalam upaya menjalankan hukum yang berlaku saja. Pemerintah membolehkan setiap kelompok membuat panduan bagi umatnya dan mempublikasi panduan itu. Namun pemerintah mencegah dan menghukum siapa pun yang melakukan kekerasan untuk memaksakan pemahamannya sendiri. Sekali pemerintah membiarkan kekerasan terjadi, dasar dari konstitusi modern dikhianati oleh pemerintah sendiri. Pemerintah akan kehilangan wibawa.

Untuk melindungi konstitusi dan hukum pula, pemerintah dapat melarang sebuah pemahaman agama jika mengarah kepada tindakan kriminal dan pornografi saja. Misalnya, ada sekte yang menumpuk senjata dan menciptakan polisi bagi komunitasnya sendiri. Atau ada sekte yang mempraktikkan seks bebas bagi anak-anak di bawah umur. Intervensi itu dilakukan bukan karena pemerintah ingin terlibat dalam pemahaman agama tetapi melindungi hak warga negara dari potensi kekerasan pihak lainnya.

Keempat, pemerintah juga membedakan kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Untuk kehidupan publik (wilayah publik atau public sphere), harus ada

konsensus bersama mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Konsensus itu dibangun berdasarkan prinsip kesamaan warga negara dan diikat dalam aturan hukum nasional. Misalnya, semua warga negara, apa pun pemahaman agamanya, dan apa pun warna kulitnya memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas negara.

Namun, untuk kehidupan pribadi masing-masing warga negara, pemerintah membiarkan warga itu sendiri yang menentukan. Warga negara itu dibolehkan memiliki gagasan apa pun, atau mempercayai pemahaman agama apa pun sejauh tidak melakukan kekerasan dan tidak mengerjakan tindakan kriminal.

Pro dan kontra fatwa MUI tidak terhindari sebagai bagian dari keberagaman persepsi warga negara Indonesia modern. Yang penting, pemerintah berkomitmen hanya menundukkan diri kepada konstitusi negara yang melindungi keberagaman pemahaman agama warga negara. **

Tambahan Menteri untuk Golkar?

Belakangan ini komunitas politik agak dibingungkan oleh aneka pernyataan politik Partai Golkar. Terhadap isu yang sangat panas seperti reshuffle kabinet para petinggi Golkar memberikan respons yang berbeda bahkan bertentangan. Respons Golkar itu dapat diklasifikasi dalam tiga sinyal.

Pertama, respons yang mendukung reshuffle kabinet. Bahkan respons ini mendesak presiden untuk melakukan reshuffle secepatnya, tidak perlu menunggu bulan Oktober 2005. Alasan yang dikemukakan Golkar punya komitmen dengan membaiknya kinerja pemerintah, sekaligus berharap ada tambahan menteri bagi Golkar. Selama ini Golkar “pasang badan” menjaga dukungan parlemen bagi aneka kebijakan sulit pemerintah.

Kedua, respons yang pasif. Karena tahu, presiden saat ini datang dari kultur Jawa yang banyak tepo seliro dan sopan santun presiden diduga sangat susah mengganti menteri. Respons ini menganjurkan sebaiknya para menterinya saja yang mengundurkan diri. Fungsi menteri adalah meringankan presiden. Namun, beberapa menteri saat ini justru sudah menjadi beban presiden. Langkah paling terhormat buat mereka adalah mundur saja. Presiden tidak perlu didesak melakukan reshuffle.

Ketiga, respons yang menolak reshuffle kabinet. Fokus utama pergantian menteri yang banyak dipercakapkan di bidang perekonomian dan keuangan. Kurs rupiah melemah. Subsidi BBM akan dikurangi. Alasan yang diungkapkan semua problem ekonomi itu adalah permasalahan global. Isu itu sama sekali tidak terkait dengan kinerja kementerian ekonomi dan keuangan, walau efek dari ekonomi global itu sangat terasa pada ekonomi Indonesia. Reshuffle kabinet dianggap tidak menyelesaikan, tetapi justru menambah persoalan.

Perbedaan respons petinggi Golkar atas isu reshuffle itu mencerminkan fragmentasi politik di kalangan internal Golkar sendiri. Tuntutan reshuffle awalnya dinyatakan oleh sebagian para pengurus struktural Golkar.

Sikap yang pasif diwacanakan oleh Muladi, yang lebih merupakan pandangan profesional sekaligus memahami karakter presiden. Sedangkan sikap menolak reshuffle

akhir-akhir ini dinyatakan oleh Andi Matalatta. Publik menghubungkan sikap Andi Mattalata itu selaras dengan ucapan Jusuf Kalla, tokoh paling berpengaruh di Golkar saat ini.

Kegamangan Golkar atas isu reshuffle kabinet itu sebenarnya refleksi dari posisi politik Partai Golkar sendiri. Di masa awal pemerintahan Yudhoyono-Kalla, sebelum Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum, Golkar adalah pemimpin oposisi di parlemen. Setelah Jusuf Kalla menjadi ketua umum, Golkar justru menjadi partai yang paling berpengaruh untuk mendukung kebijakan pemerintah di parlemen.

Ketika kabinet dibentuk, Yudhoyono-Kalla tidak memperhitungkan untuk mengakomodasi Golkar di posisi kementerian. Fahmi Idris dan Aburizal Bakrie direkrut sebagai menteri bukan dalam kapasitasnya mewakili Partai Golkar.

Mereka adalah individu yang dianggap justru bisa melawan keperkasaan Partai Golkar di parlemen. Fahmi Idris sendiri justru menjadi salah satu tokoh yang “memberontak” terhadap kebijakan resmi Partai Golkar yang mendukung Koalisi Kebangsaan.

Terpilihnya Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar mengubah kiblat politik partai. Perlahan tetapi pasti Koalisi Kebangsaan mati. PDI-P kini sendirian menjadi oposisi di parlemen. Golkar yang dulu menjadi partner politik PDI-P kini justru menjadi kompetitor

utamanya yang acap kali saling berhadap-hadapan.

Bukan PKS, PD, PKPI, atau PBB yang paling berpengaruh mendukung pemerintahan Yudhoyono-Kalla saat ini. Padahal, empat partai itu adalah partai yang semula menjadi koalisi utama Yudhoyono-Kalla. Kini partai utama yang melindungi Yudhoyono-Kalla di parlemen adalah Partai Golkar, partai yang dulu menjadi oposisi.

Naiknya harga BBM di awal pemerintahan Yudhoyono adalah contoh salah satu kebijakan tersulit. Saat itu untuk pertama kalinya, Yudhoyono-Kalla mengambil kebijakan tidak populer.

Jika DPR menentang keputusan pemerintah, politik nasional segera gonjang-ganjing. Saat itu, Golkar menjadi penyangga dan inisiator utama yang mempengaruhi parlemen untuk mendukung kebijakan BBM. Bahkan kini sebelum BBM dinaikkan kembali, Golkar juga sudah resmi mengumumkan dukungannya ke publik luas dan “pasang badan”.

Dibandingkan partai pendukung presiden lainnya, Golkar memang lebih mampu mempengaruhi dukungan parlemen. Di satu sisi, partai ini adalah partai terbesar. Di sisi lain, jam terbang politisi Golkar memang melampaui politisi partai lainnya. Mereka sangat memahami cara bermain yang “pas” dengan politik parlemen. Mereka menguasai pula sumber daya yang diperlukan dalam permainan itu.

Setelah sekian lama “pasang badang” di parlemen, tentu para politisi dan pimpinan Golkar bertanya, apa imbalan politiknya? Dalam politik praktis tidak ada yang gratis. Golkar adalah partai terbesar dan bukan sinterklas. Mereka sudah teruji dan terbukti menjalankan peran sebagai partai pemerintah, lebih dibandingkan partai lainnya.

Transformasi sebagai partai pemerintah dianggap belum dituntaskan. Kursi kementerian Golkar di pemerintahan eksekutif masih belum berubah. Transformasi kiblat politik Partai Golkar di parlemen diharapkan berlanjut juga dengan perubahan komposisi kementerian Partai Golkar di pemerintahan eksekutif.

Singkat kata, jumlah kursi kementerian untuk Partai Golkar diharapkan bertambah. Jika itu terjadi, lengkap sudah transformasi Partai Golkar selaku partai pemerintah.

Gagasan itu agaknya dihayati oleh hampir semua pimpinan Golkar saat ini. Namun, ekspresi dan pengungkapannya berbeda. Ada yang tegas, lugas, dan terbuka. Ada yang sedikit tersamar dan berbelok-belok. Perbedaan respons atas isu reshuffle kabinet saat ini juga dilandasi oleh sentimen yang sama, bahwa menteri Golkar harus dominan di pemerintahan eksekutif.

Mereka yang menolak reshuffle sebenarnya justru untuk melindungi tokoh Golkar yang sudah berada di puncak kebijakan ekonomi, posisi yang dianggap terpenting.

Bola sekarang ada di tangan Yudhoyono-Kalla. Dua tokoh ini dapat saja mempertahankan kabinet sekarang, mengubah sebagian atau merombak total sama sekali.

Transformasi Partai Golkar dari partai oposisi menjadi partai pemerintah memang harus diakomodasi. Jika tidak, Partai Golkar juga akan mengalami ketegangan internal, yang justru dapat mengurangi kemampuan dan kerelaannya dalam mendukung pemerintah di parlemen. **

Tes Bagi Duet Yudhoyono-Kalla?

Akankah duet Yudhoyono-Kalla semakin kuat, kompak dan harmonis? Masa sulit politik dan ekonomi dalam negeri menjadi pelezat dan pengalaman yang semakin menyatukan mereka? Ataukah sebaliknya, duet Yudhoyono-Kalla mulai mengalami friksi, perebutan peran, dan persaingan? Aneka gejolak politik dan ekonomi dalam negeri membuat pasangan ini semakin berpisah jalan?

Pertanyaan di atas kini menempati “tangga lagu” utama percakapan elite politik dan ekonomi di berbagai kesempatan. Penyebabnya, dua tokoh itu sendiri yang membuat aneka pernyataan publik dan tindakan yang mengundang banyak pertanyaan. Pernyataan dan tindakan lingkaran terdekat dua tokoh itu justru semakin pula menambah “bumbu” persoalan.

Pers mempublikasikan surat pendelegasian tugas presiden kepada wakil presiden selama presiden berada di luar negeri. Namun, pada waktu bersamaan, presiden sendiri yang memimpin pertemuan dengan para menteri melalui telekonferensi dari Amerika Serikat. Pertemuan itu lebih banyak tidak dihadiri oleh Jusuf Kalla.

Beberapa anggota DPR segera mengajukan interpelasi mengenai telekonferensi itu. Inisiator dari hak interpelasi diketahui publik adalah tokoh yang dekat dengan Jusuf Kalla. Bisa jadi itu hanya kebetulan. Namun spekulasi publik semakin merebak mengenai hubungan Yudhoyono-Kalla.

Sebelumnya, Yudhoyono menyatakan sedang mempertimbangkan reshuffle kabinet. Ia akan mengevaluasi para menteri yang tidak bisa bekerja sama. Respons presiden diberikan menanggapi permintaan banyak tokoh masyarakat yang kecewa dengan gonjang-ganjing rupiah dan tim ekonomi presiden.

Namun, tidak lama kemudian, Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan, tidak ada reshuffle kabinet. Yang ada hanya evaluasi. Gonjang-ganjing ekonomi yang menimpa Indonesia tidak ada hubungannya dengan kinerja tim ekonomi kabinet. Semua gonjang-ganjing itu adalah hukum pasar biasa akibat perkembangan ekonomi internasional.

Yudhoyono menyatakan, harga BBM hanya dinaikkan jika kompensasi kenaikan bulan Maret lalu sudah dibuktikan berjalan. Kompensasi berikutnya atas

kenaikan BBM juga harus disiapkan terlebih dahulu. Pendataan orang miskin dan mekanisme penyaluran kompensasi mesti rapi sebelum BBM dinaikkan kembali. Publik memperkirakan kenaikan BBM tidak dalam waktu dekat, tidak sebelum bulan puasa.

Namun, Jusuf Kalla bertindak cepat dan menyatakan BBM akan naik awal Oktober, sebelum puasa. Itu dianggap Jusuf Kalla momen yang tepat. Era puasa, umumnya masyarakat Muslim berhemat dari makan tiga kali menjadi dua kali.

Mayoritas awam agak bingung dengan perbedaan nuansa presiden dan wakil presiden. Sementara oposisi tidak kalah cepat bertindak. Fenomena itu segera “digoreng” untuk berbagai manuver politik.

Disosialisasikan isu bahwa presiden mulai tidak mempercayai wakil presiden. Lebih jauh dari itu, disosialisasikan pula isu wakil presiden sedang jajal “jimat” mengerahkan kekuatannya di DPR untuk memberi warning kepada presiden.

Yudhoyono sendiri merasa perlu membuat pernyataan yang cukup tegas, ia sangat mempercayai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tak ada kegiatan wakil presiden yang tidak diketahuinya. Begitu pula sebaliknya, berbagai kegiatan yang dibuat presiden diketahui pula oleh wakil presiden. Apa yang sebenarnya terjadi?

Tentu hanya dua tokoh itu, Yudhoyono dan Kalla

sendiri, yang persis tahu apa yang sebenarnya terjadi. Publik di luar hanya meraba dan memberikan opini. Dua tokoh itu tahu persis mereka ada dalam satu paket. Jika satu terpuruk akan membuat lainnya ikut terpuruk. Jika pihak yang satu berprestasi, juga akan ikut membuat pihak lainnya berprestasi. Secara ideal, dua tokoh itu adalah dwitunggal, memiliki persamaan kepentingan, komitmen dan berupaya untuk terus harmoni.

Namun, di samping persamaan, dua tokoh itu juga memiliki perbedaan, terutama dalam gaya kepemimpinan. Hal yang wajar saja jika terjadi perbedaan keduanya. Mereka datang dari latar belakang yang memang berbeda.

Yudhoyono datang dari kultur Jawa yang penuh dengan unggah-ungguh. Berbagai maksud dan pesan acap kali disampaikan dengan bahasa yang tidak langsung dan penuh sopan-santun.

Sedangkan Jusuf Kalla datang dari tradisi Sulawesi Selatan. Kultur Sulawesi Selatan lebih langsung dan terbuka dalam membuat pernyataan dan sikap. Maksud dan tujuan dinyatakan apa adanya, tanpa perlu diplomasi dan petatah-petitih.

Yudhoyono dididik dalam kultur tentara yang penuh disiplin dan mematuhi rambu-rambu. Ia hidup dalam kultur yang harus terus waspada dan berhati-hati. Ia bergerak lebih berdasarkan norma. Sementara Jusuf Kalla tumbuh sebagai seorang saudagar. Karakter yang muncul pada Jusuf Kalla lebih bertipe dealmaker dan

pragmatis. Asalkan prinsip sudah benar, tindakan harus cepat diambil. Masalah yang muncul akibat tindakan cepat itu dapat diurus kemudian.

Yudhoyono tipe seorang intelektual. Ia ingin masukan yang komprehensif dulu sebelum membuat keputusan. Segala hal diuji berdasarkan aneka konsekuensi yang muncul. Waktu dan respons publik luas diperhitungkan pula secara cepat.

Sementara Jusuf Kalla lebih bertipe seorang manajer perusahaan. Baginya waktu adalah kapital. Keputusan mengenai hal penting harus cepat diambil. Jika tidak, penundaan keputusan itu akan menjadi masalah tambahan.

Perbedaan gaya kepemimpinan Yudhoyono dan Kalla pada dasarnya dapat saling melengkapi. Kekurangan Yudhoyono ditutupi Kalla. Sebaliknya juga demikian, kekurangan Kalla ditutupi Yudhoyono.

Yang lebih mendasar dari gaya kepemimpinan adalah kekuatan politik dua tokoh itu. Sumber kekuatan politik utama bagi Yudhoyono adalah konstitusi dan dukungan rakyat. Ia berkuasa karena konstitusi mengatur demikian. Ia berkuasa karena rakyat memilihnya.

Namun, realitas kekuatan politik Yudhoyono dalam peta elite politik . tidak terlalu besar. Partai yang dikuasainya, Partai Demokrat, hanya memiliki amunisi 10 persen di parlemen. Tak ada pula massa yang fanatik atas Yudhoyono sebagaimana massa terhadap Megawati atau Gus Dur.

Sebaliknya, kekuatan Jusuf Kalla justru pada realitas politik elite. Di kalangan politik massa, Jusuf Kalla bukan tipe kepemimpinan rakyat yang bercorak *solidarity maker*. Tetapi, kini Kalla adalah ketua umum partai terbesar, Golkar. Lobi dari Kalla pula yang dapat menjinakkan parlemen dan memobilisasi pengusaha.

Wajar pula jika dua tokoh itu sesekali mengalami dinamika dan gesekan. Menghadapi isu besar yang berisiko, dua tokoh itu dapat memberikan respons yang berbeda. Seandainya mereka sudah sampai pada kesepakatan kebijakan, tetapi dapat pula berbeda mengenai waktu pelaksanaan.

Isu BBM dan penyelesaian Aceh kini memang menjadi ujian duet Yudhoyono-Kalla. Persoalan di Indonesia sudah sedemikian banyak dan berat. Demi kepentingan Indonesia yang lebih luas, semua berkepentingan agar duet ini semakin kompak dan harmoni. Semoga pula lingkaran terdekat dua tokoh itu justru tidak menambah rumit perbedaan gaya kepemimpinannya.**

Politik Setelah BBM Naik

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 1 Oktober 2005 segera menghidupkan kembali “kartu truf” oposisi. Akibat kenaikan harga BBM itu, dapat dipastikan transportasi umum juga segera naik. Semua harga barang pokok yang menggunakan jasa transportasi akan pula ikut naik. Mayoritas kelas menengah ke bawah semakin merasakan kesulitan hidup secara konkret. Kegelisahan, kekecewaan dan kemarahan publik luas menjadi “kartu truf” oposisi itu.

Tak lama setelah presiden mengumumkan secara resmi kenaikan BBM tanggal 1 Oktober 2005, dua peristiwa politik terjadi dan akan menjadi tren politik Indonesia pasca-kenaikan BBM akhir tahun.

Pertama, pertemuan Jusuf Kalla dengan Try Soetrisno. Publikasi cukup luas mengenai pertemuan itu adalah Try Soetrisno memahami kenaikan BBM (di samping soal RI-GAM), dan meminta publik luas tidak perlu meributkannya.

Kedua, pernyataan Gus Dur juga dimuat secara luas esok harinya. Gus Dur membantah Pak Try menyetujui naiknya harga BBM. Menurut Gus Dur, Pak Try punya niat baik bagi bangsa. Namun, niat baik itu dikesankan dan dibelokkan seolah-olah setuju kenaikan BBM.

Dua peristiwa itu hanya satu momen dari berbagai momen yang akan muncul pasca-kenaikan BBM. Polarisasi politik yang terjadi semakin jelas. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla di satu sisi. Di sisi lain adalah kelompok besar yang masih cair, yang kini dipimpin oleh Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung, Wiranto dan Try Soetrisno (jika ia belum berubah seperti yang diklaim Gus Dur).

Dua kubu politik ini segera membuat aneka manuver untuk memperebutkan dukungan pihak ketiga: parlemen dan publik luas. Naiknya harga BBM dapat membuat pihak ketiga itu menjadi bola liar dalam memberikan dukungan politiknya.

Sebelum kenaikan BBM, sangat jelas bahwa pemerintahan Yudhoyono-Kalla jauh lebih kuat dibandingkan kelompok manapun, termasuk kubu lima sekawan Megawati, Gus Dur dan lain-lain. Di parlemen,

dua tokoh ini mendapatkan dukungan mayoritas. Di luar parlemen, popularitas dua tokoh ini sudah teruji karena mereka terpilih secara langsung dengan angka yang cukup mencolok.

Namun, naiknya harga BBM dan keresahan publik luas dapat mengubah konstelasi politik, walau untuk sementara. Di parlemen, aneka partai dapat saja “bermain,” mengambil oposisi yang tegas terhadap pemerintahan Yudhoyono-Kalla mengenai isu BBM. Ujung dari manuver partai itu, boleh jadi hanya tekanan politik agar mendapatkan “kompensasi” dari pihak pemerintah.

“Kompensasi” yang dimaksud mungkin jatah menteri dalam kebijakan reshuffle kabinet. Atau mungkin pula kompensasi yang lebih langsung, yang banyak digosipkan publik luas sebagai money politics.

Kita tidak pernah pasti seberapa benar gosip politik uang yang mewarnai aneka kebijakan parlemen. Namun, manuver anggota parlemen dalam merespons BBM dapat membuat politik oposisi mendapatkan insentif.

Di luar parlemen, respon publik luas akan semakin panas. Mayoritas orang miskin pasti lebih tertekan lagi hidupnya setelah BBM dinaikkan. Mereka memang mendapatkan kompensasi langsung sebesar seratus ribu rupiah. Persoalannya, kapan kompensasi itu didapatkan. Seberapa besar pula jaminannya bahwa kompensasi itu tidak bocor dalam tradisi birokrasi Indonesia yang korup?

Di luar mayoritas masyarakat miskin, banyak pula kelompok masyarakat yang tidak menjadi target kompensasi. Upah bulanan mereka di atas UMR sehingga tidak terkena kebijakan kompensasi. Naiknya harga barang kebutuhan pokok akibat naiknya BBM, segera membuat kelompok ini semakin kekurangan.

Mereka adalah jutaan buruh, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan rakyat kecil lainnya. Mereka justru kelompok yang paling dinamik dalam politik praktis. Naiknya harga BBM menjadi picu yang membangunkan kelompok ini. Mereka dengan mudah menggabungkan aspirasi politiknya kepada oposisi.

Kini kubu oposisi potensial sangat powerful. Megawati dan Gus Dur tidak hanya mantan presiden. Mereka berdua masih mengontrol partai besar di parlemen. Dua tokoh ini juga memiliki massa yang fanatik. Jika dua tokoh ini konsisten bergerak, aktif dan memobilisasi massa, efek politiknya akan sangat terasa.

Peran dua tokoh ini akan sama signifikannya dengan mantan presiden Filipina Corry Aquino yang acapkali membawa masyarakat setempat beroposisi terhadap presidennya.

Akbar Tanjung, Wiranto dan Try Soetrisno juga tokoh bangsa yang masuk dalam kategori kelas wahid. Di samping sebagai mantan ketua DPR dan mantan ketua umum Golkar, Akbar Tanjung termasuk politisi yang memiliki jaringan paling luas. Wiranto dan Try Soetrisno menjadi akses kelompok ini untuk masuk ke

dalam lapisan purnawirawan dan tentara aktif.

Seberapa berhasil Megawati, Gus Dur dan kawan-kawan memobilisasi oposisi dengan menggunakan kasus BBM? Apa pula target politiknya?

Jika ekonomi normal dan seha4 Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan bisa dilukai. Mereka tentu tidak bisa dipecat hanya karena isu BBM. Mereka juga tidak bisa dipaksa melakukan reshuffle kabinet karena itu hak prerogatif presiden. Target politik apapun yang akan dibuat oleh oposisi tidak akan sampai pada sasarannya.

Namun, jika ekonomi gonjang-ganjing, dan rakyat banyak semakin menderita, tidak ada presiden Indonesia yang mampu bertahan. Walau oposisi tidak membuat target untuk menjatuhkan presiden, kondisi objektif itu sendiri akan menggiring ke sana. Semua alasan dan kasus untuk menjatuhkan presiden akan ketemu dengan sendirinya.

Bung Karno dan Pak Harto sampai saat ini adalah presiden Indonesia paling berjasa, paling berpengaruh dan paling kuat. Dua-duanya tumbang karena robohnya ekonomi negara. Yudhoyono-Kalla, walau kekuatan dua tokoh ini digabung, tidak sekuat Bung Karno atau Pak Harto.

Musuh terbesar Yudhoyono-Kalla memang bukan oposisi itu tetapi memburuknya kondisi ekonomi. Jika ekonomi memburuk, publik luas sendiri yang akan mengusung Megawati, Gus Dur dan lain-lain untuk

memimpin perubahan. Sebaliknya jika ekonomi normal saja, peran oposisi terbatas hanya untuk memberikan himbauan, kritik dan kontrol pemerintahan saja.

Naiknya harga BBM punya potensi keduanya. Ia bisa membuat ekonomi negara semakin sehat. Dana yang dimiliki pemerintahan untuk program pembangunan semakin banyak. Kepercayaan investor asing semakin tinggi bahwa pemerintah mampu membuat kebijakan yang tidak populer sekalipun.

Namun, kenaikan BBM dapat pula berakibat sebaliknya. Itu terjadi jika investasi asing tidak kunjung datang. Ekonomi tidak kunjung tumbuh. Fragmentasi politik semakin tinggi. Sementara publik luas semakin sengsara. Semoga negara kita tidak kembali mengalami bencana.

Semoga Negeri Ini Selamat!!!

Kesulitan yang menimpa negeri ini seolah susul-menyusul. Kesulitan yang diakibatkan naiknya harga BBM belum selesai diatasi, tiba-tiba meledak lagi bom di Bali. Berbagai upaya diplomasi untuk menarik masuknya investasi asing ke Indonesia segera porak-poranda.

Semoga negeri ini akhirnya selamat dari berbagai persoalan yang menyelimutinya. Jika tidak, negara kita bisa mengalami breakdown seperti Uni Soviet. Kesulitan yang ada melampaui ambang batas kekuatan negara itu untuk bertahan. Akibatnya, negara yang luas dan plural itu terpecah-belah menjadi beberapa negara. Kekerasan segera pula meluas mengikuti pecahnya sebuah negara.

Semoga masyarakat Indonesia masih kuat menghadapi semua kesulitan yang susul-menyusul. Jika tidak, akan lahir gerakan ketidakpuasan yang meluas. Masyarakat Indonesia akan berada dalam konflik berkepanjangan. Konflik itu tidak hanya berakar pada kesulitan ekonomi, namun segera bercampur dengan sentimen primordialisme yang berbahaya.

Semoga pemerintah Indonesia cukup kuat mengelola dan memberikan harapan. Jika tidak, pemerintahan ini segera pula porak-poranda. Kemarahan publik luas dengan cepat dapat mengikis habis legitimasi pemerintahan. Bahkan Bung Karno dan Pak Harto sekali pun tidak kuat menahan publik yang marah. Dua pemimpin besar itu pun tumbang.

Para politisi, pengusaha, tokoh masyarakat dan publik luas, kini harus memilih. Menghadapi kesulitan yang ada, apakah mereka bersatu dan menjadi solusi. Ataukah sebaliknya, mereka semakin berpisah jalan, konflik, saling mencari kesempatan, dan akhirnya justru menambah persoalan baru.

Banyak sekali persoalan yang muncul di Indonesia saat ini, muncul di luar kontrol politisi mana pun. Siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden, mereka menghadapi persoalan yang sama. Nasib buruk akan menimpa siapa pun yang terpilih sebagai presiden RI.

Tak lama setelah dilantik, Yudhoyono-Kalla segera menghadapi gelombang besar badai tsunami. Ini

bencana alam yang tidak hanya besar, tetapi terbesar dalam sejarah dunia modern. Jumlah angka kematian melampaui semua bencana alam yang pernah ada. Segera jumlah angka kemiskinan di Indonesia bertambah. Bencana tsunami ini juga akan datang, walau yang menjadi presiden adalah tokoh lain.

Belum selesai bencana alam diatasi, datang pula wabah penyakit susul-menyusul. Mulai dari penyakit polio, busung lapar dan flu burung. Efek dari penyakit itu adalah kematian dan penderitaan terutama bagi keluarga yang menjadi korban. Proses yang menyebabkan munculnya aneka wabah penyakit itu berada di luar urusan politik praktis. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden, juga akan menghadapi persoalan yang sama.

Belum selesai wabah penyakit diatasi, harga minyak dunia meroket. Sebab-musabab naiknya harga minyak dunia juga di luar kontrol politik domestik Indonesia.

Siapa pun yang menjadi presiden, segera menghadapi kesulitan yang sama. Anggaran negara berada dalam titik kritis. Sementara jika anggaran negara dibuat sehat, harga BBM harus naik. Aksi protes segera melanda negeri.

Baru saja harga BBM diumumkan naik. Penyesuaian publik luas terhadap harga BBM baru dilakukan, bom kembali meledak di Bali. Indonesia terdiri atas begitu banyak pulau. Kekuatan aparat keamanan sangat terbatas untuk memantau keseluruhan wilayah. Siapa pun yang menjadi presiden saat ini, juga akan

mengalami nasib yang sama. Bom potensial meledak di aneka tempat.

Sementara efek dari meledaknya bom tersebut sangat merugikan bagi kenyamanan investasi di Indonesia. Tanpa investasi mustahil dapat diciptakan lapangan kerja. Tanpa lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan yang ada akan bertambah. Level ketidakpuasan publik atas kondisi ekonomi segera menaik.

Tak ada kata lain untuk melukiskan situasi pemerintahan saat ini bahwa mereka memang sedang bernasib buruk. Banyak hal terjadi di luar kontrol mereka. Namun, efek kejadian itu sungguh besar dalam menurunkan legitimasi pemerintahan.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana merespons aneka persoalan di atas? Respons dapat berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Pada titik inilah leadership dan tokoh yang memerintah menjadi penting. Jika yang menjadi presiden dan wakil presiden adalah tokoh lain, mungkin respons kebijakan yang dilahirkan akan berbeda pula.

Tepatkah respons Yudhoyono-Kalla dalam menghadapi aneka bencana, mulai dari bencana alam, bencana penyakit, bencana BBM, sampai bencana teror? Dalam merespons krisis BBM sebagai misal, apakah memang naiknya harga minyak tanah sampai 185 persen adalah langkah yang bijak? Apakah pemberian uang tunai sebagai kompensasi adalah langkah yang tepat?

Jika yang menjadi presiden adalah tokoh lain, apakah ia akan melakukan tindakan serupa?

Kini perhatian publik luas terkonsentrasi kepada bom Bali. Isu itu mampu mengalihkan perhatian publik dari persoalan BBM, tetapi hanya untuk sementara.

Dibandingkan semua persoalan yang kini dihadapi Yudhoyono-Kallia, masalah BBM itu memang yang paling langsung berhubungan dengan rakyat banyak. Bom Bali lebih terkonsentrasi di Bali. Namun, masalah BBM menjangkau seluruh populasi Indonesia di seluruh wilayah.

Segera setelah daya pukau bom Bali selesai, BBM kembali menjadi isu utama. Harga barang kebutuhan pokok segera melonjak. Kehidupan publik luas semakin terasa berat, terutama bagi penduduk yang tidak mendapatkan kompensasi. Mereka kini ibarat rumput kering yang mudah sekali terbakar.

Satu-satunya kondisi yang dapat menahan akumulasi kemarahan publik luas adalah perekonomian nasional harus tumbuh. Namun bagaimana ekonomi dapat tumbuh sehat jika terus-menerus terganggu oleh isu keamanan? Bagaimana ekonomi dapat tumbuh jika muncul persepsi bahwa politik di Indonesia masih rawan?

Gejolak politik di bawah permukaan kini semakin panas dan liar. Berbagai isu mulai dikampanyekan.

Berbagai pihak memiliki persepsi dan kepentingannya sendiri. Mereka disamakan oleh kesempatan, menggunakan isu BBM sebagai pintu masuk. Ada yang tujuan utamanya hanya mengganti kementerian tertentu. Ada pula yang memasang target lebih jauh pergantian kepemimpinan nasional. Semua tahu, rakyat banyak kini sedang goyah.

Yang siap membuat manuver tidak hanya pihak yang berada di luar kekuasaan. Namun pihak yang kini bersama-sama pemerintah juga ikut bermain dalam rangka reposisi atau mendapatkan bagian yang lebih besar. Politik menjadi bola liar.

Semoga semua itu hanya gejala sementara saja. Jika gonjang-ganjing politik tidak terhindari, semoga negeri ini selamat. Kasihan nasib sekitar 200 juta manusia di Republik ini yang menjadi pertaruhan. **

**BAGIAN KEENAM
DUNIA
SETELAH PERANG IRAK**

Fondasi Politik AS

“Mereka memang mampu merobohkan fondasi gedung tertinggi di AS,” ujar Presiden Amerika Serikat George W Bush. “Tetapi mereka tidak bisa merobohkan fondasi negara kita.” Kata-kata itu keluar pada malam AS dilanda musibah teror yang terbesar sepanjang sejarahnya. Gedung kembar pencakar langit World Trade Center, dengan ketinggian hampir 500 meter, hancur lebur.

Pada satu sisi, pernyataan presiden itu berupaya membangun kembali spirit masyarakat AS yang merasa telah diperdaya secara telak oleh gerakan teroris. Namun pada sisi lain, pernyataan itu memang menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi fondasi kekuatan AS.

AS menjadi negara superpower bukan karena semata kehadiran gedung pencakar langit yang menjadi simbol

kemajuan ekonomi. AS menjadi negara terbesar juga bukan semata karena superioritas militer dan ilmu pengetahuannya. Fondasi negara AS, yang membuat maju adalah hal yang bersifat spirit. selama spirit itu tidak hancur, negara AS juga tidak akan hancur, walau ratusan gedung lainnya akan dirobohkan oleh serangan teroris berikutnya, Spirit itu yang harus kita contoh bagi kemajuan negara kita.

Milton Friedman, dalam bukunya yang terkenal, *Free to Choose*, mencari tahu apa yang menjadi spirit dan kekuatan dasar Amerika serikat (AS). Jawaban Friedman sangat menggugah. Keunggulan AS, menurut pendapatnya, karena negeri itu memberi ruang seluas-luasnya kepada kebebasan.

Para imigran yang datang ke tanah AS pada awal kelahiran bangsa ini, bukanlah para pencari tambang emas. Mereka adalah pelarian yang ingin menghindari dari tirani politik dan agama di negerinya masing-masing. Mereka sangat sensitif dengan cara pemerintahan otoriter yang telah membuat mereka terusir dari negerinya. Di tanah yang baru, di AS itu, mereka ingin membangun negeri dengan satu acuan, bagaimana membuat sistem pemerintahan yang melindungi kebebasan warganya? Bagaimana menghindari dari terbentuknya sentralisasi kekuasaan yang besar? Bukankah kekuasaan yang tidak terkontrol, yang dapat digunakan untuk untuk menciptakan kebaikan, dapat pula digunakan buat kejahatan?

Menurut Friedman, ada dua dokumen yang membantu bangsa ini membangun sistem yang bebas itu. Keduanya, terbit pada tahun 1776. satu, berjudul: *The Wealth of Nations*, yang dikarang Adam Smith. satu lagi, *Declaration of Independence*, yang disusun oleh Thomas Jefferson. Dua dokumen itu pada dasarnya argumen intelektual tentang kebebasan.

The Wealth of Nations menelurkan kebebasan individu dalam berekonomi, yang kemudian menjadi dasar dari revolusi kapitalisme sampai saat ini. Individu harus dibebaskan membuat kontrak dengan individu lain secara sukarela (*voluntary exchange*). Kebebasan sukarela itu satu-satunya jaminan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mendapatkan keuntungan dari kontrak itu. semakin banyak kontrak yang terjadi di masyarakat, semakin banyak individu yang diuntungkan. semakin banyak individu yang diuntungkan, semakin tinggi keuntungan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sistem seperti itu, fungsi pemerintah sangat minimal. Pemerintah harus membiarkan masyarakat mengatur ekonominya sendiri, dan hanya terlibat jika diperlukan, misalnya, ada pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak itu karena ditipu. Dalam ekonomi klasik, pemerintah dibutuhkan hanya dalam kasus gagalnya mekanisme pasar (*market failure*), seperti untuk mencegah monopoli, *eksternalities*, menyediakan *public goods*, *perfect information*, dan membuat hukum.

Sedangkan *Declaration of Independence*

menjustifikasi kebebasan individu untuk memilih sistem nilai dan way of life-nya sendiri. Ia menelurkan prinsip bahwa setiap orang dilahirkan secara equal dan memiliki hak langsung dari penciptanya, yang tidak dapat diambil oleh pihak lain, seperti hak atas hidup, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan. Cara mengekspresikan hak itu diserahkan kepada individu masing-masing, sejauh ia tidak melanggar kebebasan pihak lainnya.

Berbagai individu itu lalu bergabung membentuk pemerintahan untuk melindungi kebebasan. Konstitusi dan hukum dibuat agar kebebasan individu dijaga baik dari ancaman individu lain ataupun dari kesewenangan pemerintah. Karena pemerintah disepakati sebagai satu-satunya institusi yang berhak menggunakan kekerasan, kontrol terhadap pemerintah itu ekstraketat. Konstitusi dibuat pada dasarnya agar masyarakat mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya.

Dalam hal terjadinya konflik kepentingan akibat adanya kebebasan, dibentuk pengadilan yang netral dan mandiri. Pengadilan dibuat berada di luar jangkauan pemerintah (eksekutif, legislatif) karena pemerintah juga aktor yang bermain dalam politik, yang juga dapat melakukan kesalahan. Untuk mengelola kebebasan wasit dari sistem politik modern (yang melindungi individu dari paksaan) adalah pengadilan, bukan pihak eksekutif.

Sekali pihak eksekutif diberikan otoritas untuk mengurangi kebebasan masyarakat (seperti

pembredelan), membuka kemungkinan ia akan menggunakan hak itu secara salah, karena pihak eksekutif juga terlibat dalam kepentingan politik praktis. Memberikan hak itu hanya kepada pengadilan adalah cara terbaik menghindari dari penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu mekanisme untuk memisahkan kekuasaan dari wilayah buruknya.

Di manakah kekuatan kebebasan itu? Dalam situasi bebas, setiap individu dimungkinkan memaksimalkan pencapaiannya (self achievement) sesuai dengan apa yang diinginkan. Jika setiap individu mendapat hasil maksimal, masyarakat pun akan memperoleh kemajuan puncak.

Dalam kebebasan, setiap individu mempunyai ruang gerak yang luas untuk melakukan eksperimen, berkompetisi, melakukan petualangan, sejauh ia tidak melanggar kebebasan pihak lain dan terjaring oleh hukum kriminal. Tinggi pencapaian negara bebas seperti negara industri di Barat, dan hancurnya negara yang paling tidak bebas seperti negara komunis, dapat menjadi bukti yang baik bagi kekuasaan kebebasan ini.

Kebebasan membuat kita terhindar dari sentralisasi kekuasaan yang memanipulasi publik. Di negara yang tidak bebas, berkembang aneka ketertutupan, korupsi, dan penyelewengan kekayaan publik oleh para birokrat dan koneksinya. Birokrasi tidak terkontrol dan dengan mudah menjadi sejenis Frankenstein yang dapat

membunuh masyarakat yang melahirkannya sendiri.

Keuntungan sistem yang bebas, ia membuat ruang publik menjadi rumah kaca yang dapat diamati dan dikontrol oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sistem ini lebih peka dan mudah mendeteksi manipulasi secara dini. Pemerintahan yang bersih hanya mungkin tumbuh jika ia berada di rumah kaca.

Pers salah satu mikroskop kita untuk meneropong rumah kaca itu. Sekali terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh sebuah kelompok atau aktor politik tertentu, situasi bebas itu secara otomatis membuat kepentingan dan aktor politik yang lain melakukan reaksi. Terbentuklah suatu sistem yang self-correcting.

Apakah kebebasan seperti itu menimbulkan anarki dan keguncangan? Justru kebebasan inilah yang sangat stabil dan itu kestabilan yang bukan direkayasa tetapi spontan (spontaneous order). Yaitu jika hukum tegak menjadi aturan main yang berwibawa dan ditaati. Yang supreme kemudian bukan lagi orang per orang, tetapi hukum yang impersonal. Seorang presiden, seperti Nixon dapat terjungkal jika ia keluar dari aturan main. Sedangkan hukum itu sendiri hanyalah asas legal dari kebebasan dan persamaan kesempatan bagi semua warga (equal opportunity).

Kita berharap fondasi kebebasan AS itu tidak roboh. Lebih dari itu, fondasi kebebasan AS itu diharapkan menjadi virus yang mempengaruhi negara lain, termasuk Indonesia.**

Proyek Politik Afghanistan dan “Setan Besar”

Seperti yang diberitakan New York Times, suasana teror dan ecemasan mewarnai masyarakat Amerika Serikat setelah Tragedi 11 September dan serangan AS ke Afghanistan. Di bawah kesadaran kolektif publik di sana, selalu terbayang adanya serangan balasan kaum teroris secara canggih, yang sama canggihnya dengan penghancuran gedung World Trade Center dan Pentagon.

Tidak hanya orang penting, penduduk biasa selalu berpikir dua kali, atau setidaknya merasa waswas, baik ketika berada di gedung yang tinggi, melewati terowongan yang panjang, maupun melintasi jembatan besar. Mereka berpikir, jangan-jangan sekali lagi

gedung itu, terowongan itu, atau jembatan itu, meledak seketika oleh bom teroris. Banyak pula yang semakin khawatir menggunakan kereta api bawah tanah (subway). Bayangan mereka, jika meledakkan Pentagon saja bisa, apalagi menghancurkan kereta api bawah tanah.

Suasana teror semakin menjadi ketika meluasnya wabah virus biologis antraks. Banyak pegawai dari jaringan televisi besar seperti CBS, ABC, NBC yang sudah terkena wabah antraks. Bahkan diberitakan, 33 pegawai Senat AS sudah terjangkit wabah itu. Diketahui, penyebaran wabah itu umumnya dilakukan lewat surat. Sekali lagi dicurigai adanya kelompok terorganisir berada di belakang penyebaran virus antraks.

Banyak orang penting, bahkan penduduk biasa, khawatir membuka surat dan bingkisan yang datang ke rumah mereka dan kantor mereka. Jangan-jangan, pikir mereka, ada virus antraks dalam bingkisan itu.

Suasana tercekam oleh teror secara kolektif ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS. Dari sisi efek psikologis massal, siapa pun yang berada di belakang aksi virus antraks dan penghancuran gedung WTC sudah berhasil melukai AS yang sering disebut oleh musuhnya sebagai “Setan Besar”.

Tidak mengherankan jika Presiden AS George W Bush berulang-ulang menyatakan secara publik, AS akan membalas serangan itu dengan setimpal. Kita, ujar Bush, akan menggunakan semua cara yang kita kuasai agar keadilan ditegakkan dan teroris membayar harganya.

Sebuah aksi politik yang komprehensif dirapkan. Afghanistan agaknya dijadikan sasaran pertama operasi AS itu.

AS dan koalisinya berniat menjadikan Afghanistan sebagaimana Jepang setelah era Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang, bersama dengan Jerman dan Italia, dianggap musuh utama koalisi AS. Lalu negara fasis Jepang ditaklukkan, diubah menjadi negara demokratis, dan kini menjadi salah satu sahabat AS yang paling maju secara ekonomi.

Salah satu tokoh reformis politik Jepang modern adalah Jenderal McArthur. Ia salah satu jenderal perang legendaris AS sepanjang sejarah karena leadership dan visinya. Mewakili AS, McArthur mengubah Jepang yang saat itu menjadi negara yang cinta perang dan penaklukan militer-Jepang dibombardir. Nuklir dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Kekuatan militer Jepang dilucuti. Raja Jepang diturunkan dari singgasananya dan hanya dijadikan simbol. Jepang pun dilarana untuk terlibat perang.

Namun, peran McArthur yang paling signifikan adalah dalam membangun kembali negara Jepang. Ia turut merancang konstitusi Jepang yang baru. Diet sebagai parlemen Jepang dibentuk kembali secara demokratis. Jika dulu, anggota Diet diangkat oleh raja, diubah oleh McArthur untuk dipilih oleh rakyat. Masyarakat Jepang pun dibebaskan untuk membentuk

partai politik dan bertarung dalam pemilu. Lalu AS juga memimpin proyek pembangunan ekonomi Jepang. Bersama dengan Jerman, Jepang menjadi contoh negara yang dilucuti secara militer, dikontrol oleh AS secara politik di masa awalnya, namun kini tumbuh menjadi raksasa ekonomi.

Bagaimana dengan Afghanistan? AS dan koalisinya sekali lagi ingin memainkan peran yang sama. Rezim Taliban yang kini mengontrol Afghanistan dianggap AS dan sekutunya sama bahayanya dengan rezim Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Rezim ini akan secepatnya dijatuhkan. Kekuatan militernya dilucuti agar tidak lagi dapat melindungi apa yang disebut oleh AS sebagai jaringan teroris internasional.

Sebagaimana di Jepang, AS akan menggulingkan Rezim Taliban sebagai sasaran antara. Puluhan bom telah dijatuhkan. Serangan darat sedang disiapkan. Setelah Rezim Taliban ditaklukkan, AS akan memelopori berdirinya pemerintahan baru Afghanistan. Pemerintahan baru itu diharap akan menjadi pemerintahan demokratis dan sahabat AS dalam mengendalikan aneka gerakan garis keras di kawasan itu.

Namun, ada beberapa kondisi yang membuat Afghanistan bukanlah proyek politik semudah Jepang. Jepang adalah masyarakat yang homogen, sementara Afghanistan sebuah negara yang multietnis. satu etnis di Jepang dikendalikan, sama dengan mengendalikan komunitas Jepang. Tetapi, tidak ada satu etnis pun

yang mayoritas di Afghanistan. Etnis Pashtun yang merupakan mayoritas di sana hanya kurang dari separo dari populasi Afghanistan. Berbagai etnis itu punya riwayat panjang saling berkonflik satu sama lain. Padahal, pemerintah baru yang kuat dengan sendirinya harus merupakan koalisi antaretnis. AS harus bersabar menunggu terbentuknya koalisi multietnis yang kokoh.

Berbeda dengan Jepang, Afghanistan bukan pula komunitas yang terisolasi dari dunia internasional. Kultur Jepang tidak meluas ke wilayah di luar Jepang. Di Afghanistan, sentimen Islam telah menyambungkan kawasan itu dengan komunitas Islam lainnya di seluruh dunia. Menghadapi Jepang, AS hanya menghadapi elite di negara Jepang. Namun menghadapi Afghanistan, AS juga harus memperhitungkan aneka elite dan massa dari komunitas Muslim hampir di seluruh dunia.

Lingkungan Internasional saat itu juga berbeda. Di era Perang Dunia Kedua, bahkan deklarasi hak asasi universal belum terbentuk. Sementara Milenium Ketiga ini ditandai oleh globalisasi ideologi hak asasi manusia dan demokrasi. Prinsip self determination dan hak sebuah bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri sangat kuat. Intervensi AS atas kehidupan politik domestik Afghanistan lebih sulit diterima oleh komunitas internasional.

AS harus sangat berhati-hati mengayunkan intervensinya di Afghanistan. Jika salah langkah,

sentimen anti-AS justru akan menyusahkan pemerintahan baru Afghanistan kelak. Harus dibuatkan image bahwa pemerintahan baru Afghanistan adalah pemerintahan yang berdiri karena upaya keras oposisi bangsa Afganistan sendiri. Jika ada peran dari luar, diupayakan peran itu tidak datang dari AS, tetapi dari PBB, sebagai simbol otoritas politik dunia.

Menurut New York Times, saat ini AS mendukung Lakhdar Brahmini, seorang diplomat PBB untuk menjadi operator politik bagi terbentuknya pemerintahan Afghanistan pasca-Taliban.

Mantan Raja Afghanistan, Mohammad Zahir Shah, agaknya yang paling berpeluang untuk menjadi simbol penguasa baru Afghanistan. Brahmini dikenal dekat dengan berbagai kelompok etnis di Afghanistan. Diharapkan, ia mampu memfasilitasi terbentuknya kesepakatan multietnis untuk mendukung Zahir, asalkan pemerintahannya kelak melibatkan semua etnis, termasuk etnis Taliban.

Sangat mungkin Zahir kelak tidak berperan sebagai raja sebagaimana peran raja dalam sistem kerajaan di Arab saudia dan kawasan Islam lain. Peran Raja Zahir lebih mirip dengan raja Jepang yang lebih sebagai simbol. AS telah pula menjanjikan membantu sebesar 320 juta dolar AS sebagai upaya utama rekonstruksi ekonomi pemerintahan pasca-Taliban.

Seandainya pun AS berhasil mendorong terbentuknya pemerintahan baru Afghanistan, tetap menjadi

pertanyaan, berapa lama pemerintahan itu dapat bertahan. Selama AS masih dianggap sebagai “Setan Besar” bagi komunitas Islam dunia garis keras, selama itu pula pemerintahan baru Afghanistan bentukan AS akan labil.

Agaknya sebuah manuver politik lainnya yang jauh lebih historik perlu diambil AS. Penulis membayangkan AS memimpin sebuah koalisi Internasional yang lain lagi bagi berdirinya negara Palestina.

Kemudian mengorganisasi bantuan ekonomi dunia bagi negara baru Palestina. Manuver itu adalah loncatan kuantum yang akan membuat AS sebagai superpower tunggal dunia lebih diterima, tidak hanya di Afghanistan, tetapi juga di hati kaum Muslim dunia. Image “Setan Besar” sedikitnya akan berkurang.

Masalahnya, apakah Presiden Bush dan administrasinya menganggap itu hal penting? Dan seberapa besar pula kendala politik domestik dan lobi Israel di AS akan menghalanginya? Presiden Bush sendiri sudah menyatakan secara publik, AS mendukung berdirinya Palestina. Diketahui pula pemerintahan Israel sudah memberikan reaksi negatif atas pernyataan Bush.

Masa depan supremasi AS dan perlindungan kepada warga AS tentu menjadi prioritas dari siapa pun yang menjadi presiden. Ketidakadilan “Setan Besar” ini atas Palestina akan selalu menyulut kemarahan warga

Muslim di seluruh belahan dunia. Lapangan politik agaknya sudah cukup matang bagi Presiden Bush untuk membuat langkah historik yang mengubah tradisi politik AS di Timur Tengah. Koalisi Internasional yang dipimpin AS bagi kemerdekaan Palestina, bukan saja akan turut meredakan perang Afghanistan, namun juga akan lebih menjamin tata dunia yang lebih damai di masa datang. **

Amerika Serikat Versus Irak?

Akankah dalam waktu dekat Amerika Serikat menyerang Irak? Lalu berkobarlah perang yang menyeret sisa dunia lainnya dalam posisi sulit untuk bersikap? Ini pertanyaan yang sekarang paling hot. Mulai dari pusat pemerintahan di Gedung Putih, sampai ke Istana Negara di Indonesia, mulai dari seminar di universitas sampai dengan kedai kopi di pinggir jalan, semua tengah mempergunjingkannya.

Dunia terbelah dalam pro dan kontra. Di Amerika Serikat, politisi semakin yakin perlunya serangan mendadak dan cepat untuk menggulingkan Saddam Hussein. Pada saat yang sama, justru di pusat keramaian Washington dan New York, sebagian rakyat Amerika Serikat sendiri menolak perang. Mereka bergerak berdemonstrasi di jalan-jalan. Tidak ketinggalan

bintang-bintang Hollywood mengancam rencana perang.

Di Eropa, Amerika Latin, Asia, termasuk di Indonesia sendiri, pro dan kontra tidak kalah semarak. Umumnya cendekiawan, tokoh agama, dan aktivis LSM menolak perang. Sementara banyak pula politisi dan intelektual mendukung perang secara diam-diam.

Apa argumen terbaik dari mereka yang mendukung perang Amerika Serikat versus Irak? Apa pula keberatan paling masuk akal dari kaum yang menentangnya? Bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap?

Yang pro kepada perang, umumnya bersandar pada visi politik jangka panjang dan spekulasi positif hasil perang nanti. Mereka beranggapan, sebaiknya memang dunia dibersihkan dari senjata pemusnah massal. Tidak hanya nuklir yang berbahaya, namun senjata biologis dan kimia tidak kalah maut. Jika senjata itu diledakkan, yang menjadi korban bukan hanya satu kampung. Sebuah negara dapat saja hancur. Bahkan mungkin sebagian bumi dapat rusak dengan kematian berjuta-juta manusia.

Apa jadinya jika senjata pemusnah massal itu dikuasai oleh seorang atau beberapa diktator? Apa jadinya jika perlu atau tidaknya meledakkan senjata pemusnah itu hanya bergantung pada seorang penguasa otoriter dengan seluruh fantasi kekuasaan dan kekejamannya?

Sang diktator tidak terbiasa dikontrol oleh

lingkungannya. Dalam negara otoriter, tidak ada lembaga lain seperti kongres atau DPR yang punya kekuasaan mengawasi gerak-gerik sang diktator. Tidak ada pers bebas yang dapat menjadi “anjing penggonggong” agar sang diktator tidak melakukan sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi jika sang diktator berketetapan untuk menggunakan senjata pemusnah itu. Siapa yang dapat menghalangi Hitler ketika ia mengirimkan ribuan Yahudi menuju kamp pembunahan?

Dalam kondisi politik yang dipenuhi petualang dan teroris, siapa yang dapat menjamin senjata pemusnah itu tidak jatuh ke dalam kegiatan terorisme? Sebuah pesawat dapat dibajak teroris dan menghancurkan salah satu gedung tertinggi di dunia, seperti dalam kasus WTC, Tragedi 11 September. Bagi teroris dengan fantasi ingin memusnahkan sebuah negara, tentu sangat berkeinginan mendapatkan senjata pemusnah massal itu. Dengan senjata maut, mereka merasa sekali lagi “memberikan pelajaran” kepada siapa saja, yang mereka anggap sebagai “wakil kekuatan setan” di muka bumi.

Sang diktator sangat mungkin memberikan senjata pemusnah massal itu kepada jaringan teroris untuk berbagai alasan. Pertama, ini transaksi bisnis biasa. Dengan mendapatkan keuntungan uang berlipat-lipat, melalui jalurnya, satu atas dua senjata pemusnah massal itu dijual.

Kedua, mungkin pula ada motif politik. Kebencian kepada sebuah negara atau kaum, membuat sang diktator bermain api. Melalui jalur yang rahasia,

beberapa senjata pemusnah massal diselundupkan kepada jaringan terorisme. Suplai senjata pemusnah massal itu dapat dijadikan kebijakan sang diktator. Kepada rakyatnya sendiri saja, sang diktator tidak peduli.

Begitu banyak lawan politik yang ia penjarakan. Mengapa pula ia harus peduli dengan kematian ribuan bahkan jutaan manusia akibat suplai senjata yang ia berikan kepada jaringan teroris. Apalagi jika sang diktator punya fantasi bahwa ia sedang menjalankan misi suci untuk memurnikan dunia dan membersihkan 'kekuatan setan'.

Saddam Hussein oleh sebagian politisi dianggap mempunyai karakter diktator itu. Irak juga oleh sebagian diyakini memang memiliki senjata pemusnah massal itu. Demi amannya dunia di masa datang, mereka justru berharap Amerika Serikat mengambil inisiatif menyerang Irak dan menyingkirkan Saddam Hussein. Serangan itu harus dilakukan secara efisien dan secepat mungkin. Mereka percaya Amerika Serikat mampu melakukannya.

Memang benar dunia tidak sepenuhnya mendukung rencana itu. Bahkan mungkin jauh lebih banyak negara yang menentang ketimbang yang mendukung rencana Amerika Serikat menyerang Irak secara unilateral. Tetapi, menurut pandangan itu, seorang pemimpin memang kadang harus mengambil kebijakan yang tidak populer. Pada waktunya dunia akan melihat kebaikan dari kebijakan itu. Tidak hanya Amerika Serikat yang

diselamatkan, tetapi dunia pun akan dilindungi.

Mereka menganggap ini saat yang tepat untuk menyerang Irak. Afghanistan dapat ditaklukkan dan diganti rezim yang lebih baik. Bahkan di era Perang Dunia II, Jepang dan Jerman juga ditaklukkan secara militer dan diganti oleh penguasa yang lebih beradab. Irak akan lebih baik dengan pemimpin yang baru, pemimpin yang direstui, dan mengubah Irak menjadi negara demokrasi.

Pihak yang kontra dengan serangan Irak juga memiliki argumen yang tidak kalah tajamnya. Berbagai gerakan antiperang memang mengumandangkan pernyataan yang sama. Mereka sama-sama menolak rencana Amerika Serikat mengintervensi sebuah negara yang berdaulat. Namun mereka sesungguhnya memiliki argumen yang berbeda di balik penolakan itu.

Sebagian menolak serangan Amerika Serikat atas Irak karena alasan akurasi informasi. Mereka masih menyangsikan apakah benar Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Bukankah tim inspeksi PBB sudah bekerja dan belum menemukan barang bukti secuil pun. Semua bukti yang diperlihatkan Amerika Serikat masih berupa data intelijen. Dalam politik praktis yang liar, data intelijen dianggap rawan manipulasi.

Di samping persoalan akurasi, kelompok itu mencurigai Amerika Serikat memiliki agenda tersembunyi. Di balik isu senjata pemusnah massal dan

terorisme, sangat mungkin negara adidaya itu punya keinginan menguasai sumber minyak di Irak. Sangat mungkin pula Amerika Serikat ingin mempunyai cengkeraman politik lebih kuat di Timur Tengah. Sadam Hussein yang pembangkang akan diganti oleh boneka politik yang penurut dan jinak.

Sebagian lagi menolak serangan Amerika Serikat atas Irak karena alasan prosedur. Mereka melihat Irak negara berdaulat, sebagaimana Amerika Serikat sendiri. Sebuah negara berdaulat tidak boleh secara semena-mena diserang oleh negara berdaulat lainnya. Amerika Serikat tidak boleh menyerang Irak, sebagaimana Irak juga tidak boleh menyerang Amerika Serikat.

Tentu, dalam kasus khusus, penyerangan dibolehkan untuk kepentingan dunia yang lebih luas. Kejahatan terhadap kemanusiaan di sebuah negara memang harus dilawan bersama-sama. Namun dalam lingkup dunia internasional sudah ada prosedur yang disepakati. Aksi internasional harus melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Serangan atas sebuah negara yang berdaulat hanya dapat dibenarkan secara moral dan politik jika menjadi mandat PBB. Secara prosedural, PBB dianggap mewakili aspirasi dan moral politik dunia.

Aksi unilateral Amerika Serikat dengan mudah dianggap sebagai arogansi negara besar yang kini menjadi satu-satunya superpower: Jika Amerika Serikat punya alasan menyerang Irak, walau tidak didukung PBB, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi politik internasional. Sebuah negara lain akan pula menyerang

negara lain lagi, dengan misi yang tidak kalah sucinya. Mengikuti Amerika Serikat, negara penyerang itu juga tidak peduli dengan persetujuan PBB.

Dunia internasional kembali menjadi hutan rimba. Yang akhirnya menentukan bukan lagi apa yang benar (sesuai konsensus internasional), tetapi siapa yang kuat. Pihak yang kuat merasa berhak untuk menyerang. Pandangan itu melihat Amerika Serikat mungkin dapat mengalahkan Irak secara militer dalam tempo cepat. Namun arogansi unilateral itu tidak akan memenangkan the minds and the hearts dari penduduk dunia. Sebaliknya, Amerika Serikat -kan kaget melihat dirinya s-makin dibenci.

Sebagian lagi menolak serangan Amerika Serikat atas Irak karena alasan keadilan. Jika memang negara lain tidak boleh mempunyai senjata pemusnah massal, mengapa Amerika Serikat boleh? Siapa yang memberikan hak itu? Jika Amerika Serikat memang punya komitmen agar dunia dibersihkan dari senjata pemusnah massal, mengapa gerakan itu tidak dimulai dari Amerika Serikat sendiri? Apa yang membuat Amerika Serikat menetapkan hanya negaranya (dan sekutunya) yang boleh memiliki senjata maut itu?

Kelompok yang keberatan ini punya alasan yang kuat. Selama ini Amerika Serikat dianggap tidak benar-benar menjadi polisi dunia yang peduli dengan keadilan dunia. Dalam banyak kasus, terutama untuk Palestina

dan Israel, Amerika Serikat memakai ukuran ganda

Jika negara lain dilucuti dari senjata pemusnah massal, sementara hanya AS dan sekutunya dibiarkan, tidakkah berarti standar ganda kebijakan luar negeri negara Paman Sam itu akan semakin tidak terlawan? Tidakkah itu berarti ketidakadilan semakin berkuasa?

Serangan Amerika ke Irak, oleh kelompok ini, dinilai sangat politis; Alasan senjata pemusnah massal dan terorisme dianggap hanya . kamufase. Yang sebenarnya, Amerika Serikat dan sekutunya ingin semakin berkuasa. Maka, menurut mereka, hanya ada satu kata untuk Amerika Serikat: Lawan !

Sebagian lagi menolak rencana perang Amerika Serikat lebih karena alasan moral dan antikekerasan. Mereka tidak bicara politik. Mereka hanya membayangkan akan banyaknya jatuh korban manusia tidak berdosa. Sekali pembunuhan massal dibenarkan, pada periode berikutnya pembunuhan massal serupa akan kembali dibenarkan.

Padahal pembunuhan oleh individu di setiap negara dianggap fkriminal. Sementara perang adalah pembunuhan massal oleh negara

secara resmi. Jika ingin konsekuen, perang harus dianggap sebagai the ultimate crime against humanity, yang tentu saja levelnya lebih jahat dari pembunuhan individual.

Pro dan kontra terus menghangat bersamaan dengan

semakin menghangatnya kemungkinan AS menyerang Irak. Pemerintah Indonesia akan semakin terjepit oleh pro dan kontra itu. Presiden Megawati agaknya akan pula kesulitan untuk mengambil posisi yang tegas, karena kompleksitas dan kekuatan argumen pihak yang pro ataupun kontra. **

Dunia setelah Perang Irak

Perang yang sebenarnya justru terjadi setelah saddam Hussein jatuh dari kekuasaannya. saat itu, peluru terakhir Perang Teluk II sudah selesai meletus. Dimulailah era pembangunan kembali Irak paska-saddam Hussein.

Namun situasi Irak dan respons dunia tidak semudah yang dibayangkan bahkan oleh Amerika serikat, sekalipun. Irak mungkin tumbuh menjadi negara demokratis di Timur Tengah. Namun mungkin pula Irak justru semakin terpuruk dengan aneka perpecahan internal yang sulit diatasi. Dunia mungkin berterima kasih kepada inisiatif Amerika serikat. Namun mungkin pula dunia justru semakin meninggalkan Amerika Serikat.

Akan halnya Amerika serikat memenangi pertempuran ini secara militer, tidak ada yang dapat

membantah. Superioritas Amerika Serikat di bidang militer terhadap Irak memang sangat jauh. Sudan pula menjadi obsesi Amerika Serikat untuk menyingkirkan Saddam Hussein dari panggung kekuasaan. Saddam mungkin terbunuh, mungkin menyerah, mungkin ditangkap, atau mungkin menghilang, seperti Osama bin Laden. Apa pun yang terjadi atas Saddam, hampir dapat dipastikan, Irak jatuh ke tangan Amerika Serikat dan sekutunya.

Tetapi perang yang dihadapi Amerika Serikat sesungguhnya justru baru dimulai. Setelah perang Irak, akankah leadership Amerika Serikat di dunia semakin terang dan terasa? Atau yang terjadi justru sebaliknya. Leadership Amerika Serikat di dunia pasca-Perang Teluk II ini mudar? Kemenangan militer Amerika Serikat justru diikuti dengan hilangnya kepercayaan dan respek dunia kepada Amerika Serikat?

Kemungkinan pertama, Perang Teluk II justru menjadi awal mudarnya leadership Amerika Serikat di dunia. Memang secara militer Amerika Serikat semakin menunjukkan kejayaannya. Namun Amerika Serikat semakin tidak mampu memenangkan the hearts and the minds dari penduduk dunia.

Sebelum Perang Teluk II, sebuah survei besar-besaran dilakukan oleh Pew Global Attitude Project. Survei itu dilakukan di 44 negara dengan mengambil responden sebanyak 38.000 penduduk. Tidak tanggung-tanggung,

survei itu dipimpin langsung oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine K Albright.

Menurut survei yang mendunia itu, popularitas Amerika Serikat di mata dunia semakin menurun. Memang Amerika Serikat masih populer di kalangan mayoritas 35 negara dari 44 negara yang diteliti. Namun, sejak 2000, favorable rating Amerika Serikat menurun di 19 dari 27 negara. Khususnya di negara yang mayoritas Islam, mayoritas penduduk tidak menyukai Amerika Serikat, bahkan membenci.

Setelah Perang Teluk II ini meletus, dapat dipastikan, angka kebencian kepada Amerika Serikat di negara Muslim akan semakin besar. Pemerintah di negara mayoritas Muslim itu kini terimpit. Di satu sisi, mereka membutuhkan dukungan ekonomi dan politik Amerika Serikat, namun spirit anti-Amerika Serikat di kalangan masyarakat semakin besar setelah bom jatuh di Baghdad.

Tidak hanya di negara Muslim, perang teluk ini juga melahirkan sentimen anti-Amerika Serikat di hampir seluruh dunia. Demonstran antiperang bergelora hampir di semua kota penting banyak negara besar. Mulai dari Australia, sampai ke jantung Eropa di Paris, London, dan Brussels, penduduk menentang perang. Bahkan di jantung kota besar Amerika Serikat sendiri, di New York dan Washington, DC, semangat antiperang terus berkobar.

Mereka yang berdemo bukanlah hanya kelas bawah dan para fanatik agamawan, namun begitu banyak

intelektual, tokoh moralis, bintang film dan aktivis yang terlibat. Ketidakpedulian Amerika Serikat atas gerakan antiperang ini, niscaya akan menimbulkan semangat anti- Amerika Serikat yang meluas. Mungkin untuk pertama kalinya, Amerika Serikat menjadi tidak populer bahkan di kalangan penduduk negara Barat sendiri.

Di samping itu, mereka yang selama ini berharap dan membangun PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sangat mungkin akan pula anti- Amerika Serikat. Selaku badan internasional, PBB sudah dirintis dan dibangun puluhan tahun. Tidak ada lain tujuannya kecuali menjadi badan berwibawa untuk mengontrol dunia agar berjalan berdasarkan hukum dan kesepakatan internasional. Justru karena tidak ada otoritas sentral dalam politik internasional, peran lembaga internasional seperti PBB semakin diperlukan.

Namun, pecahnya Perang Teluk II itu membuktikan betapa Amerika Serikat sendiri yang menghancurkan wibawa PBB. Prosedur yang sudah digariskan PBB tidak lagi dihiraukan. Tanpa PBB, Amerika Serikat mengambil inisiatif dan menyerang Irak. Amerika Serikat membuat PBB berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika ingin berwibawa, seharusnya PBB menegur keras ke Amerika Serikat. Bahkan jika mampu, PBB membuat pasukan internasional melindungi Irak dan balik menyerang Amerika Serikat.

Namun hampir mustahil tindakan keras itu dilakukan PBB. Kantor PBB sendiri berada di wilayah Amerika Serikat. Sementara hampir mustahil ada negara Barat

yang bersedia perang melawan Amerika Serikat. Yang paling jauh dapat dilakukan adalah sekadar mengancam dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat. Walau tindakan militer mustahil dilakukan, namun trust, respek dan harapan kepada Amerika Serikat selaku pemimpin dunia di kalangan PBB akan menurun.

Di samping kehilangan respek dunia, Amerika Serikat sangat mungkin pula mengulangi kesalahan superpower dunia lainnya di era yang lalu. Amerika Serikat sudah mengalahkan Afghanistan. Kini Amerika Serikat akan pula mengalahkan Irak. Jika ambisi Amerika Serikat diteruskan, sangat mungkin Amerika Serikat akan menaklukkan Iran. Lalu menaklukkan pula Korea Utara.

Wilayah yang ditaklukkan tentu harus pula dibangun dan dijaga oleh Amerika Serikat sendiri. Akibatnya terlalu banyak dana yang dibutuhkan dan terkuras untuk kepentingan militer Amerika Serikat dalam menjaga “imperiumnya”. Semakin kurang pula dana Amerika Serikat untuk pembangunan ekonominya sendiri. Jatuhnya superpower era sebelumnya, seperti Roma dan Inggris Raya karena terlalu mahal biaya militer untuk menjaga kekuasaan imperiumnya.

Kombinasi antara mahal biaya militer, merosotnya kapabilitas ekonomi, dan menurunnya respek dunia, membuat semua superpower, termasuk Amerika Serikat sendiri akan tenggelam.

Kemungkinan kedua justru sebaliknya. Perang Teluk II ini justru menjadi awal lahirnya “imperium Amerika Serikat” yang baru. Lalu Amerika Serikat menjelma menjadi negara paling besar dan paling dihormati yang pernah ada dalam sejarah manusia.

Penyebabnya, Amerika Serikat memenuhi panggilan sejarah. Negara itu berani mengambil tindakan tidak populer. Negara itu juga cukup liar melangkahi aneka prosedur formal yang ada, seperti yang menjadi standar PBB. Namun secara substansial, Amerika Serikat berhasil membangun tata dunia baru, di mana kekuatan antagonis dan senjata pemusnah massal berhasil dikontrol. Akibatnya dunia semakin dikuasai oleh kekuatan negara demokratis, dan mengurangi potensi kekuatan antidemokrasi yang sangat berbahaya.

Menurut pandangan ini, sebelum Amerika Serikat menyerang Irak, kondisi dunia seperti api dalam sekam. Segala hal memang tampak tenang dan biasa. Namun begitu banyak negara yang menguasai teknologi bahkan sudah pula mengembangkan senjata pemusnah massal. Celakanya, negara itu dipimpin oleh seorang t,ran dan diktator. Jika kepada rakyatnya saja sang diktator tidak peduli, apalagi terhadap penduduk dunia dari negara lain.

Sangat mungkin sang diktator ini hidup dalam paranoia. Karena kegilaan politiknya, atau karena inspirasi sucinya, sang diktator berkolaborasi dengan aneka kelompok teroris, baik lokal ataupun internasional. Dengan peralatan konvensional saja, kelompok teroris bisa menghancurkan gedung WTC

yang merenggut lebih dari 4.000 nyawa sekaligus. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kelompok teroris itu jika mereka dapat menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal.

Di dunia supermodern seperti sekarang, mereka yang jahat semakin pula canggih, mengawinkan kelihaihan dan teknologi paling muthakir. Segala bentuk prosedur formal yang dibuat PBB ataupun badan lainnya tidak akan pernah mampu melacak dan menghancurkan tumbuhnya kekuatan jahat itu. Namun jika dibiarkan, kekuatan jahat itu semakin besar dan semakin sulit dibendung. Tinggalah menunggu waktu. Seluruh dunia akan menderita akibat terlambat bertindak.

Di situ Amerika Serikat berperan. Walau gaya politiknya seperti koboi, namun Amerika Serikat berani mengambil peran yang bersejarah. Walau awalnya dikecam, menurut pandangan ini, pada waktunya dunia akan berterima kasih kepada Amerika Serikat. Walau awalnya untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, dengan doktrin preemptive, seluruh dunia menjadi “free-rider” yang juga menikmati tata dunia baru yang lebih damai.

Amerika Serikat akan semakin dihormati lagi jika memang Irak berhasil dibangun menjadi negara demokratis. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang dan Jerman juga dihancurkan oleh Amerika Serikat dan sekutu. Namun dua negara itu kemudian dibangun kembali juga dengan bantuan Amerika Serikat serta sekutu. Kini Jepang dan Jerman tumbuh menjadi raksasa

ekonomi yang menyaingi Amerika Serikat sendiri. Irak diharapkan menjadi Jepang atau Jerman yang lain untuk kasus wilayah Timur Tengah.

Berhasilnya Irak dibangun diawali dengan jatuhnya Saddam Husein. Menurut skenario ini, berbeda dengan yang diduga banyak pihak, jatuhnya Saddam justru disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Irak sendiri. Pasukan Amerika Serikat dan Inggris yang menang di Irak, tidak dianggap sebagai penindas. Sebaliknya, mereka justru sebagai pembebas. Rakyat Irak sendiri sudah lama semakin menderita di bawah diktator Saddam Husein.

Serangan Amerika Serikat ke Irak tidak dipahami sebagai agresi sebuah negara asing terhadap kedaulatan nasional. Serangan itu dianggap sebagai upaya awal membangun dunia baru, yang lebih aman, yang lebih bersih dari komplotan terorisme, yang lebih akomodatif bagi lahirnya negara demokrasi baru. Leadership Amerika Serikat setelah Perang Teluk II justru semakin kuat.

Dari dua kemungkinan di atas, yang mana akan terjadi? Amerika Serikat akan redup sebagai pemimpin dunia atau justru semakin bercahaya? Jawaban yang pasti saat ini belum dapat kita ketahui. Dua-duanya masih mungkin.**

“Perang Irak” di Menko Polkam

Bayangkan apa yang terjadi pada dunia 20 tahun mendatang, setelah berakhirnya Perang Irak. Saat itu, bangkit sebuah poros kekuatan dunia baru. Poros itu dipimpin Jerman dan Prancis. Berbagai dunia dengan jumlah penduduk besar ikut pula dalam poros baru itu, seperti Cina, India, Indonesia dan Rusia. Dari segi ekonomi, militer, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan peradaban, poros baru itu mengimbangi Amerika Serikat.

Dua efek besar akan mempengaruhi tata dunia baru akibat kelahiran poros itu. Pertama, tidak ada lagi sindrom penguasa tunggal di jagat raya. Amerika Serikat tidak bisa lagi semauanya mengatur dunia atau menyerang secara militer negara mana pun, tanpa memperdulikan kekuatan lain.

Boleh jadi, Amerika Serikat punya ideal dan visi

yang cemerlang di balik serangan militer seperti yang terjadi di Irak saat ini. Namun tanpa kontrol yang memadai dari kekuatan lain, sindrom penguasa tunggal itu dengan mudah dapat membuat Amerika Serikat “terpeleset”. Bukan kebaikan yang dihasilkan, tetapi justru keburukan. Apalagi jika motivasi di balik serangan militer ke Irak itu belum tentu kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Bisa saja perang itu hanya digerakkan oleh mispersepsi kelompok minoritas Neo-Konservatif yang kini menguasai Pentagon, Gedung Putih, dan opini publik Amerika Serikat.

Dengan hadirnya Poros Baru, sindrom penguasa tunggal akan direduksi pada tingkat yang minimal. Amerika Serikat akan menghormati semua bentuk kesepakatan internasional. Kemungkinan Amerika Serikat “terpeleset” dan membuat kesalahan sejarah juga berkurang karena adanya kontrol dan “tekanan” dari kekuatan lain.

Sementara itu, Poros Baru itu juga tidak memecah dunia bersandar kepada garis ideologi yang berbahaya. Sebelum Perang Dunia Kedua, dunia terbelah antara kekuatan demokrasi dan fasisme. Di tahun delapan puluhan, dunia terbelah pula menjadi Blok Barat versus Komunisme. Di awal abad ini, dunia ingin pula dibelah antara kelompok Amerika Serikat versus terorisme global. Namun Poros Baru tidak menantang Amerika Serikat secara ideologis. Sebagaimana Amerika Serikat, Poros Baru juga meyakini demokrasi dan kapitalisme yang sama.

Perbedaannya, Poros Baru didirikan dengan visi yang berbeda. Negara anggota sangat yakin bahwa dunia memang sebaiknya memiliki balance of power. Dalam negara demokrasi, check and balances diperlukan agar pemegang kekuasaan tidak korup. Dalam level internasional, check and balances yang sama juga dibutuhkan. Munculnya Poros Baru yang dipimpin oleh negara Eropa akan memberikan keseimbangan kekuatan baru, yang kini sama sekali absen.

Skenario itu adalah salah satu eksplorasi yang dapat dikembangkan dari National Security Talks, yang diselenggarakan Menko Polkam. Menghadapi Perang Irak, Menko Polkam, bersama dengan Menhan dan Menlu, mengumpulkan sekitar dua puluhan tokoh masyarakat. Tokoh yang diundang berasal dari kelompok yang beragam, mulai dari mantan menteri luar negeri, mantan menteri lainnya, mantan duta besar, agamawan, pakar, diplomat senior, pemimpin lembaga penelitian, purnawirawan, pejabat, sampai kepada aktivis LSM. Tokoh yang diundang juga mewakili generasi tua, sampai kepada generasi muda.

Begitu banyak isu yang dilontarkan dalam pertemuan itu. Namun ada empat isu pokok yang penting untuk terus dieksplorasi dalam debat publik yang lebih luas. Dendemikian, respons kita terhadap Perang Irak akan jauh lebih kaya dan konstruktif. Di samping mengancam dan meminta perang dihentikan, yang memang perlu secara moral, kita mesti pula mengembangkan wacana lain yang lebih antisipatif, atas perubahan besar yang

mungkin terjadi pascaperang.

Tulisan ini tidak hanya melaporkan apa yang diangkat dalam National Security Talks itu. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga menambahkan perspektif, opini lanjutan dan konteks makro, agar pembahasan lebih tajam dan fokus.

Isu pertama yang banyak direspons adalah usang dan bahayanya tata dunia lama, di mana Amerika Serikat menjadi “penguasa tunggal”. Dalam konstruksi kekuasaan dunia seperti itu, Amerika Serikat mendapat insentif untuk mengabaikan siapa saja, termasuk PBB (Persatuan Bangsa Bangsa). Jika Amerika Serikat boleh menyerang negara lain dan membentuk rezim boneka tanpa seizin PBB, Rusia juga mungkin dan “boleh” menyerang tetangganya, untuk membentuk kembali imperium Uni Soviet. Atau, misalnya, negara Islam tertentu menyerang negara Islam lain untuk membentuk The NewOttoman Empire.

Saatnya memikirkan untuk membangun kekuatan pengimbang terhadap Amerika Serikat. Namun forum berbeda pendapat tentang langkah apa yang mesti ditempuh. Sebagian mengusulkan terbentuknya Poros Baru seperti yang ditulis di awal tulisan. Prancis dan Jerman, beserta Rusia dan Cina sudah berani berkata “tidak” kepada Amerika Serikat. Kita sebagai bangsa tinggal memperkuat kubu itu, sehingga solid membentuk Poros Baru.

Namun sebagian lagi merasa PBB lebih efektif untuk didayagunakan. Dibandingkan Poros Baru, lembaga PBB sudah berdiri, sudah punya sejarah, dan sudah pula diterima oleh komunitas internasional. Memang banyak kelemahan PBB. Perang Irak membuka kemungkinan restrukturisasi PBB. Misalnya, PBB dibangun kembali tanpa adanya hak veto negara tertentu. Semua anggota memiliki pengaruh yang sama, selayaknya dalam demokrasi “one man, one vote”.

Dalam pemikiran internasional, perlunya lembaga dunia yang kokoh seperti PBB, dapat dilacak jauh ke belakang, sampai kepada Emmanuel Kant. Menurut filsuf Jerman itu, dunia memerlukan sebuah konfederasi yang efektif. Itu sejenis pemerintahan dunia, yang bersandar kepada moralitas yang juga sudah mengalami universalisasi. Agar efektif, semestinya hanya PBB yang boleh memiliki senjata pemusnah massal untuk memaksa anggota PBB memenuhi keputusan “pemerintahan dunia”.

Tetapi oleh sebagian, restrukturisasi PBB juga dianggap tidak realistis walaupun sangat baik jika dapat dicapai. Masih sulit membayangkan negara besar yang punya hak veto bersedia menanggalkan hak itu. Bahkan Prancis, Cina dan Rusia yang menantang Amerika Serikat, dan juga punya hak itu, belum tentu juga bersedia.

Sebagian mengusulkan, Amerika Serikat harus diimbangi oleh aliansi kekuatan regional yang lebih longgar. Sudah ada berbagai kekuatan regional di dunia

saat ini, baik untuk kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin ataupun Eropa. Kekuatan regional itu juga beragam, mulai dari yang bersandar kepada kerja sama ekonomi murni sampai kepada aliansi kekuatan politik seperti gerakan nonblok.

Mereka yang menentang sindrom penguasa tunggal Amerika Serikat, dapat kembali merapatkan barisan. Namun kekuatan pengimbang itu tidak harus berbentuk poros yang solid, seperti blok komunisme tempo dulu. Aliansi internasional justru lebih realistis jika terbentuk secara ad hoc dan per isu. Misalnya, isu Perang Irak dapat membentuk aliansi yang kontra Amerika Serikat. Namun untuk isu lainnya, aliansi bisa berubah. Negara yang tadinya berkumpul dalam satu aliansi, dapat saling berhadap-hadapan untuk isu yang berbeda.

Isu kedua yang diangkat dalam National Security Talks adalah penekanan kepada realisme dalam diplomasi. Sungguhpun kita tersentuh oleh imbauan moral dan komitmen kepada kemanusiaan, namun kebijakan negara harus tetap bersandar kepada apa yang mungkin, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Menurut pandangan ini, imbauan Amerika Serikat agar menghentikan perang Irak sebelum pergantian rezim Saddam Hussein, tidak realistis. Jauh lebih mungkin jika kita memobilisasi sumber daya yang ada untuk tujuan lain, yang lebih dapat dicapai oleh kekuatan negara kita.

Misalnya, turut memikirkan membangun kembali Irak pascaperang. Indonesia berupaya agar PBB yang in charge dalam rekonstruksi Irak, bukan Amerika Serikat.

Hal lain yang perlu juga dipikirkan adalah kawasan Timur Tengah. Persoalan Irak dapat saja selesai, tetapi sejauh masih ada konflik Israel versus Palestina, Timur Tengah selamanya bergolak. Amerika Serikat sudah mengeluarkan sebuah road map. Sudah dirancang pada waktunya akan berdiri sebuah negara Palestina merdeka, yang hidup secara damai dengan Israel dan tetangganya. Menurut diplomasi yang realis, kita dapat aktif bergerak agar skenario Amerika Serikat itu terlaksana. Bantuan kita kepada Timur Tengah melingkar, tidak secara langsung melawan Amerika Serikat untuk menghentikan perang Irak, tetapi membantu Amerika Serikat untuk berdirinya negara Palestina.

Isu ketiga yang layak diperhatikan adalah persoalan domestik Indonesia sendiri. Bagaimanapun, kini Indonesia berada dalam masa transisi yang beresiko. Belum tentu demokrasi mengalami konsolidasi di Indonesia. Pengalaman negara lain, banyak pula transisi yang berbelok dan kembali ke negara otoriter. Krisis ekonomi belum tentu pula dapat cepat pulih. Bersandar kepada data dunia, banyak pula negara yang terus merosot perekonomiannya.

Perang Irak jangan terlalu banyak mengambil porsi perhatian kita, sehingga melupakan persoalan domestik. Lebih celaka lagi, jika kita membuat aksi

yang mencelakakan kepentingan nasional sendiri.

Aksi itu bisa saja terkesan heroik untuk jangka pendek, seperti ingin membawa George Bush ke Mahkamah Internasional. Namun untuk jangka panjang aksi itu akan membawa balasan internasional yang justru memporandakan Indonesia sendiri.

Menurut pandangan ini, apa yang sudah dibuat pemerintah sudah cukup. Enough is enough. Pernyataan pemerintah untuk perang Irak sudah cukup keras. Bahkan pernyataan pemerintah Republik Indonesia adalah yang paling keras daripada semua negara muslim. Kini saatnya kita kembali mengurus masalah domestik saja. Ada kemungkinan tidak lama lagi Irak membaik karena direkonstruksi oleh dunia. Namun Indonesia tetap terus dalam krisis.

Isu keempat yang juga layak direnungkan adalah peran civil society. Dunia baru saat ini memiliki banyak aktor. Pemain untuk tingkat dunia tidak hanya negara nasional. Juga tidak hanya lembaga Internasional seperti IMF, World Bank, yang mempengaruhi dunia. Sudah hadir pula jaringan civil society tingkat dunia. Untuk pertama kalinya kita melihat jaringan demo antiperang yang terbesar sepanjang sejarah. Bukan pemerintah, bukan lembaga seperti IMF yang menggerakkan demo global itu tetapi civil society.

Pemerintah Republik Indonesia memang terlalu berisiko untuk menantang Amerika Serikat dalam Perang Irak. Karenanya, lebih baik jaringan civil society

domestik yang mengambil alih peran itu. Jaringan masyarakat itu lebih bebas bergerak. Bahkan kita dapat pula bekerja sama dengan civil society di Amerika Serikat sendiri yang juga antiperang. Artis Holywood bahkan turut mengkampanyekan antiperang.

Empat isu di atas sangat cemerlang dan lahir dari ruang pertemuan kantor Menko polkam. Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menko Polkam yang sudah mengambil inisiatif mengumpulkan elemen masyarakat dalam National Security Talks. Dengan demikian, aneka pemikiran cemerlang dari anak bangsa atas Perang Irak dapat didengar dan dijadikan bahan untuk kebijakan pemerintah.

Melalui National Security Talks itu, kebijakan pemerintah atas perang Irak tidak lagi hanya dianggap semata “kebijakan pemerintah” saja, tetapi menjadi respons kita bersama sebagai sebuah bangsa. **

Terorisme di Pundak Amerika Serikat

Apa yang salah dengan Amerika Serikat dalam perangnya menumpas terorisme? Lebih dari negara mana pun, Amerika Serikat sudah mengambil inisiatif dan mengerahkan semua kemampuan untuk melemahkan jaringan terorisme internasional. Namun, di mata negara yang penduduknya Muslim; Amerika Serikat buk3nnya menjadi pahlawan, atau disambut dengan puja dan puji. Sebaliknya, popularitas Amerika Serikat justru semakin turun.

Dua berita mutakhir menguatkan kesan itu. Pertama, berita dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, John Snow, yang banyak dilansir media massa Indonesia. Snow mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sudah

membekukan secara finansial sepuluh orang yang diduga anggota kunci Jemaah Islamiyah. Di antara sepuluh orang itu, terdapat enam warga Indonesia, antara lain Imam Samudra dan Agus Dwikarma.

Nama kesepuluh orang itu sudah dimasukkan ke badan dunia PBB. Diharapkan dalam waktu cepat, semua anggota PBB melakukan aksi pembekuan yang sama, sesuai dengan komitmen perang global atas terorisme. Kali ini yang menjadi korban adalah pentolan Jemaah Islamiyah. Di Asia, jaringan Jemaah Islamiyah dianggap menjadi partner AI-Qaeda dan Osama bin Laden. Jaringan itu dituduh, antara lain, di balik peristiwa bom Bali dan bom Marriott.

Snow menambahkan, pembekuan itu merupakan langkah penting melawan terorisme. Ia bersyukur mendapatkan dukungan dari para menteri APEC. Daftar baru tersebut menambah jumlah pembekuan finansial yang dilakukan Amerika Serikat sejak Tragedi 11 September. Tidak kurang dari 305 individu terkena sanksi itu, baik sebagai pelaku ataupun pembantu pelaku terorisme. Sementara total aset yang dibekukan sebesar 136 juta dolar Amerika Serikat.

Upaya pembekuan aset semakin menambah daftar inisiatif dan leadership Amerika Serikat memerangi terorisme global. Namun, sebagai hasilnya, Amerika Serikat bukannya menjadi pahlawan. Berita kedua menunjukkan popularitas Amerika Serikat di negara yang mayoritasnya Muslim justru merosot sangat jauh.

Dibandingkan sebelum Tragedi 11 September, Amerika Serikat justru semakin tidak disukai.

Menurut lembaga riset swasta, GAO, pandangan yang menguntungkan Amerika Serikat di negara seperti Yordania, Lebanon, Maroko, Indonesia, Turki, dan Pakistan menurun selama setahun dan tiga tahun terakhir. Di Yordania, persentasenya menurun dari 25 persen menjadi 1 persen. Di Lebanon, persentasenya turun dari 35 persen menjadi 27 persen. Di Maroko, angkanya merosot dari 77 persen menjadi 27 persen. Di Indonesia, juga turun drastis dari 75 persen menjadi 15 persen. Di Pakistan, persentase berkurang dari 23 persen ke 13 persen. Sementara di Turki, persentasenya terjun dari 52 persen ke 15 persen.

Tidak pernah kita tahu seberapa akurat angka-angka di atas. Namun common sense dari menurunnya popularitas Amerika Serikat itu memang mengejutkan. Padahal, berbagai kampanye sudah dilakukan Amerika Serikat termasuk di te'levisi Indonesia. Berbagai episode menggambarkan betapa Amerika Serikat negeri yang ramah terhadap keluarga Muslim. Kampanye itu ternyata tidak mempan. Merosotnya popularitas Amerika Serikat pasti disebabkan ada yang salah secara fundamental dalam cara Amerika Serikat menindak terorisme.

Berbagai analisis dapat diberikan untuk merespons fenomena unik di atas. Ada analisis yang suportif,

ada pula analisis yang kritis. Yang suportif melihat penurunan popularitas Amerika Serikat sebagai grafik yang wajar. Di masa awal penumpasan terorisme, Amerika Serikat memang terlihat begitu bersemangat dan agresif. Itu adalah kebijakan yang memang seharusnya dilakukan agar terorisme cepat dipotong akarnya. Namun, sebagai akibatnya, dalam jangka pendek, Amerika Serikat memang menjadi tidak populer di negara yang mayoritasnya Muslim.

Namun, menurut pandangan suportif itu, grafik popularitas Amerika Serikat segera berubah. Dengan berbagai perolehan konkret, dan melemahnya jaringan terorisme internasional, popularitas Amerika Serikat segera kembali. Analisis itu mungkin menyamakannya dengan pendudukan Amerika Serikat di Jepang. Di masa awal, penduduk Jepang sangat marah kepada Amerika Serikat. Namun, setelah negara Jepang bangkit kembali, penduduk Jepang berangsur senang kepada Amerika Serikat. Apalagi kini Jepang sudah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang dapat menyaingi Amerika Serikat sendiri.

Bagi analisis kritis, pandangan suportif di atas cukup berbahaya. Semata mempercayai naik turunnya grafik popularitas, pandangan suportif membutuhkan diri dengan kemungkinan kesalahan dalam kebijakan Amerika Serikat ketika membasmi terorisme internasional. Akibatnya, perbaikan dan pengembangan menjadi nihil akibat pandangan yang terlalu optimis-spekulatif.

Bagi analisis kritis, menurunnya popularitas Amerika Serikat disebabkan oleh kesalahan Amerika Serikat dalam merencanakan perang globalnya. Perang Amerika Serikat terlalu vulgar. Banyak serangan militer yang tidak perlu. Akibatnya justru kontraproduktif. Bukannya Amerika Serikat menjadi pahlawan, tetapi justru semakin menjadi musuh bersama. Bukannya Amerika Serikat melemahkan terorisme, tetapi justru semakin meradikalkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan terorisme itu sendiri.

Kemarahan Amerika Serikat atas Tragedi 11 September jelas mendapatkan dukungan dunia. Niat Amerika Serikat melemahkan jaringan terorisme internasional juga memperoleh dukungan serupa. Namun, aneka langkah dalam perang global itu bermasalah.

Ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan, mengusir Taliban, dan mencari Osama bin Laden, Amerika Serikat sudah dinilai kontroversial. Namun, serangan ke Afghanistan itu tidak terlalu ditentang dunia. Kaitan serangan itu dengan upaya pembalasan akibat Tragedi 11 September masih dapat diterima. Walau tidak banyak negara yang mendukung agresi Amerika Serikat secara terang-terangan, tidak banyak pula negara yang mengecamnya.

Blunder pertama dimulai ketika Amerika Serikat meluaskan agresinya ke Irak. Tanpa menghiraukan PBB, Amerika Serikat mengambil inisiatif menjatuhkan

Saddam Husein dan membentuk pemerintahan boneka. Berbagai alasan dikemukakan. Mulanya Saddam Hussein dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda dan Peristiwa 11 September. Karena tidak mempan, Irak dikenakan tuduhan menyimpan senjata pemusnah massal. Sebelum senjata itu digunakan, Saddam harus dilumpuhkan.

Di kalangan pengamat yang netral, bahkan mungkin di sebagian pembuat kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, agresi ke Irak mulai dinilai blunder untuk berbagai alasan. Saddam Hussein sudah jatuh. Rezim sudah berganti. Namun, senjata pemusnah massal tidak kunjung ditemukan. Alasan moral menyerang Irak kehilangan landasannya. Amerika Serikat dan Inggris bahkan terlibat dalam skandal laporan intelijen palsu untuk mendukung serangan ke Irak itu.

Setelah Irak dikalahkan, Amerika Serikat justru menghadapi perang yang lebih sulit. Penduduk setempat mengembangkan perang gerilya terhadap Amerika Serikat dan pendukungnya. Korban yang mati di 4 pihak Amerika Serikat setelah jatuhnya Saddam Hussein justru lebih banyak ketimbang ketika perang berlangsung. Irak dapat menjadi Vietnam yang lain.

George Bush dan Tony Blair semakin kehilangan popularitasnya akibat kasus Irak. Awalnya dua tokoh itu mendapatkan dukungan dan popularitas yang melimpah. Namun, melalui waktu, ketika satu per satu fakta terungkap, dan perang gerilya terus berlangsung,

warga Amerika Serikat dan Inggris berbalik arah. Dipandang dari sisi merosotnya popularitas saja, Irak justru dapat menjadi “kuburan” karier politik George Bush dan Tony Blair.

Dari perspektif terorisme, pendudukan Amerika Serikat di Irak justru semakin menyuburkan dan membenarkan perlawanan global atas Amerika Serikat. Islam adalah agama yang damai. Namun, oleh sebagian penganutnya, ajaran Islam dapat diinterpretasi secara sangat keras. Berbagai ayat Al-Qur’an memang menyatakan keabsahan berperang melawan penjajah yang membuat kaum Muslim terusir dari tanah kelahirannya. Pendudukan Amerika Serikat di Irak sangat mudah sekali ditafsirkan sebagai pendudukan asing atas tanah kaum Muslimin. Akan semakin banyak komunitas yang bersedia “jihad” melawan Amerika Serikat.

Blunder kedua adalah semakin berlarutnya konflik Palestina-Israel. Jalan perdamaian yang dirancang Amerika Serikat mulai menemui jalan buntu. Perdana Menteri Palestina yang didukung Amerika Serikat dari Israel juga sudah mengundurkan diri. Israel dan Palestina (berikut Hamas) semakin terlibat dalam mata rantai kekerasan yang saling membalas. Padahal, justru konflik di Palestina itu salah satu “pabrik” yang melahirkan aneka kemarahan dan kebencian kepada Amerika Serikat secara global di kalangan komunitas Muslim.

Dalam kasus Palestina, Amerika Serikat dianggap

selalu melindungi negara Israel. Sangat jarang terdengar kecaman atau kutukan Amerika Serikat terhadap negara Israel, sementara terlalu banyak kecaman dan kutukan Amerika Serikat terhadap Palestina. Padahal, dalam kaca mata mereka, Israel dan Palestina (Hammas) melakukan kekerasan yang sama. Lebih jauh lagi, mereka mempersepsikan kekerasan yang dilakukan Palestina (Hammas) adalah sah sebagai bagian dari kehendak untuk merdeka di tanahnya sendiri.

Selama Amerika Serikat masih menduduki Irak, selama Palestina belum merdeka sebagai sebuah negara, selama itu pula “pabrik” yang menghasilkan dan mengeksport kemarahan, kebencian atas Amerika Serikat tidak pernah berhenti. Jika Amerika Serikat membantu kemerdekaan Palestina secepatnya, serta menyerahkan Irak ke PBB, juga secepatnya, mungkin 80 persen dari akar terorisme akan hilang.

Di dunia modern yang plural, semakin nyata bahwa kemenangan politik tidak hanya bisa dilakukan dengan penaklukan militer. Amerika Serikat harus pula banyak berpikir untuk memenangkan the hearts and the minds dari komunitas Islam. Jika tidak, hasilnya seperti yang ditunjukkan oleh jajak pendapat internasional itu.

Semakin banyak Amerika Serikat berbuat untuk membasmi terorisme, dunia Islam bukannya semakin berterima kasih, tetapi semakin benci. Semakin banyak aksi militer dilakukan atas terorisme itu, warga Amerika

Serikat di seluruh dunia bukannya bertambah aman, tetapi justru bertambah khawatir.

Perang AS terhadap terorisme tentu saja harus didukung secara Jenuh. Namun, AS Serikat jangan pula “membuang peluru” percuma, jengan aneka penaklukan militer yang justru menambah kerumitan baru. Jelas kita mendukung upaya perang atas terorisme. Namun, selayaknya AS juga berkaca atas hasil jajak pendapat itu. Selama itu mungkin perang Amerika Serikat atas terorisme terlalu vulgar.**

Mengusir Yasser Arafat?

Konflik Palestina versus Israel mungkin menjadi contoh terburuk di dunia modern. Dua komunitas itu gagal hidup berdampingan secara damai. Perkembangan terakhir semakin menjerumuskan dua komunitas itu dalam mata rantai kekerasan yang sambung-menyambung. Konflik itu akan terus meluas, melampaui Timur Tengah, dan akhirnya juga turut mengguncang politik di Indonesia.

Pemerintah Israel berencana mengusir Arafat dari Palestina. Ratusan, mungkin ribuan, penduduk Palestina membentuk benteng manusia melindungi pemimpin mereka, Yasser Arafat. Karena keunggulan senjata militer, mungkin saja secara kekerasan Israel

berhasil membawa keluar Yasser Arafat. Bahkan sangat mungkin pula Yasser Arafat terbunuh.

Tetapi, apa yang akan diperoleh Israel dan qunia pada umumnya? Konflik Palestina dan Israel sudah begitu mendalam dan tidak bergantung pada pribadi Yasser Arafat. Jika Arafat terusir, apalagi terbunuh, dapat dipastikan serial bom bunuh diri akan semakin sering. Perasaan dilalimi, dan terhina karena pemimpin mereka diusir atau terbunuh di tanahnya sendiri, akan menjadi energi besar kekerasan global yang lebih brutal.

Bahkan konflik itu sangat mungkin meluas ke luar wilayah Palestina dan Israel. Amerika Serikat akan pula terkena dampaknya. Selaku negara superpower Amerika Serikat akan dipersepsikan secara benar ataupun salah, tidak cukup melindungi Yasser Arafat. Atau bahkan Amerika Serikat dianggap menyetujui pula tindakan Israel. Perang Amerika Serikat melawan terorisme global akan jauh lebih sulit. Mereka yang radikal semakin mempunyai alasan dan legitimasi untuk melakukan kekerasan dalam rangka menuntaskan keadilan.

Tidak perlu dikatakan, Pemerintah Indonesia dalam situasi seperti itu akan terus terjepit di tengah. Di satu sisi, gerakan solidaritas atas nasib Yasser Arafat akan meluas. Partai Keadilan Sejahtera bahkan sudah memulai aksi solidaritasnya. Semakin isu Palestina menghangat, apalagi jika Arafat benar-benar terusir, dalam waktu yang lama gelombang demonstrasi akan memenuhi jalan-jalan utama Jakarta dan kota besar

lainnya. Sementara tidak banyak yang dapat diperbuat pemerintah Indonesia sendiri. Apalagi jika Amerika Serikat yang menjadi target dari aksi solidaritas itu.

Konflik Palestina dan Israel sudah sedemikian tajam. Sementara dua komunitas itu hidup berbaur di wilayah yang sama. Secara konseptual sekalipun Pemerintah Israel tidak menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi kompleksitas dan multidimensi konflik yang terjadi. Setiap pilihan kebijakan selalu ada sisi kelemahan yang dapat berakibat sangat buruk, terutama bagi kepentingan Israel jangka pendek.

Pilihan pertama, misalnya, pemerintah Israel bersikeras menguasai wilayah Israel sekarang ditambah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang didudukinya. Katakanlah melalui superioritas militer, wilayah itu akhirnya dapat ditaklukkan dan berada dalam satu negara saja, negara Israel. Negara Palestina tidak pernah berdiri. Komunitas Palestina berada dalam teritori dan kontrol pemerintahan Israel.

Saat ini, di wilayah itu memang penduduk Israel masih mayoritas. Namun pertumbuhan penduduk warga Palestina dan Arab sangat tinggi. Diperkirakan, pada 2010, setidaknya 2020, penduduk Israel akan segera menjadi minoritas di negara Israel sendiri. Mayoritas negara Israel saat itu justru dari komunitas Palestina.

Jika sistem demokrasi dipertahankan, pada 2020 niscaya pemerintahan Israel akan dikuasai oleh tokoh

Palestina. Berdasarkan prinsip one man one votef dengan segera mayoritas Palestina bersatu memberikan suara kepada politisi Palestina mengalahkan politisi Israel. Jelas itu mimpi paling buruk penduduk Israel. Mereka akan dikalahkan secara demokratis di negaranya sendiri.

Ketika menjadi minoritas, mungkin saja pemerintah dan penduduk Israel tidak ingin menerapkan demokrasi. Namun, negara itu segera menjadi negara apartheid, seperti negara Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela. Sistem apartheid pemerintah minoritas hanya mungkin bertahan jika diterapkan dengan pengawasan dan kekerasan militer. Diskriminasi penduduk Israel versus non-Israel dipaksakan. Di dunia supermodern, tahun 2020, negara apartheid Israel akan segera menjadi lelucon dunia kelas tinggi. Kekerasan akibat perlawanan mayoritas Palestina akan membuat situasi semakin buruk.

Pilihan pertama itu justru merugikan Israel sendiri. Pilihan kedua, Israel membiarkan saja situasi seperti sekarang.

Misalnya Israel tetap menduduki wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara Israel juga tidak mengontrol komunitas Palestina di wilayah itu sebagai warga negara Israel. Semua kekerasan dari Palestina akan dibalas dengan kekerasan yang sama kepada pemimpinnya.

Tetapi bagaimana mengontrol maraknya bom bunuh diri dari kalangan Palestina? Tidak pernah diduga, bom

dapat meledak di dalam bus, di restoran, di hotel, di tempat belanja. Siapa yang dapat tahan hidup dalam ketidakpastian dan mati konyol karena serangan bom bunuh diri?

Pemerintah Israel memang sudah pula membangun tembok baru di Tepi Barat. Padahal Tembok Berlin baru saja dirobohkan. Tembok yang memisahkan dua komunitas Jerman Barat dan Jerman Timur dianggap bagian dari keterbelahan dunia masa silam. Robohnya Tembok Berlin sudah diyakini sebagai era baru dunia yang semakin menyatu, harmoni, dan saling sapa.

Kini sejenis Tembok Berlin kembali dibangun di Tepi Barat. Keamanan dan pencegahan atas susupan bom bunuh diri dijadikan alasan. Tetapi, bagaimana aspirasi kemerdekaan Palestina harus dipadamkan? Selama ada warga Palestina selama itu pula aspirasi memiliki Negara Palestina tidak pernah padam. Padahal, mustahil memusnahkan sama sekali penduduk Palestina dengan nuklir sekalipun. Dinding yang tinggi, sekalipun dikawal oleh nuklir, tidak dapat memadamkan hasrat merdeka.

Dapat saja Pemerintah Israel berencana mengadu domba bangsa Palestina sendiri. Disusun skenario secara cerdas agar terjadi perang saudara antara sesama warga Palestina, antara garis moderat versus garis keras. Atau Israel turut menyusun perpecahan politik dan konflik internal antara barisan Yasser Arafat melawan Hamas. Dengan perang saudara, hasrat merdeka diharapkan berhenti dengan sendirinya.

Persoalannya, bangsa Palestina dan dunia Arab terlalu cerdas untuk masuk dalam perangkap perang saudara. Mereka juga membaca kemungkinan itu dan bersatu mencegahnya. Sebesar-besarnya konflik antara sesama bangsa Palestina, mereka lebih disatukan oleh musuh bersama, dan kehendak bersama untuk merdeka. Membiarkan status quo seperti sekarang, juga bukan pilihan yang baik, bahkan untuk kedamaian negara Israel sendiri.

Lalu solusi apa yang tersedia? Pilihan apa yang kurang buruk dibandingkan yang lebih buruk lainnya? Pemerintah Israel memang harus “berkorban” lebih banyak. Komunitas Palestina dan Arab di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, bahkan di negara Israel sendiri tidak bisa ditolak. Mereka terus beranak-pinak dan berkembang. Aspirasi merdeka, harga diri, perlawanan, dan militansi akan terus diwariskan dan dihidupkan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Dalam situasi seperti itu, tidak bisa tidak, Israel secepatnya harus ikut mendeklarasikan sebuah negara Palestina merdeka. Semakin cepat deklarasi itu semakin baik. Pihak Palestina dan Islam internasional akan melihat adanya kesungguhan Israel untuk hidup berdampingan sebagai dua negara yang sederajat. Agar mendapat kredit dan mengurangi permusuhan atasnya, Amerika Serikat dapat mengambil peran yang aktif. Tidak perlu menunggu tahun 2005 seperti rencana semula. Tahun 2004 lebih baik untuk deklarasi

kemerdekaan Palestina.

Lebih dari itu, Israel menunjukkan pula keseriusan ekstra. Secara resmi, misalnya, pemerintah Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dua wilayah itu diserahkan kepada negara Palestina merdeka. Babak baru yang heroik dan historis di Timur Tengah dimulai.

Memang deklarasi kemerdekaan Palestina akan tetap mendapat tantangan, baik dari garis keras Israel maupun garis keras Palestina sendiri. Garis keras Israel masih mendambakan Negara Israel Raya, yang meliputi semua teritori seperti di masa awal turunnya Taurat. Di era Raja David dan Raja Solomon, Israel Raya sudah diimpikan.

Sebaliknya, garis keras Palestina juga mempunyai agenda lain yang sebaliknya. Bagi mereka tidak cukup hanya Palestina merdeka. Mereka bahkan ingin pula memusnahkan negara Israel sama sekali. Lalu di atas negara Israel yang musnah itu, wilayah Palestina merdeka dimekarkan.

Dua ekstrem itu akan terus hadir. Tetapi mayoritas Palestina dan Israel sendiri segera tahu. Hidup berdampingan, saling menghormati sebagai dua negara yang sama-sama merdeka adalah masa depan dua komunitas itu yang paling menjanjikan. Alternatif selain itu hanyalah kekerasan demi kekerasan yang tidak berujung.

Niat mengusir Yasser Arafat jelas hanya mungkin lahir dari politisi Israel yang kalap. Jika kebijakan itu tetap

dilakukan, Pemerintah Israel sekarang akan dikenang sejarah sebagai pemicu kekerasan yang mungkin paling brutal yang akan lahir di Timur Tengah kelak. Bahkan kekerasan itu akan segera pula diimpor ke negara lain, termasuk Indonesia. **

Jatuhnya Kepemimpinan Amerika Serikat

Minggu, 2 November 2003, sebuah helikopter Chinook milik AS (Amerika Serikat) ditembak jatuh dalam perjalanan menuju Bandara Baghdad. Dilaporkan sedikitnya 15 tentara Amerika Serikat tewas dan 21 orang lainnya luka-luka. Bertambah pula korban tentara Amerika Serikat yang terbunuh sejak tumbanganya Saddam Hussein di Irak. Sejak 1 Mei 2003, sudah 130 tentara Amerika Serikat yang tewas di Irak. Setiap hari, rata-rata dua tentara Amerika Serikat dibunuh.

Lebih dari sekadar helikopter, yang kita khawatirkan peristiwa itu juga secara simbolis menggambarkan jatuhnya pamor, kepemimpinan Amerika Serikat di dunia, khususnya di Timur Tengah, dan khususnya lagi di Irak. Amerika Serikat semakin tidak dipandang

sebagai kekuatan superpower yang kompeten untuk mengendalikan dunia. Harapan AS ingin menjadikan Irak sebagai negara demokratis pertama di Timur Tengah semakin dianggap sebuah ilusi. Kehendak AS ingin menyebarkan virus demokrasi di Timur Tengah melalui Irak semakin dianggap salah alamat.

Jatuhnya pamor kepemimpinan politik AS jelas sebuah pukulan yang jauh lebih telak ketimbang jatuhnya helikopter. Sedangkan kepemimpinan moral AS sudah lebih dahulu jatuh. Ketika Amerika Serikat menyerang Irak dan mengabaikan PBB, Amerika Serikat sudah kehilangan separo pesona moralnya. Ketika senjata pemusnah massal tidak ditemukan di Irak, berarti tidak ada alasan pembenar bagi invasi Amerika Serikat ke Irak itu. Saat itulah kepemimpinan moral Amerika Serikat sudah jatuh.

Jatuhnya helikopter Amerika Serikat hari Minggu itu juga secara simbolis mungkin menggambarkan jatuhnya pamor George Bush di mata rakyat Amerika Serikat sendiri. Awalnya George Bush dipuja karena berani mengambil tindakan yang cepat dan tepat menghadapi terorisme global pasca Tragedi 11 September 2001. Popularitas George Bush meningkat pesat. Berbagai buku dan kolom ditulis mengenai bakat George Bush yang terpendam, yang ternyata mampu menjadi pemimpin dunia efektif.

Namun, enam bulan setelah tumbangnyanya Saddam

Hussein, ternyata kasus Irak justru menjadi “kuburan” politik bagi George Bush. Rakyat Amerika Serikat semakin terbuka matanya bahwa tidak ada alasan moral yang dapat membenarkan invasi ke Irak. Jika alasannya hanya untuk menumbangkan seorang diktator, bukankah Amerika Serikat sendiri juga dapat dianggap “Raja Diktator” karena mengabaikan peran PBB untuk menyerang negara lain ser.ara sepihak? Berapa banyak yang sudah terbunuh akibat invasi Amerika Serikat di Irak?

Kemarahan rakyat Amerika Serikat terhadap George Bush bertambah ketika melihat semakin banyaknya kantong mayat serdadu Amerika Serikat yang datang dari Irak. Semakin banyak keluarga Amerika Serikat yang kehilangan anggotanya di Irak. Sementara mengontrol Irak juga semakin mahal dan memberatkan ekonomi nasional Amerika Serikat sendiri. Irak kini dapat menjadi Vietnam kedua bagi Amerika Serikat. Demo antipendudukan Amerika Serikat di Irak semakin meluas di berbagai wilayah Amerika Serikat sendiri.

Yang lebih konkret lagi, jatuhnya helikopter Amerika Serikat itu secara simbolis menggambarkan jatuhnya kelompok Neo-Konservatisme di tubuh pemerintahan George Bush sendiri. Luas diketahui, proyek Timur Tengah George Bush, terutama Irak, diinspirasi oleh kelompok Neo-Konservatisme. Mereka adalah birokrat, politisi dan intelektual yang sejak lama mengelilingi Partai Ppublik. Di antara mereka adalah Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, dan Richard Perle.

Kini George Bush berada dalam posisi sulit. Jika ia ingin kembali populer, George Bush harus menetralisasi, bahkan menyingkirkan kelompok Neo-Konservatisme itu dari pemerintahannya. Lalu kepada publik luas, Bush secepatnya memoderatkan kebijakannya di Irak. Hanya itu yang dapat membuat George Bush mengurangi, kritik setidaknyanya dari Kubu Partai Demokrat.

Namun, di sisi lain, jika penyingkiran kaum Neo-Konservatisme dilakukan, George Bush justru kehilangan pesona kepemimpinannya. Ia terkesan sebagai pemimpin yang ragu-ragu, yang tidak tuntas dengan visi dan cita-citanya. Bahkan ia terkesan sebagai pemimpin yang kurang matang membuat kebijakan. Koreksi atas Neo-Konservatisme itu menjadi bukti ketidakmatangan kebijakan luar negerinya.

Pendek kata, jatuhnya helikopter Amerika Serikat minggu lalu hanya menjadi puncak gunung es dari persoalan pelik peran Amerika Serikat di dunia internasional. Kini kita menyaksikan sebuah kekuatan superpower, satu-satunya hegemon dunia, yang tengah tertatih-tatih. Apakah ini pertanda akhir dari supremasi Amerika Serikat di dunia?

Jika dunia dilihat dalam rentang waktu yang panjang, dinamika superpower dunia tampak lebih jelas. Sudah begitu banyak muncul kekuatan politik sebuah kelompok, entah itu kerajaan atau negara nasional. Namun begitu banyak pula contoh bagaimana kekuatan

superpower itu rontok melalui waktu.

Ada Kerajaan Romawi yang kisahnya sampai saat ini menjadi inspirasi berbagai film besar Hollywood. Ada Inggris yang disebut "Great Britain Rules the Wave". Tidak pula kita lupa hadirnya Uni Soviet yang oleh Amerika Serikat sendiri dianggap memimpin "Kerajaan Setan Komunisme". Terakhir Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya superpower sejak dekade lalu setelah runtuhnya Uni Soviet

Rontoknya kekuatan superpower ini agaknya mengikuti pola yang sama. Awalnya dimulai dengan jatuhnya kepemimpinan politik superpower itu. Penyebab utama kejatuhan itu karena sang superpower kehilangan kepemimpinan moral. Publik luas semakin tidak merasakan adanya alasan moral yang dapat diterima akal sehat mengapa superpower itu harus hadir mengontrol berbagai wilayah. Kontrol militer dan ekonomi kekuatan superpower itu gagal untuk juga mendapatkan simpati dan dukungan moral.

Kemudian terjadi perlawanan terhadap hegemoni kekuatan superpower. Bentuk perlawanan lokal dan nasional juga mengambil bentuk yang beragam. Para intelektual mengembuskan perlawanan moral. Namun, politisi, aktivis, dan pemimpin gerilya menghidupkan perlawanan militer.

Akibatnya untuk menjaga hegemoni, kelompok superpower meningkatkan kontrol militer. Semakin intensif perlawanan lokal, semakin besar dan intens

pula kontrol militer diupayakan. Persoalannya, kontrol militer semakin lama semakin mahal. Tidak hanya ekonomi kekuatan superpower yang tersedot. Serdadu dan warga kekuatan superpower itu juga banyak yang terbunuh.

Kekuatan superpower semakin menunjukkan kejatuhannya ketika ekonomi nasional tidak lagi mampu menopang jaringan militer internasional itu. Kontrol militer menjadi terlalu mahal dan terlalu membebani ekonomi nasional. Mulai muncul kegelisahan dan perlawanan di dalam negeri kelompok superpower itu sendiri.

Puncaknya, di kalangan elite kekuatan superpower mulai muncul friksi. Perbedaan mengenai perlu tidaknya membiayai kontrol militer yang mahal itu semakin terbuka. Sebagian perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan elite yang berbeda kubu pemikiran. Sebagian lagi, hal itu juga disebabkan oleh keraguan moral para elite. Sebagian melihat tidak ada alasan moral yang cukup untuk melanjutkan ekspansi, atau pendudukan, atau kontrol militer di tanah orang lain. Saat itulah superpower tumbang.

Pola jatuhnya superpower dalam sejarah dunia ini agaknya akan terjadi dan menimpa Amerika Serikat pula. Saat ini Amerika Serikat memang sudah kehilangan legitimasi moral di dunia internasional atas invasinya ke Irak. Kontrol militer Amerika Serikat di Irak juga semakin mahal dan semakin tidak tertanggung oleh ekonomi nasional. Protes dalam negeri atas kebijakan

Amerika Serikat di Irak juga semakin sering. Dan yang utama lagi, elite Amerika Serikat sudah terpecah. Apalagi pemilihan Presiden Amerika Serikat semakin dekat. Kubu Demokrat akan sangat menyalahkan George Bush yang dianggap telah menyesatkan rakyat Amerika Serikat melalui “pendudukan” di Irak.

Melalui kasus Irak, semakin nyata bahwa Amerika Serikat harus berbenah diri. Jika Amerika Serikat ingin tetap menjadi satu-satunya superpower dunia, pelajaran sederhana dari kasus Irak harus benar-benar direnungkan. Mustahil Amerika Serikat dapat menjadi pemimpin dunia jika Amerika Serikat hanya unggul secara militer dan ekonomi. Amerika Serikat hanya dapat menjadi pemimpin dunia secara stabil jika ada aura kepemimpinan moral dari pihak Amerika Serikat. Negara itu hanya dapat diterima dengan tangan terbuka jika melalui akal sehat publik merasakan keadilan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Dua tahun setelah Tragedi 11 September, justru sebaliknya yang terjadi. Pengawas Kongres Amerika Serikat, Kantor Akuntan Umum (GAO), baru-baru ini melakukan jajak pendapat internasional. Kesimpulannya sangat menyesakkan dada pemimpin Amerika Serikat. Betapa Amerika Serikat saat ini semakin dibenci di dunia Muslim. Popularitas Amerika Serikat di Indonesia misalnya, merosot dari 75 persen menjadi hanya 15 persen

Merosotnya kepemimpinan moral Amerika Serikat di mata publik Indonesia dapat dilihat dari reaksi dua tokoh yang sangat moderat. Aa Gym dan Nurcholish Madjid dikenal sebagai figur yang sangat santun dan pengambil jalan tengah. Namun Aa Gym saja sudah mengambil sikap tidak mau bertemu George Bush di Bali. Bahkan Nurcholish Madjid menyebut Bush sebagai pembohong besar.

Dunia Muslim tidak dapat diabaikan oleh Amerika Serikat. Jumlah penduduk Muslim di dunia terlalu banyak untuk disepelekan Amerika Serikat. Indonesia adalah dunia Muslim yang paling moderat. Jika publik di Indonesia saja semakin membenci Amerika Serikat, apalagi publik di dunia Muslim lainnya. Harus ada perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Jika tidak, Amerika Serikat akan mengikuti Kerajaan Romawi yang runtuh sebagai kekuatan superpower. Berapa helikopter lagi yang dibutuhkan pemimpin Amerika Serikat untuk menilai bahwa kebijakannya di Irak, di Palestina, dan pembelaannya yang membabi buta atas Israel, adalah kesalahan besar?*

Tertangkapnya Saddam Hussein

Akankah Irak semakin mudah ditaklukkan dan pelan-pelan menjadi negara demokrasi pertama di Timur Tengah di kawasan penduduk Muslim? Ini pertanyaan penting yang melintas setelah tertangkapnya Saddam Hussein. Sejak invasi AS (Amerika Serikat) ke Irak, peristiwa tertangkapnya Saddam Hussein adalah peristiwa terbesar, sensasional, dan heboh.

Segera berita ini menjadi headline semua koran dan TV besar dunia. CNN mengulas event besar ini berulang-ulang. Ditampilkan secuplik video detik-detik penangkapan Saddam Hussein. Tidak ketinggalan, koran dalam negeri hari ini juga dipenuhi oleh peristiwa itu di halaman pertama, sebagai headline.

Di video CNN, Saddam Hussein tampak tua dan lelah. Keperkasaannya tidak lagi tampak. Ia seperti

orang awam biasa, bukan sebuah mitos, bukan manusia setengah dewa, seperti yang selama ini diagungkan oleh pengikutnya., ia tidak bersembunyi di sebuah bunker mewah dengan teknologi tinggi. Tidak ada ratusan atau puluhan pasukan elite berani mati yang menjaganya. Tidak ada tembak menembak yang seru sebelum ia tertangkap.

Saddam Hussein ditangkap bahkan tanpa letusan satu pelurupun. Ia bersembunyi dalam sebuah lobang yang teramat sederhana. Rumah di atas persembunyiannya juga teramat biasa, seperti rumah penduduk desa. Ia juga hanya ditemani oleh dua orang yang berdiam di rumah itu. Bahkan pasukan Amerika Serikat sendiri tidak terlalu yakin apakah pria tua berjenggot panjang itu Saddam Hussein. Setelah melalui uji coba DNA, dipastikan bahwa yang tertangkap adalah Saddam Hussein.

Sebuah perburuan yang cerdas dengan melibatkan 600 personel membuahkan hasil. Namun apa pengaruh penangkapan ini atas situasi Irak? Akankah ia berujung kepada situasi yang tenteram, damai dan demokratis di Irak? Ataukah sebaliknya, Irak justru semakin anarkhis dan menyusahkan kawasan Timur Tengah?

Dalam jangka pendek, tentu saja penangkapan ini menambah spirit tentara Amerika Serikat, George Bush dan PBB sebagai wakil - masyarakat internasional. Invasi Amerika Serikat ke Irak sekian lama sudah menjadi

puncak kontroversi. Amerika Serikat menanggung beban paling berat, baik secara ekonomi ataupun politik akibat invasi itu. Sebelum tertangkapnya Saddam Hussein, Amerika Serikat menjadi kecaman dunia.

Dalam Tragedi 11 September yang menimpa Amerika Serikat, sekitar 4.000 nyawa melayang. Dunia jelas berduka. Namun invasi Amerika Serikat ke Irak sudah menyebabkan kematian sekitar 11, 000 orang, sekitar tiga kali lipat lebih banyak daripada korban Tragedi 11 September. Dalam perang yang brutal, tidak terhindari, begitu banyak wanita, anak-anak, penduduk sipil yang tidak mengerti politik ikut terbunuh. Belum lagi terhitung penderitaan banyak orang secara psikologis karena ketidakpastian.

Sementara korban yang jatuh sedemikian besar, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan serbuan Amerika Serikat tidak kunjung puladitemukan. Lebih celaka lagi, Saddam Hussein, tokoh yang diburu nomor satu juga tidak ada bekas. Diduga mungkin ia terbunuh. Mungkin pula ia bersembunyi di negara lain. Hilangnya Saddam Hussein segera menjadi mitos yang menambah energi perlawanan rakyat Irak dan dunia terhadap Amerika Serikat.

Yang lebih berat bagi George Bush adalah perlawanan, n warga Amerika Serikat sendiri di dalam negeri. Hampir menyerupai Vietnam, semakin banyak penduduk Amerika Serikat yang menentang kehadiran militer Amerika Serikat di Irak. Rata-rata, setiap hari ada saja militer Amerika Serikat yang terbunuh. Kantung mayat

tentara Amerika Serikat dikirim pulang, dan menambah kekhawatiran publik Amerika Serikat. Bahkan George Bush sendiri juga sudah mengubah strateginya di Irak, ingin menyerahkan pemerintahan kepada penduduk Irak sendiri secara lebih cepat.

Tertangkapnya Saddam Hussein memang membalikkan spirit Amerika Serikat di Irak. Namun anarkhisme yang kini melanda Irak, sudah terlepas sama sekali dengan Saddam Hussein. Saddam boleh terangkap. Saddam boleh bersembunyi dan terus hidup. Tetapi pergolakan di Irak tidak lagi ditentukan oleh kondisi Saddam Hussein.

Walau Saddam Hussein tertangkap, membangun demokrasi di Irak dalam waktu jangka pendek ini hampir menjadi the mission impossible. Di samping miskinnya social capital dan kultur di Irak untuk demokrasi, begitu banyak perlawanan yang tidak ingin Irak menjadi negara demokratis. Beberapa kelompok dapat diidentifikasi akan menghalangi Irak menjadi negara demokratis yang sukses.

Kelompok yang terberat justru para elite pemerintahan negara tetangga, yang menjadi sekutu Amerika Serikat sendiri. Mereka adalah segelintir penguasa negara kerajaan, atau negara republik yang diktator. Walau jumlah mereka segelintir dibandingkan penduduk negara mereka, namun kekuasaan yang dimiliki nyaris absolut.

Bagi mereka, Irak yang demokratis akan mengirimkan virus demokratisasi di wilayah mereka sendiri. Boleh jadi mereka mungkin sangat senang Saddam Hussein tertangkap. Namun demokrasi di Irak mungkin bagi mereka adalah mimpi buruk.

Jelas elite ini ingin stabilitas Irak. Irak yang tidak stabil hanya membuat wilayah Timur Tengah ikut bergolak. Tanpa stabilitas di Irak, akan terus terjadi gelombang migrasi penduduk Irak ke negara tetangga. Sebagian dari migrasi itu tetap aktif dalam gerakan politik, baik untuk Irak ataupun untuk negara yang tengah didiami. Kegiatan itu sangat merepotkan. Migrasi itu hanya dapat dicegah secara baik jika Irak pasca-invasi Amerika Serikat menjadi stabil.

Namun tidak berarti Irak yang stabil harus menjadi negara demokrasi yang sukses. Pesona demokrasi akan menjadi virus yang cepat menyebar. Segera Irak akan menjadi model yang ingin diikuti oleh warga negara tetangganya. Penduduk berbagai negara Arab yang selama ini hidup di bawah kerajaan, atau diktator republik, ingin pula menumbuhkan demokrasi di negaranya sendiri

Nikmatnya kebebasan politik, gurihnya partisipasi bebas dari warga negara, terbukanya peluang oposisi menjadi penguasa segera menjadi mimpi negara tetangga. Ujung dari mimpi ini akan muncul perlawanan yang menyeluruh dari publik luas dan oposisi agar negara kerajaan rnenjadi republik. Akan muncul gerakan sosial yang meminta republik diktator menjadi

demokratis. Jika gerakan ini berhasil bukankah berarti para penguasa kerajaan dan dikator itu tersingkir.

Yang lebih dikhawatirkan, bagaimana jika gerakan demokratisasi itu berdarah? Irak yang demokratis (jika berhasil) telah meminta lebih dari 11.000 nyawa melayang. Bagaimana jika gerakan sama di negara tetangganya meminta korban yang lebih banyak? Bagaimana pula jika para elite kerajaan dan penguasa diktator negara tetangga itu ikut terbunuh?

Wacana ini jelas menakutkan para elite negara tetangga. Dengan segala upaya, mereka berusaha agar Irak menjadi stabil saja, tetapi tidak perlu menjadi negara demokratis. Mungkin mereka tidak berani secara terang-terangan menentang Amerika Serikat agar jangan membentuk Irak yang demokratis. Tetapi mereka akan mencari segala upaya yang tersembunyi. Padahal semakin tersembunyi, semakin berbahaya manuver itu karena penyimpangan dan komplikasinya semakin tidak terkontrol.

Demokrasi akan pula ditentang oleh sebagian besar politisi Sunni di Irak. Selama ini di bawah Saddam Hussein, kaum Sunni memang minoritas. Kaum Syiah mayoritas di Irak. Namun karena Saddam Hussein sendiri seorang Sunni, apalagi perang yang panjang melawan Iran yang Syiah, dominasi politik Sunni di Irak berjalan normal. Mereka bisa saja turut gembira dengan tertangkapnya Saddam Hussein, tetapi demokrasi di Irak adalah hal yang berbeda.

Alasannya sederhana. Jika demokrasi dipraktikkan di Irak, akan ada prinsip dalam pemilu satu warga satu suara. Karena kaum Sunni minoritas, hampir dapat dipastikan pimpinan tertinggi negara tidak lagi berada di kalangan kaum Sunni. Mayoritas Syiah yang selama ini menjadi kelas dua akan menjadi penguasa baru di Irak. Akan butuh transisi yang sangat lama dan complicated akibat beralihnya kekuasaan dari kaum Sunni ke kaum Syiah.

Jika mampu, dengan segala cara sebagian politisi Sunni menentang demokrasi. Mungkin mereka membuat manuver agar yang diterapkan adalah sistem yang lain. Stabilitas Irak dan pertumbuhan ekonomi di Irak mereka anggap tidak harus difasilitasi oleh negara Irak yang demokratis. Aneka alasan dikemukakan dan manuver politik dibuat bahwa Irak jangan menjadi negara demokrasi. Namun penentang terberat demokrasi di Irak bukanlah kaum politisi. Umumnya politisi bersemangat pragmatis saja. Kalkulasi mereka lebih rasional menyangkut seberapa jauh kepentingan mereka dirugikan atau dilayani. Penentang terberat justru para ideolog, yang melawan demokrasi karena keyakinan dan “iman” mereka dari lubuk hati yang terdalam.

Secara tulus dan ikhlas mereka meyakini bahwa demokrasi adalah produk Barat yang “kafir.” Melalui demokrasi, dalam persepsi mereka, Barat akan menguasai dunia, dan membentuk dunia sesuai

dengan “kekafiran mereka.” Apalagi jika demokrasi itu disponsori oleh Amerika Serikat. Bagi mereka, Amerika Serikat tidak lain adalah “Raja Setan.” Dengan segala cara mereka ingin proyek demokrasi di Irak gagal. Jika perlu kekerasan dan terorisme akan disebarakan.

Tentu saja mereka dengan pikiran aneh ini jumlahnya minoritas saja. Tetapi minoritas yang terlatih, yang berjangkaran internasional, sangat berbahaya dan susah ditaklukkan. Mereka dapat saja bekerja sama dengan elemen lain, yang tidak menyukai baik demokrasi di Irak, ataupun yang membenci Amerika Serikat. Akan terbentuk koalisi longgar antidemokrasi di Irak dengan berbagai upaya sistematis, baik secara damai ataupun teror.

Saddam Hussein memang sudah terangkap. Stabilitas politik di Irak diinginkan oleh begitu banyak pihak. Kesejahteraan ekonomi di Irak juga menjadi impian banyak kalangan. Isu Saddam Hussein, stabilitas, kesejahteraan ekonomi mungkin dapat menyatukan elite terpenting di Irak dan tetangganya.

Namun proyek demokrasi di Irak akan membelah mereka. Walau Saddam Hussein tertangkap, proyek demokrasi di Irak tidak bertambah mudah.**

Sumber Naskah

1. Babak Pertama Reformasi, Suara Pembaruan, 22 Juli 2001
2. Paham Kebangsaan Pemerintahan Baru, Suara Pembaruan, 30 Juli 2001
3. Meningkatkan Kinerja Parlemen, Suara Pembaruan, 26 Agustus 2001
4. Bangkitnya Politik Primordial, Suara Pembaruan, 10 September 2001
5. Memburu Hantu Komunisme, Suara Pembaruan, 8 Oktober 2001
6. Memperkuat Paham Kebangsaan, Suara Pembaruan, 28 Oktober 2001
7. Paso, Idul Fitri, dan Natal, Suara Pembaruan, 24 Desember 2001
8. Bom Bali: The Event of the Year 2002, Suara Pembaruan, 23 Desember 2002
9. Lemahnya Komunikasi Politik, Suara Pembaruan, 13 Januari 2003
10. Gerakan Mahasiswa di Simpang Jalan?, Suara Pembaruan, 27 Januari 2003
11. Gerakan Anti-Megawati, Suara Pembaruan, 3 Februari 2003

12. Soal Pasal Kudeta Itu, Suara Pembaruan, 10 Maret 2003
13. Rhoma Irama Versus Inul, Suara Pembaruan, 5 Mei 2003
14. Wacana Mahkamah Konstitusi, Suara Pembaruan, 30 Juni 2003
15. Setelah Bom Meledak di Marriott, Suara Pembaruan, 11 Agustus 2003
16. Setelah Hambali Ditangkap, Suara Pembaruan, 19 Agustus 2003
17. Membelah Politik Papua, Suara Pembaruan, 1 September 2003
18. Seputar Reformasi Politik Tentara, Suara Pembaruan, 6 Oktober 2003
19. PKI, Militer, GAM, dan Nonpri, Suara Pembaruan, 8 Maret 2004
20. Komplikasi Pemilihan Presiden, Suara Pembaruan, 4 Februari 2003
21. Calon Presiden Golkar?, Suara Pembaruan, 17 Februari 2003
22. Kuburan Partai Kecil, Suara Pembaruan, 24 Februari 2003
23. Satu Gus Dur, Dua PKB, Suara Pembaruan, 2 Juni 2003

24. Pemerintahan Tiga Partai, Suara Pembaruan, 9 Juni 2003
25. Kemenangan Kembali Partai Golkar? , Suara Pembaruan, 16 Juni 2003
26. Kompromi Menjaring Presiden, Suara Pembaruan, 7 Juli 2003
27. Kebutuhan Koalisi Partai, Suara Pembaruan, 21 Juli 2003
28. Godaan Terakhir Nurcholish Madjid, Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003
29. Ribut-ribut di PDI-P, Suara Pembaruan, 23 Agustus 2003
30. Konvensi Golkar sebagai Strategi, Suara Pembaruan, 20 Oktober 2003
31. Koalisi Menghadang Megawati? , Suara Pembaruan, 27 Oktober 2003
32. Heboh Tutut sebagai Capres, Suara Pembaruan, 8 Desember 2003
33. Megawati Soekarnoputri versus Tutut "Soehartoputri?II, Suara Pembaruan, 22 Desember 2003
34. Dua Momen Pemilu di 2004, Suara Pembaruan, 5 Januari 2004
35. Akbar Tandjung Pascakasasi, Suara Pembaruan, 16 Februari 2004

36. Balada Surya Paloh vs Akbar Tandjung, Suara Pembaruan, 29 Maret 2004
37. Siapa Mencuri Start Kampanye? , Suara Pembaruan, 17 Mei 2004
38. Mesin Politik versus Citra Capres, Suara Pembaruan, 31 Mei 2004
39. Wiranto Versus Megawati, Suara Pembaruan, 14 Juni 2004
40. Kampanye Negatif Calon Presiden, Suara Pembaruan, 21 Juni 2004
41. Golkar di antara Dua Capres, Suara Pembaruan, 12 Juli 2004
42. Tuduhan Polri Memihak Megawati? , Suara Pembaruan, 26 Juli 2004
43. Proklamasi di Era Transisi Demokrasi, Suara Pembaruan, 16 Agustus 2004
44. Golkar Versus Koalisi Kebangsaan? , Suara Pembaruan, 23 Agustus 2004
45. Cak Nur Melemah, Gagasannya Menguat, Suara Pembaruan, 6 September 2004
46. Golkar Mendukung Siapa? , Suara Pembaruan, 2 Agustus 2004
47. Politik setelah Pemilu Presiden, Suara Pembaruan, 27 September 2004

48. Sentuhan Terakhir Megawati Soekarnoputri, Suara Pembaruan, 11 Oktober 2004
49. Selamat Datang Kabinet Baru, Suara Pembaruan, 18 Oktober 2004
50. Setelah Kabinet Diumumkan, Suara Pembaruan, 25 Oktober 2004
51. Politik Elite yang Mengkhawatirkan, Suara Pembaruan, 8 Nopember 2004
52. Akbar, Wiranto atau Surya Paloh?, Suara Pembaruan, 22 Nopember 2004
53. Pertaruhan Gus Dur di NU, Suara Pembaruan, 29 Nopember 2004
54. Godaan Politik Nahdlatul Ulama, Suara Pembaruan, 6 Desember 2004
55. Berebut Ketua Umum Golkar, Suara Pembaruan, 13 Desember 2004
56. Kemenangan Jusuf Kalla di Golkar, Suara Pembaruan, 20 Desember 2004
57. Akankah Aceh Mengubah Indonesia? Suara Pembaruan, 10 Januari 2005
58. PPP, Riwayatmu Kini, Suara Pembaruan, 21 Februari 2005
59. Kompensasi bagi Penduduk Miskin? Suara Pembaruan, 7 Maret 2005

60. Megawati Versus Yudhoyono Jilid Dua?, Suara Pembaruan, 4 April 2005
61. Ditangkapnya Mulyana W Kusumah, Suara Pembaruan, 11 April 2005
62. Dimulainya Konsolidasi Politik Presiden, Suara Pembaruan, 2 Mei 2005
63. Dimulainya Perang Melawan Korupsi? Suara Pembaruan, 9 Mei 2005
64. Drama Panjang di KPU, Suara Pembaruan, 16 Mei 2005
65. Dua Partai Kebangkitan Bangsa, Suara Pembaruan, 30 Mei 2005
66. Gelombang Pertama Kepala Daerah, Suara Pembaruan, 4 Juli 2005
67. Pemerintah dalam Kontroversi Fatwa MUI, Suara Pembaruan, 8 Agustus 2005
68. Tambahan Menteri untuk Golkar? Suara Pembaruan, 12 September 2005
69. Tes bagi Duet Yudhoyono-Kalla? Suara Pembaruan, 19 september 2005
70. Politik Setelah BBM Naik, Suara Pembaruan, 26 September 2005
71. Semoga Negeri Ini Selamat..., Suara Pembaruan, 3 Oktober 2005

72. Fondasi Politik AS, Suara Pembaruan, 23 September 2001
73. Proyek Politik Afghanistan dan “Setan Besar”, Suara Pembaruan, 22 Oktober 2001
74. Amerika Serikat versus Irak? Suara Pembaruan, 10 Februari 2003
75. Dunia Setelah Perang Irak, Suara Pembaruan, 24 Maret 2003
76. “Perang Irak” di Menko Polkam, Suara Pembaruan, 31 Maret 2003
77. Terorisme di Pundak Amerika Serikat, Suara Pembaruan, 8 September 2003
78. Mengusir Yasser Arafat? Suara Pembaruan, 15 September 2003
79. Jatuhnya Kepemimpinan Amerika Serikat, Suara Pembaruan, 3 Nopember 2003
80. Tertangkapnya Saddam Hussein, Suara Pembaruan, 15 Desember 2003

Kebebasan politik semata tidak pernah mencukupi (untuk membangun demokrasi). Tanpa pengamanan, kebebasan politik justru dapat berbahaya. Ia dapat dengan mudah tergelincir menjadi penindasan mayoritas terhadap minoritas. Tanpa pengamanan, aneka kelompok kepentingan dapat bebas untuk saling melukai. Yang kemudian tercipta, kebebasan justru menunjang eskalasi konflik dan kekerasan. Pengamanan atas kebebasan politik ada pada pelembagaan politik, sebuah kondisi di mana prosedur dan aturan main politik nasional benar-benar menjadi tradisi dan pedoman yang ditaati .

Denny J.A dalam artikel Babak Pertama Reformasi

TIDAK perlu terkejut jika politik primordial kembali bangkit di Indonesia. Kebebasan politik karena. transisi ke demokrasi sama dengan membuka kotak Pandora. Dari kotak itu semua Jenis inting politik muncul ke permukaan dan menyebar. Transisi ke demokrasi tidak hanya melahirkan para pejuang demokrat, namun juga para demagog yang memainkan sentimen primordial. Namun yang membuat demokrasi itu terkonsolidasi dan menetap secara permanen, atau demokrasi itu hanya datang dan pergi (kembali ke negara otoriter), sangat bergantung pada seberapa dominannya para demagog yang memainkan politik primordial. Pengalaman Amerika serikat dapat kita jadikan model bagaimana memberikan kebebasan politik bagi politik primordial itu di satu sisi, namun di sisi lain membuat kekuatan politik primordial itu selalu menjadi marginal.

Denny J.A dalam artikel Bangkitnya Politik Primordial

Denny J.A, Lahir di Palembang, 4 Januari 1963, mendapatkan gelar PhD dari Ohio State University, Amerika Serikat, bidang Comparative Politics. Sepulang dari Amerika Serikat, ia ikut memperkenalkan dan mendorong perkembangan riset politik kuantitatif, yang membawa warna baru baik untuk dunia akademis ilmu politik, maupun politik praktis soal pemilu. Untuk kiprahnya itu, ia mendapatkan penghargaan 7 rekor Indonesia (MURI) di bidang akademis, jurnalisme dan konsultan politik. Saat ini, ia memimpin Lingkaran Survei Indonesia, sebuah lembaga riset dan konsultan kampanye pertama berskala nasional di Indonesia.

PUSTAKA SINAR HARAPAN Jl. Dewi Sartika 136-D, Cawang, Jakarta 13630 Telp. (021) 8006981,8015262 Faks. (021) 8006982 Email : pshjkt@yahoo.com